



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024
DI RUMBIA**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DI KENDARI**

Nomor : 25.A/LHP/XIX.KDR/05/2025

Tanggal : 22 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024
DI RUMBIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DI KENDARI**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
Laporan ini memuat:
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

LAMPIRAN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bombana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bombana. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.1.1 dan 5.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana yang menjelaskan pada TA 2024 saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp832.351.859,49. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut tidak mencerminkan sisa kas yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp44.917.203.361,00 yang seharusnya masih tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, Kas yang Ditentukan Penggunaannya tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan lain sebesar Rp44.084.851.501,51 (Rp44.917.203.361,00 - Rp832.351.859,49), yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bombana perlu memberikan perhatian untuk menyediakan dana pengganti atas Kas yang Ditentukan Penggunaannya dalam APBD TA 2025 sebesar Rp44.084.851.501,51.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal itu.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 25.B/LHP/XIX.KDR/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kendari, 22 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
KEPALA PERWAKILAN



Dr. Dadek Nandemar, S.P., S.M.M., A.K., CFE., CA., CSFA, CFrA, ERMAP, GRCP, GRCA
Register Negara Akuntan Nomor RNA-11771

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bombana yang memiliki 51 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terdiri dari pemeriksaan interim selama 30 hari mulai dari tanggal 13 Februari 2025 s.d 14 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 27/ST/XIX.KDR/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 dan pemeriksaan terinci selama 45 hari mulai tanggal 09 April 2025 s.d. 23 Mei April 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 85/ST/XIX.KDR/04/2025 tanggal 08 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024 (LKPD)



KABUPATEN BOMBANA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



BUPATI BOMBANA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Rumbia, 22 Mei 2025

BUPATI BOMBANA



Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si.



KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

LKPD Tahun 2024 disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama dalam periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026. Dimana pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bombana tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPRD, LKPD Tahun 2024 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPD Tahun 2024 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPD dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan upaya perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah, khususnya bagi unit-unit Organisasi Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset tetap Pemerintah dengan melakukan penertiban aset tetap yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah khususnya pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah.
4. Menyebarluaskan informasi LKPD kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan peningkatan penggunaan informasi dalam LKPD.
5. Memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien, dan mendapatkan mendukung pencapaian opini WTP atas laporan keuangannya.
6. Meningkatkan peran dan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern atas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
7. Meningkatkan pengendalian dan efektifitas program subsidi dan pemberian manfaat sosial lainnya dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yang konsisten agar sesuai atau tepat sasaran.

Disamping semua capaian yang dilaporkan dalam LKPD Tahun 2024, Pemerintah tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga kualitas LKPD di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyajikan LKPD secara andal sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rumbia, 22 Mei 2025



BUPATI BOMBANA

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si.

RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

Melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran (TA) 2024 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD TA 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan ini disusun berdasarkan konsolidasian antara Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan menggunakan sistem aplikasi daring dan terintegrasi. Berikut kami paparkan ringkasan LKPD Kabupaten Bombana TA 2024.

1. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD TA 2024 dengan realisasinya, dan menyajikan ikhtisar informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2024 tercatat senilai Rp1.298.891.201.720,00 atau mencapai 90,22% dari target APBD TA 2024 senilai Rp1.439.654.318.208,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp 75.908.389.750,00, Pendapatan Transfer senilai Rp1.213.079.653.467,00. Pendapatan daerah TA 2024 mengalami kenaikan 23,27% atau senilai Rp245.221.897.112,00 jika dibandingkan dengan TA 2023 yang tercatat senilai Rp1.053.669.304.608,00.

Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2024 direalisasikan senilai Rp1.303.046.573.543,50 atau mengalami kenaikan 18,37% dari saldo tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.100.797.203.966,50. Realisasi belanja dan Transfer tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi senilai Rp924.778.828.926,50, Belanja Modal senilai Rp205.132.359.301,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp1,066,690,000,00 dan Transfer senilai Rp172,068,695,316,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja dan Transfer, maka terdapat defisit anggaran senilai (Rp4.155.371.823,50). Defisit tersebut akan

menambah surplus saldo pembiayaan yang direncanakan senilai Rp9.377.318.332,00. Ringkasan Laporan Realisasi APBD TA 2024 disajikan sebagai berikut.

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	1.439.654.318.208,00	1.298.891.201.720,00	90,22	1.053.669.304.608,00
BELANJA	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50	89,93	1.100.797.203.966,50
TRANSFER	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07	162.776.290.998,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(9.377.318.332,00)	(4.155.371.823,50)	44,31	(47.127.899.358,50)
PEMBIAYAAN NETO	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
SILPA/SIKPA	0,00	5.221.946.509,49		9.377.318.332,99

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Nilai Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 direalisasikan senilai Rp5.221.946.509,49. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai (Rp4.155.371.823,50) atau (44,31%) dibandingkan tahun sebelumnya TA 2023 dimana Saldo Anggaran Lebih akhir tercatat senilai Rp9.377.318.332,99. Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 dapat dilihat dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	9.377.318.332,99	56.505.217.691,49
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	9.377.318.332,99	56.505.217.691,49
3	Sub Total	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.221.946.509,49	9.377.318.332,99
5	Sub Total	5.221.946.509,49	9.377.318.332,99
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain – Lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.221.946.509,49	9.377.318.332,99

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.321.222.117.791,33 yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp55.842.649.809,10, Investasi Jangka Panjang senilai Rp39.720.796.300,00, Aset Tetap senilai Rp2.107.387.055.339,55, dan Aset Lainnya senilai Rp118.271.616.342,68. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp102.907.205.301,86 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.218.314.912.489,47. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Aset Lancar	55.842.649.809,10	50.641.664.752,93
Investasi Jangka Panjang	39.720.796.300,00	39.720.796.300,00
Aset Tetap	2.107.387.055.339,55	2.070.353.557.413,76
Aset Lainnya	118.271.616.342,68	220.533.801.635,69
Jumlah Aset	2.321.222.117.791,33	2.381.249.820.102,38
Kewajiban Jangka Pendek	102.907.205.301,86	64.329.264.764,86
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	102.907.205.301,86	64.329.264.764,86
Ekuitas	2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.321.222.117.791,33	2.381.249.820.102,38

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bombana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Dari kegiatan operasional pemerintah daerah, Pendapatan-LO adalah senilai Rp1.122.373.033.776,06, Beban senilai Rp1.220.060.716.274,35, sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai (Rp0,00) dan Defisit dari Pos Luar Biasa senilai (Rp1.066.690.000,00), sehingga Defisit LO senilai (Rp98.754.372.498,29).

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pendapatan – LO	1.122.373.033.776,06	1.087.966.029.024,24
2.	Beban	1.220.060.716.274,35	1.001.939.946.655,23
3.	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(97.687.682.498,29)	86.026.082.369,01
4.	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	(2.000.000.000,00)
5.	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	(1.066.690.000,00)	(4.739.785.807,00)
6.	Surplus/(Defisit) LO	(98.754.372.498,29)	79.286.296.562,01

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024.

Aktivitas Arus Kas Kabupaten Bombana periode 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	200.976.987.477,50	138.246.773.049,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(205.132.359.301,00)	(185.374.672.408,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	57.530.345,00	(628.964.407,00)

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(4.097.841.478,50)	(47.756.863.765,50)

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan Perubahan Ekuitas Lainnya sepanjang periode tahun 2024. Nilai Ekuitas akhir tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah senilai Rp 2.218.314.912.489,47

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	2.316.920.555.337,52	2.130.254.544.177,68
2.	Surplus/Defisit LO	(98.754.372.498,29)	79.286.296.562,01
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	148.729.650,24	107.379.714.597,83
4.	Ekuitas Akhir	2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi (CaLK) mengemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.


BUPATI BOMBANA
Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
RINGKASAN.....	iii
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
LAPORAN REALISASI APBD LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH NERACA LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN ARUS KAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan Daerah	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJ APBD	18
2.1. Ekonomi Makro	18
2.2. Kebijakan Keuangan.....	25
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	31
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	32
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	33
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah	38
3.2 Realisasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (<i>Mandatory</i> <i>Spending</i>).....	43

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTASI.....	55
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	55
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	55
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	57
4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	65
BAB V PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN.....	72
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	72
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	105
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca	107
5.4. Penjelasan Pos-Pos Operasional	137
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	154
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	161
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD.....	163
BAB VII PENUTUP.....	164

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bombana.....	19
Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bombana	19
Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bombana	19
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bombana	20
Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Bombana.....	21
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia	21
Tabel 2.7 PDRB Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	22
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bombana.....	23
Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Bombana (Mengikuti Wilayah Kota Kendari).....	24
Tabel 2.10 Struktur Perekonomian Kabupaten Bombana.....	25
Tabel 2.11 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.....	27
Tabel 3.1 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.....	34
Tabel 3.2 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pad Kabupaten Bombana Tahun 2024	36
Tabel 3.3 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.....	37
Tabel 3.4 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Bombana Tahun 2024	40
Tabel 3.5 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Belanja Operasi APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran.....	41

Tabel 3.6	Rekapitulasi Target Dan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten	41
Tabel 3.7	Target Dan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.....	43
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Fungsi Pendidikan Tahun 2024	43
Tabel 3.9	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Fungsi Kesehatan 2024.....	45
Tabel 3.10	Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2024	46
Tabel 3.11	Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2024	46
Tabel 3.12	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024.....	47
Tabel 3.13	Alokasi Dana Desa (<i>Mandatory Spending</i>) Tahun 2024	48
Tabel 3.14	Alokasi Anggaran Belanja Pengawasan (<i>Mandatory Spending</i>) Tahun 2024	49
Tabel 3.15	Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan & Pelatihan Asn Tahun 2024	50
Tabel 3.16	Daftar Program Dan Kegiatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2024	52
Tabel 4.1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2024	66
Tabel 4.2	Nilai Sdana Atuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Saat Perolehan Awal.....	67
Tabel 4.3	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Atas Pengeluaran Setelah Perolehan.....	67
Tabel 5.1	Pendapatan – LRA	73
Tabel 5.2	Pendapatan Berdasarkan Kelompok Dan Jenisnya – LRA	74
Tabel 5.3	Pendapatan Asli Daerah – LRA.....	75
Tabel 5.4	Pendapatan Pajak Daerah	76
Tabel 5.5	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah	77

Tabel 5.6	Lain-Lain Pad Yang Sah	79
Tabel 5.7	Daftar Pendapatan Transfer	81
Tabel 5.8	Daftar Dana Bagi Hasil Pajak.....	83
Tabel 5.9	Daftar Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	84
Tabel 5.10	Daftar Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK).....	85
Tabel 5.11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	86
Tabel 5.12	Daftar Rincian Belanja Menurut Jenis.....	88
Tabel 5.13	Daftar Target Dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi	90
Tabel 5.14	Daftar Belanja Operasi	92
Tabel 5.15	Daftar Belanja Pegawai	92
Tabel 5.16	Daftar Belanja Tambahan Penghasilan ASN.....	93
Tabel 5.17	Belanja Gaji Dan Tunjangan DPR.....	94
Tabel 5.18	Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH	94
Tabel 5.19	Daftar Belanja Hibah.....	96
Tabel 5.20	Daftar Belanja Bantuan Sosial.....	97
Tabel 5.21	Belanja Modal Tahun 2024	98
Tabel 5.22	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	99
Tabel 5.23	Belanja Modal, Jalan Irigasi Dan Jaringan	100
Tabel 5.24	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100
Tabel 5.25	Belanja Modal Aset Lainnya	101
Tabel 5.26	Belanja Tak Terduga	101
Tabel 5.27	Belanja Transfer	102
Tabel 5.28	Surplus/Defisit	102
Tabel 5.29	Pembiayaan	103
Tabel 5.30	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	104
Tabel 5.31	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Ta 2024	105
Tabel 5.32	Laporan Perubahan Saldo Anggaran	106

Tabel 5.33	Saldo Kas Di Rekening Kas Daerah	108
Tabel 5.34	Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan	111
Tabel 5.35	Daftar Penyetoran.....	111
Tabel 5.36	Kas Di Bendahara Pengeluaran	111
Tabel 5.37	Daftar Saldo Piutang Ta 2024	114
Tabel 5.38	Daftar Piutang Pajak.....	114
Tabel 5.39	Piutang Pajak Netto	114
Tabel 5.40	Daftar Piutang Retribusi	115
Tabel 5.41	Penyisihan Piutang Retribusi.....	115
Tabel 5.42	Piutang Retribusi Netto	115
Tabel 5.43	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah	116
Tabel 5.44	Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah Netto.....	116
Tabel 5.45	Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	116
Tabel 5.46	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Netto.....	117
Tabel 5.47	Rincian Persediaan Tahun 2024	117
Tabel 5.48	Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 Dan 2023	118
Tabel 5.49	Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap TA. 2024	122
Tabel 5.50	Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Tanah	123
Tabel 5.51	Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin TA 2024	124
Tabel 5.52	Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan	125
Tabel 5.53	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan	126
Tabel 5.54	Mutasi Aset Tetap Lainnya	127
Tabel 5.55	Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	129
Tabel 5.56	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	129

Tabel 5.57	Tambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara TA 2023- 2024	130
Tabel 5.58	Mutasi Aset Tak Berwujud.....	131
Tabel 5.59	Aset Tak Berwujud Dan Amortisasi	131
Tabel 5.60	Aset Tak Berwujud Nilai Netto	132
Tabel 5.61	Rincian Saldo Aset Lain-Lain	133
Tabel 5.62	Daftar Utang Belanja.....	135
Tabel 5.63	Utang Jangka Pendek Lainnya Menurut SKPD Per 31 Desember 2024	135
Tabel 5.64	Ekuitas	136
Tabel 5.65	Rincian Pendapatan LO.....	139
Tabel 5.66	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO.....	140
Tabel 5.67	Rincian Beban Operasi	143
Tabel 5.68	Daftar Beban Pegawai	144
Tabel 5.69	Daftar Rincian Beban Persediaan	145
Tabel 5.70	Daftar Rincian Beban Jasa	146
Tabel 5.71	Daftar Beban Pemeliharaan	148
Tabel 5.72	Beban Perjalanan Dinas.....	149
Tabel 5.73	Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.....	150
Tabel 5.74	Beban Hibah.....	150
Tabel 5.74	Beban Bantuan Sosial.....	151
Tabel 5.75	Beban Penyisihan Piutang	151
Tabel 5.76	Beban Penyusutan	151
Tabel 5.77	Beban Transfer	152
Tabel 5.78	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	152
Tabel 5.79	Arus Kas Bersih Per Aktivitas Ta 2024	154

Tabel 5.80	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi.....	155
Tabel 5.81	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	156
Tabel 5.82	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	157
Tabel 5.83	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	158
Tabel 5.84	Saldo Akhir Kas	159
Tabel 5.85	Saldo Akhir Kas	160
Tabel 5.86	Rincian Koreksi Ekuitas	161

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan	35
Grafik 3.2 Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	36
Grafik 3.3 Persentase Capaian Target Pendapatan Transfer	37
Grafik 5.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kab, Bombana Tahun 2020-2024.....	73
Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Bombana TA. 2024	75
Grafik 5.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2024	81
Grafik 5.4 Komposisi Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2024	82
Grafik 5.4 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020-2024	87
Grafik 5.5 Perkembangan Belanja Tahun 2020-2024	89
Grafik 5.6 Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi TA. 2024	90
Grafik 5.7 Komposisi Belanja Operasi Menurut Jenis TA. 2024	91
Grafik 5.8 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2020 sd. 2024.....	98
Grafik 5.9 Komposisi Belanja Modal Perjenis TA.2024.....	98
Grafik 5.10 Trend Perkembangan Silpa Kab. Bombana 2020-2024.....	104
Grafik 5.11 Trend Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kab. Bombana Tahun 2020-2024.....	106
Grafik 5.12 Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban. Dan Ekuitas Tahun 2020-2024.....	107
Grafik 5.13 Komposisi Aset Kab, Bombana Tahun 2024	108
Grafik 5.14 Komposisi Piutang TA. 2024.....	113
Grafik 5.15 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Kab. Bombana 2020-2024	119

Grafik 5.16 Aset Tetap Berdasarkan Nilai Buku Tahun 2020-2024.....	120
Grafik 5.17 Persentase Aset Tetap per Jenis TA.2024	122
Grafik 5.18 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2024.....	134
Grafik 5.19 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2020-2024	137
Grafik 5.20 Kegiatan Operasioanal 2020-2024.....	138
Grafik 5.21 Pendapatan LO TA. 2024	140
Grafik 5.22 Pendapatan Asli Daerah.....	141
Grafik 5.23 Perbandingan Beban Operasi TA.2024	143

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 5.1	BELANJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) DALAM HAL INI PPKD. RINGKASAN REALISASI BELANJA MENURUT ORGANISASI SECARA BERURUTAN BERDASARKAN BESARAN REALISASI BELANJA
LAMPIRAN 5.2	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN
LAMPIRAN 5.2	BELANJA BARANG DAN JASA
LAMPIRAN 5.3	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
LAMPIRAN 5.4	ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TA 2024
LAMPIRAN 5.5	KAS DI BENDAHARA BOS
LAMPIRAN 5.6	KAS DI BENDAHARA FKTP
LAMPIRAN 5.7	PIUTANG
LAMPIRAN 5.8	PERSEDIAAN
LAMPIRAN 5.9	TAGIHAN JANGKA PANJANG
LAMPIRAN 5.10	UTANG BELANJA
LAMPIRAN 5.11	PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO
LAMPIRAN 5.12	PENDAPATAN TRANSFER – LO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAHAN KAB. BOMBANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sempel 31 Desember 2024



URAIAN	Catetan	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	5 = (4 / 3) * 100		6
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	1.439.654.318.208,00	1.298.891.201.720,00	90,22	1.053.669.304.608,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	85.086.780.609,00	75.908.389.750,00	89,21	94.462.652.184,00
Pajak Daerah	5.1.1.2	22.865.000.000,00	16.809.320.380,00	73,52	16.741.628.704,00
Retribusi Daerah	5.1.1.3	6.835.000.000,00	7.944.727.599,00	116,24	6.460.644.617,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.4	16.241.480.609,00	16.241.480.609,00	100,00	12.863.598.813,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.5	39.145.300.000,00	34.912.861.162,00	89,19	58.396.780.050,00
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	1.329.508.325.516,00	1.213.079.653.467,00	91,24	959.206.652.424,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1	1.282.808.325.516,00	1.177.890.523.909,00	91,82	904.931.884.533,00
Dana Perimbangan	5.1.2.1.1	1.168.672.437.516,00	1.064.243.885.909,00	91,06	807.155.593.533,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.2.1.1.1	435.425.670.319,00	370.038.827.211,00	84,98	162.743.083.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.2.1.1.2	506.203.005.197,00	507.929.909.000,00	100,34	469.181.210.648,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.2.1.1.3	72.914.205.000,00	71.548.170.798,00	98,13	57.368.240.596,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.2.1.1.3	154.129.557.000,00	114.726.978.900,00	74,44	117.863.059.289,00
Dana Desa	5.1.2.1.1.4	98.927.677.000,00	98.438.427.000,00	99,51	97.776.291.000,00
Insentif Fiskal	5.1.2.1.1.5	15.208.211.000,00	15.208.211.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.2.2	46.700.000.000,00	35.189.129.558,00	75,35	54.274.767.891,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.2.2.1	46.700.000.000,00	35.189.129.558,00	75,35	39.274.767.891,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LRA		0,00	0,00		15.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.3	25.059.212.083,00	9.903.158.503,00	39,52	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		25.059.212.083,00	9.903.158.503,00	39,52	0,00
BELANJA DAERAH	5.1.4	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50	89,93	1.100.797.203.966,50
BELANJA OPERASI	5.1.4.1	989.624.184.307,00	924.778.828.926,50	93,45	747.906.454.753,50
Belanja Pegawai	5.1.4.1.1	438.806.935.686,00	415.021.806.513,50	94,58	353.049.066.129,50
Belanja Barang dan Jasa	5.1.4.1.2	481.516.537.399,00	441.591.050.797,00	91,71	342.512.576.227,00
Belanja Subsidi	5.1.4.1.3	200.000.000,00	176.701.394,00	88,35	106.098.667,00
Belanja Hibah	5.1.4.1.4	69.079.711.222,00	67.968.970.222,00	98,39	51.606.713.730,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.4.1.5	21.000.000,00	20.300.000,00	96,67	632.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.4.2	279.409.337.574,00	205.132.359.301,00	73,42	185.374.672.408,00
Belanja Modal Tanah	5.1.4.2.1	1.742.580.000,00	1.623.988.996,00	93,19	3.510.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.4.2.2	55.265.750.297,00	46.649.909.911,00	84,41	28.872.385.235,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.4.2.3	73.668.465.212,00	52.190.485.037,00	70,85	53.448.414.400,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.4.2.4	144.054.363.065,00	102.117.940.857,00	70,89	96.832.955.543,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.4.6.1	2.084.089.000,00	1.087.528.800,00	52,18	2.710.917.230,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.4.6.2	2.594.090.000,00	1.462.505.700,00	56,38	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.4.7	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52	4.739.785.807,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.4.7.1	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52	4.739.785.807,00
BELANJA TRANSFER	5.1.5	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07	162.776.290.998,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07	162.776.290.998,00
SURPLUS/DEFISIT	5.1.6	(9.377.318.332,00)	(4.155.371.823,50)	44,31	(47.127.899.358,50)
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.7	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.7.1	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.7.2	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.8	0,00	5.221.946.509,49		9.377.318.332,99

Bombana, 22 Mei 2025
BUPATI BOMBANA
Y. H. BURHANUDDIN, M.Si.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH Kab. Bombana
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE TAHUN 1 Januari 2024 DAN 31 Desember 2024

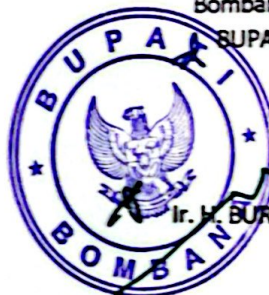


(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024 Audited	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL		9.377.318.332,99	56.505.217.691,49
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH		9.377.318.332,99	56.505.217.691,49
SUBTOTAL (1-2)		0,00	0,00
SILPA/(SIKPA)		5.221.946.509,49	9.377.318.332,99
SUBTOTAL (3+4)		5.221.946.509,49	9.377.318.332,99
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		0,00	0,00
LAIN-LAIN		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	5.1.8	5.221.946.509,49	9.377.318.332,99

Bombana, 22 Mei 2025

SUPATI BOMBANA



Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si.

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

NERACA



PEMERINTAHAN KAB. BOMBANA

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Uraian	Catatan	2024 Audited	2023
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas		5.282.690.529,49	9.417.921.191,99
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	832.351.859,49	921.142.531,49
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	20.085.997,00	95.571.540,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	136.711.579,00	98.800,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	394.775.125,00	4.424.263.680,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	22.966.714,00	113.091.855,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.6	9.315.617,00	3.204.353,50
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	-	37.389.184,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.8	3.866.483.638,00	3.823.159.248,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9.1	2.341.094.759,20	2.994.606.361,14
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		- 560.600.768,33	- 617.781.226,94
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9.2	1.950.118.316,00	2.127.874.963,00
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		- 1.803.713.098,73	- 1.952.124.991,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.9.3	-	-
Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9.4	4.292.168.447,00	6.194.640.200,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		- 20.756.377,74	- 30.627.139,50
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.9.5	-	7.527.583.284,00
Penyisihan Piutang Tranfer Antar Daerah		-	- 37.637.916,42
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	-	-
Persediaan	5.3.1.1.11	44.361.648.002,21	25.017.210.027,16
JUMLAH ASET LANCAR		55.842.649.809,10	50.641.664.752,93
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	39.720.796.300,00	39.720.796.300,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		39.720.796.300,00	39.720.796.300,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	175.377.050.588,00	171.759.156.592,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	475.869.384.819,84	435.659.087.381,84
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.093.121.540.702,72	1.053.844.007.450,72
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.660.535.472.641,50	1.532.230.013.580,50
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	43.020.872.080,79	41.084.979.580,79
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	60.132.777.287,35	44.669.277.340,35
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	- 1.400.670.042.780,65	- 1.208.892.964.512,44
JUMLAH ASET TETAP		2.107.387.055.339,55	2.070.353.557.413,76
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	75.213.843.733,00	74.757.059.001,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	8.843.069.880,00	5.858.256.780,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	36.584.727.509,96	39.012.749.474,96
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		- 899.329.228,00	- 520.978.480,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		- 30.012.670.552,28	- 29.849.729.140,27
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.4	28.541.975.000,00	131.276.444.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		118.271.616.342,68	220.533.801.635,69
JUMLAH ASET		2.321.222.117.791,33	2.381.249.820.102,38

Uraian	Catatan	2024 Audited	2023
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	60.744.020,00	40.602.859,00
Utang Belanja	5.3.1.4.2	102.115.099.459,86	63.557.300.083,86
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.4.3	731.361.822,00	731.361.822,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		102.907.205.301,86	64.329.264.764,86
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		102.907.205.301,86	64.329.264.764,86
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS			
Ekuitas		2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52
JUMLAH EKUITAS		2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.1.4.3	2.321.222.117.791,33	2.381.249.820.102,38



Bombana, 22 Mei 2025
BUPATI BOMBANA

IR. H. BURHANUDDIN, M.Si.

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAHAN KAB. BOMBANA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Uraian	Catatan	2024 Audited	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	5.4.2	1.122.373.033.776,06	1.087.966.029.024,24	25.053.575.345,82	2,30
PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)-LO	5.4.2.1	73.605.023.378,06	83.087.853.802,24	(9.623.723.424,18)	(11,58)
Pajak Daerah-LO		16.127.077.408,06	17.573.444.015,00	(1.446.366.606,94)	(8,23)
Retribusi Daerah-LO		8.226.075.952,00	6.771.393.180,00	1.454.682.772,00	21,48
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		16.241.480.609,00	12.863.598.813,00	3.377.881.796,00	26,26
Lain-lain PAD yang Sah-LO		33.010.389.409,00	45.879.417.794,24	(13.009.921.385,24)	(28,36)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.2.2	1.023.482.378.832,00	992.703.059.746,00	45.987.530.086,00	4,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		976.717.627.909,00	938.432.037.533,00	53.493.801.376,00	5,70
Dana Perimbangan-LO		961.509.416.909,00	938.432.037.533,00	38.285.590.376,00	4,08
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		267.304.358.211,00	294.019.527.000,00	(26.715.168.789,00)	(9,09)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		507.929.909.000,00	469.181.210.648,00	38.748.698.352,00	8,26
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		71.548.170.798,00	57.368.240.596,00	14.179.930.202,00	24,72
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		114.726.978.900,00	117.863.059.289,00	(3.136.080.389,00)	(2,66)
Insentif Fiskal		15.208.211.000,00	0,00	15.208.211.000,00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		46.764.750.923,00	54.271.022.213,00	(7.506.271.290,00)	(13,83)
Pendapatan Bagi Hasil-LO		46.764.750.923,00	39.271.022.213,00	7.493.728.710,00	19,08
Bantuan Keuangan		0,00	15.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.2.3	25.285.631.566,00	12.175.115.476,00	(11.310.231.316,00)	(92,90)
Pendapatan Hibah-LO		15.382.473.063,00	12.175.115.476,00	(11.310.231.316,00)	(92,90)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		9.903.158.503,00	0,00	9.903.158.503,00	
BEBAN		1.220.060.716.274,35	1.001.939.946.655,23	200.683.635.619,37	20,03
BEBAN OPERASI	5.4.3	948.757.944.570,44	743.910.973.000,09	189.357.265.675,60	25,45
Beban Pegawai	5.4.3.1	429.331.394.094,50	356.906.524.307,50	60.846.368.887,00	17,05
Beban Persediaan	5.4.3.2	141.706.832.763,95	107.925.254.539,14	44.166.841.625,81	40,92
Beban Jasa	5.4.3.3	127.651.358.341,00	127.355.258.751,00	(10.012.029.841,00)	(7,86)
Beban Pemeliharaan	5.4.3.4	18.783.355.688,00	11.718.428.550,00	2.753.307.588,00	23,50
Beban Perjalanan Dinas	5.4.3.5	133.262.960.406,00	99.118.286.868,00	33.328.648.538,00	33,63
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.3.6	2.258.176.172,00	0,00	2.258.176.172,00	
Beban Subsidi	5.4.3.7	176.701.394,00	106.098.667,00	70.602.727,00	66,54
Beban Hibah	5.4.3.8	76.507.807.222,00	39.801.506.092,00	56.832.995.341,00	142,79
Beban Bantuan Sosial	5.4.3.9	0,00	632.000.000,00	(611.700.000,00)	(96,79)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.3.10	19.079.358.488,99	347.615.225,45	(275.945.362,21)	(79,38)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.11	194.277.771.703,91	193.028.973.657,14	(698.630.058,23)	(0,36)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		43.566.471.571,23	42.592.735.721,10	520.533.019,80	1,22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		24.840.473.184,00	23.505.280.196,00	(31.931.980,00)	(0,14)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		125.145.492.866,17	126.168.361.325,00	(1.200.026.473,00)	(0,95)
Beban Penyusutan Aset Lainnya		346.983.334,51	483.194.973,04	(86.153.931,03)	(17,83)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		378.350.748,00	279.401.442,00	98.949.306,00	35,41
BEBAN TRANSFER	5.4.3.12	77.025.000.000,00	64.999.999.998,00	12.025.000.002,00	18,50
Beban Bantuan Keuangan		77.025.000.000,00	64.999.999.998,00	12.025.000.002,00	18,50
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(97.687.682.498,29)	86.026.082.369,01	(175.630.060.273,55)	(204,16)

Uraian	Catatan	2024 Audited	2023	Kenaikan / Penurunan	%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO					
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	(2.000.000.000,00)	2.000.000.000,00	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	-97.687.682.498,29	84.026.082.369,01	(173.630.060.273,55)	(206,64)
POS LUAR BIASA	5.4.6				
BEBAN LUAR BIASA	5.4.6.1	1.066.690.000,00	4.739.785.807,00	(3.835.254.807,00)	(80,92)
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		-1.066.690.000,00	(4.739.785.807,00)	3.835.254.807,00	(80,92)
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.7	-98.754.372.498,29	79.286.296.562,01	44.968.083.295,99	56,72



Bombana, 22 Mei 2025
BUPATI BOMBANA

H. RUBYANUDDIN, M.Si.

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAHAN KAB. BOMBANA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023



URAIAN	Catatan	2024 Audited	2003
1	2		4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		16.809.320.380,00	16.741.628.704,00
Penerimaan Retribusi Daerah		7.944.727.599,00	6.460.644.617,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.241.480.609,00	12.863.598.813,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		34.912.861.162,00	58.396.780.050,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil		370.038.827.211,00	162.743.083.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		507.929.909.000,00	469.181.210.648,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		71.548.170.798,00	57.368.240.596,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		114.726.978.900,00	117.863.059.289,00
Penerimaan Dana Desa		98.438.427.000,00	97.776.291.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal		15.208.211.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		35.189.129.558,00	39.274.767.891,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		9.903.158.503,00	15.000.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi		1.298.891.201.720,00	1.053.669.304.608,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		415.021.806.513,50	353.049.066.129,50
Pembayaran Barang dan Jasa		441.591.050.797,00	342.512.576.227,00
Pembayaran Subsidi		176.701.394,00	106.098.667,00
Pembayaran Belanja Hibah		67.968.970.222,00	51.606.713.730,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		20.300.000,00	632.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga		1.066.690.000,00	4.739.785.807,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		172.068.695.316,00	162.776.290.998,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		1.097.914.214.242,50	915.422.531.558,50
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1	200.976.987.477,50	138.246.773.049,50
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas jalan, irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		1.623.988.996,00	3.510.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		46.649.909.911,00	28.872.385.235,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		52.190.485.037,00	53.448.414.400,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		102.117.940.857,00	96.832.955.543,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.087.528.800,00	2.710.917.230,00
Perolehan Aset Lainnya		1.462.505.700,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		205.132.359.301,00	185.374.672.408,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2	-205.132.359.301,00	-185.374.672.408,00

URAIAN	Catatan	2024 Audited	2003
1	2		4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		69.108.885.342,00	57.687.133.980,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris		69.108.885.342,00	57.687.133.980,00
Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		69.051.354.997,00	58.316.098.387,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris		69.051.354.997,00	58.316.098.387,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	57.530.345,00	-628.964.407,00
			0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		-4.097.841.478,50	-47.756.863.765,50
Saldo Awal Kas		9.380.532.007,99	57.137.395.773,49
Koreksi SilPA		0,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		9.380.532.007,99	57.137.395.773,49
Saldo Akhir Kas	5.5.5	5.282.690.529,49	9.380.532.007,99
Kas di Kas Daerah		832.351.859,49	921.142.531,49
Kas di Bendahara Penerimaan		20.085.997,00	95.571.540,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		136.711.579,00	98.800,00
Kas di BLUD		394.775.125,00	4.424.263.680,00
Kas di Bendahara BOS		22.966.714,00	113.091.855,00
Kas di Bendahara FKTP		9.315.617,00	3.204.353,50
Kas Dana BOSP		0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas		3.866.483.638,00	3.823.159.248,00
Saldo Akhir Kas		5.282.690.529,49	9.380.532.007,99
Kas Lainnya		0,00	37.389.184,00
Saldo Akhir Kas + Kas Lainnya		5.282.690.529,49	9.417.921.191,99



Bombana, 22 Mei 2025

BUPATI BOMBANA

H. H. BURHANUDDIN, M.Si.

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KAB. BOMBANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 DAN 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024 Audited	2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	2.316.920.555.337,52	2.130.254.544.177,68
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	5.6.2	(98.754.372.498,29)	79.286.296.562,01
RK PPKD		1.089.827.015.727,00	0,00
RK SKPD		(1.089.827.015.727,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR	5.6.3		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN		148.729.650,24	107.379.714.597,83
Piutang PBBP2		28.731.370,00	
Piutang Retribusi Kios		(459.105.000,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya		12.167,78	
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pertandingan Olahraga		7.350,00	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		11.205,66	
Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet		33.375,00	
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya		3.968.411,92	
Penyisihan Piutang PBBP2		66.939.704,66	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios		145.483.875,50	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		870.000,00	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat		587.375,00	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan		1.470.642,27	
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		9.870.761,76	
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		(15.000.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		2.010.470.450,00	
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		(25.898.900,00)	
Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar		(149.410.000,00)	
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		(76.470.000,00)	
Koreksi Ekuitas Awal Piutang Pajak Air Permukaan		0,00	113.780,58
Koreksi Ekuitas Awal Piutang Retribusi Pasar		0,00	9.856.250,00
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Hotel		0,00	4.915,00
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Restoran		0,00	17.148.147,02
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		0,00	37.542.864,23
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap		(1.387.982.798,89)	109.364.328.775,99
Koreksi Ekuitas-Kewajiban		0,00	(2.096.460.228,00)
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya		(5.860.340,42)	3.099.998,01
Koreksi Ekuitas-Lainnya		0,00	44.080.095,00
EKUITAS AKHIR		2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52



Bombana, 22 Mei 2025
BUPATI BOMBANA

BURHANUDDIN, M.Si.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Pemerintah Kabupaten Bombana menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah dan sekaligus menjadi tolak ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 32 ayat (1) bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL); (3) Laporan Operasional (LO); (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (5) Neraca; (6) Laporan Arus Kas (LAK); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tersebut disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana selama Tahun Anggaran 2024, baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja pendapatan dan belanja, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai tingkat pendapatan periode tahun berjalan sehingga dapat diketahui cukup/tidaknya untuk membiayai seluruh pengeluaran;



- b. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan menentukan kesesuaian alokasi penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah sebagai akibat kegiatannya selama periode pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan anggaran, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal: aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

Informasi dalam pelaporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam perbuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna yang meliputi:

1. Masyarakat;
2. Para Wakil Rakyat; Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa;
3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberi gambaran program/kegiatan yang dianggarkan dalam DPA tiap-tiap SKPD sehingga dapat menjadikan pedoman atau kerangka acuan yang bersifat umum dalam memberi informasi dan menjelaskan anggaran pemerintah daerah tahun 2024;



- b. Merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dari aspek keuangan tahun anggaran 2024;
- c. Memberi informasi secara singkat tentang realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ada pada pemerintah daerah tahun anggaran 2024;
- d. Sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024;
- e. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana disusun dengan tujuan:
 - 1) Memberi kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2024; dan
 - 2) Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD berikutnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
-



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana;
31. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



33. Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Bombana;
34. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana;
35. Peraturan Bupati Bombana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
36. Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan dibandingkan dengan anggaran pertama dan penjelasan atas perubahan yang dilakukan pada tiap-tiap SKPD.
- 2.2 Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.
Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan realisasi anggaran dan neraca daerah.
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintahan Daerah.
Memuat penjelasan mengenai indikator capaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD.

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada tiap-tiap SKPD berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektivitasnya dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan pada program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Ditetapkan
Memuat tentang hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI



- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
Memuat informasi tentang laporan tiap-tiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebagai entitas pelaporan.
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap SKPD.
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Daerah.
Memuat informasi tentang Basis pengukuran atas pos-pos pendapatan dan Belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap SKPD.
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang dan rincian laporan keuangan daerah.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2024 atau tahun sebelumnya Tahun 2023 menurut data BPS Pusat, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, dan BPS Kabupaten Bombana, yaitu:

- a. Tingkat kemiskinan sebesar 10,54% (persentase penduduk miskin);
- b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,43% %;
- c. Gini Ratio sebesar 0,344%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,85%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,04%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,67% ; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan sebesar 5.609,73 Miliar Rupiah.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Jadi tingkat kemiskinan penduduk yang dikategorikan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bombana

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota (%)	10,73	10,54	-1,77
2	Kabupaten/Kota (Ribu Orang)	20,52	20,56	0,19
3	Provinsi (%)	11,43	11,21	-1,92
4	Nasional (%)	9,36	9,03	-3,53
5	Peringkat Provinsi	15	15	0,00
6	Peringkat Nasional	232	249	17,00

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bombana pada Tahun 2024 sebesar 10,54% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 10,73% mengalami penurunan sebesar -1,77%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bombana masih dibawah provinsi dan masih di atas secara nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bombana

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota	2,05	1,15	-43,90
2	Tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi	1,96	2,08	6,12
3	Tingkat kedalaman kemiskinan Nasional	1,53	1,46	-4,58
4	Peringkat Provinsi	10	16	6
5	Peringkat Nasional	156	305	149

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bombana

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten/Kota	0,55	0,21	-61,82
2	Tingkat keparahan kemiskinan Provinsi	0,48	0,56	16,67
3	Tingkat keparahan kemiskinan Nasional	0,38	0,35	-7,89
4	Peringkat Provinsi	8	16	8
5	Peringkat Nasional	141	347	206

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum memulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Pusat/BPS Provinsi Sulawesi Tenggara/Kabupaten Bombana tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebesar 1,43%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bombana

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	1,16	1,43	23,28
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi	3,15	3,09	-1,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	5,32	4,91	-7,71
4	Peringkat Provinsi	17	17	0
5	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bombana Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,43%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,16% atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2024. Dengan demikian TPT Kabupaten Bombana masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional yang sebesar 5,32% dan sebesar 4,91%

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara/Kabupaten Bombana realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebesar 0,344 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini



Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Bombana

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Kabupaten/Kota	0,310	0,344	9,88
2	Tingkat Provinsi	0,371	0,370	-0,27
3	Tingkat Nasional	0,388	0,379	-2,37
4	Peringkat Provinsi	13	7	
5	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana

Pada Tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bombana yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,344 angka ini meningkat 9,88 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,310 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk tiga dimensi dasar yaitu: harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (<60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Pusat/Provinsi Sulawesi Tenggara/Kabupaten Bombana realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebesar 68,85 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	68,12	68,85	1,07
2	Provinsi	72,94	73,62	0,93
3	Nasional/Indonesia	74,39	75,02	0,85
4	Peringkat Provinsi	13	13	0
5	Peringkat Nasional	419	468	-49

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bombana Tahun 2024 adalah sebesar 68,85 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 68,12 poin mengalami kenaikan sebesar 1,07 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/ menurunnya umur harapan hidup



saat lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir tahun 2023 mencapai 68,12 tahun pada tahun 2024, lebih lama 68,85 tahun di bandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya, kemudian, rata-rata lama sekolah tahun 2024 selama 8,10 tahun dengan harapan lama sekolah tahun 2024 11,91 tahun.

Kemajuan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bombana secara umum terlihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi indikator utamanya. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Bombana berada pada poin 65,65. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 IPM sampai pada poin 68,85. Meskipun demikian IPM Kabupaten Bombana masih berada dibawah IPM Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 73,62 poin. Jika dilihat perbandingan IPM Kabupaten Bombana dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Kabupaten Bombana berada pada urutan ke 6 dari 17 kabupaten/kota, sedangkan untuk tingkat nasional Kabupaten Bombana berada pada urutan ke 420 dari 541 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat memilih faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana dapat di lihat dari pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Berdasarkan PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan, PDRB Kabupaten Bombana pada tahun 2023 adalah sebesar Rp5.340,69 dan pada tahun 2024 menjadi Rp5.609,73 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,04%. PDRB Kabupaten Bombana atas dasar harga konstan seri 2010 dari tahun 2020 s.d. tahun 2024 dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2.7. PDRB Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.393,03	1.464,89	1.569,03	1.699,59	1.864,96
2	Pertambangan dan Penggalian	1.356,66	1.330,05	1.366,57	1.405,00	1.413,17
3	Industri Pengolahan	240,49	258,69	257,91	224,66	255,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	0,74	0,80	0,86	0,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah, dan Daur Ulang	6,14	6,25	6,29	6,44	6,24
6	Konstruksi	453,75	492,59	512,60	508,09	526,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	600,61	646,34	708,52	753,76	767,91
8	Transportasi dan Pergudangan	31,00	31,82	33,36	35,35	36,63



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,42	21,05	22,11	23,19	23,65
10	Informasi dan Komunikasi	45,84	47,28	50,66	55,06	60,35
11	Jasa Keuangan dan Akuntansi	45,16	47,91	50,27	53,36	54,51
12	<i>Real Estate</i>	64,69	66,40	69,08	70,55	74,23
13	Jasa Perusahaan	0,61	0,65	0,69	0,72	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	177,92	176,44	176,71	191,79	208,11
15	Jasa Pendidikan	211,11	218,72	230,37	243,44	247,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,52	42,84	45,54	45,59	46,15
17	Jasa Lainnya	20,08	20,54	21,81	23,24	23,54
	PBRB	4.708,74	4.873,22	5.122,34	5.340,69	5.609,73

Catatan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana

Dari tabel tersebut di atas dalam 5 tahun terakhir, terlihat bahwa PDRB tahun 2020 dan tahun 2024 masih didominasi oleh sektor pertanian sedangkan sektor yang memberi peran terkecil yaitu sektor jasa perusahaan.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bombana

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku	6.559,65	6.913,33	7.780,30	8.557,37	9.155,32
2	Pertumbuhan PDRB (2010=200) Menurut Pengeluaran %	2,16	1,83	7,07	5,49	1,86
3	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran	4.708,74	4.873,22	5.122,34	5.340,69	5.609,73
4	Pertumbuhan PDRB seri 2010 menurut Pengeluaran %	0,56	3,49	5,11	4,26	5,04

Catatan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber Dokumen: BPS Prov. Sultra & BPS Kab. Bombana

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB perkapita pertahun. Berdasarkan harga berlaku PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Bombana mengalami peningkatan lima tahun terakhir dari tahun sebelumnya. Berdasarkan PDRB seri 2010 atas dasar Harga Berlaku tahun 2020 sebesar Rp6.559,65 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp6.913,33 pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp7.780,30 atau mengalami kenaikan sebesar 5,49 persen, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp8.557,37 atau meningkat sebesar 4,67 persen. Pada tahun 2024 berdasarkan data BPS belum ada data yang ditetapkan sehingga data masih mengacu tahun 2023 sebesar Rp9.155,32 atau mengalami kenaikan sebesar 1,86 persen. Dengan rata-rata kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 3,68%.

PDRB perkapita atas dasar harga konstan menurut pengeluaran Kabupaten Bombana mengalami pula peningkatan lima tahun terakhir dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.708,74 meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp4.873,22, atau mengalami kenaikan sebesar 3,49 persen. Pada tahun 2022 Rp5.122,34 meningkat



pada tahun 2023 menjadi Rp5.340,69 atau mengalami kenaikan sebesar 4,26 persen, Pada tahun 2024 Rp5.609,73 mengalami kenaikan sebesar 5,04 persen. Adapun rata-rata kenaikannya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 3,69%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bombana dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10 % dalam satu tahu. (ii) inflasi sedang (*Galloping Inflation*) inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) inflasi berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Pusat/BPS Provinsi Sulawesi Tenggara/BPS Kabupaten Bombana tingkat Inflasi Kabupaten Bombana tahun 2024 adalah sebesar 0,67% (Kota Kendari) dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Bombana (mengikuti wilayah Kota Kendari)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota (%)	2,61	0,67	-74,33
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,58	1,05	-59,30
3	Tingkat Infasi Nasional (%)	2,61	1,57	-39,85
4	Peringkat Provinsi	1	3	2
5	Peringkat Nasional	53	133	80

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bombana

Tingkat inflasi di Kabupaten Bombana (mengikuti wilayah Kota Kendari) tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,67% sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2023 adalah sebesar 2,61% atau lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Namun dengan demikian inflasi Kabupaten Bombana lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 1,05% lebih rendah -59,30% dan Nasional sebesar 1,57% dan tingkat inflasi Kabupaten Bombana tahun 2024 di daerah Provinsi pada peringkat 3, secara nasional berda pada peringkat 133.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bombana

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bombana berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran (Juta Rupiah) tahun 2024 sebesar Rp9.155,32 miliar mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp8.557,37 miliar atau mengalami



peningkatan sebesar 1,86 persen dibanding tahun 2023. PDRB Kabupaten Bombana atas dasar harga berlaku dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Struktur Perekonomian Kabupaten Bombana

NO	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.007,37	2.138,16	2.365,93	2.683,32	3.152,24
2	Pertambangan dan Penggalian	1.866,31	1.867,60	2.219,38	2.492,77	2.417,64
3	Industri Pengolahan	334,57	368,54	375,94	335,93	399,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,81	0,89	0,99	1,09	1,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah, dan Daur Ulang	8,02	8,18	8,40	8,73	8,68
6	Konstruksi	637,67	724,90	801,15	821,75	857,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	835,15	903,68	1.050,56	1.169,82	1.212,55
8	Transportasi dan Pergudangan	35,99	37,26	41,10	47,66	50,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,49	28,54	30,46	32,57	34,07
10	Informasi dan Komunikasi	45,37	47,25	49,87	53,39	58,20
11	Jasa Keuangan dan Akuntansi	65,85	73,32	82,63	89,42	91,81
12	<i>Real Estate</i>	83,74	86,18	90,20	94,03	99,63
13	Jasa Perusahaan	0,82	0,88	0,97	1,06	1,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	253,81	254,42	256,32	282,54	313,58
15	Jasa Pendidikan	278,77	290,95	317,12	350,16	362,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,56	56,36	60,83	61,88	62,69
17	Jasa Lainnya	25,33	26,22	28,46	31,25	31,36
	PDRB	6.559,65	6.913,33	7.780,30	8.557,37	9.155,32

Catatan: *angka sementara ** angka sangat sementara
Sumber Dokumen BPS Kabupaten Bombana

2.2 Kebijakan Keuangan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana kerja tahunan daerah yang bersifat makro dan disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada keinginan/aspirasi rakyat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagaimana dalam Pasal 149 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
4. Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2.2.1 Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 semula ditargetkan sebesar Rp1.217.610.554.010, namun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp222.043.764.198 atau sebesar 18,23% menjadi sebesar Rp1.439.654.318.208.

Peningkatan target pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh penyesuaian pada komponen pendapatan daerah sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp6.536.780.609,00 atau sebesar 8,32% dimana pada APBD tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp78.550.000.000,00 menjadi sebesar Rp85.086.780.609,00; dan
- 2) Target Penerimaan Dana Transfer dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp202.309.761.882,00 atau sekitar 17,95% dari



target penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp1.127.198.563.634,00 menjadi sebesar Rp1.329.508.325.516,00 dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara umum, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bombana pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.439.654.318.208,00 yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp85.086.780.609,00;
- 2) Pendapatan Transfer Sebesar Rp1.329.508.325.516; dan
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp25.059.212.083.

Untuk lebih jelasnya, perubahan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel. 2.11 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Pendapatan Daerah	Proyeksi		Bertambah Berkurang	
		APBD T.A 2024	Perubahan T.A 2024	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	78.550.000.000	85.086.780.609	6.536.780.609	8,32%
2	Pendapatan Transfer	1.127.198.563.634	1.329.508.325.516	202.309.761.882	17,95%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.861.990.376	25.059.212.083	13.197.221.707	111,26%
PROYEKSI TOTAL PENDAPATAN DAERAH		1.217.610.554.013	1.439.654.318.212	222.043.764.203	18,24%

1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp78.550.000,00 namun demikian dari hasil laporan Badan Keuangan daerah sampai dengan Juni Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp40.220.420.156,00 atau sebesar 47,27%. Dengan memperhatikan capaian realisasi PAD tersebut serta mempertimbangkan kondisi saat ini maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap beberapa target sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6.536.780.609,00 atau sebesar 8,32% sehingga menjadi sebesar Rp85.086.780.609,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah sampai dengan bulan Juni 2024 baru mencapai Rp5.585.038.468,00 atau sebesar 24,43% dari target penerimaan pajak daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.020.000,00. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah daerah merasa perlu untuk menyesuaikan target pendapatan dari sektor pajak daerah sehingga dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp155.000.000) atau turun sebesar (0,67)% dari target yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga menjadi sebesar Rp22.865.000.000.

Penambahan dan penurunan target pendapatan pajak daerah tersebut bersumber dari:

- a. Penambahan target penerimaan pajak reklame sebesar Rp130.000.000 atau sebesar 65% dari target penerimaan pajak restoran pada APBD Tahun Anggaran



- 2024 sebesar Rp200.000.000 menjadi sebesar Rp330.000.000 pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 2024;
- b. Penurunan target penerimaan pajak air tanah sebesar (Rp15.000.000,00) atau sebesar (30,00)% dari target penerimaan pajak air tanah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.000.000 menjadi sebesar Rp35.000.000;
 - c. Penurunan target penerimaan pajak sarang burung walet sebesar (Rp30.000.000) atau sebesar (30,00)% dari target penerimaan pajak sarang burung walet pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.000.000 menjadi sebesar Rp70.000.000;
 - d. Penurunan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar (Rp2.700.000.000) atau sebesar (60,00)% dari target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.500.000.000 menjadi Rp1.800.000.000;
 - e. Penambahan target pajak PBB-P2 sebesar Rp350.000.000 atau sebesar 8,75% dari target penerimaan pajak PBB-P2 pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000 menjadi sebesar Rp4.350.000.000;
 - f. Penambahan target pajak BPHTB sebesar Rp2.000.000.000 atau sebesar 40% dari target penerimaan pajak BPHTB pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000 menjadi sebesar Rp7.000.000.000; dan
 - g. Penambahan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp9.280.000.000 dari target APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp- menjadi Rp9.280.000.000.
2. Selanjutnya realisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah sampai pada bulan Juni 2024 baru mencapai sebesar Rp 3.020.576.347 atau 25,86% dari target penerimaan retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.680.000.000.
- Dengan melihat capaian realisasi penerimaan hasil retribusi daerah tersebut, Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD menurunkan target penerimaan retribusi daerah sebesar (Rp4.845.000.000) atau turun sebesar (41,48) % dari target penerimaan retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp6.835.000.000. Penyesuaian target penerimaan retribusi daerah sebagai berikut:
- a. Penyesuaian penambahan target penerimaan dari hasil retribusi jasa umum sebesar Rp405.000.000 atau sebesar 12, 13% dari target APBD sebesar Rp3.340.000.000 menjadi sebesar Rp3.745.000.000;
 - b. Penyesuaian penurunan retribusi jasa usaha sebesar (Rp750.000.000) atau sebesar (26,41%) target target APBD 2024 Rp2.840.000.000 menjadi sebesar Rp2.090.000.000; dan
 - c. Penurunan retribusi perizinan tertentu sebesar (Rp4.500.000.000) atau sebesar (81,82%) dari target APBD sebesar Rp5.500.000.000 menjadi Rp1.000.000.000;
3. Penyesuaian target penerimaan pada sektor Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan realisasi dari bagian laba atas bagi hasil atau deviden atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sultra yang mencapai Rp16.241.480.609 naik sebesar Rp3.241.480.609 atau 24,93% dari target APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.000.000.000;
4. Untuk sektor Lain-Lain PAD yang Sah, realisasi sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 sebesar Rp15.373.324.734 atau sebesar 49,83% dari target penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp30.850.000.000. Berdasarkan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penambahan target terhadap proyeksi penerimaan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran



2024 sebesar Rp12.295.300.000 atau sebesar 39,86% dari yang ditargetkan sebesar Rp30.850.000.000 menjadi sebesar Rp43.145.300 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyesuaian target pada lain-lain penerimaan PAD yang sah tersebut terjadi karena:

- a. Peningkatan target penerimaan Jasa Giro sebesar Rp300.000.000 atau 37,50% dari yang semula ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 Rp800.000.000 menjadi sebesar Rp1.100.000.000;
- b. Peningkatan target penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp1.000.000.000 atau 14,29% yang semula pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.000.000.000 naik menjadi sebesar Rp8.000.000.000;
- c. Penurunan target penerimaan yang bersumber dari Pendapatan atas denda pajak daerah sebesar (Rp6.200.000) yang semula target Rp50.000.000 menjadi sebesar Rp43.800.000;
- d. Peningkatan target pendapatan BLUD sebesar Rp11.000.000.000 atau sebesar 47,83% dari yang semula sebesar Rp23.000.000.000 naik menjadi sebesar Rp34.000.000.000; dan
- e. Peningkatan target penerimaan dari pendapatan dana kapitasi JKN sebesar Rp2.426.480.512 atau 35,33% dari Rp6.868.519.488 naik menjadi sebesar Rp9.295.000.000.

1.1.2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat meliputi antara lain: dana perimbangan, dana desa, dan dana insentif fiskal. Sedangkan untuk transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan daerah melalui pendapatan transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.127.198.563.634 yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.089.198.563.634 dan transfer antar-daerah sebesar Rp38.000.000.000. Sedangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan naik sebesar Rp202.309.761.882 atau sebesar 17,95% menjadi sebesar Rp1.329.508.325.516 yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1.329.508.325.516 dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp46.700.000.000. Untuk rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.127.198.563.634 sementara pada Kebijakan umum perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp202.309.761.882 atau sebesar 17,95% menjadi sebesar Rp1.329.508.325.516, yang terdiri dari Dana Perimbangan, dan Dana Desa dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dana perimbangan
Penerimaan dari Dana Perimbangan Kabupaten Bombana pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp978.562.675.634 naik sebesar Rp190.109.761.882 atau 19,43% pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran menjadi Rp1.168.672.437.516 yang terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum

Untuk pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari dana transfer



umum pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp787.918.801.634, pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp153.709.873.882 atau sebesar 19,51% menjadi sebesar Rp941.628.675.516 yang terdiri dari Dana bagi hasil sebesar Rp435.425.670.319 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp506.203.005.197.

2) Dana Transfer Khusus

Untuk pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari dana transfer khusus pada APBD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp190.643.874.000 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp36.399.888.000 atau sebesar 19,09% menjadi Rp227.043.762.000, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp72.514.205.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp154.129.557.000.

3) Dana Desa

Alokasi Dana Desa Kabupaten Bombana pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp3.500.000.000 atau sebesar 3,67% menjadi sebesar Rp98.927.677.000.

4) Insentif Fiskal

Alokasi dana Insentif Fiskal Kabupaten Bombana pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp15.208.211.000.

2. Transfer Antar Daerah

Untuk proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari transfer antar daerah naik sebesar Rp8.700.000.000 atau sebesar 22,89 dari target Rp38.000.000.000 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp46.700.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp5.000.000.000;
- b. Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp24.500.000.000;
- c. Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp7.200.000.000;
- d. Bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp500.000.000;
- e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp9.500.000.000.

1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi



oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, target pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar 13.197.221.707 atau sebesar 111,26% dari target sebesar Rp11.861.990.376 menjadi Rp25.059.212.083 dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan RPJMD.

Penentuan besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 telah dilakukan secara rasional dengan beberapa strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Menentukan besaran target PAD melalui analisis terhadap realisasi PAD Tahun 2022 maupun realisasi PAD tahun 2023 dan realisasi PAD tahun berjalan tahun 2024;
2. Menentukan besaran target PAD dengan cara menghitung estimasi potensi pendapatan pajak seperti perhitungan estimasi pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sarang burung walet, perhitungan estimasi Pendapatan yang bersumber dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian tanah masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di kabupaten Bombana dan pajak terhadap penjualan sarang burung walet;
3. Estimasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah antara lain perhitungan estimasi retribusi pasar berdasarkan jumlah pedagang yang melakukan kegiatan jual beli dipasar, retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi berdasarkan jumlah menara telekomunikasi yang ada di kabupaten Bombana, Potensi pemakaian kekayaan daerah yang bersumber dari sewa bangunan dan kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, estimasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan jumlah bangunan sarang burung walet dan potensi pendirian bangunan baru oleh perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Bombana, estimasi pendapatan melalui retribusi pelayanan kepelabuhanan berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan modal transportasi laut;



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Untuk itu pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selain undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bombana, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
- j. Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Bombana;
- k. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diawali dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran. Untuk tahun 2024, dokumen-dokumen tersebut disepakati dan ditetapkan dalam regulasi-regulasi sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2024;
- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 900.910/BK/151/IX/2023 Tahun 2023 -



- 170/002/BA/DPRD/VIII/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024;
- c. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 900.910/BK/152/IX/2023 Tahun 2023 - 170/003/BA/DPRD/VIII/2023 Tahun 2023 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Tahun Anggaran 2024;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - e. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - f. Peraturan Bupati Bombana Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2024;
 - g. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 900.1.12/8381/2024 Tahun 2024 170/06/MoU/DPRD/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - h. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 900.1.12/8382/2024 Tahun 2024 - 170/07/MoU/DPRD/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Tahun Anggaran 2024; dan
 - i. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penerimaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Bombana, yang merupakan salah satu komponen dari PAD sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan yang mengakibatkan masih rendahnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total penerimaan daerah di Kabupaten Bombana. Hal ini mengakibatkan masih sangat tergantungnya keuangan daerah kepada dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus mampu meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga harus tetap dimaksimalkan agar kemampuan kapasitas fiskal daerah dapat terus meningkat sehingga seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal pula. Upaya intensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan di Kabupaten Bombana antara lain:

- a. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial



- dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- Peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
 - Sosialisasi dengan memberikan penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi agar mereka sadar bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti mereka telah ikut andil dalam peningkatan pembangunan di daerahnya;
 - Memperkuat proses pemungutan melalui peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah dan penyusunan perda / perbu terkait pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui :

- Identifikasi wajib pajak baru/potensial secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dan biaya yang dibutuhkan sebagai upaya untuk menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerjasama melalui model kerjasama masyarakat, swasta, dan pemerintah (public-private partnership);
- Cara yang terakhir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak, agar pendapatan asli daerah tersebut dapat terus meningkat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari pusat.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang meliputi semua penerimaan uang yang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada Tahun Anggaran 2024 jumlah pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bombana ditargetkan senilai Rp1.439.654.318.208,00, dari jumlah tersebut telah terealisasi senilai Rp1.298.891.201.720,00 atau mencapai 90,22%. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	85.086.780.609,00	75.908.389.750,00	89,21
Pendapatan Transfer	1.329.508.325.516,00	1.213.079.653.467,00	91,24
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.059.212.083,00	9.903.158.503,00	39,52
TOTAL	1.439.654.318.208,00	1.298.891.201.720,00	90,22



Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk pendapatan asli daerah senilai 89,21%, dana perimbangan mencapai 91,24% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 39,52%. Gambaran tingkat capaian target dan komposisi realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tersebut diatas dapat dilihat pada grafik 3.1 di bawah ini:

Grafik 3.1 Komposisi Capaian Realiasi Tiap Komponen Pendapatan



Dari diagram grafik komposisi realisasi pendapatan daerah di atas untuk tahun 2024 terlihat bahwa pendapatan asli daerah menyumbang 6% dari total realisasi, pendapatan transfer (dana perimbangan) memberikan kontribusi sebesar 92%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi sebesar 2%. Jika dibandingkan realiasi pendapatan tahun 2023 pendapatan asli daerah mengalami penurunan senilai Rp18.554.434 atau sebesar 19,64% dari relaisai tahun 2023 senilai Rp94.462.652.184, untuk pendapatan transfer terdapat peningkatan kontribusi senilai Rp253.873.001.043 atau sebsasar 26,47% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp959.206.652.424, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak terapat resalisasi pendapatan tahun 2023 nanti pada tahun 2024 terdapat realisasi senilai Rp9.903.158.503.

3.1.2.1 Pendapatan Asli daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli daerah merupakan kemampuan keuangan dan potensi daerah, sehingga peningkatan besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat memengaruhi kualitas keuangan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp85.086.780.609,00 dan terealisasi senilai Rp75.908.389.750 atau mencapai 89,21% dari target. Realiasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan

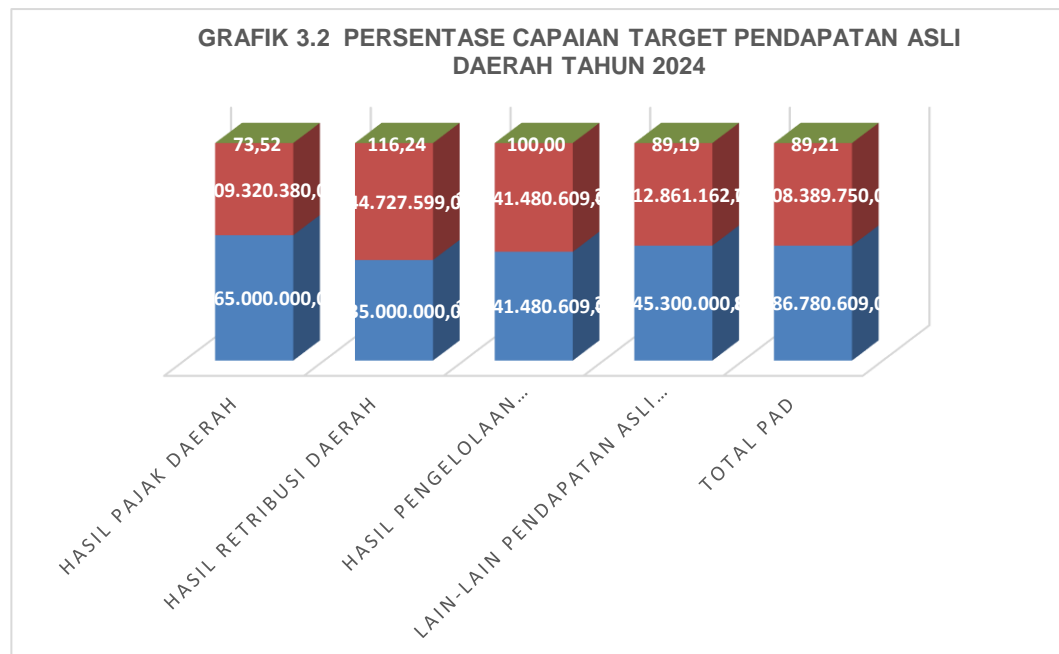


retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran tingkat capaian target dari komponen pendapatan asli daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2. dan grafik 3.3 berikut:

**Tabel 3.2 Rekapitulasi Target dan Realiasi PAD
Kabupaten Bombana Tahun 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Hasil Pajak Daerah	22.865.000.000,00	16.809.320.380,00	73,52
Hasil Retribusi Daerah	6.835.000.000,00	7.944.727.599,00	116,24
Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	16.241.480.609,00	16.241.480.609,00	100,00
Lain-lain pendapatan Asli daerah	39.145.300.000,00	34.912.861.162,00	89,19
Pendapatan Asli Daerah	85.086.780.609,00	75.908.389.750,00	89,21

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2024



Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa hanya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mencapai target 100%, sedangkan penerimaan retribusi daerah melampaui target yaitu capaian 116%, namun capaian realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut hanya mencapai 10,47% atau senilai Rp7.944.727.599,00 dari total realisasi PAD senilai Rp75.908.389.750,00. Untuk seluruh komponen pendapatan asli daerah rata-rata terealisasi 89,21%.

3.1.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun pendapatan transfer yang berasal dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, guna untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah



utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan transfer bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Pendapatan transfer adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari ketiga penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum sebagai penyumbang terbesar setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Bombana. Selanjutnya terdapat dana desa dan Insentif Fiskal. Sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

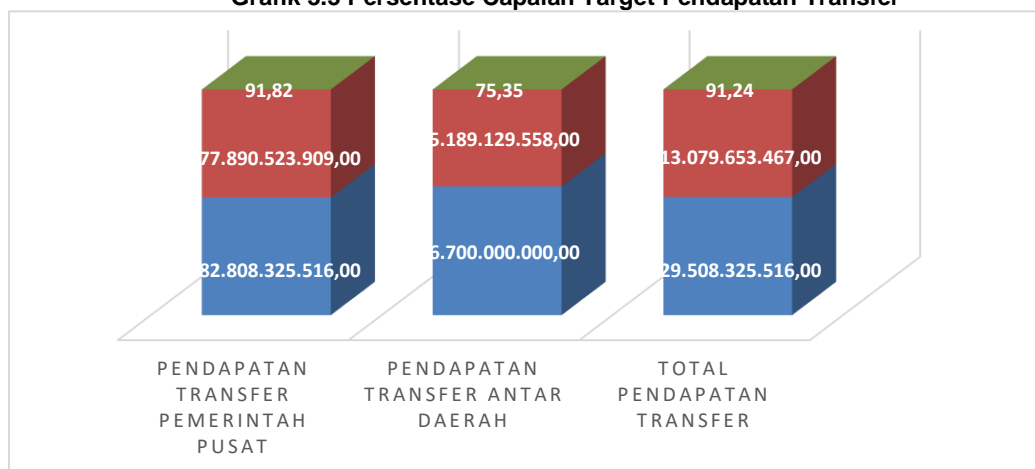
Pada tahun 2024 secara keseluruhan pendapatan transfer ditargetkan senilai Rp1.329.508.325.516 dan terealisasi senilai Rp1.213.079.653.467 atau mencapai 91,24%.

**Tabel 3.3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.282.808.325.516,00	1.177.890.523.909,00	91,82
Pendapatan Transfer antar Daerah	46.700.000.000,00	35.189.129.558,00	75,35
Total Pendapatan Transfer	1.329.508.325.516,00	1.213.079.653.467,00	91,24

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

Grafik 3.3 Persentase Capaian Target Pendapatan Transfer



Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa komponen penerimaan dana transfer pemerintah pusat mencapai 91,82%. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah hanya mencapai 75,35%. Secara keseluruhan pendapatan transfer mencapai 91,24% dari target yang telah ditetapkan.

3.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tahun 2024, pemerintah daerah Kabupaten Bombana mengalokasi pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN senilai Rp25.059.212.083,00 dan terealisasi senilai Rp9.903.158.503 atau mencapai 39,52% dari target.

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Peningkatan pelayanan dasar berupa pemenuhan standar pelayanan minimal, atau belanja dalam hal pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dimana pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial;
2. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah seperti termuat dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 yang terdiri dari:
 - a. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);



- b. Penurunan angka kemiskinan;
 - c. Pemulihan ekonomi sebagai akibat dari wabah Covid-19; dan
 - d. Peningkatan layanan publik.
3. Pemenuhan belanja mandatory atau Mandatory Spending yaitu belanja pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
 - b. Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
 - d. Pemenuhan Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
 - e. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD dimana untuk nilai APBD sampai dengan Rp1.000.000.000 setidaknya dialokasikan 1% untuk pengawasan sedangkan untuk nilai APBD diatas Rp1.000.000.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000.000 sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja;
 - f. Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 0,16% total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota; dan
 - g. Dukungan terhadap program penanganan dampak inflasi sebagai pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 dimana Pemerintah daerah mengalokasikan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana transfer Umum (tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan



pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD, perkiraan alokasi Belanja Daerah senilai Rp1.449.031.636.540,00 naik senilai Rp226.794.664.530,00 atau 18,56% dari alokasi belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.222.236.972.010,00 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp989.624.184.307,00, Belanja Modal senilai Rp279.409.337.574,00, Belanja tidak terduga senilai Rp4.534.687.659,00 dan Belanja transfer senilai Rp175.463.427.000,00.

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.449.031.636.540,00 terdiri dari belanja operasi Rp989.624.184.307,00, belanja modal senilai Rp279.409.337.574,00, belanja tak terduga senilai Rp4.534.659,00, dan belanja transfer bantuan keuangan Rp175.463.427.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 total belanja daerah dapat terealisasi senilai Rp1.303.046.573.543,50 atau mencapai 89,93% dari target.

Target dari realisasi dari masing-masing kelompok belanja dirinci pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3. 4 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Belanja Daerah APBD
Kabupaten Bombana Tahun 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Operasi	989.624.184.307,00	924.778.828.926,50	93,45
Belanja Modal	279.409.337.574,00	205.132.359.301,00	73,42
Belanja Tidak Terduga	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52
Transfer Bantuan Keuangan	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07
Total	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50	89,93

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas, belanja operasi mencapai 93,45%, belanja modal mencapai 73,42%, belanja tak terduga hanya mencapai 23,52% dan belanja tranfer bantuan keuangan mencapai 98,07%.

3.2.2.1 Belanja Operasi

Kelompok belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Pada tahun 2024 komponen belanja operasi yang terealisasi sangat rendah yaitu belanja subsidi hanya mencapai 88,35%. Sedangkan untuk belanja pegawai mencapai 94,58%, belanja barang dan jasa mencapai 91,71%, belanja hibah mencapai 98,39%, dan belanja bantuan social mencapai 96,67%. Secara keseluruhan belanja operasi ditargetkan senilai Rp989.624.184.307,00 dapat terealisasi senilai Rp924.778.828.926,50 atau mencapai 93,45% dari target.. Gambaran Tingkat capaian target dari komponen belanja operasi dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:



**Tabel 3. 5 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Belanja Operasi APBD
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja pegawai	438.806.935.686,00	415.021.806.513,50	94,58
Belanja barang dan jasa	481.516.537.399,00	441.591.050.797,00	91,71
Belanja bunga	-	-	-
Belanja subsidi	200.000.000,00	176.701.394,00	88,35
Belanja hibah'	69.079.711.222,00	67.968.970.222,00	98,39
Belanja bantuan sosial	21.000.000,00	20.300.000,00	96,67
Total	989.624.184.307,00	924.778.828.926,50	93,45

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk mengalokasikan pengeluaran belanja untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria antara lain:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset.

Kelompok belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Pada tahun 2024 ini terdapat realisasi belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah terealisasi 93,19 %, belanja modal peralatan dan mesin terealisasi 84,41%, belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar 70,85%, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 70,89%, dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 52,18%, serta belanja modal aset lainnya sebesar 56,38%. Dan secara keseluruhan belanja modal yang ditargetkan senilai Rp279.409.337.574,00 dapat terealisasi Rp205.132.359.301,00 atau mencapai 73,42%. Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja modal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

**Tabel 3. 6 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Belanja Modal APBD
Kabupaten Bombana Tahun 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	1.742.580.000,00	1.623.988.996,00	93,19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.265.750.297,00	46.649.909.911,00	84,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.668.465.212,00	52.190.485.037,00	70,85
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.054.363.065,00	102.117.940.857,00	70,89
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.084.089.000,00	1.087.528.800,00	52,18
Belanja Modal Aset Lainnya	2.594.090.000,00	1.462.505.700,00	56,38
Total	279.409.337.574,00	205.132.359.301,00	73,42

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2024



3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024 ini terdapat realisasi belanja tidak terduga mencapai 23,52%, dimana ditergetkan senilai Rp4.534.687.659,00 dengan realisasi senilai Rp1.066.690.000,00.

3.2.2.4 Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja transfer dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024 belanja transfer pemerintah daerah dialokasikan anggaran senilai Rp175.463.427.000,00. Realisasi belanja transfer bantuan keuangan mencapai 98,07%, dari target senilai Rp175.463.427.000,00 dengan realisasi senilai Rp172.068.695.316,00.

3.2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Pembiayaan Daerah dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

3.2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Penerimaan Pembiayaan, dalam menetapkan besaran alokasi anggaran yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, didalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menyesuaikan dengan besaran SiLPA hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

3.2.3.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan senilai Rp9.377.318.332,00 dan terealisasi senilai Rp9.377.318.332,99 atau mencapai target 100%. Berdasarkan realisasi tersebut maka terdapat surplus pada pembiayaan daerah yang digunakan untuk menutup defisit pada belanja daerah.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:



**Tabel 3. 7 Target Dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100 Tabel
Penerimaan Pinjaman Daerah			-
Penerimaan Kembali investasi non permanen			
Total Penerimaan Pembiayaan	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100 Tabel
Pengeluaran Pembiayaan			-
Penyertaan Modal			-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			-
Total Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

3.3 Realisasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*).

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah,

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran dan realisasi yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

3.3.1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Dalam Upaya peningkatan pelayanan bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengalokasi anggaran fungsi pendidikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yaitu minimal 20% dari APBD berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk Fungsi Pendidikan Kabupaten Bombana senilai Rp315.102.805.187,00 atau sebesar 21,75% dari total belanja daerah sebesar Rp1.449.031.636.540,00. Terhadap alokasi anggaran fungsi Pendidikan tersebut, telah terealisasi senilai Rp292.937.429.892 atau 22,48% dari total realisasi belanja daerah senilai Rp1.303.046.573.543,50, alokasi anggaran belanja fungsi Pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran dan Realisasi Fungsi Pendidikan
Tahun 2024

No	Komponen Perhitungan	Target APBD- Perubahan 2024	Realisasi Belanja
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	291.906.789.309,00	273.305.348.744,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Komponen Perhitungan	Target APBD- Perubahan 2024	Realisasi Belanja
	1) Belanja Operasi:	250.015.660.819,00	244.653.364.883,00
	a. belanja pegawai;	212.960.772.419	208.874.105.883
	b. belanja barang dan jasa;	36.754.888.400	35.500.000.000
	c. belanja hibah;	300.000.000	279.259.000,00
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	41.891.128.490	28.651.983.861,00
b.	Urusan Bidang Kebudayaan:	2.977.515.650,00	1.526.394.372,00
	1) Belanja Operasi:	2.530.622.250,00	1.471.422.556,00
	a. belanja pegawai;		
	b. belanja barang dan jasa;	2.530.622.250,00	1.471.422.556,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	446.893.400,00	54.971.816,00
c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	7.380.031.289,00	6.650.341.943,00
	1) Belanja Operasi:	6.005.896.589,00	5.370.341.943,00
	a. belanja pegawai;	2.378.061.089,00	2.136.307.840,00
	b. belanja barang dan jasa;	3.627.835.500,00	3.234.388.503,00
	c. belanja hibah;		
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	1.374.134.700,00	1.279.645.600,00
d.	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	12.838.468.939,00	11.455.344.833,00
	1) Belanja Operasi:	9.825.396.139,00	9.443.419.533,00
	a. belanja pegawai;	3.091.890.239,00	2.909.817.156,00
	b. belanja barang dan jasa;	3.933.505.900,00	3.733.602.377,00
	c. belanja hibah;	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal;	3.013.072.800,00	2.011.925.300,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	315.102.805.187,00	292.937.429.892,00
3.	Total Belanja Daerah	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50
4.	Rasio Anggaran Pendidikan Minimal 20% (2:3) x 100%	21,75	22,48

3.3.2. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Alokasi anggaran belanja kesehatan pemerintah daerah, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam aturan tersebut tidak mengatur secara khusus besaran persentase alokasi anggaran



fungsi kesehatan di daerah, namun pelaksanaan fungsi Kesehatan di daerah tetap ditekankan untuk melaksanakan belanja-belanja fungsi Kesehatan mengacu pada program kegiatan fungsi Kesehatan yang beralaku secara nasional. Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana masih tetap mengalokasikan anggaran Fungsi Kesehatan senilai Rp231.311.706.897,00 atau 19,81% dari total belanja daerah diluar gaji yaitu senilai Rp1.167.748.884.413,60. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan senilai Rp213.794.401.890,50, atau 20,88% dari total realisasi belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp1.024.083.750.085,50 dapat dilihat tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran dan Realisasi Fungsi Kesehatan
Tahun 2024

No	Komponen Perhitungan		Target APBD- Perubahan 2024	Realisasi
1.	a.	Urusan Bidang Kesehatan:	215.068.076.610,00	198.854.719.244,50
		1) Belanja Operasi:	194.214.288.394,00	180.524.170.935,50
		a. belanja pegawai;	81.636.169.501,00	77.687.531.884,50
		b. belanja barang dan jasa;	112.488.118.893,00	102.836.639.051,00
		c. belanja hibah;	90.000.000,00	0,00
		d. belanja bantuan sosial.		
		2) Belanja Modal;	20.853.788.216,00	18.330.548.309,00
	b.	Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	16.243.630.287,00	14.939.682.646,00
		1) Belanja Operasi:	14.984.573.387,00	13.683.456.746,00
		a. belanja pegawai;	5.243.419.287,00	4.929.265.582,00
		b. belanja barang dan jasa;	9.741.154.100,00	8.754.191.164,00
		c. belanja hibah;	0,00	0,00
		d. belanja bantuan sosial.		
		2) Belanja Modal;	1.259.056.900,00	1.256.225.900,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		231.311.706.897,00	213.794.401.890,50
3.	Total Belanja Daerah		1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50
4.	Gaji ASN		281.282.752.126,40	278.962.823.458,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.167.748.884.413,60	1.024.083.750.085,50
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		19,81	20,88

3.3.3. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
- (2) Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama



5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau paling lama Tahun Anggaran 2027.

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan Pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada Pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun 2024 telah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik senilai Rp365.404.291.427 atau 28,69% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa senilai Rp1.273.568.209.540. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan senilai Rp286.857.935.637 atau 25,36% dari total realisasi belanja APBD senilai Rp1.130.977.878.227,50.

Dari alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut di atas belum memenuhi capaian 40% dari target yang telah ditetapkan sesuai perundang-undangan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bombana di tahun-tahun selanjutnya tetap berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sesuai perintah perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dapat dilihat tabel 3.10 dan tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.10				
Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
Tahun 2024				
No	Komponen Perhitungan			APBD-Perubahan 2024
1.	Total Belanja Daerah			1.449.031.636.540,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a.	belanja bagi hasil		0,00
	b.	belanja bantuan keuangan		175.463.427.000,00
	Jumlah (a + b)			175.463.427.000,00
3.	Selisih (1 - 2)			1.273.568.209.540,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayan Publik (40% x Selisih)			509.427.283.816,00

Tabel 3.11
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
Tahun 2024

No	Komponen Perhitungan		APBD-Perubahan 2024	Realisasi
1.	a)	Belanja Modal :	279.409.337.574,00	205.132.359.301,00
	1)	Tanah	1.742.580.000,00	1.623.988.996,00
	2)	Peralatan dan Mesin	55.265.750.297,00	46.649.909.911,00
	3)	Bangunan dan Gedung	73.668.465.212,00	52.190.485.037,00
	4)	Jalan, Jaringan dan Irigasi	144.054.363.065,00	102.117.940.857,00



No	Komponen Perhitungan	APBD-Perubahan 2024	Realisasi
	5) Aset Tetap Lainnya	2.084.089.000,00	1.087.528.800,00
	6) Aset Lainnya	2.594.090.000,00	1.462.505.700,00
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan		
	c) Belanja Pemeliharaan	16.894.242.631,00	13.736.306.114,00
2.	a) Belanja Hibah	69.079.711.222,00	67.968.970.222,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	21.000.000,00	20.300.000,00
3.	Total Belanja Infrastruktur Daerah (1a+1b+1c) + (2a+2b)	365.404.291.427,00	286.857.935.637,00
4.	Total Belanja APBD	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50
5.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00
6.	Total Belanja APBD (4 - 5)	1.273.568.209.540,00	1.130.977.878.227,50
7.	Ratio Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur minimal 40% (3:6x100)	28,69	25,36

3.3.4. Alokasi Anggaran Belanja Belanja Pegawai.

Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa:

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- (2) Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30% (tiga puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau paling lambat Tahun Anggaran 2027.

Alokasi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 diluar tunjangan guru, dialokasikan senilai Rp371.514.846.286 atau 25,64% dari total belanja APBD senilai Rp1.449.031.636.540,00. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan senilai Rp348.578.845.553,50 atau 26,75% dari total realisasi belanja Rp1.303.046.573.543,50 atas alokasi belanja pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12			
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai			
Tahun 2024			
No.	Uraian	APBD-Perubahan TA 2024	Realisasi
A.	BELANJA PEGAWAI	438.806.935.686,00	415.021.806.513,50
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	281.282.752.126,40	278.962.823.458,00



	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.068.639.924,60	39.261.833.408,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.727.873.478,00	75.934.968.685,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.315.948.157,00	10.087.741.189,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	63.095.000,00	0
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	492.400.000,00
	Belanja Pegawai BOS	6.044.237.000,00	0
	Belanja Pegawai BLUD	9.793.510.000,00	10.282.039.773,50
B.	BELANJA TUNJANGAN GURU YG DIALOKASIKAN MELALUI TKD	67.292.089.400,00	66.442.960.960,00
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	57.572.720.000,00	57179528730
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.120.369.400,00	6843557230
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.599.000.000,00	2419875000
C	ALOKASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (A - B)	371.514.846.286,00	348.578.845.553,50
D	TOTAL BELANJA DAERAH	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50
E	Rasio Anggaran Belanja Pegawai Maksimal 30% (C : D) x 100%	25,64	26,75

3.3.5. Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2024 mengalokasikan anggaran alokasi dana desa senilai Rp98.438.427.000,00 atau 10,45% dari pendapatan transfer dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp941.628.675.516,00. Terhadap alokasi dana desa tersebut telah direalisasikan senilai 98.438.427.000,00 atau 11,21% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus senilai Rp877.968.736.211,00. Alokasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yaitu pada Pasal 96 ayat (2) disebutkan bahwa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa tersebut dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13			
Alokasi Dana Desa (Mandatory Spending)			
Tahun 2024			
No	Komponen Perhitungan	APBD-Perubahan 2024	Realisasi
1.	Belanja Transfer/Bantuan Keuangan	98.438.427.000,00	98.438.427.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.438.427.000,00	98.438.427.000,00
2.	Dana Perimbangan	1.168.672.437.516,00	1.064.243.885.909,00
3.	Dana Transfer Khusus (DAK)	227.043.762.000,00	186.275.149.698,00



4.	Dana Perimbangan (2 - 3)	941.628.675.516,00	877.968.736.211,00
5.	Rasio Alokasi Anggaran Dana Desa Minimal = 10% (1:4) x 100%	10,45	11,21

3.3.6. Alokasi Anggaran Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan. Untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan klasifikasi:

- sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
- dias Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- dias Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat. Pemerintah Kabupaten Bombana pada TA 2024 mengalokasikan belanja pengawasan diluar gaji dan tunjangan ASN SKPD Inspektorat senilai Rp10.504.754.420,00 atau 0,72% dari total belanja APBD senilai Rp1.449.031.636.540,00, terhadap alokasi anggaran pengawasan tersebut telah direalisasikan senilai Rp9.787.889.373,00 atau 0,75% dari total realisasi belanja APBD senilai Rp1.303.046.573.543,50. Adapun uraian belanja pengawasan dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14			
Alokasi Anggaran Belanja Pengawasan (<i>Mandatory Spending</i>)			
Tahun 2024			
No	Uraian Belanja	APBD-Perubahan 2024	Realisasi
1.	Urusan bidang Pengawasan:	13.889.714.702,00	13.103.160.677,00
	1) Belanja Operasi:	12.915.922.402,00	12.145.646.577,00
	a. belanja pegawai;	4.744.736.302,00	4.355.767.117,00
	b. belanja barang dan jasa;	8.171.186.100,00	7.789.879.460,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal Pengadaan Sarana & Prsarana Pengawasan	973.792.300,00	957.514.100,00
2.	Total Anggaran Belanja Pengawasan (1 + 2)	13.889.714.702,00	13.103.160.677,00
3.	Total Belanja Daerah	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50



4.	Gaji ASN SKPD Inspektorat	3.384.960.282,00	3.315.271.304,00
5.	Alokasi Anggaran Belanja Pengawasan (2 - 4)	10.504.754.420,00	9.787.889.373,00
6.	Rasio Anggaran Belanja Pengawasan = 0,75% (5:3) x 100%	0,72	0,75

3.3.7. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimkasud paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD penunjang bidang pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Kabupaten Bombana TA 2024 mengalokasikan belanja Pendidikan dan pelatihan bagi ASN senilai Rp2.609.250.000,00 atau 0,18% dari total belanja diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan SKPD BKPSDM senilai Rp1.446.425.295.644,00. Dari alokasi anggaran tersebut telah direalisasikan senilai Rp2.500.490.345,00 atau 0,19% dari total belanja APBD diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan SKPD BKPSDM senilai Rp1.300.677.635.778,50, alokasi belanja tersebut dapat dilihat tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15				
Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan & Pelatihan ASN				
Tahun 2024				
No	Komponen Perhitungan		APBD-Perubahan 2024	Realisasi
1.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan:		2.609.250.000,00	2.500.490.345,00
	a.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.236.000.000,00	2.127.264.365,00
	b.	Belanja Diklat Kepemimpinan	373.250.000,00	373.225.980,00
2.	Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan dan Pelatihan (a+b)		2.609.250.000,00	2.500.490.345,00
3.	Total Belanja Daerah		1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50
4.	Belanja Pegawai SKPD BKPSDM		2.373.080.896,00	2.164.371.265,00
5.	Belanja Pemeliharaan SKPD BKPSDM		233.260.000,00	204.566.500,00
6.	Total Belanja Daerah (3 - 4 - 5)		1.446.425.295.644,00	1.300.677.635.778,50
7.	Rasio Anggaran Belanja Pendidikan dan Pelatihan = 0,16% (2:6) x 100%		0,18	0,19

3.4 Realisasi Belanja Program Kegiatan Penanganan *Stunting* dan *Inflasi*

Berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. Percepatan Penurunan *Sfunting* adalah setiap Upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen,



holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan antara lain:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Gambaran tingkat capaian belanja program dan kegiatan dana *stunting* dan *Inflasi* dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.16
Daftar Program dan Kegiatan Penurunan Prevalensi Stunting
Tahun 2024

No.	Nama Program Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	445.326.800,00	330.724.000,00	74,27
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	244.722.500,00	234.282.900,00	95,73
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.331.739.000,00	3.821.315.760,00	60,35
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200.214.000,00	200.064.000,00	99,93
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	264.548.000,00	229.299.500,00	86,68
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	249.570.000,00	219.040.000,00	87,77
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	350.545.000,00	317.396.400,00	90,54
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	847.193.000,00	842.492.000,00	99,45



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Program Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	%
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	330.000.000,00	322.370.000,00	97,69
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	150.000.000,00	103.835.000,00	69,22
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	374.800.000,00	369.600.000,00	98,61
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	168.113.000,00	164.353.340,00	97,76
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	989.100.000,00	814.461.700,00	82,34
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, warga dan pemerintah (percepatan Penurunan Stunting)	1.342.329.400,00	1.237.927.170,00	92,22



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Program Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	%
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Kesejahteraan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	306.070.000,00	227.878.100,00	74,45
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Kesejahteraan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	84.950.000,00	83.765.000,00	98,61
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	343.492.000,00	314.282.451,00	91,50
18	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	300.000.000,00	281.827.400,00	93,94
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	75.508.300,00	74.290.089,00	98,39
20	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	578.423.900,00	535.625.360,00	92,60
21	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	60.210.900,00	59.587.004,00	98,96
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.398.000,00	26.398.000,00	100,00
23	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengelolaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	166.209.000,00	166.209.000,00	100,00
TOTAL				14.229.462.800,00	10.977.024.174,00	77,14



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bombana menganut kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Bombana.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga OPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

- a. Entitas akuntansi adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seluruh pemerintah kabupaten yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing OPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan OPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah pejabat pengelola keuangan daerah (Badan Keuangan Daerah). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana mengacu pada delapan prinsip. Kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Perolehan;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Formalitas;
- e. Prinsip Periodisasi;
- f. Prinsip Konsistensi;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari kedelapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bombana adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Periode akuntansi yang digunakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Bombana menerapkan nilai perolehan karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Bombana dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD, Pemerintah Kabupaten Bombana selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

d. Prinsip Subtansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksud untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

e. Prinsip Periodisasi (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bombana dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran, Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulanan untuk laporan realisasi anggaran (LRA) dan penjabarannya, semester untuk LRA, laporan operasional, neraca, arus kas (PPKD), tahunan untuk LRA, laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas (PPKD) dan CaLK.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2019 tidak ada perubahan metode akuntansi.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bombana menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bombana. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan –LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pendapatan yang telah diterima bendahara penerimaan namun belum di setorkan ke RKUD pada akhir periode yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Bombana, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Bombana yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui saat diterima pada rekening kas Bendahara Umum Daerah, kecuali Pendapatan BLUD diakui saat pendapatan BLUD dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan Pendapatan LRA yang diterima oleh Sekolah/Satuan Pendidikan, Puskesmas dan Transfer Dana Desa yang tidak melalui RKUD, diakui pada saat dilakukan Pengesahan oleh BUD/Kuasa BUD dengan dokumen Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan; atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
- c) Pendapatan direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih misalnya:

- a) Timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi parkir.
- b) Timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak reklame, retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Bombana di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Bombana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bombana. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban dan
- b) terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Bombana, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Saat terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Bombana untuk pembayaran gaji pegawai membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah.

Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah saat terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu, contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh pemerintah Kabupaten Bombana, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan pemerintah Kabupaten Bombana misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran pemerintah Kabupaten Bombana seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban uang pengeluaran dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan atas transfer masuk (LRA) dilakukan pada saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah sedangkan pendapatan transfer (LO) pengakuan pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*). Pendapatan transfer dapat juga diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan transfer keluar (LRA) dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar dan beban transfer (LO) diakui pada saat beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer juga dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lain.

Transfer masuk (LRA) dinilai berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintahan Kabupaten Bombana, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Bombana terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintahan Kabupaten Bombana, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening Kas umum daerah antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bombana, pembayaran kembali pada pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat realisasi atau dapat direalisasikan sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto* dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas *bruto*.

Akuntansi pembiayaan *netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan *netto*.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bombana sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh pemerintah Kabupaten Bombana, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya *non* keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang adalah hak pemerintah Kabupaten Bombana untuk menerima pembayaran atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan operasional maupun *non* operasional yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Bombana, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Bombana atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Bombana tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak terwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai normal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; dan
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. *Asset* moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.6. Kewajiban Akuntansi Kewajiban Dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Kabupaten Bombana.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat kategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman. Utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b) Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan:
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban dapat timbul dari:

1. transaksi dengan pertukaran (*exchange transaction*);
2. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*) sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah kabupaten bombana menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah apabila memenuhi kriteria berikut : (1) badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan saldo ekuitas di neraca berarti saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Bombana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini bpkad selaku bud) entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara *organisatoris* berada dibawahnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Entitas akuntansi dilingkungan pemerintah Kabupaten Bombana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Bombana. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas per laporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah Kabupaten Bombana sebagai entitas laporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD. Prosedur konsolidasian dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K dinas aset dieliminasi menjadi R/K aset.

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bombana antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan metode Periodik/fisik kecuali obat-obatan menggunakan metode Perpetual, sedangkan metode penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO* atau MPKP (masuk pertama keluar pertama) kecuali penilaian persediaan obat, tanaman, hewan atau lainnya menggunakan metode *FIFO* dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadarluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) meliputi persediaan yang nilainya satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi serta persediaan sejenisnya.

Pengakuan persediaan secara umum adalah:

- 1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan dapat diverifikasi;
- 2) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 3) Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur/kuitansi atau Berita Acara Srah Terima (BAST).
- 4) Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengakuan keluarnya persediaan antara lain:

- 1) Persediaan selain obat-obatan menggunakan pendekatan beban yaitu diakui sebagai beban persediaan pada saat pembelian/pengadaan barang persediaan, pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Persediaan obat-obatan di Puskesmas dan BLUD RSUD diakui sebagai beban pada saat diterbitkan resep obat atau dokumen lain yang dipersamakan dengan resep obat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Beban persediaan hibah/bantuan/barang diserahkan kepada Masyarakat/barang diserahkan kepada kelompok Masyarakat/barang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain, hadiah/cendera mata diakui pada saat diserahkan atau ditandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
- 4) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki kegiatan swakelola dibebankan ke suatu Akun Aset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), tidak dimasukan sebagai persediaan.

Pengukuran dan Penyajian Persediaan

- 1) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya angkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan sebagai perolehan persediaan. Sedangkan potongan harga, rabat, dan potongan lainnya mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- 4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya uraian penyisihan piutang tak tertagih dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun Anggaran 2024

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	lancar	0,50 %
2	Kurang lancar	10,00 %
3	Diragukan	50,00 %
4	Macet	100,00 %

c. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh asset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonomisnya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah memperoleh merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Untuk nilai jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel 4.2 dan tabel 4.3. dibawah ini.

1. Nilai satuan minimum kapitalitas aset tetap atas perolehan awal per unit tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap saat Perolehan Awal

No.	Uraian	Batas Nilai Kapitalisasi Harga Perolehan Awal (Rp)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan mesin	1.000.000/unit
3	Gedung dan bangunan	Seluruhnya
4	Jalan Irigasi dan jaringan Yang Terdiri Atas	Seluruhnya
5	Aset Tetap Lainnya :	
	1)Buku Perpustakaan	300.000/unit
	2) Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	300.000/unit
	3) Hewan/Ternak Dan Tumbuhan;	
	- Hewan	500.000/ekor
	- Ternak	500.000/ekor
	- Tumbuhan Pohon dan tanaman hias	500.000/pohom
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pengeluaran setelah perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas Pengeluaran Setelah Perolehan

No.	Uraian	Batas Nilai Kapitalisasi Setelah Perolehan Awal (Rp)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan mesin :	
	1) Alat-alat besar darat	50.000.000
	2) Alat-alat besar apung	20.000.000
	3) Alat-alat bantu	1.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Batas Milai Kapitalisasi Setelah Perolehan Awal (Rp)
	4) Alat Angkutan Roda dua dan roda tiga	5.000.000
	5) Alat Angkutan Roda empat dst.	20.000.000
	6) Alat-alat Angkut Berat Tidak Bermotor	1.000.000
	7) Alat Angkut apung bermotor	10.000.000
	8) Alat angkut apung tak bermotor	5.000.000
	9) Alat bengkel bermesin	1.000.000
	10) Alat bengkel tak bermesin	1.000.000
	11) Alat Ukur	1.000.000
	12) Alat pengelohan	1.000.000
	13) Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian	1.000.000
	14) Alat Kantor	1.000.000
	15) Alat Rumah Tangga	1.000.000
	16) Peralatan komputer	1.000.000
	17) Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	1.000.000
	18) Alat studio	1.000.000
	19) Alat komunikasi	1.000.000
	20) Alat pemancar	1.000.000
	21) Alat kedokteran	1.000.000
	22) Alat kesehatan	1.000.000
	23) Unit-unit laboratorium	1.000.000
	24) Alat peraga/praktek sekolah	-
	25) Unit alat laboratorium kimia nuklir	50.000.000
	26) Alat keamanan dan perlindungan	1.000.000
	27) Rambu-rambu	5.000.000
	28) Rambu-rambu lalu lintas udara	5.000.000
3	Gedung dan bangunan:	
	1) Banguna Gedung tempat kerja	50.000.000
	2) Bangunan Gedung tempat tinggal	50.000.000
	3) Bangunan menara	50.000.000
	4) Bangunan bersejarah	50.000.000
	5) Tugu peringatan	50.000.000
	6) Candi	50.000.000
	7) Monumen	50.000.000
	8) Tugu titik kontrol	50.000.000
4	Jalan, Irigasi dan jaringan:	
	1) Jalan	100.000.000
	2) Jembatan	100.000.000
	3) Bangunan air irigasi	100.000.000
	4) Bangunan air pasang surut	100.000.000
	5) Bangunan air rawa	100.000.000
	6) Bangunan pengaman Sungai dan penganggulangan bencana alam	100.000.000
	7) Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	100.000.000
	8) Bangunan air bersih/baku	100.000.000
	9) Bangunan air kotor	100.000.000
	10) Bangunan air	100.000.000
	11) Instalasi air minum/air bersih	100.000.000
	12) Instalasi air kotor	100.000.000
	13) Instalasi pengolahan sampah	100.000.000
	14) Instalasi pengolahan bahan bangunan	100.000.000
	15) Instalasi pembangkit listrik	100.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Batas Milai Kapitalisasi Setelah Perolehan Awal (Rp)
16)	Instalasi gardu listrik	100.000.000
17)	Instalasi pertahanan	100.000.000
18)	Instalasi gas	100.000.000
19)	Instalasi pengaman	100.000.000
20)	Jaringan air minum	100.000.000
21)	Jaringan listrik	100.000.000
22)	Jaringan telepon	100.000.000
23)	Jaringan gas	100.000.000

d. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tersebut juga semakin menurun.

Penyusutan aset tetap tahun anggaran 2024 masih berpedoman pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bombana.

Metode penyusutan adalah penyusunan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bombana adalah metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap pada pemerintah Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1 . 3	ASET TETAP	
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	
1 . 3 . 2 . 01	Alat-Alat Besar Darat	10
1 . 3 . 2 . 02	Alat-Alat Besar Apung	8
1 . 3 . 2 . 03	Alat-alat Bantu	7
1 . 3 . 2 . 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 . 3 . 2 . 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1 . 3 . 2 . 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 . 3 . 2 . 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 . 3 . 2 . 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 . 3 . 2 . 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1 . 3 . 2 . 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening	Nama Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.11	Alat Ukur	5
1.3.2.12	Alat Pengolahan	4
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1.3.2.14	Alat Kantor	5
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.16	Komputer	4
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.18	Alat Studio	5
1.3.2.19	Alat Komunikasi	5
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.21	Alat Kedokteran	5
1.3.2.22	Alat Kesehatan	5
1.3.2.23	Unit-Unit Laboratorium	8
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1.3.2.31	Senjata Api	10
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.33	Amunisi	
1.3.2.34	Senjata Sinar	
1.3.2.35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	40
1.3.3.04	Bangunan Bersejarah	50
1.3.3.05	Tugu Peringatan	50
1.3.3.06	Candi	50
1.3.3.07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1.3.3.08	Tugu Peringatan	50
1.3.3.09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1.3.3.10	Rambu-Rambu	50



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening	Nama Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.3.4.01	Jalan	10
1.3.4.02	Jembatan	50
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1.3.4.05	Bangunan Air Rawa	25
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.10	Bangunan Air	40
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.16	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.18	Instalasi Gas	30
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.20	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.21	Jaringan Listrik	40
1.3.4.22	Jaringan Telepon	20
1.3.4.23	Jaringan Gas	30



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan antara Laporan Keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dengan Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Bombana selaku entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah, Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan, serta laporan operasional menyajikan pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus defisit.

5.1.1 Pendapatan – LRA

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan – LRA	1.298.891.201.720,00	1.053.669.304.608,00	245.221.897.112,00	23,27
Jumlah	1.298.891.201.720,00	1.053.669.304.608,00	245.221.897.112,00	23,27

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 tercatat senilai **Rp1.298.891.201.720,00** atau mencapai **90,22%** dari target APBD TA 2024 senilai **Rp1.439.654.318.208,00**. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai **Rp75.908.389.750,00**, dan Pendapatan Transfer senilai **Rp1.213.079.653.467,00**, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah **Rp9.903.158.503,00**.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan **Rp245.221.897.112,00** atau **23,27%** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat senilai **Rp1.053.669.304.608,00**. Pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:



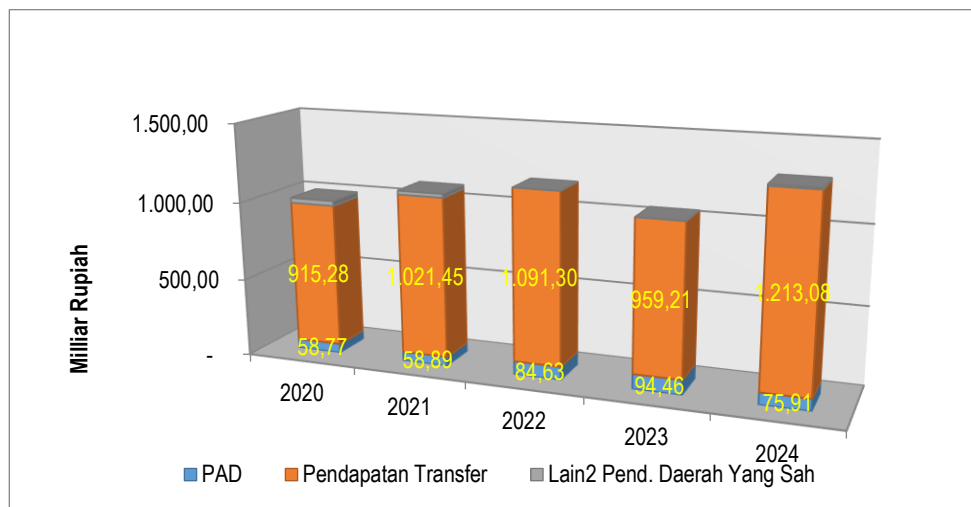
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.1
Pendapatan – LRA

Uraian	2024		2023	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN	1.439.654.318.208,00	1.298.891.201.720,00	90,22	1.053.669.304.608,00
Pendapatan Asli Daerah	85.086.780.609,00	75.908.389.750,00	89,21	94.462.652.184,00
Pendapatan Transfer	1.329.508.325.516,00	1.213.079.653.467,00	91,24	959.206.652.424,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	25.059.212.083,00	9.903.158.503,00	39,52	0,00

Secara umum realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bombana mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan senilai **Rp245.221.897.112,00** atau **23,27%**. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan kelompok pendapatan pada periode 2020-2024 dilihat pada grafik 5.1.

Grafik 5.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Bombana Tahun 2020-2024



Dibandingkan dengan realisasi di Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp1.053.669.304.608,00**, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp245.221.897.112,00**, yang terjadi pada kelompok Pendapatan Transfer yang mengalami kenaikan senilai **Rp253.873.001.043,00** utamanya pada jenis transfer Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil. Kemudian pada kelompok realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 senilai **Rp75.908.389.750,00** terjadi penurunan senilai (**Rp18.554.262.434,00**) dibanding realisasi Tahun 2023 senilai **Rp94.462.652.184,00**

Rincian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya masing-masing dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.2
Pendapatan berdasarkan kelompok dan jenisnya – LRA

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN	1.439.654.318.208,00	1.298.891.201.720,00	90,22	1.053.669.304.608,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.086.780.609,00	75.908.389.750,00	89,21	94.462.652.184,00
Pendapatan Pajak Daerah	22.865.000.000,00	16.809.320.380,00	73,52	16.741.628.704,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.835.000.000,00	7.944.727.599,00	116,24	6.460.644.617,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	16.241.480.609,00	16.241.480.609,00	100,00	12.863.598.813,00
Lain-lain PAD yang sah	39.145.300.000,00	34.912.861.162,00	89,19	58.396.780.050,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.329.508.325.516,00	1.213.079.653.467,00	91,24	959.206.652.424,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.282.808.325.516,00	1.177.890.523.909,00	91,82	904.931.884.533,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	435.425.670.319,00	370.038.827.211,00	84,98	162.743.083.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	506.203.005.197,00	507.929.909.000,00	100,34	469.181.210.648,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.914.205.000,00	71.548.170.798,00	98,13	57.368.240.596,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	154.129.557.000,00	114.726.978.900,00	74,44	117.863.059.289,00
Dana Desa	98.927.677.000,00	98.438.427.000,00	99,51	97.776.291.000,00
Insentif Fiskal	15.208.211.000,00	15.208.211.000,00	100,00	-
Transfer Antar Daerah	46.700.000.000,00	35.189.129.558,00	75,35	54.274.767.891,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.700.000.000,00	35.189.129.558,00	75,35	39.274.767.891,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	15.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.059.212.083,00	9.903.158.503,00	39,52	-

Dari tabel diatas tergambar bahwa realisasi pendapatan hanya mencapai **90,22%** itu disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai **89,21%**, Pendapatan Transfer mencapai **91,24%** dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya mencapai **39,52%** realisasi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Asli Daerah	75.908.389.750,00	94.462.652.184,00	(18.554.262.434,00)	(19,64)
Jumlah	75.908.389.750,00	94.462.652.184,00	(18.554.262.434,00)	(19,64)



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp75.908.389.750,00** atau **89,21%** dari anggaran senilai **Rp85.086.780.609,00**. Realisasi tersebut turun senilai **(Rp18.554.262.434,00)** atau **(19,64%)** dibandingkan dengan realisasi TA 2023 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat senilai **Rp94.462.652.184,00**.

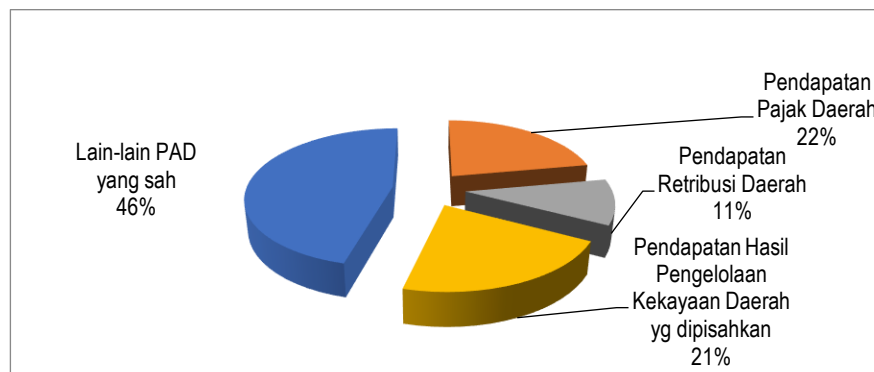
Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pendapatan Asli Daerah – LRA

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.086.780.609,00	75.908.389.750,00	89,21	94.462.652.184,00
Pendapatan Pajak Daerah	22.865.000.000,00	16.809.320.380,00	73,52	16.741.628.704,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.835.000.000,00	7.944.727.599,00	116,24	6.460.644.617,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	16.241.480.609,00	16.241.480.609,00	100,00	12.863.598.813,00
Lain-lain PAD yang sah	39.145.300.000,00	34.912.861.162,00	89,19	58.396.780.050,00

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan realisasinya pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik 5.2.

Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Bombana TA. 2024



5.1.1.2 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Pajak Daerah	16.809.320.380,00	16.741.628.704,00	67.691.676,00	0,40
Jumlah	16.809.320.380,00	16.741.628.704,00	67.691.676,00	0,40



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan pajak daerah target pada tahun 2024 dianggarkan senilai **Rp22.865.000.000,00** sampai dengan per 31 Desember terealisasi senilai **Rp16.809.320.380,00** atau **73,52%**. Dibanding dengan Tahun 2023, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan senilai **Rp67.691.676,00** atau **0,40%** dengan rincian pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024		%	2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	22.865.000.000,00	16.809.320.380,00	73,52	16.741.628.704,00
Pajak Hotel	-	-	-	120.047.350,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	2.734.771.683,00
Pajak Pertandingan Olahraga	-	-	-	12.776.750,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	330.000.000,00	321.685.500,00	97,48	309.291.750,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-	-	-	6.048.325.435,00
Pajak Air Tanah	35.000.000,00	41.035.068,00	117,24	32.140.455,00
Pajak Sarang Burung Walet	70.000.000,00	52.625.000,00	75,18	56.980.000,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.800.000.000,00	2.240.685.633,00	124,48	2.500.034.628,00
PBB-P2	4.350.000.000,00	4.354.665.951,00	100,11	4.167.792.141,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.000.000.000,00	701.606.317,00	10,02	759.468.512,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.500.000.000,00	2.075.604.751,00	83,02	-
PBJT-Tenaga Listrik	6.610.000.000,00	6.829.355.210,00	103,32	-
PBJT-Jasa Perhotelan	150.000.000,00	168.070.000,00	112,05	-
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.000.000,00	23.986.950,00	119,93	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa beberapa komponen pajak melampaui dari target penerimaan, yaitu Pajak Air Tanah yang melampaui dari target penerimaan mencapai 117,24%, Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya yang melampaui target senilai 124,48%, PBB-P2 melampaui dari target senilai 100,11%, PBJT-Tenaga Listrik mencapai 103,32%, PBJT-Jasa perhotelan melampaui target sebesar 112,05%, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan melampaui target sebesar 119,93%. Sedangkan pendapatan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu Pajak Reklame senilai 97,48%, Pajak Sarang Burung Walet senilai 75,18%, PBJT-Makanan dan Minuman mencapai senilai 83,02%, dan BPHTB hanya mencapai senilai 10,02%.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*, dimana *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir, pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan *Official Assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif karena



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Adapun penyebab dan atau kendala tidak tercapainya target perolehan pajak daerah antara lain:

- a. kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah;
- b. terbatasnya obyek pajak hiburan di wilayah Kabupaten Bombana, hal ini disebabkan dengan kondisi alam wilayah Kabupaten Bombana yang kurang mendukung dalam usaha hiburan sehingga banyak tempat usaha hiburan yang tutup;
- c. Pajak BPHTB yang realisasinya masih minim disebabkan oleh pengusaha-pengusaha badan dan perorangan di wilayah Kabupaten Bombana mengalami kesulitan keuangan akibat di tahun 2024 masih terjadi inflasi yang tidak menentu, harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang signifikan, selain itu terdapat pengusaha atau Yayasan Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan ketetapan tahun 2021 dengan nomor: 0016/SPTPD/BPHTB/2021 senilai **Rp32.750.000,00** sampai akhir 31 Desember 2024 belum dilunasi.

5.1.1.3 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan Retribusi Daerah	7.944.727.599,00	6.460.644.617,00	1.484.082.982,00	22,97
Jumlah	7.944.727.599,00	6.460.644.617,00	1.484.082.982,00	22,97

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp6.835.000.000,00**, dan terealisasi melampaui target pendapatan retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Bombana yaitu senilai **Rp7.944.727.599,00** atau mencapai **116,24%**. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila di bandingkan dengan Realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan senilai **Rp1.484.082.982,00** atau **22,97%**, dengan rincian pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	6.835.000.000,00	7.944.727.599,00	116,24	6.460.644.617,00
Retribusi Jasa Umum	3.745.000.000,00	5.257.740.490,00	140,39	4.197.705.090,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.300.000.000,00	3.912.252.400,00	170,10	2.751.927.050,00
Retribusi Pelayanan Persampahan	240.000.000,00	284.650.000,00	118,60	230.490.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	200.000.000,00	206.113.000,00	103,06	319.711.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	850.345.090,00	85,03	727.377.040,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	168.200.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	2.090.000.000,00	2.026.451.710,00	96,96	1.939.064.935,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	78.100.000,00	0,00	379.140.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	40.000.000,00	38.814.000,00	97,04	14.019.000,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	120.127.000,00	100,11	99.149.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.480.000.000,00	1.131.487.570,00	76,45	1.417.751.935,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	80.000.000,00	0,00	0,00	20.005.000,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	169.343.140,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan	0,00	61.930.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	370.000.000,00	426.650.000,00	115,31	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	660.535.399,00	66,05	323.874.592,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	323.874.592,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	660.535.399,00	66,05	0,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis Retribusi Daerah yang melampaui target penerimaan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai **170,10%**, Retribusi Pelayanan Persampahan mencapai **118,60%**, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum mencapai **103,06%**, Retribusi Tempat Khusus Parkir mencapai **100,11%** dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah mencapai **115,31%** sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target yaitu:

- Retribusi Pelayanan Pasar hanya mencapai **85,03%** dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena kurangnya masyarakat pengguna Kios-Kios di Pasar memenuhi kewajiban akibat dari kurangnya pembeli yang disebabkan oleh *inflasi*;
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus mencapai **60,00%** dari target yang ditetapkan, hal ini di sebabkan karena kurangnya peminat untuk menggunakan alat penyedotan kakus.
- Retribusi Tempat Pelelangan hanya mencapai **97,04%** dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain kurangnya hasil tangkapan ikan yang disebabkan oleh cuaca yang ekstrim;
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan hanya mencapai **76,45%** dari target yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan kurangnya masyarakat pengguna pelabuhan yang disebabkan oleh cuaca ekstrim; dan
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung hanya mencapai **66,05%** dari target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat yang mendirikan bangunan mengurus Izin Mendirikan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	16.241.480.609,00	12.863.598.813,00	3.377.881.796,00	26,26
Jumlah	16.241.480.609,00	12.863.598.813,00	3.377.881.796,00	26,26

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan tersebut merupakan bagian laba (*dividen*) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yaitu Bank Sultra. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dari penetapan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada tahun 2024 dianggarkan senilai **Rp16.241.480.609,00** dan terealisasi senilai **Rp16.241.480.609,00** atau **100%**. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.377.881.796,00** atau **26,26%** dibandingkan dengan Tahun 2023.

5.1.1.5 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain PAD Yang Sah	34.912.861.162,00	58.396.780.050,00	(23.483.918.888,00)	(40,21)
Jumlah	34.912.861.162,00	58.396.780.050,00	(23.483.918.888,00)	(40,21)

Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2024 dianggarkan senilai **Rp39.145.300.000,00** sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp34.912.861.162,00** atau **89,19%**. Bila di bandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp58.396.780.050,00**, realisasi lain-lain PAD yang sah pada TA 2024 mengalami penurunan senilai **Rp(23.483.918.888,00)** atau **(40,21)%** dengan rincian pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2024	Realisasi	%	2023
	Anggaran Setelah Perubahan			Realisasi
	(Rp)			(Rp)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	39.145.300.000,00	34.912.861.162,00	89,19	58.396.780.050,00
Penerimaan Jasa Giro	1.100.000.000,00	972.325.560,00	88,39	1.645.985.567,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.000.000.000,00	5.868.132.108,00	73,35	8.177.733.972,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	43.800.000,00	36.474.721,00	83,28	32.928.586,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.500.000,00	120.000,00	8,00	-
Pendapatan BLUD	30.000.000.000,00	28.035.808.773,00	93,45	23.347.461.607,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	-	-	-	8.085.810.396,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya	-	-	-	17.106.859.922,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Lain-Lain PAD yang Sah tidak ada yang melampaui dari target penerimaan, yaitu Penerimaan jasa giro mencapai **88,39%**, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mencapai **73,35%**, Pendapatan Denda Pajak Daerah senilai **83,28%**, Pendapatan Denda Retribusi Daerah hanya mencapai **8,00%**, dan Pendapatan BLUD mencapai **93,45%**. Penyebab dan atau kendala tidak tercapainya target pendapatan tersebut antara lain adalah:

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah kurang optimalnya tindak lanjut hasil temuan BPK; dan
- Pendapatan Denda Pajak adalah kurangnya Personil penagih pajak, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

5.1.2 Pendapatan Transfer – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.177.890.523.909,00	904.931.884.533,00	272.958.639.376,00	30,16
Transfer Antar Daerah	35.189.129.558,00	54.274.767.891,00	(19.085.638.333,00)	35,16
Jumlah	1.213.079.653.467,00	959.206.652.424,00	253.873.001.043,00	26,47

Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Transfer Ke Daerah (TKD) terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil (DBH), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Otonomi Khusus; 5) Dana Keistimewaan, dan 6) Dana Desa. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pendapatan Transfer pada tahun 2024 dianggarkan senilai **Rp1.329.508.325.516,00** sampai dengan per 31 Desember terealisasi senilai **Rp1.213.079.653.467,00** atau **91,24%**. Bila di bandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp959.206.652.424,00**, realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2024 mengalami kenaikan senilai **Rp253.873.001.043,00** atau **(26,47%)** dengan rincian pada tabel 5.7 berikut:



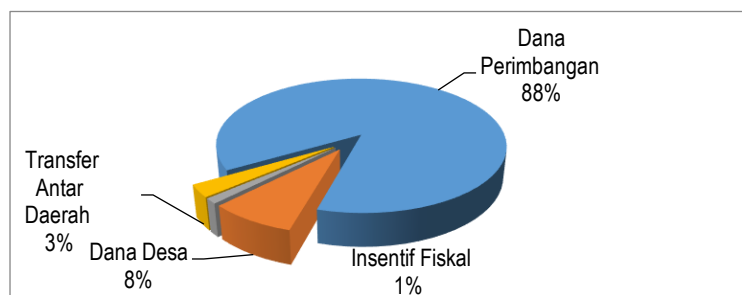
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.7
Daftar Pendapatan Transfer

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan				
Transfer Pemerintah Pusat	1.282.808.325.516,00	1.177.890.523.909,00	91,82	904.931.884.533,00
Dana Perimbangan	1.168.672.437.516,00	1.064.243.885.909,00	91,06	807.155.593.533,00
Dana Transfer Umum	941.628.675.516,00	877.968.736.211,00	93,68	631.924.293.648,00
Dana Bagi Hasil Pajak	42.625.726.000,00	18.983.170.211,00	44,53	11.838.867.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	392.799.944.319,00	351.055.657.000,00	89,37	150.904.216.000,00
Dana Alokasi Umum	506.203.005.197,00	507.929.909.000,00	100,34	469.181.210.648,00
Dana Transfer Khusus	227.043.762.000,00	186.275.149.698,00	82,04	175.231.299.885,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	72.914.205.000,00	71.548.170.798,00	98,13	57.368.240.596,00
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	154.129.557.000,00	114.726.978.900,00	74,44	117.863.059.289,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	98.927.677.000,00	98.438.427.000,00	99,51	97.776.291.000,00
Insentif Fiskal	15.208.211.000,00	15.208.211.000,00	0,00	0,00
Transfer Antar Daerah	46.700.000.000,00	35.189.129.558,00	75,35	54.274.767.891,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.700.000.000,00	35.189.129.558,00	75,35	39.274.767.891,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer	1.329.508.325.516,00	1.213.079.653.467,00	91,24	959.206.652.424,00

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas dapat diperhatikan bahwa jenis pendapatan transfer yang paling kontributif terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bombana masih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Berikut komposisi Pendapatan Transfer pemerintah daerah berdasarkan persentase per jenisnya disajikan dalam grafik 5.3 dan grafik 5.4.

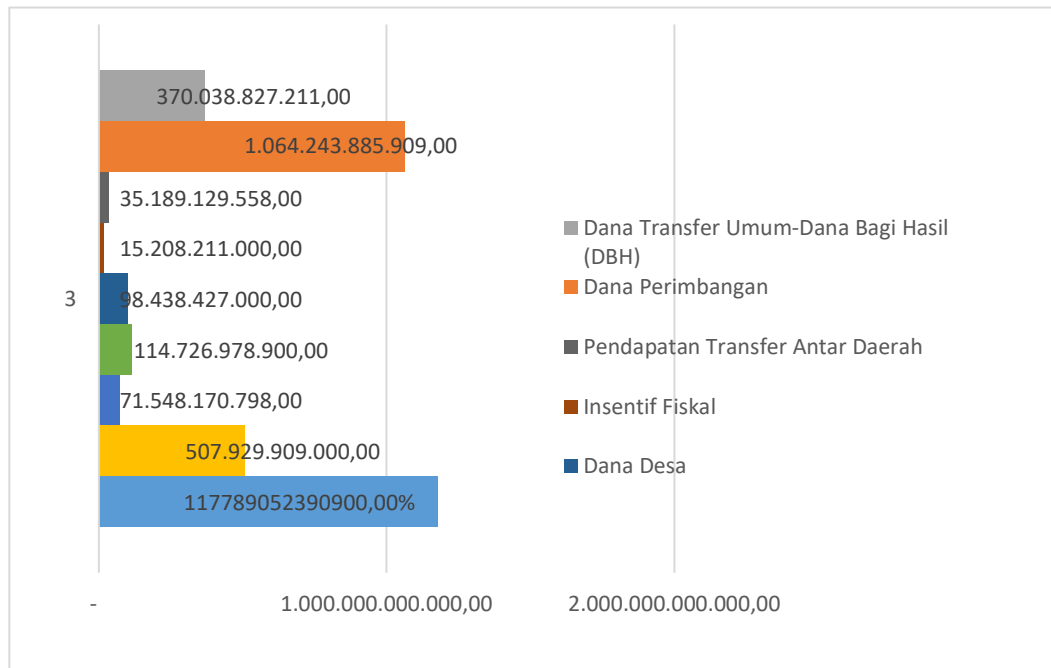
Grafik 5.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 5.4 Komposisi Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024



5.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.064.243.885.909,00	807.155.593.533,00	257.088.292.376,00	31,85
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa	98.438.427.000,00	97.776.291.000,00	662.136.000,00	0,68
Insentif Fiskal	15.208.211.000,00	-	15.208.211.000,00	-
Jumlah	1.177.890.523.909,00	904.931.884.533,00	272.958.639.376,00	30,16

Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp1.177.890.523.909,00** dari jumlah yang dianggarkan senilai **Rp1.282.808.325.516,00** atau **91,82%**. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Bagi Hasil (DBH)	370.038.827.211,00	162.743.083.000,00	207.295.744.211,00	127,38
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	507.929.909.000,00	469.181.210.648,00	38.748.698.352,00	8,26
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	186.275.149.698,00	175.231.299.885,00	11.043.849.813,00	22,06
Jumlah	1.064.243.885.909,00	807.155.593.533,00	257.088.292.376,00	31,85



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dana Perimbangan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp1.064.243.885.909,00** dari jumlah yang dianggarkan senilai **Rp1.168.672.437.516,00** atau **91,06%**. Realisasi Dana Perimbangan berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Bagi Hasil (DBH)	370.038.827.211,00	162.743.083.000,00	207.295.744.211,00	127,38
Jumlah	370.038.827.211,00	162.743.083.000,00	207.295.744.211,00	127,38

Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp370.038.827.211,00** dari jumlah yang dianggarkan senilai **Rp435.425.670.319,00** atau **84,98%**. Dana Bagi Hasil berdasarkan kelompok dan jenisnya yaitu DBH Pajak **Rp18.983.170.211,00** dan DBH SDA **Rp351.055.657.000,00** dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Bagi Hasil Pajak	18.983.170.211,00	11.838.867.000,00	7.144.303.211	60,35
Jumlah	18.983.170.211,00	11.838.867.000,00	7.144.303.211	60,35

Dana Bagi hasil pajak pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp42.625.726.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp18.983.170.211,00** atau **44,53%**. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan senilai **Rp7.144.303.211,00** atau **(60,35%)** dengan rincian pada tabel 5.8.

Tabel 5.8
Daftar Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	42.625.726.000,00	18.983.170.211,00	44,53	11.838.867.000,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	36.674.378.000,00	15.031.822.211,00	40,99	9.170.238.000,00
DBH PPh Pasal 21	5.951.348.000,00	3.951.348.000,00	66,39	2.668.629.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2) Dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	351.055.657.000,00	150.904.216.000,00	200.151.441.000,00	132,63
Jumlah	351.055.657.000,00	150.904.216.000,00	200.151.441.000,00	132,63

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk TA 2024 dianggarkan senilai **Rp392.799.944.319,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 direalisasikan senilai **Rp351.055.657.000,00** atau **89,37%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp200.151.441.000,00** atau **132,63%** dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Daftar Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Uraian	2024	2023	%	Realisasi
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	392.799.944.319,00	351.055.657.000,00	89,37	150.904.216.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	1.420.956.000,00	1.420.956.000,00	100,00	720.614.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>	375.380.859.319,00	342.423.278.000,00	91,22	141.972.475.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.086.706.000,00	0,00	-	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	141.781.000,00	141.781.000,00	100,00	4.848.047.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.982.936.000,00	2.982.936.000,00	100,00	3.363.080.000,00
DBH Sawit	8.786.706.000,00	4.086.706.000,00	46,51	0,00

5.1.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Alokasi Umum	507.929.909.000,00	469.181.210.648,00	38.748.698.352,00	8,26
Jumlah	507.929.909.000,00	469.181.210.648,00	38.748.698.352,00	8,26

Untuk Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai **Rp506.203.005.197,00** dan sampai pada akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai **Rp507.929.909.000,00** atau **100,34%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp38.748.698.352,00** atau **8,26%** dibandingkan dengan realisasi TA 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.548.170.798,00	57.368.240.596,00	14.179.930.202,00	24,72
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	114.726.978.900,00	117.863.059.289,00	(3.136.080.389,00)	(2,66)
Jumlah	186.275.149.698,00	175.231.299.885,00	11.043.849.813,00	6,30

Dana Alokasi Khusus sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp186.275.149.698,00** dari jumlah yang dianggarkan senilai **Rp227.043.762.000,00** atau **82,04%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp11.043.849.813,00** atau **6,30%** jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2024 baik fisik dan non fisik dapat dilihat pada tabel 5.10 .

Tabel 5.10
Daftar Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi	Rasio
Dana Alokasi Khusus	227.043.762.000,00	186.275.149.698,00	82,04
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.914.205.000,00	71.548.170.798,00	98,13
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.060.935.000,00	1.048.930.800,00	98,87
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.645.888.000,00	8.147.554.200,00	94,24
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.892.732.000,00	2.881.358.800,00	99,61
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.383.044.000,00	6.229.155.800,00	97,59
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.652.000.000,00	3.544.620.000,00	97,06
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	23.480.081.000,00	23.254.218.000,00	99,04
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	13.431.902.000,00	13.184.702.000,00	98,16
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	7.038.126.000,00	7.038.126.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.041.554.000,00	3.934.422.198,00	97,35
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.287.943.000,00	2.285.083.000,00	99,87
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	154.129.557.000,00	114.726.978.900,00	74,44
DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.372.720.000,00	48.086.850.000,00	78,35
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.701.000.000,00	1.701.000.000,00	29,84
DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.920.383.000,00	5.583.025.000,00	46,84
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.684.460.000,00	4.495.205.665,00	79,08
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	454.631.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	25.566.920.000,00	15.743.799.752,00	61,58
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.869.078.000,00	5.040.413.345,00	73,38
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	326.781.300,00	80,49
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.851.525.000,00	1.851.525.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	26.579.240.000,00	24.576.159.838,00	92,46
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.462.400.000,00	2.443.494.000,00	99,23
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.716.200.000,00	3.333.725.000,00	89,71
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.1.4. Dana Desa

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Desa	98.438.427.000,00	97.776.291.000,00	662.136.000,00	0,68
Jumlah	98.438.427.000,00	97.776.291.000,00	662.136.000,00	0,68

Dana Desa sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp98.438.427.000.000,00** dari jumlah yang dianggarkan senilai **Rp98.927.677.000,00** atau **99,51%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp662.136.000,00** atau **0,68%** jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

5.1.2.1.1.5. Insentif Fiskal

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Insentif Fiskal	15.208.211.000,00	15.208.211.000,00	0,00	-
Jumlah	15.208.211.000,00	15.208.211.000,00	0,00	-

Insentif fiskal dialokasikan TA 2024 senilai **Rp15.208.211.000,00** sampai dengan Desember 2024 terealisasi **100,00%** dari target yang telah ditetapkan.

5.1.2.2. Transfer Antar Daerah - LRA

5.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.189.129.558,00	54.274.767.891,00	(19.085.638.333,00)	(35,16)
Jumlah	35.189.129.558,00	54.274.767.891,00	(19.085.638.333,00)	(35,16)

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dianggarkan senilai **Rp46.700.000.000,00** sampai pada akhir Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan senilai **Rp35.189.129.558,00** atau **75,35%**. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan senilai **(Rp19.085.638.333,00)** atau **(35,16%)**, dengan rincian pada tabel 5.11.

Tabel 5.11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Nilai
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.984.206.956,00
Bagi Hasil dari BBNKB	4.605.796.912,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.003.483.903,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Permukaan Air	223.306.129,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6.372.335.658,00
JUMLAH	35.189.129.558,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	9.903.158.503,00	0,00	9.903.158.503,00	0,00
Jumlah	9.903.158.503,00	0,00	9.903.158.503,00	0,00

Tahun 2024 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan senilai **Rp25.059.212.083,00** sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp9.903.158.503,00** atau **39,52%**. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut diatas adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bombana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik 5.4.

Grafik 5.4 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020-2024



5.1.4 Belanja

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Belanja	1.303.046.573.543,50	1.100.797.203.966,50	202.249.369.577,00	18,37
Jumlah	1.303.046.573.543,50	1.100.797.203.966,50	202.249.369.577,00	18,37

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance-Based Budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Rincian belanja menurut jenis disajikan secara rinci pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
Daftar Rincian Belanja Menurut Jenis

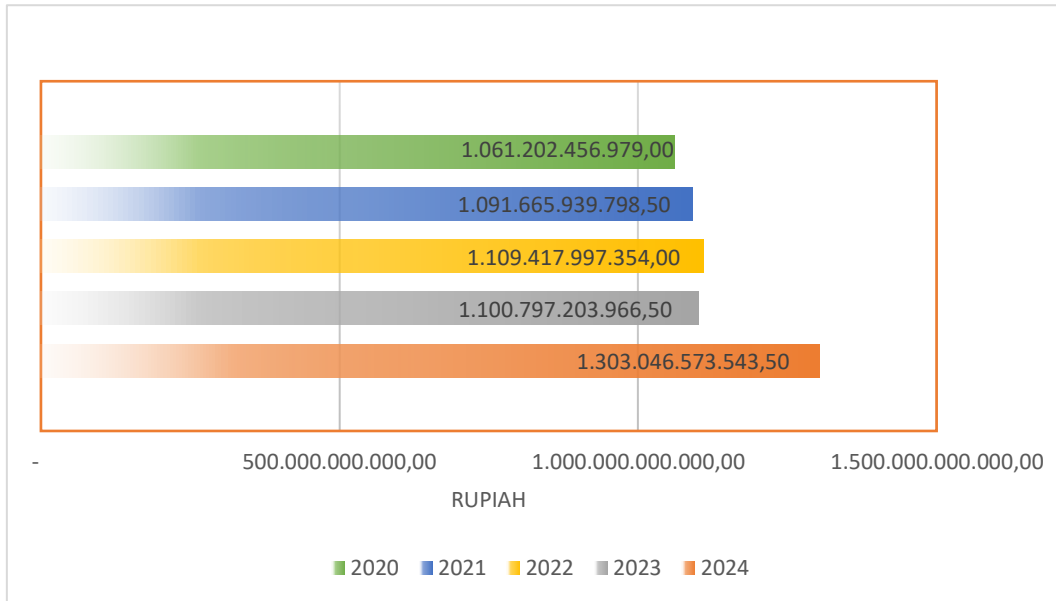
URAIAN	2024		2023	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	438.806.935.686,00	415.021.806.513,50	94,58	353.049.066.129,50
Belanja Barang dan Jasa	481.516.537.399,00	441.591.050.797,00	91,71	342.512.576.227,00
Belanja Subsidi	200.000.000,00	176.701.394,00	88,35	106.098.667,00
Belanja Hibah	69.079.711.222,00	67.968.970.222,00	98,39	51.606.713.730,00
Belanja Bantuan Sosial	21.000.000,00	20.300.000,00	96,67	632.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	989.624.184.307,00	924.778.828.926,50	93,45	747.906.454.753,50
Belanja Modal				
Belanja Tanah	1.742.580.000,00	1.623.988.996,00	93,19	3.510.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	55.265.750.297,00	46.649.909.911,00	84,41	28.872.385.235,00
Belanja Gedung dan Bangunan	73.668.465.212,00	52.190.485.037,00	70,85	53.448.414.400,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.054.363.065,00	102.117.940.857,00	70,89	96.832.955.543,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.084.089.000,00	1.087.528.800,00	52,18	2.710.917.230,00
Belanja Aset Lainnya	2.594.090.000,00	1.462.505.700,00	56,38	0,00
Jumlah Belanja Modal	279.409.337.574,00	205.132.359.301,00	73,42	185.374.672.408,00
Belanja Tak Terduga				
Belanja Tak Terduga	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52	4.739.785.807,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52	4.739.785.807,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Bantuan Keuangan	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07	162.776.290.998,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07	162.776.290.998,00
JUMLAH BELANJA	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50	89,93	1.100.797.203.966,50

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai **Rp1.303.046.573.543,50** atau mencapai **89,93%**. Apabila dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya di Tahun Anggaran 2023 yang tercatat senilai **Rp1.100.797.203.966,50**, mengalami kenaikan senilai **Rp202.249.369.577** atau **18,37%**. Berikut perkembangan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana disajikan dalam grafik 5.5.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 5.5 Perkembangan Belanja Tahun 2020-2024



Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Khusus dalam kelompok belanja, sesuai dengan Paragraf 18 PSAP Nomor 02 yang menyebutkan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Menurut Organisasi

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Belanja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini PPKD. Ringkasan realisasi belanja menurut organisasi secara berurutan berdasarkan besaran realisasi belanja disajikan pada **Lampiran 5.1**.

Berdasarkan data lampiran 2 diketahui bahwa 5 (lima) besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah yang paling tinggi realisasi belanjanya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, BLUD RSUD, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Menurut Fungsi

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bombana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Belanja pemerintah daerah menurut fungsi terbagi dalam 9 fungsi, yaitu: 1) fungsi pelayanan umum, 2) fungsi ketertiban dan keamanan, 3) fungsi ekonomi, 4) fungsi lingkungan hidup, 5) fungsi perumahan dan fasilitas umum, 6) fungsi kesehatan, 7) fungsi pariwisata dan budaya, 8) fungsi pendidikan, dan 9) fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

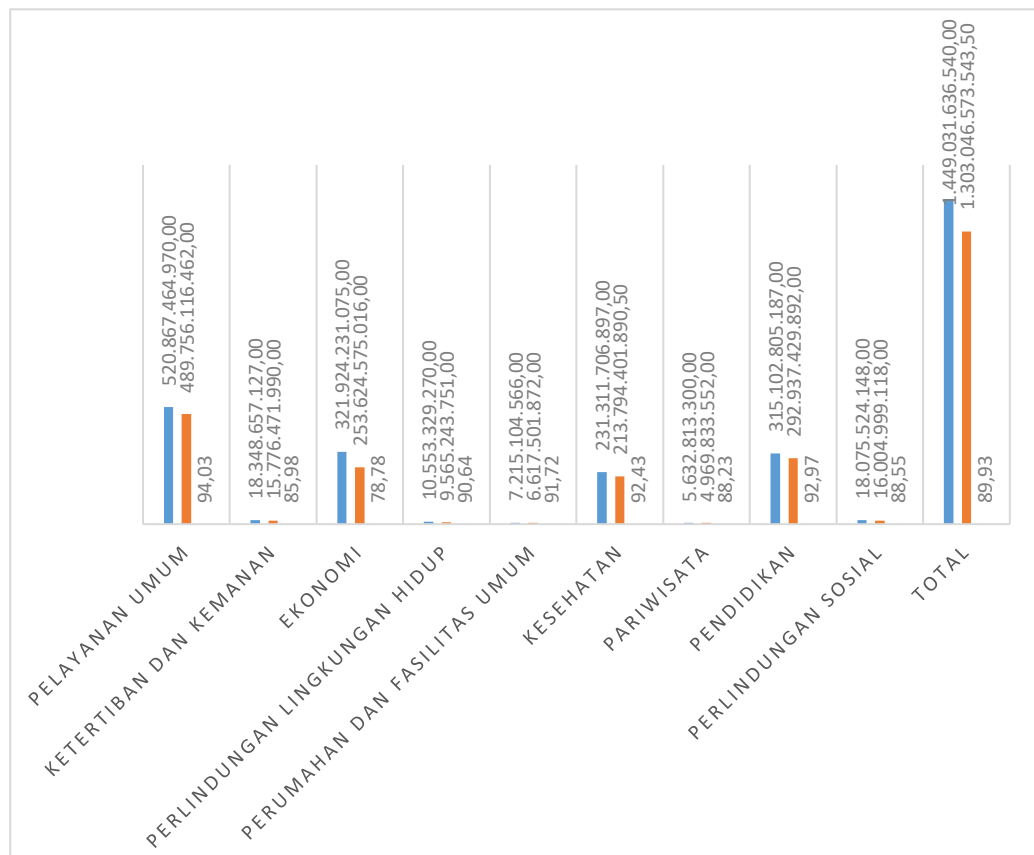
Pemerintah Kabupaten Bombana per fungsi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13
Daftar Target dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi

Kode Fungsi	Uraian Fungsi	Target	Realisasi	Rasio (%)
01	Pelayanan Umum	520.867.464.970,00	489.756.116.462,00	94,03
03	Ketertiban dan Kemanan	18.348.657.127,00	15.776.471.990,00	85,98
04	Ekonomi	321.924.231.075,00	253.624.575.016,00	78,78
05	Perlindungan Lingkungan Hidup	10.553.329.270,00	9.565.243.751,00	90,64
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	7.215.104.566,00	6.617.501.872,00	91,72
07	Kesehatan	231.311.706.897,00	213.794.401.890,50	92,43
08	Pariwisata	5.632.813.300,00	4.969.833.552,00	88,23
10	Pendidikan	315.102.805.187,00	292.937.429.892,00	92,97
11	Perlindungan Sosial	18.075.524.148,00	16.004.999.118,00	88,55
	Total	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50	89,93

Komposisi realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bombana menurut fungsi Tahun Anggaran 2024 terlihat pada grafik 5.6.

Grafik 5.6
Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi TA 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

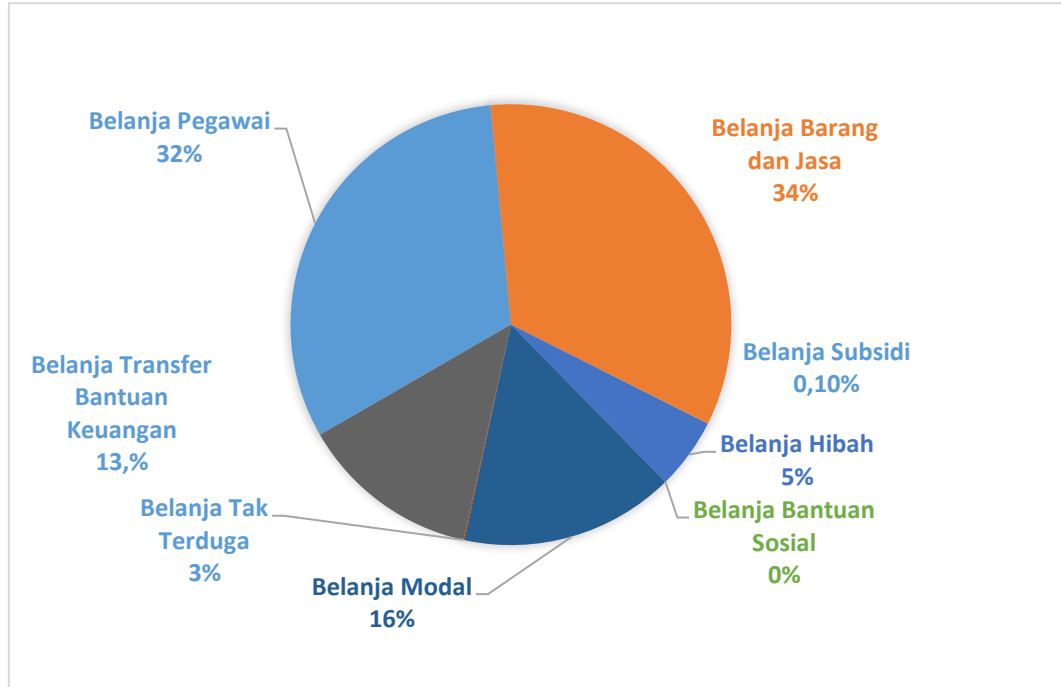
Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2024, bidang penyelenggaraan pemerintahan atau fungsi yang memiliki alokasi anggaran belanja yang paling dominan adalah mulai dari fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup melalui pelayanan umum, pelayanan bidang pendidikan dan pelayanan bidang kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Menurut Jenis

Berdasarkan PSAP Nomor 02, Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan klasifikasinya terdiri dari Belanja Operasi senilai **Rp924.778.828.926,50**, Belanja Modal senilai **Rp205.132.359.301,00**, Belanja Tak Terduga senilai **Rp1,066.690.000,00** dan Belanja Transfer senilai **Rp172.068.695.316,00**. Berikut komposisi belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 menurut jenis disajikan dalam grafik 5.7.

Grafik 5.7 Komposisi Belanja Operasi Menurut Jenis TA.2024





PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.4.1 Belanja Operasi

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Belanja Operasi	924.778.828.926,50	747.906.454.753,50	176.872.374.173,00	23,65
Jumlah	924.778.828.926,50	747.906.454.753,50	176.872.374.173,00	23,65

Pengeluaran Belanja Operasi pada tahun 2024 dianggarkan senilai **Rp989.624.184.307,00** dengan realisasi senilai **Rp924.778.828.926,50** atau **93,45%**. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dengan rincian pada tabel 5.14

Tabel 5.14
Daftar Belanja Operasi

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	438.806.935.686,00	415.021.806.513,50	94,58	353.049.066.129,50
Belanja Barang dan Jasa	481.516.537.399,00	441.591.050.797,00	91,71	342.512.576.227,00
Belanja Subsidi	200.000.000,00	176.701.394,00	88,35	106.098.667,00
Belanja Hibah	69.079.711.222,00	67.968.970.222,00	98,39	51.606.713.730,00
Belanja Bantuan Sosial	21.000.000,00	20.300.000,00	96,67	632.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	989.624.184.307,00	924.778.828.926,50	93,45	747.906.454.753,50

5.1.4.1.1 Belanja Pegawai

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Belanja Pegawai	415.021.806.513,50	353.049.066.129,50	61.972.740.384,00	17,55
Jumlah	415.021.806.513,50	353.053.203.209,50	61.972.740.384,00	17,55

Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp438.806.935.686,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp415.021.806.513,50** atau **94,58%**, dengan rincian pada tabel 5.15.

Tabel 5.15
Daftar Belanja Pegawai

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai				
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	281.282.752.126,40	278.962.823.458,00	99,18	232.190.835.554,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.068.639.924,60	39.261.833.408,00	78,42	42.919.736.718,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.727.873.478,00	75.934.968.685,00	94,06	55.145.823.720,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.315.948.157,00	10.087.741.189,00	97,79	9.923.230.817,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	63.095.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	492.400.000,00	96,38	510.880.000,00
Belanja Pegawai BOS	6.044.237.000,00	0,00	0,00	2.525.584.000,00
Belanja Pegawai BLUD	9.793.510.000,00	10.282.039.773,50	104,99	9.832.975.320,50
Jumlah Belanja Pegawai	438.806.935.686,00	415.021.806.513,50	94,58	353.049.066.129,50

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan pada tahun 2024 direalisasikan senilai **Rp278.962.823.458,00** atau **99,18%** dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai **Rp281.282.752.126,40** dengan rincian pada **lampiran 5.2**

b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada tahun 2024 direalisasikan senilai **Rp115.196.802.093,00** atau **88,07%** dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai **Rp130.796.513.402,60**, dengan rincian pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Daftar Belanja Tambahan Penghasilan ASN

URAIAN	2024		
	Anggaran Setelah	Realisasi	(%)
	Perubahan	(Rp)	
	(Rp)		
a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	50.068.639.924,60	39.261.833.408,00	78,42
b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya:	80.727.873.478,00	75.934.968.685,00	94,06
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.586.069.078,00	609.442.725,00	38,42
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	215.250.000,00	15.000.000,00	6,97
Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi guru PNSD (TPG)	57.572.720.000,00	57.179.528.730,00	99,32
Tambahan penghasilan Tunjangan Khusus Guru PNSD	7.120.369.400,00	6.843.557.230,00	96,11
Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	2.599.000.000,00	2.419.875.000,00	93,11
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.396.500.000,00	0	-
Belanja Honorarium	8.764.765.000,00	8.409.635.000,00	95,95
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	473.200.000,00	457.930.000,00	96,77
Belanja Tambahan Penghasilan PNS (a + b)	130.796.513.402,60	115.196.802.093,00	88,07



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Tahun 2024 direalisasikan senilai **Rp10.087.741.189,00** atau **97,79%** dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai **Rp10.315.948.157,00** dengan rincian pada tabel 5.17.

Tabel 5.17
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Uang Representasi DPRD	579.022.500,00	560.070.000,00	96,73	550.515.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	43.643.250,00	42.210.000,00	96,72	37.674.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	55.313.600,00	52.996.800,00	95,81	50.969.600,00
Belanja Uang Paket DPRD	49.880.250,00	47.985.000,00	96,20	47.029.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.648.375,00	812.101.500,00	96,60	798.246.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.363.750,00	75.181.050,00	99,76	88.518.150,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.968.750.000,00	1.890.000.000,00	96,00	1.845.900.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	157.500.000,00	100,00	466.200.000,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.000,00	17.595,00	58,65	14.050,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.340.947.344,00	2.333.394.244,00	99,68	2.286.463.767,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.001.989.088,00	3.915.000.000,00	97,83	3.726.500.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	202.860.000,00	201.285.000,00	99,22	25.200.000,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.315.948.157,00	10.087.741.189,00	97,79	9.923.230.817,00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH pada Tahun 2024 dialokasikan senilai **Rp63.095.000,00**, tetapi tidak direalisasikan karena belum ada KDH dan WKDH definitif sedangkan yang menjalankan tugas KDH dan WKDH sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai akhir tahun 2024 adalah Penjabat Bupati yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rincian alokasi belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH pada tabel 5.18

Tabel 5.18
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	35.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.246.800,00	0,00	0,00	0,00
Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	2.293.200,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunajangan KDH/WKDH	63.095.000,00	0,00	0,00	0,00

e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2024 direalisasikan senilai **Rp492.400.000,00** atau **96,38%** dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai **Rp510.880.000,00**, terdiri dari :

- 1) Belanja Operasional Pimpinan DPRD direalisasikan senilai Rp92.400.000,00 atau 83,33% dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp110.880.000,00
- 2) Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH pada TA 2024 direalisasikan senilai Rp400.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp400.000.000,00

f. Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS pada TA 2024 direalisasikan senilai **Rp0,00** atau **0,00%** dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai **Rp6.044.237.000,00**.

g. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD pada TA 2024 direalisasikan senilai **Rp10.282.039.773,50** atau **104,99%** dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai **Rp9.793.510.000,00**.

5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Barang dan Jasa	441.591.050.833,00	342.512.576.227,00	99.078.474.606,00	28,93
Jumlah	441.591.050.833,00	342.512.576.227,00	99.078.474.606,00	28,93

Belanja Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2024 telah dianggarkan senilai **Rp441.591.050.797,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 telah direalisasikan senilai **Rp342.512.576.227,00** atau **91,71%**, dengan rincian pada **lampiran 5.2**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.4.1.3 Belanja Subsidi

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Subsidi	176.701.394,00	106.098.667,00	70.602.727,00	66,54
Jumlah	176.701.394,00	106.098.667,00	70.602.727,00	66,54

Belanja Subsidi pada Tahun 2024 dianggarkan senilai **Rp200.000.000,00** dan telah terealisasi senilai **Rp176.701.394,00** atau **88,35%**. Belanja Subsidi tersebut adalah belanja untuk pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

5.1.4.1.4 Belanja Hibah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Hibah	67.968.970.222,00	51.606.713.730,00	16.362.256.492,00	31.71
Jumlah	67.968.970.222,00	51.606.713.730,00	16.362.256.492,00	31.71

Belanja Hibah pada Tahun 2024 dianggarkan senilai **Rp69.079.711.222,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp67.968.970.222,00** atau **98,39%**, dengan rincian pada tabel 5.19.

Tabel 5.19
Daftar Belanja Hibah

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.316.336.990,00	60.201.336.990,00	99,81	22.827.332.660,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	480.000.000,00	438.259.000,00	91,30	7.849.420.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.643.000.000,00	6.689.000.000,00	87,52	6.099.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	2.364.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	11.760.942.080,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	65.644.758,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	640.374.232,00	640.374.232,00	100,00	640.374.232,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Jumlah	69.079.711.222,00	67.968.970.222,00	98.39	51.606.713.730,00

5.1.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Bantuan Sosial	20.300.000,00	632.000.000,00	(611.700.000,00)	(96,79)
Jumlah	20.300.000,00	632.000.000,00	(611.700.000,00)	(96,79)

Belanja bantuan sosial dianggarkan senilai **Rp21.000.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp20.300.000,00** atau **96,67%**. Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel 5.20

Tabel 5.20
Daftar Belanja Bantuan Sosial

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	21.000.000,00	20.300.000,00	96,67	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (Bid. Pendidikan, Keagamaan dan Lainnya)	0,00	0,00	0,00	632.000.000,00
Jumlah	21.000.000,00	20.300.000,00	96,67	632.000.000,00

5.1.4.2 Belanja Modal

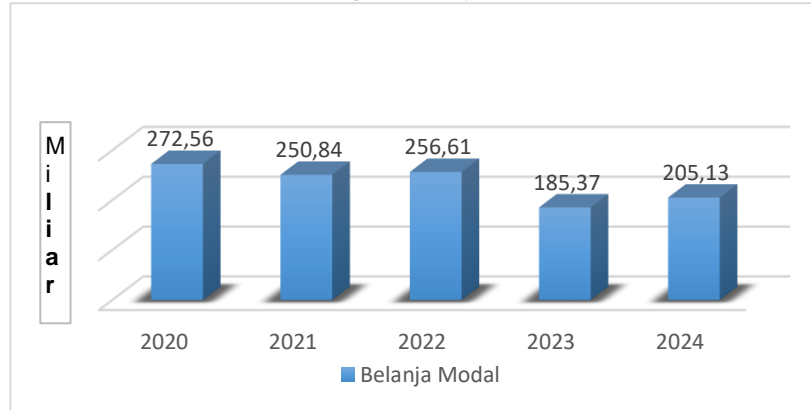
Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Modal	205.132.359.301,00	185.374.672.408,00	19.757.686.893,00	10,66
Jumlah	205.132.359.301,00	185.374.672.408,00	19.757.686.893,00	10,66

Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp279.409.337.574,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp205.132.359.301,00** atau **73,42%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan senilai **Rp19.757.686.893,00** atau **10,66%**. Berikut kami gambarkan perbandingan belanja modal Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2019-2024 pada grafik 5.8.



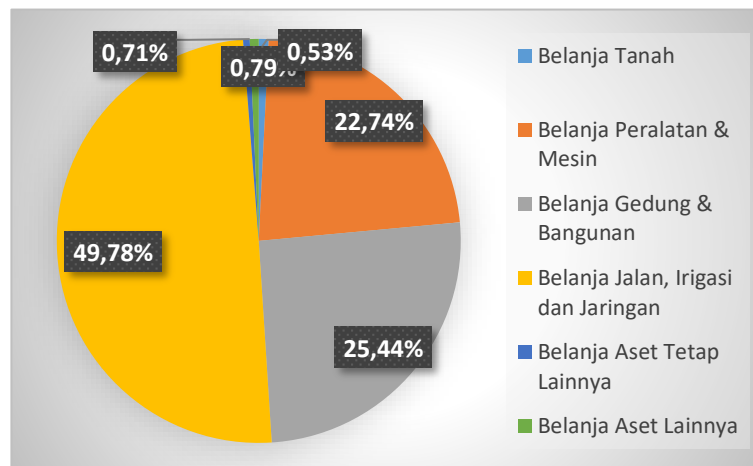
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 5.8 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2020 s.d. 2024



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa belanja modal dalam kurun lima tahun terakhir paling tinggi realisasinya pada Tahun anggaran 2020 yakni senilai Rp272,56 milyar. Kemudian tahun 2021 penurunan sekitar (7,97%) atau senilai Rp250,84 milyar, pada tahun 2022 mengalami peningkatan senilai menjadi Rp256,61 milyar atau 2,30%, tahun 2023 mengalami penurunan Rp71,24 milyar atau (27,76%), Belanja modal tahun 2024 dapat dilihat dalam grafik 5.9.

Grafik 5.9 Komposisi Belanja Modal per Jenis TA. 2024



Grafik komposisi belanja modal berdasarkan jenisnya pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa Belanja Modal jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan persentase tertinggi yakni 49,78%, kemudian disusul Gedung dan Bangunan dengan persentase senilai 25,44%. Selanjutnya posisi ketiga adalah belanja modal jenis Peralatan dan Mesin persentase 22,74%. Kemudian disusul oleh Belanja Modal jenis Tanah persentase 0,79%, Belanja Modal Aset Lainnya 0,71% dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan persentase 0,53%.

Realisasi belanja modal berdasarkan jenisnya dapat dilihat dengan rincian pada tabel 5.21



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.21
Belanja Modal Tahun 2024

URAIAN	2024		2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah	1.742.580.000,00	93,19	3.510.000.000,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	55.265.750.297,00	84,41	28.872.385.235,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	73.668.465.212,00	70,85	53.448.414.400,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.054.363.065,00	70,89	96.832.955.543,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.084.089.000,00	52,18	2.710.917.230,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.594.090.000,00	56,38	0,00
Jumlah Belanja Modal	279.409.337.574,00	73,42	185.374.672.408,00

5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp1.742.580.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp1.623.988.996,00** atau **93,19%**. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut adalah belanja Modal Tanah untuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk digunakan Pemerintah Kabupaten Bombana.

5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp55.265.750.297,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp46.649.909.911,00** atau **84,41%**. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan senilai **Rp17.777.524.676,00** atau **61,57%** bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada **lampiran 5.3**.

5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp73.668.465.212,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp52.190.485.037,00** atau **70,85%**. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai **(Rp1.257.929.363,00)** atau **(2,35%)** bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai **Rp52.190.485.037,00** dapat dirinci pada tabel 5.22.

Tabel 5.22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.883.736.939,00	47.378.983.598,00	71,91
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.339.311.700,00	1.362.640.500,00	58,25
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	740.000.000,00	342.090.000,00	46,23



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.705.416.573,00	3.106.770.939,00	66,03
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.668.465.212,00	52.190.485.037,00	70,85

5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp144.054.363.065,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp102.117.940.857,00** atau **70,89%** dengan rincian pada tabel 5.23.

Tabel 5.23
Belanja Modal, Jalan Irigasi dan Jaringan

URAIAN	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Jalan	114.645.365.750,00	81.780.671.600,00	71,33
Belanja Modal Jembatan	6.168.991.985,00	3.276.981.787,00	53,12
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.986.109.530,00	7.654.023.620,00	69,67
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	9.763.184.600,00	7.844.792.650,00	80,35
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.402.000,00	-	-
Belanja Modal Instalasi Lain	648.012.800,00	643.262.800,00	99,27
Belanja Modal Jaringan Air Munum	8.662.500,00	0,00	-
Belanja Modal Jaringan Listrik	1.831.633.900,00	918.208.400,00	50,13
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.054.363.065,00	102.117.940.857,00	70,89

5.1.4.6.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp2.084.089.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp1.087.528.800,00** atau **52,18%** dengan rincian pada tabel 5.24.

Tabel 5.24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

URAIAN	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.710.399.000,00	794.778.800,00	46,47
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	373.690.000,00	292.750.000,00	78,34
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.084.089.000,00	1.087.528.800,00	52,18



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.4.6.2 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2024 dialokasikan anggaran senilai Rp2.594.090.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp1.462.505.700,00 atau 56,38% dengan rincian pada tabel 5.25.

Tabel 5.25
Belanja Modal Aset Lainnya

URAIAN	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.594.090.000,00	1.462.505.700,00	56,38
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya	2.594.090.000,00	1.462.505.700,00	56,38

5.1.4.7 Belanja Tak Terduga

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Tak Terduga	1.066.690.000,00	4.739.785.807,00	(3.673.095.807,00)	(77,49)
Jumlah	1.066.690.000,00	4.739.785.807,00	(3.673.095.807,00)	(77,49)

Belanja Tak Terduga pada tahun anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp4.534.687.659,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp1.066.690.000,00** atau **23,52%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp(**3.673.095.807,00**) atau **(77,49%)** dengan rincian pada tabel 5.24.

Tabel 5.26
Belanja Tak Terduga

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Tak Terduga	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52	4.739.785.807,00
Jumlah	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52	4.739.785.807,00

5.1.5 Belanja Transfer

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Transfer	172.068.695.316,00	162.776.290.998,00	9.292.404.318,00	5,71
Jumlah	172.068.695.316,00	162.776.290.998,00	9.292.404.318,00	5,71

Belanja transfer daerah pada tahun 2024 dianggarkan senilai **Rp175.463.427.000,00** direalisasikan senilai **Rp172.068.695.316,00** atau **98,07%**, bila dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan senilai **Rp9.292.403.318,00** atau **5,71%**. Sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.27
Belanja Transfer

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Transfer				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (ADD)	77.025.000.000,00	73.630.268.316,00	95,59	64.999.999.998,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (DD) sumber APBN	98.438.427.000,00	98.438.427.000,00	100,00	97.776.291.000,00
Jumlah Transfer	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07	162.776.290.998,00

Lebih lanjut rincian terkait pengeluaran transfer daerah berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.4.

5.1.6 Surplus Dan Defisit

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Surplus / Defisit	(4.155.371.823,50)	(47.127.899.358,50)	42.972.527.535,00	(91,18)
Jumlah	(4.155.371.823,50)	(47.127.899.358,50)	42.972.527.535,00	(91,18)

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit TA 2024 senilai **(Rp4.155.371.823,50)** sedangkan TA 2023 Defisit senilai **(Rp47.127.899.358,50)** dengan rincian pada tabel 5.28.

Tabel 5.28
Surplus/Defisit

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan	1.439.654.318.208,00	1.298.891.201.720,00	90,22	1.053.669.304.608,00
Belanja dan Transfer	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50	89,93	1.100.797.203.966,50
Surplus / Defisit	(9.377.318.332,00)	(4.155.371.823,50)	44,31	(47.127.899.358,50)

5.1.7 Pembiayaan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pembiayaan	9.377.318.332,99	56.505.217.691,49	(47.127.899.358,50)	(83,40)
Jumlah	9.377.318.332,99	56.505.217.691,49	(47.127.899.358,50)	(83,40)

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

5.1.7.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai **Rp9.377.318.332,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp9.377.318.332,99** atau **100,00%**. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 merupakan SiLPA tahun Anggaran Sebelumnya senilai **Rp9.377.318.332,99**.

5.1.7.2 Pengeluaran

Untuk Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak ada pula realisasinya.

5.1.7.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai **Rp9.377.318.332,99** dan Pembiayaan Pengeluaran senilai **Rp0,00**. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp9.377.318.332,99** sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp56.505.217.691,49**. Rincian dan Perhitungan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian pada tabel 5.29.

Tabel 5.29
Pembiayaan

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
Penggunaan SiLPA	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
Pinjaman dalam negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran utang jangka panjang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49

5.1.8 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.221.946.509.,49	9.377.318.332,99	(4.155..371.823,50)	(44,31)
Jumlah	5.221.946.509.,49	9.377.318.332,99	(4.155..371.823,50)	(44,31)

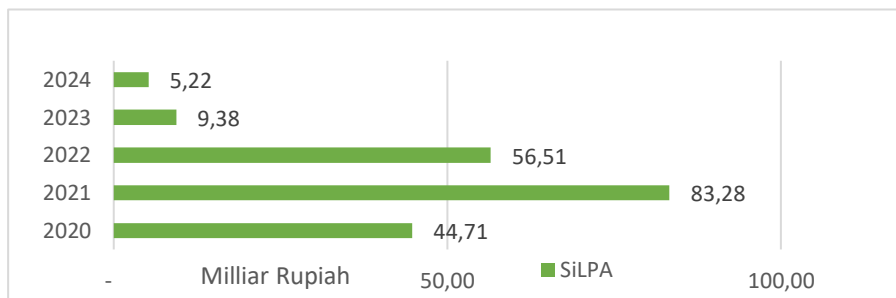


PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Meskipun keberadaan SiLPA masih bias digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun secara umum SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari defisit APBD. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi. SiLPA ini terbentuk dari realisasi perolehan PAD yang melebihi apa yang sudah ditargetkan, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap, dan selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Dalam melakukan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah, penting untuk melihat tren perkembangan SiLPA antara tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut tren perkembangan SiLPA Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam grafik 5.10

Grafik 5.10 Trend Perkembangan SiLPA Kab. Bombana 2020-2024



Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa SiLPA pada tahun 2021 merupakan SiLPA tertinggi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam lima tahun terakhir yaitu **Rp83.275.559.568,49**. Tingginya SiLPA pada periode tersebut disebabkan karena adanya penerimaan kurang bayar pusat yang tidak dianggarkan pada APBD, sehingga menjadi SiLPA di akhir tahun. Kemudian pada tahun 2022 SiLPA turun menjadi **Rp56.505.217.691,49** atau turun dengan persentase sekitar **32,15%**. SiLPA tahun 2023 menurun senilai **Rp47.127.899.358,50** atau **-83,40%**. Hal ini terjadi karena Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Bayar/Lebih Bayar (KB/LB) DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dan alokasi KB/LB DBH Tahun Anggaran 2022 yang tidak disalurkan oleh Pemerintah Pusat hingga 31 Desember 2023. SiLPA tahun 2024 menurun menjadi **Rp4.155.371.823,50** atau **44,31%**. Hal ini terjadi karena DBH, DAU dan DAK Tahun 2024 tidak disalurkan oleh Pemerintah Pusat hingga 31 Desember 2024.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan senilai **Rp5.221.946.509,49** adalah hasil dari penjumlahan antara Surplus/Defisit Pendapatan dan Belanja Daerah senilai (**Rp4.155.371.823,50**) dengan Pembiayaan Netto senilai **Rp9.377.318.332,00** dengan rincian pada tabel 5.30.

Tabel 5.30
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	2024		2023	
		Realisasi	(%)	Realisasi	
Pendapatan	1.439.654.318.208,00	1.298.891.201.720,00	90,22	1.053.669.304.608,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja dan Transfer	1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50	89,93	1.100.797.203.966,50
SURPLUS/(DEFISIT)	(9.377.318.332,00)	(4.155.371.823,50)	44,31	-47.127.899.358,50
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	9.377.318.332,00	9.377.318.332,99	100,00	56.505.217.691,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	5.221.946.509,49	0,00	9.377.318.332,99

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan senilai **Rp5.221.946.509,49** dapat dirinci pada tabel 5.31 sebagai berikut :

Tabel 5.31
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024

1	Kas di Kas Daerah	832.351.859,49
2	Kas di Bendahara Penerimaan	20.085.997,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	136.711.579,00
4	Kas di BLUD	394.775.125,00
5	Kas di Bendahara BOS	22.966.714,00
6	Kas di Bendahara FKTP	9.315.617,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	3.866.483.638,00
8	Saldo Utang PFK	(60.744.020,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	5.221.946.509,49

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Laporan Perubahan Saldo Anggaran	5.221.946.509,49	9.377.318.332,99	(4.155.371.823,50)	(44,31)
Jumlah	5.221.946.509,49	9.377.318.332,99	(4.155.371.823,50)	(44,31)

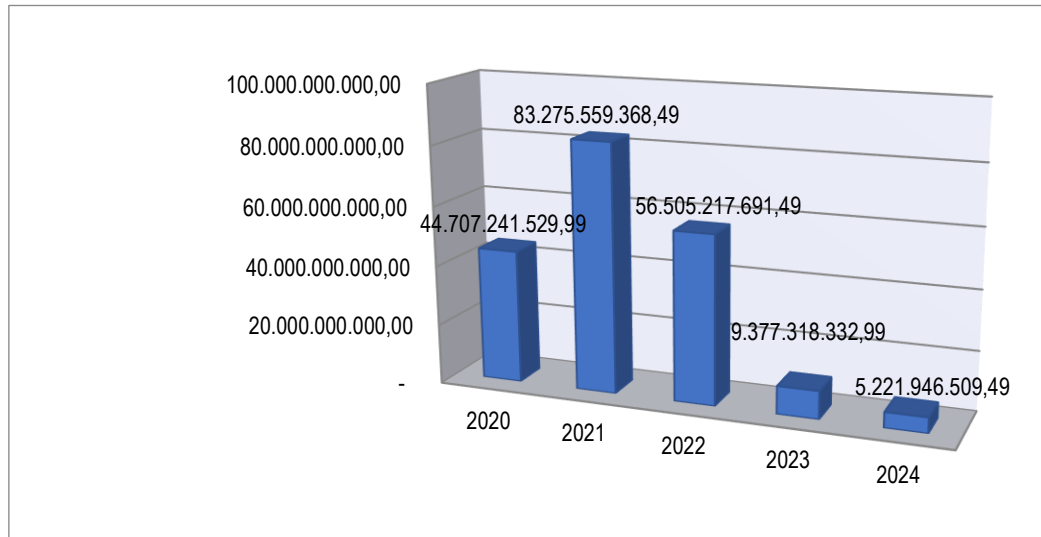
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada grafik 5.11 disajikan trend Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Bombana kurun 2020-2024.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 5.11

Grafik 5.Trend Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kab. Bombana Tahun 2020-2024



Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Nilai Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 direalisasikan senilai **Rp5.221.946.509,49**. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai (**Rp4.155.371.823,50**) atau (**83,40%**) dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2023 dimana Saldo Anggaran Lebih Akhir tercatat senilai **Rp9.377.318.332,99**. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 dapat dilihat dengan rincian mutasi pada tabel 5.32.

Tabel 5.32
Laporan Perubahan Saldo Anggaran

NO.	U R A I A N	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	9.377.318.332,99	56.505.217.691,49
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	9.377.318.332,99	56.505.217.691,49
3	Sub Total	0,00	0,00
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	5.221.946.509,49	9.377.318.332,99
5	Sub Total	5.221.946.509,49	9.377.318.332,99
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain – Lain /SiLPA Dana Khusus	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		5.221.946.509,49	9.377.318.332,99

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal senilai **Rp9.377.318.332,99** merupakan SiLPA tahun 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023. Saldo SiLPA tersebut digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada periode APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir adalah saldo akhir yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai SiLPA pada periode anggaran berikutnya. Tercatat Saldo Anggaran Lebih (SAL)



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Akhir Pemerintah Kabupaten Bombana per 31 Desember 2024 yaitu SiLPA murni senilai **Rp5.221.946.509,49**.

Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2024 senilai **Rp5.221.946.509,49** merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bombana kecuali Kas Lainnya selain BUD dan Utang PFK BUD yang merupakan sisa PFK yang belum disetorkan oleh SKPD sampai dengan 31 Desember 2024.

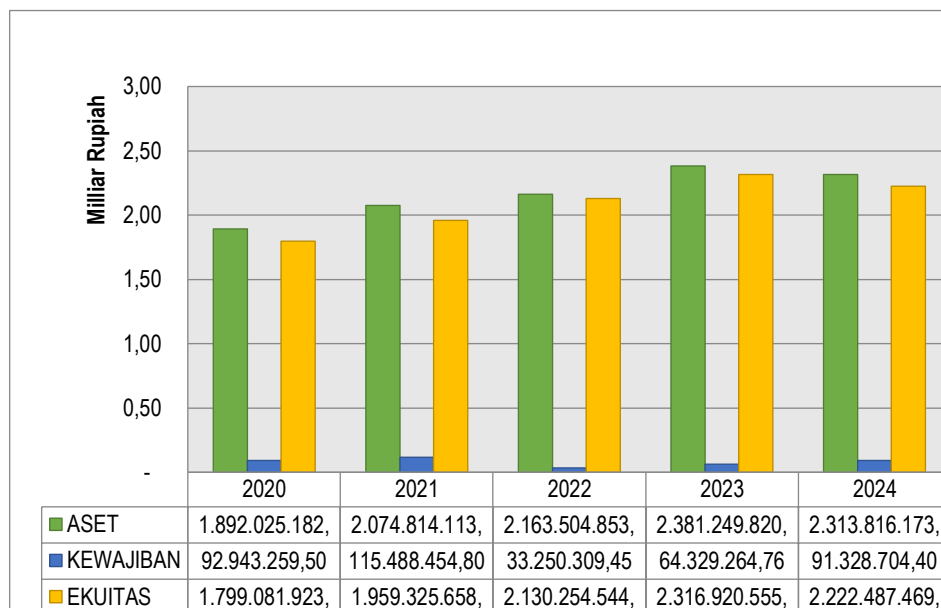
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Posisi Neraca	31-Des-24	31-Des-23
Aset Lancar	55.842.649.809,10	50.641.664.752,93
Investasi Jangka Panjang	39.720.796.300,00	39.720.796.300,00
Aset Tetap	2.107.387.055.339,55	2.070.353.557.413,76
Aset Lainnya	118.271.616.342,68	220.533.801.635,69
Jumlah Aset	2.321.222.117.791,33	2.381.249.820.102,38
Kewajiban Jangka Pendek	102.907.205.301,86	64.329.264.764,86
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	102.907.205.301,86	64.329.264.764,86
Ekuitas	2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.321.222.117.791,33	2.381.249.820.102,38

Perkembangan nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada grafik 5.12.

Grafik 5.12 Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2020-2024



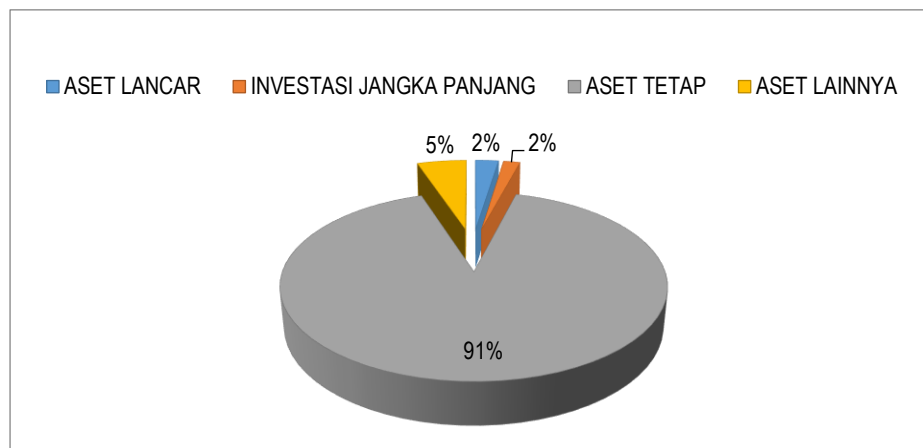


PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat,serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Bombana per 31 Desember 2024 disajikan pada grafik 5.13.

Grafik 5.13 Komposisi Aset Kab. Bombana Tahun 2024



5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas di Kasda

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Kas Daerah	832.351.859,49	921.142.531,49	(88.790.672,00)	(9,64)
Jumlah	832.351.859,49	921.142.531,49	(88.790.672,00)	(9,64)

Saldo kas di Kasda adalah saldo kas yang terdapat pada Rekening Umum Kas Daerah sesuai dengan Buku Kas Umum Kasda dan rekening koran per 31 Desember 2024 senilai **Rp832.351.859,49**. Nilai saldo tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp88,790,672,00)** dengan persentase **(9,64%)** dibandingkan nilai saldo kas di Kasda tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 yakni **Rp921.142.531,49**. Rincian saldo kas pada rekening Giro Kasda dapat dilihat pada tabel 5.33.

Tabel 5. 33
Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
BPD Sultra - 01020000013	36.456.837,00	52.677.452,00	(16.220.615,00)	(30,79)
Reconciling Items	756.760.575,49	675.532.790,49	81.227.785,00	12,02



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rekonsiliasi 2013	0,49	0,49		
gaji 2017	11.099.944,00	11.099.944,00		
lebih pajak 2017	5.181.818,00	5.181.818,00		
lebih pajak 2016	25.876.752,00	25.876.752,00		
lebih pajak 2016	17.104.145,00	17.104.145,00		
lebih pajak 2016	95.397.578,00	95.397.578,00		
lebih pajak 2016	518.743.921,00	518.743.921,00		
lebih pajak 2023		255.405,00		
lebih pajak 2023		1.872.973,00		
Lebih JKK/JKM 2023		254		
lebih pajak 2024	82.543.732,00			
lebih pajak 2024	812.685,00			
BPD Sultra - 01020000025	38.329.132,00	154.024.551,00	(115.695.419,00)	(-75,11)
BPD Sultra - 01020003351	805.315,00	38.907.738,00	(38.102.423,00)	(97,93)
Jumlah	832.351.859,49	921.142.531,49	-88.790.672,00	(9,64)

Untuk Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan (SILPA) yang tidak sesuai peruntukannya sebesar **Rp44.917.203.361,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33.a
Daftar Rincian SILPA Tidak Sesuai Peruntukannya

SUMBER PENDANAAN	PENDAPATAN DAN SUMBER PENERIMAAN	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	SILPA DANA KHUSUS
PAD			-
DAU	363,630,481,000.00	363,630,481,000.00	-
DAU TERIKAT			
DAU PPPK	19,629,396,000.00	19,629,396,000.00	-
DAU PENDIDIKAN	61,556,247,000.00	43,454,123,076.00	18,102,123,924.00
DAU KESEHATAN	26,900,408,000.00	24,743,211,807.00	2,157,196,193.00
DAU PEKERJAAN UMUM	23,505,177,000.00	15,597,374,206.00	7,907,802,794.00
DAU KELURAHAN	4,400,000,000.00	3,655,511,122.00	744,488,878.00
DBH PUSAT	-	0	-
DBH SAWIT	8,713,124,000.00	3,034,618,000	5,678,506,000.00
DBH DAERAH	35,189,129,558.00	35,189,129,558.00	-
DAK FISIK	71,548,170,798.00	66,013,670,100	5,534,500,698.00
DAK NON FISIK			-
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	48,436,491,300.00	47,442,481,280.00	994,010,020.00
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	6,733,718,600.00	6,701,057,230.00	32,661,370.00
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	2,324,650,000.00	2,195,250,000.00	129,400,000.00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	6,139,091,000.00	5,065,437,569.00	1,073,653,431.00
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4,869,190,000.00	4,259,276,886.00	609,913,114.00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

SUMBER PENDANAAN	PENDAPATAN DAN SUMBER PENERIMAAN	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	SILPA DANA KHUSUS
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,851,525,000.00	1,851,525,000.00	-
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)	406,000,000.00	305,719,500.00	100,280,500.00
DID	15,208,211,000.00	13,355,544,561.00	1,852,666,439.00
JUMLAH	701,041,010,256.00	656,123,806,895.00	44,917,203,361.00

Atas penggunaan rekening tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bank Sultra Cab. Bombana 108.01.02.000001-3 merupakan Rekening Kas Umum Daerah. Rekening tersebut merupakan rekening utama yang digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Untuk transaksi yang sifatnya penerimaan daerah, rekening ini digunakan untuk menerima dan menyimpan sumber-sumber dana perimbangan yang meliputi transfer atas Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, dana bagi hasil provinsi, jasa giro dan deposito, serta setoran-setoran atas temuan pengembalian. Adapun untuk transaksi yang sifatnya pengeluaran daerah rekening tersebut diperuntukkan untuk melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk menyalurkan dana non kapitasi, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil Pajak maupun Retribusi desa, serta pengeluaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD baik melalui mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, maupun LS.
- Bank Sultra Cab. Bombana 108.01.02.000002-5 merupakan rekening kas daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan transaksi atas penerimaan yang bersumber dari penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, penerimaan dari non kapitasi BPJS.
- Bank Sultra Cab. Bombana 108.01.05.000335-1 merupakan rekening yang difungsikan untuk menyimpan Penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Penerimaan	20.085.997,00	95.571.540,00	(75.485.543,00)	(78,98)
Jumlah	20.085.997,00	95.571.540,00	(75.485.543,00)	(78,98)

Kas di Bendahara Penerima tahun 2024 senilai **Rp20.085.997,00** merupakan saldo Kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan SKPD bersumber dari pungutan maupun setoran atas pendapatan daerah, sedangkan saldo kas dibendahara penerimaan tahun 2023 senilai **Rp95.571.540,00** telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Kas Daerah pada tahun 2024, dengan Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan dapat dilihat tabel 5.34.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 34
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	Saldo	Saldo
		Per 31-Des-2024	Per 31-Des-2023
1	Dinas Perhubungan	-	35.380.000,00
2	Dinas Perindagkop & PKM	173.000,00	60.191.540,00
3	Badan Keuangan Daerah	19.912.997,00	
	Jumlah	20.085.997,00	95.571.540,00

Berdasarkan PSAP Nomor 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada rekening kas umum negara/daerah dapat dijelaskan bahwa saldo kas tersebut merupakan realisasi pendapatan di akhir tahun yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan SKPD, namun sudah dilakukan penyetoran ke Kasda di awal tahun 2024. Berikut rincian penyetorannya dapat dilihat pada tabel 5.35.

Tabel 5. 35
Daftar Penyetoran

No	SKPD	Tanggal STS	Jumlah Setoran
1	Badan Keuangan Daerah	02-Jan-25	19.912.997,00
2	Dinas Perindagkop dan UKM		173.000,00
	Jumlah Dinas Perhubungan		20.085.997,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Pengeluaran	136.711.579,00	98.800,00	136.612.779,00	138.272,04
Jumlah	136.711.579,00	98.800,00	136.612.779,00	138.272,04

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Tambah Uang (TU) pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang sampai tanggal 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terjadi kenaikan senilai **Rp136.612.779,00** dengan persentase **138.272,04%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan yaitu senilai **Rp136.612.779,00**. Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel 5.36.

Tabel 5. 36
Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	Sisa Kas Per 31- Des-2024 (Rp)	Tanggal Setor	Keterangan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.393.000,00		TU
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	105.453.729,00		TU
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.064.850,00		TU
4	Kelurahan Bambaesa	7.800.000,00		TU
	Jumlah	136.711.579,00		



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di BLUD	394.775.125,00	4.424.263.680,00	(4.029.488.555)	(91,08)
Jumlah	394.775.125,00	4.424.263.680,00	(4.029.488.555)	(91,08)

Saldo kas pada Bendahara BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah. Diketahui bahwa terdapat saldo kas pada Bendahara BLUD pada RSUD senilai **Rp394.775.125,00** per 31 Desember 2024. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang senilai **Rp4.424.263.680,00** maka dapat kita lihat bahwa mengalami penurunan nilai dengan persentase **(91,08%)** atau senilai **(Rp4.029.488.555,00)**. Saldo tersebut tersimpan pada rekening BLUD di Bank Sultra Cab. Bombana dengan nomor rekening 108.01.05.000577-3.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Dana BOS	22.966.714,00	113.091.855,00	(90.125.141,00)	(79,69)
Jumlah	22.966.714,00	113.091.855,00	(90.125.141,00)	(79,69)

Per 31 Desember 2024 terdapat saldo kas pada Bendahara pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD/Kesetaraan dan Satuan Pendidikan Dasar Negeri lingkup Kabupaten Bombana senilai **Rp22.966.714,00** Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang senilai **Rp113.091.855,00** maka dapat kita lihat bahwa mengalami penurunan saldo dengan persentase **(79,69)%** atau senilai **Rp90.125.141,00**. Untuk lebih jelasnya rincinya dapat dilihat pada **lampiran 5.5**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara FKTP	9.315.617,00	3.204.353,50	6.111.263,50	190,72
Jumlah	9.315.617,00	3.204.353,50	6.111.263,50	190,72

Merupakan saldo kas yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi-JKN. Rincian dapat dilihat pada **lampiran 5.6**

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas Lainnya selain BUD	0,00	37.389.184,00	-37.389.184,00	- 100,00
Jumlah	0,00	37.389.184,00	-37.389.184,00	- 100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kas lainnya merupakan Saldo Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa pajak yang belum disetorkan ke kas negara, pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat kas lainnya.

5.3.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

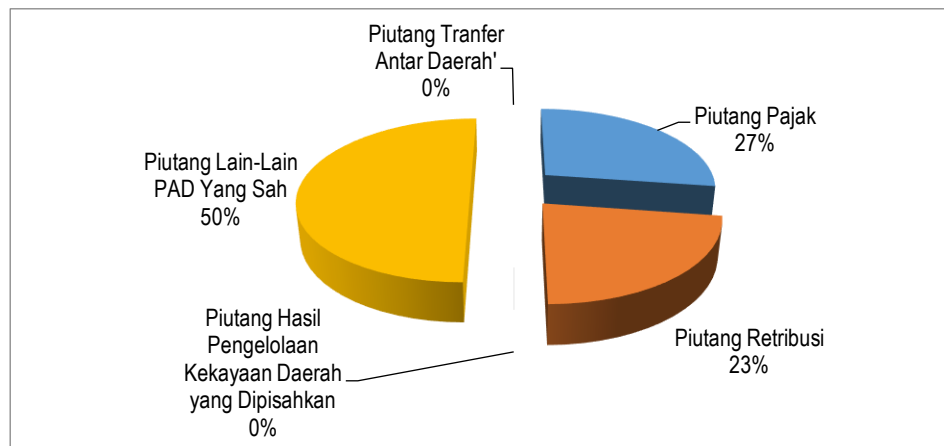
Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas BOK Puskesmas	3.866.483.638,00	3.823.159.248,00	43.324.390,00	1,13
Jumlah	3.866.483.638,00	3.823.159.248,00	43.324.390,00	1,13

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai **Rp3.866.483.638,00** dan per 31 Desember 2023 **Rp3.823.159.248,00**. Kas Dana BOK adalah merupakan saldo kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas se-Kabupaten Bombana.

5.3.1.1.9 Piutang

Piutang daerah merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih. Piutang netto pada tahun 2024 senilai **Rp8.583.381.522,20**, sedangkan pada tahun 2023 piutang netto senilai **Rp16.206.533.533,78**. Rincian masing-masing penyisihan piutang dapat dilihat pada **lampiran 5.7**. Komposisi piutang daerah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada grafik 5.14 berikut.

Grafik 5.14 Komposisi Piutang TA. 2024



Secara keseluruhan Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat pada tahun 2024 senilai **Rp8.583.381.522,20** dan tahun 2023 senilai **Rp18.844.704.808,14** dengan rincian terlihat pada tabel 5.37. sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.37
Daftar Saldo Piutang TA 2024

OPD	Uraian	31-Des-24	31-Des-23
Badan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Daerah	2.341.094.759,20	2.994.606.361,14
Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Kepelabuhan	62.843.546,00	12.848.600,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM	Piutang Retribusi Pasar	1.884.749.770,00	2.100.326.363,00
Dinas Kominfo	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	8.700.000,00
Sekretariat Daerah	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.525.000,00	6.000.000,00
BLUD RSUD	Piutang Pendapatan Lainnya (BLUD)	4.151.275.447,00	6.194.640.200,00
Badan Keuangan Daerah/PPKD	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan Bermotor	140.893.000,00	0,00
Badan Keuangan Daerah/PPKD	Piutang Pendapatan Transfer Provinsi	0,00	7.527.583.284,00
Jumlah		8.583.381.522,20	18.844.704.808,14

5.3.1.1.9.1 Piutang Pajak

Piutang pajak pada tahun 2024 tercatat senilai **Rp2.341.094.759,20** sedangkan pada tahun 2023 senilai **Rp2.994.606.361,14** dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.38.

Tabel 5.38
Daftar Piutang Pajak

Uraian	31-Des-24	31-Des-23
Pajak Hotel	38.965.500,00	150.000,00
Pajak restoran/rumah makan dan sejenisnya	24.638.280,00	27.071.835,40
Pajak Hiburan	0,00	1.470.000,00
Pajak Reklame	14.225.000,00	9.819.500,00
Pajak Penerangan Jalan	589.632.955,00	557.302.671,54
Pajak Air Tanah	1.418.297,20	3.659.429,20
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.011.921.130,00	1.805.583.013,00
PBB P2	561.293.597,00	546.674.912,00
BPHTB	99.000.000,00	36.200.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	6.675.000,00
Jumlah	2.341.094.759,20	2.994.606.361,14

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 senilai **Rp560.600.768,33** Sehingga piutang pajak netto dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.39
Piutang Pajak Netto

Uraian	Jumlah
Piutang Pajak Tahun 2024	2.341.094.759,20
Beban Penyisihan Piutang	(560.600.768,33)
Piutang Pajak Netto	1.780.493.990,87



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi

Piutang retribusi pada tahun 2024 senilai **Rp1.950.118.316,00** sedangkan pada tahun 2023 senilai **Rp2.127.874.963,00**. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.40.

Tabel 5.40
Daftar Piutang Retribusi

Uraian	31-Des-24	31-Des-23
Retribusi Pelayanan Pasar	1.884.749.770,00	2.100.326.363,00
Retribusi Kepelabuhanan	62.843.546,00	12.848.600,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	8.700.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Karpet Lapangan Badminton)	2.525.000,00	6.000.000,00
Jumlah	1.950.118.316,00	2.127.874.963,00

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 senilai **Rp1.803.386.256,00** dapat dihitung sebagai berikut.

Tabel 5.41
Penyisihan Piutang Retribusi

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	66.740.546,00	0,50%	333.707,73
Kurang Lancar	7.075.500,00	10,00%	707.550,00
Diragukan	147.258.858,00	50,00%	73.629.429,00
Macet	1.729.042.412,00	100,00%	1.729.042.412,00
Total	1.950.118.316,00		1.803.713.098,73

Sehingga piutang retribusi netto dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.42
Piutang Reteribusi Netto

Uraian	Jumlah
Piutang Retribusi Tahun 2024	1.950.118.316,00
Penyisihan Piutang	(1.803.713.098,73,)
Piutang Retribusi Netto	146.405.217,27

5.3.1.1.9.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tidak terdapat Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 dan tahun 2023 yaitu bernilai **Rp0,00**

5.3.1.1.9.4 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Piutang BLUD)

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain PAD yang sah	4.151.275.447,00	6.194.640.200,00	(2.043.364.753,00)	(32,99)
Jumlah	4.151.275.447,00	6.194.640.200,00	(2.043.364.753,00)	(32,99)



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tahun 2024 senilai **Rp4.151.275.447,00** dan pada tahun 2023 senilai **Rp6.194.640.200,00**. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan Piutang BLUD senilai Rp4.151.275.447,00 yang belum terbayar sampai 31 Desember 2024. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 senilai **Rp20.756.377,74** dapat dihitung sebagai berikut.

Tabel 5.43
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	4.151.275.447,00	0,50%	20.756.377,74
Kurang Lancar	0,00	10,00%	0,00
Diragukan	0,00	50,00%	0,00
Macet	0,00	100,00%	0,00
Total	0.00		20.756.377,74

Sehingga piutang Lain-Lain PAD Yang Sah netto dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.44
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto

Uraian	Jumlah
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024	4.151.275.447,00
Penyisihan Piutang	(20.756.377,74)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	4.130.519.069,26

5.3.1.1.9.5 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0,00	7.527.583.284,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	7.527.583.284,00	0,00	0,00

Piutang Transfer Bagi hasil Pajak Daerah merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Tahun 2024 yang belum diterima sampai 31 Desember 2024 senilai **Rp0,00**.

Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2024 senilai **Rp0,00** dapat dihitung sebagai berikut.

Tabel 5.45
Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10,00%	0,00
Diragukan	0,00	50,00%	0,00
Macet	0,00	100,00%	0,00
Total	0,00		0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sehingga piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah netto dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.46
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Netto

Uraian	Jumlah
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
Penyisihan Piutang	0,00
Piutang Retribusi Netto	0,00

5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat beban sewa dibayar dimuka

5.3.1.1.11 Persediaan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Persediaan	44.361.648.002,21	25.017.210.027,16	19.344.437.975,05	77,32
Jumlah	44.361.648.002,21	25.017.210.027,16	19.344.437.975,05	77,32

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bombana, dalam perhitungan persediaan menggunakan dua metode, yaitu:

a. Metode *Perpetual*

Metode *Perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues*, membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan/bahan farmasi.

b. Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode ini digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2024 senilai **Rp44.361.648.002,21** atau naik senilai 77,32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp25.017.210.027,16**. Berikut rincian persediaan dapat dilihat dalam tabel 5.47.

Tabel 5.47
Rincian Persediaan Tahun 2024

No	Uraian	31-Des-24	31-Des-23
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	-	0,00
2	Bahan bakar minyak	-	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31-Des-24	31-Des-23
3	Peralatan dan Kebersihan	-	0,00
4	Cetak dan penggandaan	28.844.750,00	15.651.000,00
5	Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00
6	Makanan dan Minuman	0,00	0,00
7	Barang di serahkan ke masyarakat	0,00	0,00
8	Peralatan listrik dan Elektronik	0,00	0,00
9	Perangko, materai dan benda pos	0,00	0,00
10	Persediaan benda berharga	0,00	0,00
11	Stock Laboratorium	0,00	0,00
12	Instalasi Farmasi	0,00	0,00
13	Blangko KTP /Akte Kelahiran	0,00	0,00
14	Barang Medis Pakai Habis	0,00	0,00
15	Instalasi Gizi/makan minum pasien	0,00	0,00
16	Alkes/Belanja Alat/Non Alat	0,00	0,00
17	Obat-obatan ikan (Pakan)	0,00	0,00
18	Bahan/bibit tanaman	0,00	0,00
19	Obat-obatan	6.748.436.103,21	5.044.207.047,16
20	Obat-obatan lainnya	-	148.053.135,00
21	Bahan pangan/beras	784.764.792,00	-
22	Bahan lainnya	456.566.710,00	101.142.195,00
23	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	36.343.035.647,00	19.708.156.650,00
	Total	44.361.648.002,21	25.017.210.027,16

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan persediaan senilai **Rp19.344.437.975,05** atau senilai **77,32%** dari **Rp25.017.210.027,16** Per 31 Desember 2023 menjadi **Rp44.361.648.002,21** per 31 Desember 2024. Kenaikan persediaan lebih dominan pada Barang diserahkan ke masyarakat, obat-obatan, dan Alkes/belanja Alat/Non Alat. Rincian Persediaan per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.8.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Investasi Jangka Panjang	39.720.796.300	39.720.796.300,00	0,00	(0,00)
Jumlah	39.720.796.300	39.720.796.300,00	0,00	(0,00)

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp39.720.796.300,00** dan **Rp39.720.796.300,00** dengan rincian pada tabel 5.48.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.48

Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Bank Sultra	37.591.000.000,00	37.591.000.000,00
2	BPR Bahteramas	705.000.000,00	705.000.000,00
3	PD Wonua Bombana	1.424.796.300,00	1.424.796.300,00
4	PDAM	0,00	0,00
	Jumlah	39.720.796.300,00	39.720.796.300,00

5.3.1.2.1 Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah

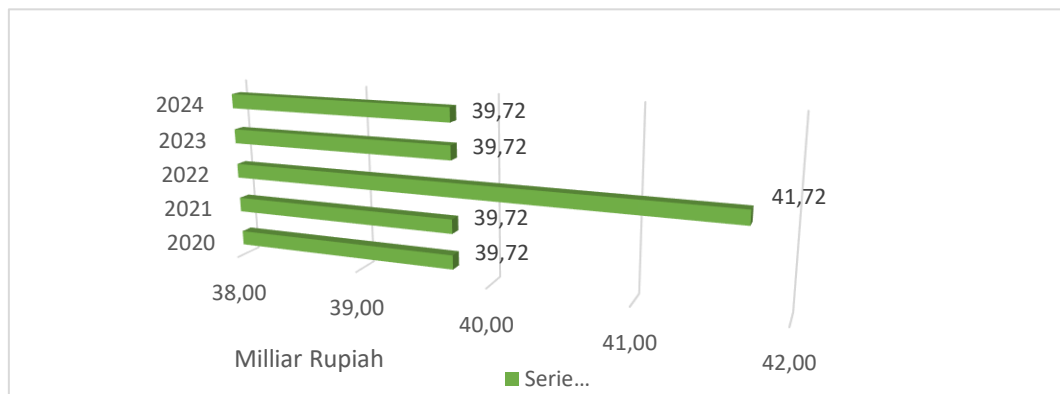
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana berupa Penyertaan Modal pada Bank Sultra, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas, PD Wonua Bombana, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bombana.

Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp39.720.796.300,00**.

Terkait kerugian PDAM, Pemerintah Kabupaten Bombana pernah menyajikan saldo penyertaan modal PDAM Kabupaten Bombana. Namun sejak tahun 2023 PDAM mengalami kerugian. Atas kerugian tersebut diakui sebagai pengurang penyertaan modal pemerintah daerah karena kepemilikan modal melebihi 20% sehingga pencatatan menggunakan metode ekuitas. Sejak tahun 2023, saldo penyertaan modal pada PDAM terkoreksi sudah bernilai Rp0,00.

Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Kab. Bombana dari tahun 2020-2024, dapat di lihat pada grafik 5.15 berikut ini.

**Grafik 5.15 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal
Kab. Bombana 2020-2024**



Berdasarkan garfik perkembangan Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bombana, dapat dilihat bahwa nilai investasi pada tahun 2024 tidak ada peningkatan atau penambahan investasi.



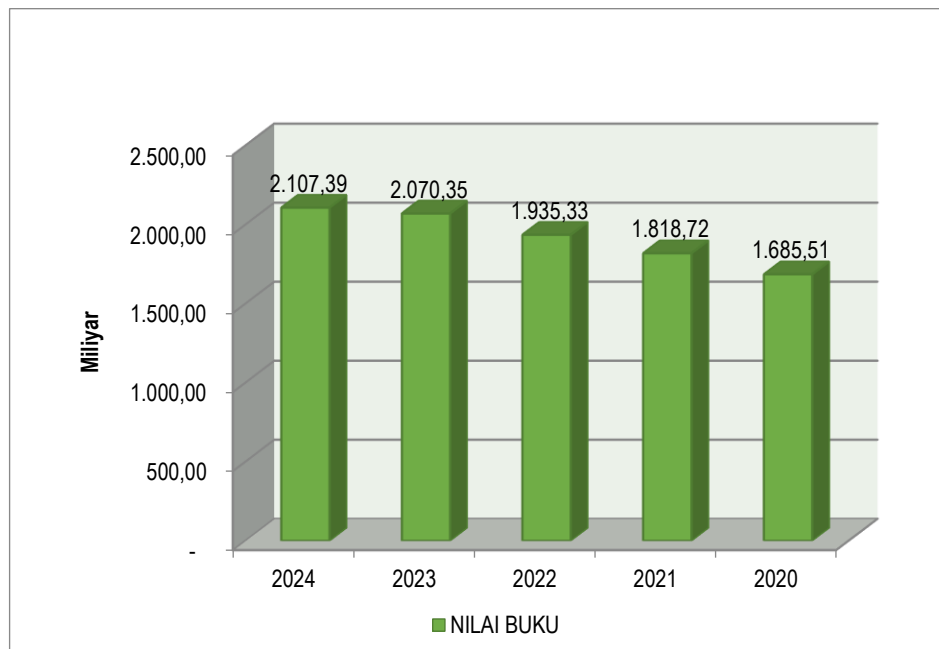
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3 Aset Tetap

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Tanah	175.377.050.588,00	171.759.156.592,00	3.617.893.996,00	2,11
Peralatan dan Mesin	475.869.384.819,84	435.659.087.381,84	40.210.297.438,00	9,23
Gedung dan Bangunan	1.093.121.540.702,72	1.053.844.007.450,72	39.277.533.252,00	3,73
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.660.535.472.641,50	1.532.230.013.580,50	128.305.459.061,00	8,37
Aset Tetap Lainnya	43.020.872.080,79	41.084.979.580,79	1.935.892.500,00	4,71
Konstruksi dalam Pekerjaan	60.132.777.287,35	44.669.277.340,35	15.463.499.947,00	34,62
Akumulasi Penyusutan	(1.400.670.042.780,65)	(1.208.892.964.512,44)	(191.777.078.268,21)	15,86
Jumlah / Nilai Buku	2.107.387.055.339,55	2.070.353.557.413,76	37.033.497.925,79	1,79

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Perubahan nilai aset tetap merupakan indikator kemampuan sumber daya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi operasional penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai penopang peningkatan ekonomi wilayah Kabupaten Bombana. Pada grafik 5.16 terlihat tren nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bombana 2020-2024 berdasarkan nilai buku sebagai berikut:.

Grafik 5.16 Aset Tetap berdasarkan Nilai Buku Tahun 2020 – 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap antara lain terdiri dari:

- Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
- Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan Alat Besar, Alat Angkutan Bermotor, Alat Angkutan Tak Bermotor, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Alat Besar, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat eksplorasi, Alat pengeboran, Alat produksi, pengolahan dan pemurnian, Alat bantu eksplorasi, Alat keselamatan kerja, Alat peraga, Peralatan proses/produksi, Rambu – rambu, Peralatan olah raga;
- Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/ Pasti, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi.
- Aset Tetap Lainnya, meliputi Bahan Perpustakaan, Bahan Perpustakaan Tercetak, Bahan perpustakaan lainnya, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman dan Barang Koleksi, dan Aset Renovasi.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Saldo Nilai Buku aset tetap pemerintah Kabupaten Bombana per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp2.107.387.055.339,55** terdiri dari:

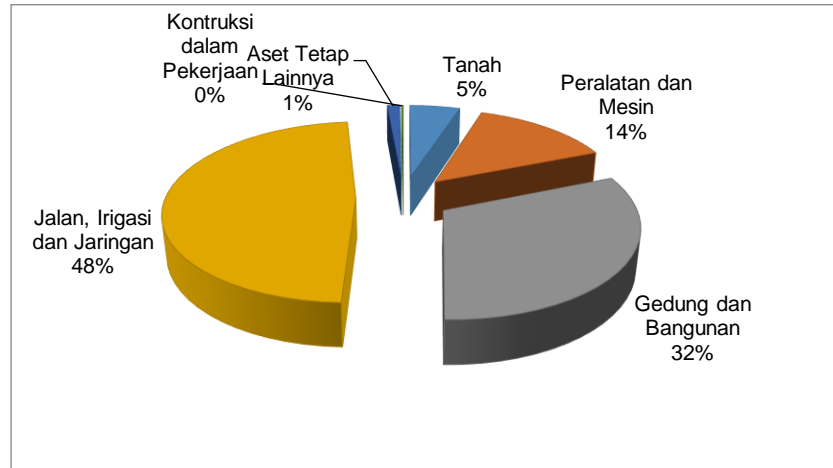
1 Tanah	Rp	175.377.050.588,00
2 Peralatan dan Mesin	Rp	475.869.384.819,84
3 Bangunan dan Gedung	Rp	1.093.121.540.702,72
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.660.535.472.641,50
5 Aset Tetap Lainnya	Rp	43.020.872.080,79
6 Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp	60.132.777.287,35
7 Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.400.670.042.780,65)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.107.387.055.339,55

Komposisi aset tetap berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada grafik 5.17.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 5.17 Persentase Aset Tetap per Jenis TA. 2024



Berikut adalah data mutasi tambah dan kurang aset tetap tahun 2024

Tabel 5.49
Penambahan dan Pengurangan Aset tetap TA. 2024

No	Uraian	Saldo Aset Tetap	Mutasi Aset		Saldo Aset Tetap
		Per 31 Des 2023			Per 31 Des 2024
		(Rp)	Penambahan Aset Tahun 2024	Pengurangan Aset Tahun 2024	(Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Tanah	171.759.156.592,00	3.666.348.996,00	48.455.000,00	175.377.050.588,00
2	Peralatan dan Mesin	435.659.087.381,84	58.146.130.244,00	17.935.832.806,00	475.869.384.819,84
3	Bangunan dan Gedung	1.053.844.007.450,72	71.654.251.927,00	32.376.718.675,00	1.093.121.540.702,72
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.532.230.013.580,50	142.907.741.221,00	14.602.282.160,00	1.660.535.472.641,50
5	Aset Tetap Lainnya	41.084.979.580,79	4.429.949.236,00	2.494.056.736,00	43.020.872.080,79
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.669.277.340,35	15.555.228.737,00	91.728.790,00	60.132.777.287,35
7	Akumulasi Penyusutan	(1.208.892.964.512,44)	(1.398.329.964.719,34)	2.340.078.061,31	(1.400.670.042.780,65)
J U M L A H		2.070.353.557.413,76	(1.101.970.314.358,34)	69.889.152.228,31	2.107.387.055.339,55

5.3.1.3.1 Tanah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Tanah	175.377.050.588,00	171.759.156.592,00	3.617.893.996,00	2,11
Jumlah	175.377.050.588,00	171.759.156.592,00	3.617.893.996,00	2,11



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo tanah per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp175.377.050.588,00**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.617.893.996,00** atau **2,11%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp171.759.156.592,00**. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 5.50
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	171.759.156.592,00
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	1.623.988.996,00
2) Hibah	1.616.020.000,00
3) Reklasifikasi	423.040.000,00
4) Koreksi	3.300.000,00
5) Inventarisasi Aset	-
Jumlah	3.666.348.996,00
b. Pengurangan	
1) Mutasi Keluar	0,00
2) Koreksi	48.455.000,00
Jumlah	48.455.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	175.377.050.588,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah selama TA. 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Tanah senilai **Rp3.666.348.996** yang terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Modal TA 2024 senilai **Rp1.623.988.996**;
 - 2) Penambahan bersumber dari hibah senilai **Rp1.616.020.000,00**;
 - 3) Penambahan yang bersumber dari reklasifikasi senilai **Rp423.040.000,00**;
 - 4) Penambahan bersumber dari koreksi senilai **Rp3.300.000,00**;
- b. Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai **Rp48.455.000,00** yang terdiri dari:
 - 1) Pengurangan bersumber dari koreksi senilai **Rp48.455.000,00**;

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Peralatan dan Mesin	475.869.384.819,84	435.659.087.381,84	40.210.297.438,00	9,23
Jumlah	475.869.384.819,84	435.659.087.381,84	40.210.297.438,00	9,23

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp475.869.384.819,84**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp40.210.297.438,00** atau senilai **9,23%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp435.659.087.381,84**.

Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan Bermotor, Alat Angkutan Tak Bermotor, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Alat Besar, Komunikasi dan Pemancar, Alat



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat eksplorasi, Alat pengeboran, Alat produksi, pengolahan dan pemurnian, Alat bantu eksplorasi, Alat keselamatan kerja, Alat peraga, Peralatan proses/produksi, Rambu – rambu, Peralatan olah raga dan lain sebagainya. yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Adapun mutasi tambah kurang Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel 5.51 di bawah ini.

Tabel 5.51
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	435.659.087.381,84
a Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	46.649.909.911,00
2) Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak	606.244.200,00
3) Hibah	1.600.925.493,00
4) Reklasifikasi	134.862.000,00
5) Koreksi	6.317.858.477,00
6) Inventarisasi	-
7) Perolehan lainnya (BOS/BLUD)	2.836.330.163,00
8) Mutasi	-
9) Penghapusan	-
J u m l a h	58.146.130.244,00
b Pengurangan	
1) Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak	361.453.600,00
2) Hibah	-
3) Reklasifikasi	1.218.548.850,00
4) Koreksi	10.085.661.070,00
5) Inventarisasi	-
6) Perolehan lainnya (BOS/BLUD)	4.259.698.836,00
7) Mutasi	-
8) Penghapusan	2.010.470.450,00
J u m l a h	17.935.832.806,00
Saldo per 31 Desember 2024	475.869.384.819,84

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **Rp58.146.130.244,00** yang terdiri dari:
 - 1) Penambahan bersumber dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 **Rp46.649.909.911,00**;
 - 2) Penambahan aset dari utang realisasi belanja modal peralatan dan mesin senilai **Rp606.244.200,00**;
 - 3) Penambahan peralatan dan mesin bersumber dari hibah senilai **Rp1.600.925.493**;
 - 4) Penambahan aset karena reklasifikasi senilai **Rp134.862.000,00**;
 - 5) Penambahan aset karena koreksi senilai **Rp6.317.858.477,00**;
 - 6) Penambahan bersumber dari dana BOS senilai **Rp2.836.330.163,00**; dan
- b. Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin senilai **Rp17.935.832.806,00** yang terdiri dari:
 - 1) Pengurangan yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian/kontrak senilai **Rp361.453.600,00**;
 - 2) Pengurangan karena reklasifikasi senilai **Rp1.218.548.850,00**;
 - 3) Pengurangan yang bersumber dari koreksi senilai **Rp10.085.661.070,00**
 - 4) Pengurangan yang bersumber dari perolehan lainnya senilai **Rp4.259.698.836,00**



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 5) Pengurangan bersumber dari penghapusan aset sebab Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) senilai **Rp2.010.470.450 ,00** berupa Kendaraan Dinas.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Gedung dan Bangunan	1.093.121.540.702,72	1.053.844.007.450,72	39.277.533.252,00	3,73
Jumlah	1.093.121.540.702,72	1.053.844.007.450,72	39.277.533.252,00	3,73

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp1.093.121.540.702,72**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp39.277.533.252,00** atau senilai **3,73%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp1.053.844.007.450,72**.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, gedung/bangunan bersejarah, gedung, gedung museum, Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol Pasti.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Bangunan dan Gedung dapat dilihat pada tabel 5.52.

Tabel 5.52
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	1.053.844.007.450,72
a Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	52.190.485.037,00
2) Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak	4.587.504.141,00
3) Hibah	7.093.715.418,00
4) Reklasifikasi	2.572.454.250,00
5) Koreksi	5.060.253.806,00
6) Inventarisasi	-
7) Perolehan lainnya (BOS/BLUD)	149.839.275,00
8) Mutasi	-
9) Penghapusan	-
J u m l a h	71.654.251.927,00
b Pengurangan	
1) Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak	10.775.127.994,00
2) Hibah	-
3) Reklasifikasi	15.846.130.750,00
4) Koreksi	3.387.933.237,00
5) Inventarisasi	-
6) Perolehan lainnya (BOS/BLUD)	-
7) Mutasi	2.367.526.694,00
8) Penghapusan	-
J u m l a h	32.376.718.675,00
Saldo per 31 Desember 2024	1.093.121.540.702,72



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Adapun rincian penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai **Rp71.654.251.927,00** yang terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai **Rp52.190.485.037,00**;
 - 2) Penambahan Utang senilai **Rp4.587.504.141,00**;
 - 3) Penambahan yang bersumber dari reklasifikasi antar aset tetap senilai **Rp2.572.454.250,00**;
 - 4) Penambahan Koreksi senilai **Rp5.060.253.806,00**;
 - 5) Penambahan berupa Perolehan lainnya yaitu sebesar **Rp149.839.275,00**;
 - 6) Penambahan sumber dari hibah **Rp7.093.715.418,00**;
- b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai **Rp32.376.718.675,00** yang terdiri dari:
 - 1) Pengurangan bersumber dari Pembayaran Utang senilai **Rp10.775.127.994,00**;
 - 2) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan akibat reklasifikasi senilai **Rp15.846.130.750,00**
 - 3) Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan akibat Koreksi Senilai **Rp3.387.933.237,00**
 - 4) Pengurangan yang bersumber dari Mutasi senilai **Rp2.367.526.694,00**

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.660.535.472.641,50	1.532.230.013.580,50	128.305.459.061,00	8,37
Jumlah	1.660.535.472.641,50	1.532.230.013.580,50	128.305.459.061,00	8,37

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp1.660.535.472.641,50**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp128.305.459.061,00** atau senilai **8,37%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp1.532.230.013.580,50**.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel 5.53.

Tabel 5.53
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	1.532.230.013.580,50
a Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal	102.117.940.857,00
2) Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak	30.452.248.750,00
3) Hibah	5.963.365.652,00
4) Reklasifikasi	763.790.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5) Koreksi	1.363.677.543,00
6) Mutasi	2.246.717.969,00
7) Penghapusan	-
Jumlah	142.907.741.221,00
b Pengurangan	
1) Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak	9.191.099.304,00
2) Hibah	-
3) Reklasifikasi	5.071.713.687,00
4) Koreksi	339.469.169,00
Jumlah	14.602.282.160,00
Saldo per 31 Desember 2024	1.660.535.472.641,50

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA. 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp142.907.741.221,00** yang terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp102.117.940.857,00**;
 - 2) Penambahan pelaksanaan dari perjanjian/kontrak senilai **Rp30.452.248.750,00**;
 - 3) Penambahan bersumber dari Reklasifikasi senilai **Rp763.790.450,00**;
 - 4) Penambahan bersumber dari Koreksi senilai **Rp1.363.677.543,00**;
 - 5) Penambahan bersumber dari mutasi senilai **Rp2.246.717.969,00**;
 - 6) Penambahan bersumber dari hibah senilai **Rp5.963.365.652,00**
- b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp14.602.282.160,00** yang terdiri dari:
 - 1) Pengurangan bersumber dari pembayaran utang senilai **Rp9.191.099.304,00**;
 - 2) Pengurangan bersumber dari Reklasifikasi senilai **Rp5.071.713.687,00**;
 - 3) Pengurangan bersumber dari koreksi senilai **Rp339.469.169,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tetap Lainnya	43.020.872.080,79	41.084.979.580,79	1.935.892.500,00	4,71
Jumlah	43.020.872.080,79	41.084.979.580,79	1.935.892.500,00	4,71

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp43.020.872.080,79** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.935.892.500,00** atau senilai **4,71%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp41.084.979.580,79**.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel 5.54 di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.54
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	41.084.979.580,79
a. Penambahan	
1. Realisasi Belanja Modal	1.087.528.800,00
2. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	13.737.000,00
3. Reklasifikasi	1.667.041.100,00
4. Koreksi	150.545.300,00
5. Perolehan Lainnya	1.511.097.036,00
J u m l a h	4.429.949.236,00
b. Pengurangan	
1. Realisasi Belanja Modal	
2. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak	
3. Reklasifikasi	88.262.000,00
4. Koreksi	2.405.794.736,00
5. Perolehan Lainnya	
J u m l a h	2.494.056.736,00
Saldo per 31 Desember 2024	43.020.872.080,79

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai **Rp4.429.949.236,00** yang terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp1.087.528.800,00**;
 - 2) Penambahan pelaksanaan dari perjanjian/kontrak (utang retensi) senilai **Rp13.737.000,00**;
 - 3) Penambahan yang bersumber dari reklasifikasi senilai **Rp1.667.041.100,00**;
 - 4) Penambahan yang bersumber dari koreksi senilai **Rp150.545.300,00**;
 - 5) Penambahan dari Perolehan lainnya senilai **Rp1.511.097.036,00**;
- b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai **Rp2.494.056.736,00** yang terdiri dari:
 - 1) Pengurangan karena reklaksi aset tetap dan aset lainnya senilai **Rp88.262.000,00**;
 - 2) Pengurangan yang bersumber dari koreksi senilai **Rp2.405.794.736,00**;

5.3.13.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.132.777.287,35	44.669.277.340,35	15.463.499.947,00	34,62
Jumlah	60.132.777.287,35	44.669.277.340,35	15.463.499.947,00	34,62

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp60.132.777.287,35**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp15.463.499.947,00** atau senilai **34,62%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp44.669.277.340,35**. Rincian Mutasi KDP dapat dilihat pada tabel 5.55 di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.55
Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	44.669.277.340,35
a. Penambahan	
1) Reklasifikasi	15.555.228.737,00
2) Koreksi	
J u m l a h	15.555.228.737,00
b. Pengurangan	
1) Reklasifikasi	18.617.000,00
2) Koreksi	73.111.790,00
J u m l a h	91.728.790,00
Saldo per 31 Desember 2024	60.132.777.287,35

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.400.670.042.780,65)	(1.208.892.964.512,44)	(191.777.078.268,21)	15,86
Jumlah	(1.400.670.042.780,65)	(1.208.892.964.512,44)	(191.777.078.268,21)	15,86

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai **(Rp1.400.670.042.780,65)** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **(Rp191.777.078.268,21)** atau senilai **15.86%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **(Rp1.208.892.964.512,44)**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel 5.56 di bawah ini.

Tabel 5.56
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	175.377.050.588,00	-	175.377.050.588,00
2	Peralatan dan Mesin	475.869.384.819,84	(361.811.769.930,84)	114.057.614.889,00
3	Gedung dan Bangunan	1.093.121.540.702,72	(163.524.149.533,08)	929.597.391.169,64
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.660.535.472.641,50	(875.334.123.316,72)	785.201.349.324,78
5	Aset Tetap Lainnya	43.020.872.080,79	-	43.020.872.080,79
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.132.777.287,35	-	60.132.777.287,35
J U M L A H		3.508.057.098.120,20	(1.400.670.042.780,65)	2.107.387.055.339,55



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.4 Aset Lainnya

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Lainnya	118.271.616.342,68	220.533.801.635,69	(102.262.185.293,01)	(46,37)
Jumlah	118.271.616.342,68	220.533.801.635,69	(102.262.185.293,01)	(46,37)

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai **Rp118.271.616.342,68**. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp102.262.185.293,01)** atau **(46,37%)** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp220.533.801.635,69**.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Tagihan Jangka Panjang	75.213.843.733,00	74.757.059.001,00	456.784.732,00	0,61
Jumlah	75.213.843.733,00	74.757.059.001,00	456.784.732,00	0,61

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan senilai **Rp75.213.843.733,00**. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari per 31 Desember 2023 senilai **Rp74.757.059.001,00**. Adapun rincian Tagihan Jangka Panjang tersebut dapat dilihat dilihat pada tabel 5.57 berikut:

Tabel 5.57
Tambahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara TA 2023-2024

No.	Uraian	Nilai	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	487.842.903,00	487.842.903,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.522.654,00	77.522.654,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	24.805.541,00	24.805.541,00
4	Dinas Perikanan	27.232.661,00	27.232.661,00
5	Sekretariat Daerah	113.958.063,00	113.958.063,00
	Saldo Akhir	731.361.822,00	731.361.822,00

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tak Berwujud Nilai Bruto	8.843.069.880,00	5.858.256.780,00	2.984.813.100,00	50,95
Jumlah	8.843.069.880,00	5.858.256.780,00	2.984.813.100,00	50,95



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Aset Tak Berwujud (bruto) per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp8.843.069.880,00** dengan nilai Akumulasi Amortisasi senilai minus (**Rp899.329.228,00**) sehingga Nilai Netto Aset Tidak Berwujud tercatat senilai **Rp7.943.740.652,00**. Nilai netto tersebut mengalami peningkatan senilai **Rp2.984.813.100,00** atau sebesar **50,95%** dibandingkan dengan saldo bruto per 31 Desember 2023 senilai **Rp5.858.256.780,00** dengan nilai Akumulasi Amortisasi senilai minus (**Rp520.978.480,00**) dimana nilai Netto Aset Tidak Berwujud tercatat sebesar **Rp5.337.278.300,00**. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel 5.58 di bawah ini.

Tabel 5.58
Mutasi Aset Tak Berwujud

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	5.858.256.780,00
1. Penambahan	
1) Belanja ATB	1.377.595.700,00
2) Utang Pihak Ketiga	260.672.400,00
3) Reklasifikasi dari Aset Tetap	991.420.000,00
4) Koreksi Barjas Menjadi Aset Tak Berwujud	384.910.000,00
J u m l a h	3.014.598.100,00
2. Pengurangan	
1) Reklas ke Aset Tetap	29.785.000,00
J u m l a h	29.785.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	8.843.069.880,00

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tak Berwujud selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tak Berwujud senilai **Rp3.014.598.100,00** bersumber dari:
 - 1) Belanja Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 senilai **Rp1.377.595.700,00**
 - 2) Utang Pihak Ketiga senilai **Rp260.672.400,00**
 - 3) Reklasifikasi dari aset tetap sebesar **Rp991.420.000,00**; dan
 - 4) Koreksi barang dan jasa menjadi aset tak berwujud sebesar **Rp384.910.000,00**.
- b. Pengurangan Aset tak Berwujud disebabkan adanya reklas ke aset tetap sebesar **Rp29.785.000,00**

Penyajian nilai Aset tak berwujud dengan nilai netto dapat dilihat pada tabel 5.59.

Tabel 5.59
Aset Tak Berwujud dan Amortisasi

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Netto) (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	49.228.000,00	205.117,00	49.022.883,00
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	477.953.800,00	21.293.771,00	456.660.029,00
3	BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURGA BERENCANA	109.560.000,00	15.563.000,00	93.997.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Netto) (Rp)
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	769.397.000,00	76.515.542,00	692.881.458,00
5	BADAN RISET DAERAH	3.204.000.000,00	460.458.333,00	2.743.541.667,00
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	29.865.000,00	6.595.188,00	23.269.812,00
7	DINAS KESEHATAN	44.000.000,00	6.783.333,00	37.216.667,00
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	629.491.000,00	53.387.408,00	576.103.592,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	849.177.000,00	77.280.971,00	771.896.029,00
10	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	437.554.000,00	20.101.307,00	417.452.693,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.141.330.000,00	34.746.292,00	1.106.583.708,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	64.998.980,00	1.937.494,00	63.061.486,00
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	38.000.000,00	8.866.667,00	29.133.333,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	106.615.100,00	7.918.599,00	98.696.501,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	34.800.000,00	6.525.000,00	28.275.000,00
16	DINAS PERUMAHAN, PEMUKINAN DAN PERTANAHAN	150.000.000,00	6.056.834,00	143.943.166,00
17	DINAS SOSIAL	49.863.000,00	7.687.213,00	42.175.787,00
18	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	199.700.000,00	16.641.667,00	183.058.333,00
19	INSPEKTORAT	34.985.500,00	6.143.386,00	28.842.114,00
20	KECAMATAN KABAENA BARAT	30.000.000,00	5.625.000,00	24.375.000,00
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	42.571.500,00	6.563.106,00	36.008.394,00
22	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	34.980.000,00	6.121.500,00	28.858.500,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,00	62.500,00	14.937.500,00
24	SEKRETARIAT DPRD	300.000.000,00	46.250.000,00	253.750.000,00
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	8.843.069.880,00	899.329.228,00	7.943.740.652,00

Tabel 5.60
Aset Tak Berwujud Nilai Netto

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tak Berwujud Nilai Netto	7.943.740.652	5.337.278.300	2.606.462.352,00	48,84
Jumlah	7.943.740.652,00	5.337.278.300,00	2.606.462.352,00	48,84

Saldo Aset Tak Berwujud (netto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp7.943.740.652,00**. Pada nilai netto tersebut mengalami peningkatan sebesar **Rp2.606.462.352,00** atau sebesar **48,84%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp5.337.278.300,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Lain-lain	36.584.727.509,96	39.012.749.474,96	(2.428.021.965,00)	(6,22)
Jumlah	36.584.727.509,96	39.012.749.474,96	(2.428.021.965,00)	(6,22)

Aset lain-lain terdiri dari Aset Tetap Rusak Berat (Bruto) senilai **Rp36.584.727.509,96** dengan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat senilai minus (**Rp30.012.670.552,28**) sehingga nilai Netto Aset Tetap Rusak Berat tercatat senilai **Rp6.572.056.957,68**.

Aset Tetap Rusak Berat merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain, yang disebabkan karena kondisi rusak berat dan Aset untuk di hibahkan. Rincian dapat dilihat pada tabel 5.61.

Tabel 5.61
Rincian Saldo Aset Lain-Lain

No	Uraian Barang	Harga Perolehan 2024 (Rp)	Akum Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Netto) (Rp)
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	19.113.444.743,96	19.183.829.938,96	(70.385.195,00)
3	Bangunan dan Gedung	15.192.952.394,00	9.519.166.946,24	5.673.785.447,76
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.924.350.001,00	1.309.673.667,08	614.676.333,92
5	Aset Tetap Lainnya	353.980.371,00	-	353.980.371,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	-	-	-
	J U M L A H	36,584.727.509,96	30.012.670.552,28	6.572.056.957,68

5.3.1.4.4 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	28.541.975.000,00	131.276.444.000,00	(102.734.469.000,00)	(78,26)
Jumlah	28.541.975.000,00	131.276.444.000,00	(102.734.469.000,00)	(78,26)

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai **Rp28.541.975.000,00** dimana terjadi penurunan senilai (**Rp102.734.469.000,00**) atau (**78,26%**). Aset lainnya berupa DBH *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah tersebut ditetapkan melalui sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-447/KPN.2801/2024 tanggal 27 Februari 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

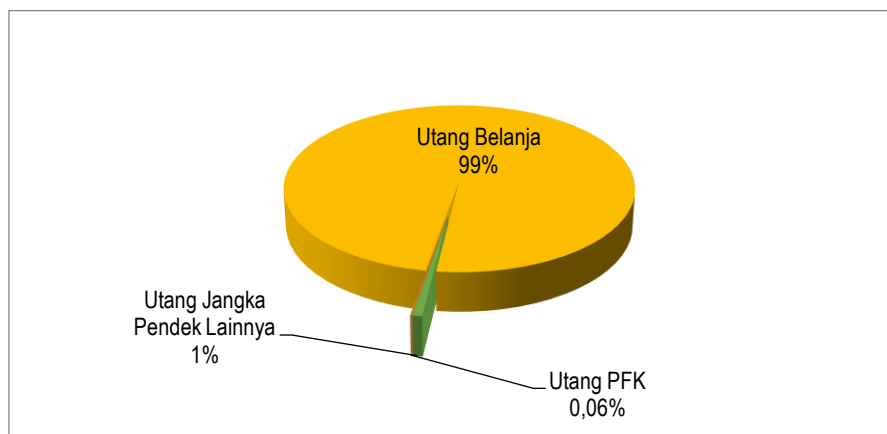
5.3.2 Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kewajiban Jangka Pendek	102.907.205.301,86	64.329.264.764,86	38.577.940.537,00	59,97
Jumlah	102.907.205.301,86	64.329.264.764,86	38.577.940.537,00	59,97

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 senilai **Rp102.205.301,86** dan tahun 2023 senilai **Rp64.329.264.764,86**. Saldo pada TA 2024 mengalami kenaikan yang signifikan yakni senilai **Rp38.577.940.537,00** atau senilai **59,97%**. Kenaikan nilai Kewajiban Jangka Pendek yang paling besar terjadi pada Utang Belanja Modal. Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana disajikan dalam grafik 5.18 berikut ini.

Grafik 5.18 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2024



5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 senilai **Rp60.744.020,00** merupakan utang pajak tahun 2024 atas pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran SKPD dan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2024 yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bombana.

5.3.2.1.2 Utang Belanja

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Utang Belanja	102.115.099.459,86	63.557.300.083,86	38.557.799.376,00	60,67
Jumlah	102.115.099.459,86	63.557.300.083,86	38.557.799.376,00	60,67

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai **Rp102.115.099.459,86** sedangkan per 31 Desember 2023 senilai **Rp63.557.300.083,86**, terjadi peningkatan senilai **Rp38.557.799.376,00** atau **60,67%**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Peningkatan Utang Belanja pada tahun 2024 terjadi pada utang belanja modal. Rincian Utang Belanja berdasarkan jenisnya dapat dijelaskan pada tabel 5.62 sebagai berikut.

Tabel 5.62
Daftar Utang Belanja

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	24.548.811.833,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	11.981.873.165,00
3	Utang Belanja Hibah	1.017.318.000,00
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	673.415.200,00
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.084.411.308,36
6	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.140.128.869,50
7	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	13.737.000,00
8	Utang Belanja Bantuan Keuangan	3.394.731.684,00
9	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	260.672.400,00
Saldo per 31 Desember 2024		102.115.099.459,86

Rincian utang belanja berdasarkan jenis dan perangkat daerah dapat dilihat selengkapnya pada **lampiran 5.10**.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Utang Jangka Pendek Lainnya	731.361.822,00	731.361.822,00	0,00	0,00
Jumlah	731.361.822,00	731.361.822,00	0,00	0,00

Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 senilai **Rp731.361.822,00** sedangkan per 31 Desember 2023 senilai **Rp731.361.822,00** sehingga tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Utang Jangka Pendek Lainnya senilai **Rp731.361.822,00** adalah Utang TGR disajikan dalam tabel 5.63.

Tabel 5.63
Utang Jangka Pendek Lainnya Menurut SKPD per 31 Desember 2024

NO	UNIT KERJA	TGR s.d 2024	TOTAL UTANG s.d 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	487.842.903,00	487.842.903,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	77.522.654,00	77.522.654,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	24.805.541,00	24.805.541,00
4	Dinas Perikanan	27.232.661,00	27.232.661,00
5	Sekretariat Daerah	113.958.063,00	113.958.063,00
JUMLAH		731.361.822,00	731.361.822,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.3 Ekuitas

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas	2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52	-98.605.642.848,05	(4,26)
Jumlah	2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52	-98.605.642.848,05	(4,26)

Ekuitas senilai **Rp2.218.314.912.489,47** merupakan Ekuitas Awal ditambah/dikurang Surplus/Defisit LO ditambah/dikurang dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi /koreksi persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64
Ekuitas

Ekuitas Awal	2.316.920.555.337,52
Surplus / Defisit LO	(98.754.372.498,29)
Lain-Lain/Koreksi	148.729.650,24
Ekuitas Akhir	2.218.314.912.489,47

Pada periode tahun 2024, terdapat perubahan yang menambah dan mengurangi ekuitas pemerintah daerah. Perubahan pertama adalah terdapat Surplus-LO pada Pemerintah Kabupaten Bombana. Sedangkan yang kedua adalah terdapat koreksi ekuitas yang menambah dan mengurangi ekuitas SKPD. Koreksi Ekuitas disebabkan oleh perubahan nilai aset tetap akibat reklas dan mutasi antar SKPD, perubahan nilai piutang, penyisihan piutang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban, serta koreksi kesalahan penyajian. Penjelasan Atas Koreksi Ekuitas dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4 Penjelasan Pos-Pos Operasional

Laporan operasional adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan yang menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO.

Surplus/defisit-LO Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2024 tercatat senilai **(Rp98.754.372.498,29)**. Surplus/defisit-LO Tahun 2024 mengalami penurunan senilai **Rp(178.040.699.060,30)** atau **(224,55)%** dibandingkan Surplus-LO pada tahun 2023 senilai **(Rp79.286.296.562,01)**. Surplus/defisit-LO Tahun 2024 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp97.687.682.498,29)**, Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai **Rp0,00**, dan Defisit Pos Luar Biasa senilai **(Rp1.066.690.00,00)**. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai **Rp1.122.373.033.776,06** dan Beban Operasional senilai **Rp1.220.060.716.274,35**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai **Rp0,00**. Diperoleh dari Defisit Non Operasional senilai **Rp0,00**. Laporan Operasional Tahun 2024 menyajikan angka Tahun 2023 sebagai pembandingan. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 5.19

Grafik 5.19

Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2020-2024



5.4.1 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

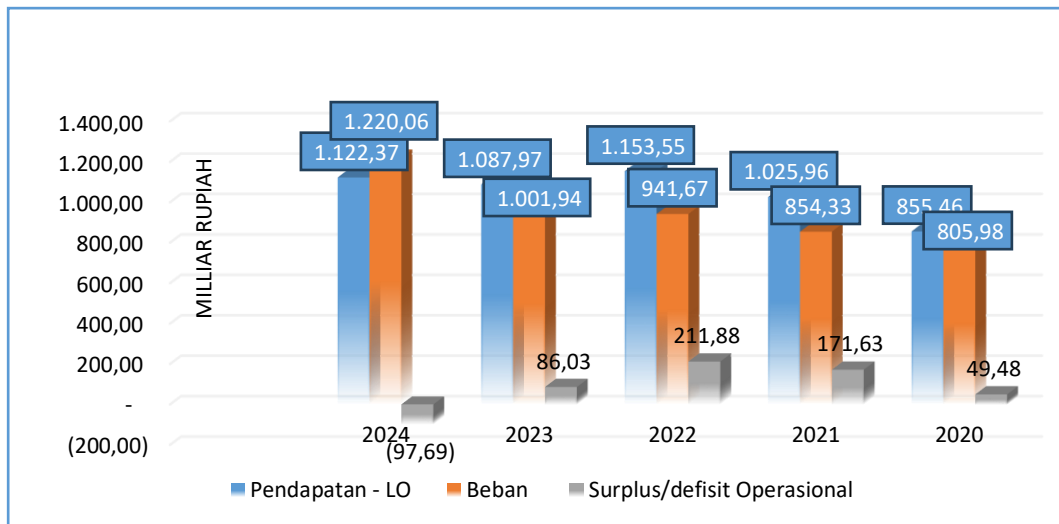
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain.

Selama periode Tahun 2024, nilai Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat senilai (**Rp97.687.682.498,29**) diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai **Rp1.122.373.033.776,06** dan Beban Operasional senilai **Rp1.220.060.716.274,35**. Nilai Surplus/defisit operasional tersebut mengalami kenaikan senilai (**Rp44.968.083.295,99**) atau sekitar (**56,72**)%. Perbandingan Pendapatan, beban, dan Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 5.20.

Grafik 5.20 Kegiatan Operasional 2020-2024



Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Bombana berada pada grafik tertinggi pada TA 2022 Pendapatan-LO pada tahun tersebut disebabkan oleh kenaikan yang pada kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pada periode dimana Pendapatan-LO tinggi, maka beban di periode tersebut cenderung tinggi mengikuti pendapatan. Adapun Surplus-LO tertinggi tercatat pada periode TA.2022c dimana pada periode tersebut banyak pembayaran utang beban yang pengakuan bebannya telah dicatat pada periode sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2. Pendapatan LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan LO	1.122.373.033.776,06	1.087.966.029.024,24	34.407.004.751,82	3,16
Jumlah	1.122.373.033.776,06	1.087.966.029.024,24	34.407.004.751,82	3,16

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp1.122.373.033.776,06** terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) senilai **Rp73.605.023.378,06**, Pendapatan Transfer-LO senilai **Rp1.023.482.378.832,00** dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp25.285.631.566,00**. Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Pendapatan LO

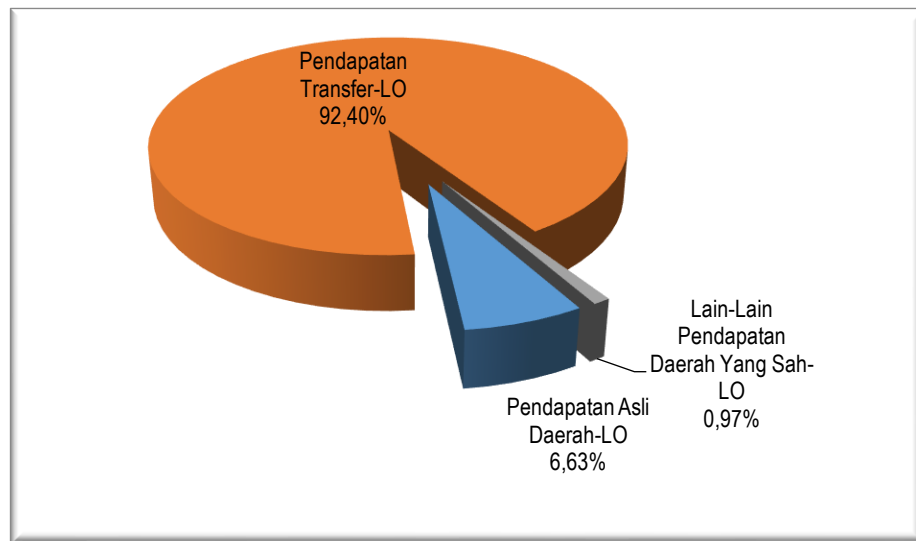
Uraian	2024	2023
PENDAPATAN DAERAH-LO	1.122.373.033.776,06	1.087.966.029.024,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	73.605.023.378,06	83.087.853.802,24
Pendapatan Pajak Daerah – LO	16.127.077.408,06	17.573.444.015,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	8.226.075.952,00	6.771.393.180,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	16.241.480.609,00	12.863.598.813,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	33.010.389.409,00	45.879.417.794,24
PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.023.482.378.832,00	992.703.059.746,00
Dana Perimbangan –LO	961.509.416.909,00	938.432.037.533,00
Insentif Fiskal	15.208.211.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	46.764.750.923,00	54.271.022.213,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	25.285.631.566,00	12.175.115.476,00
Pendapatan Hibah – LO	15.382.473.063,00	12.175.115.476,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	9.903.158.503,00	0,00

Komposisi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik 5.21.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 5.21 Pendapatan LO TA. 2024



5.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp73.605.023.378,06** Nilai ini mengalami penurunan **(11,41%)** atau senilai **(Rp9.482.830.424C,18)** dibandingkan tahun 2023 dimana tercatat Pendapatan Asli Daerah-LO teralisasi senilai **Rp83.087.853.802,24**. Pendapatan Asli Daerah-LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.66 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

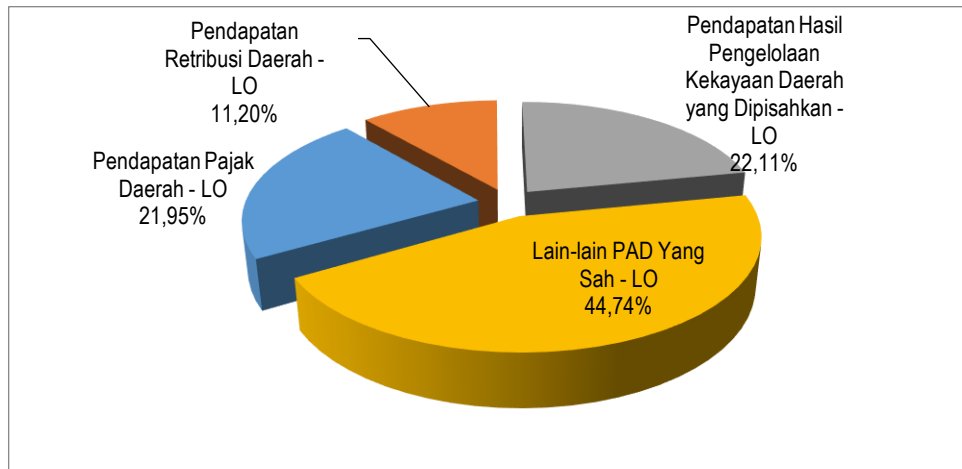
URAIAN	2024	2023
Pendapatan Pajak Daerah	16.127.077.408,06	17.573.444.015,00
PendapatanRetribusi Daerah	8.226.075.952,00	6.771.393.180,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.241.480.609,00	12.863.598.813,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	33.010.389.409,00	45.879.417.794,24
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.605.023.378,06	83.087.853.802,24

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik 5.23.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 5.22 Pendapatan Asli Daerah



Secara rinci tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO dapat dilihat pada lampiran 5.11.

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp73.605.023.378,06**, sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran senilai **Rp75.908.389.750,00**. Terdapat selisih senilai **Rp2.303.366.371,94**, nilai ini bersumber dari selisih nilai piutang pendapatan dan penurunan Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF).

5.4.2.2 Pendapatan Transfer – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Transfer Pemerintah Pusat	976.717.627.909,00	938.432.037.533,00	38.285.590.376,00	4,08
Transfer Antar Daerah	46.764.750.923,00	54.271.022.213,00	(7.506.271.290)	(13,83)
Jumlah	1.023.482.378.832,00	992.703.059.746,00	30.779.319.086,00	3,10

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2024 tercatat senilai **Rp1.023.482.378.832,00**. Pendapatan jenis ini mengalami kenaikan senilai **Rp30.779.319.086,00** atau **3,10%** dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan alokasi dana transfer dari pusat kepada daerah. Realisasi Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat pada lampiran 5.12.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp976.717.627.909,00** sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan Transfer Tahun 2024 berjumlah **Rp1.177.890.523.909,00**. Terdapat selisih nilai senilai **Rp198.172.896.000,00**, Nilai ini bersumber dari TDF bagi Hasi senilai **Rp28.541.975.000,00** yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bombana namun belum diterima sampai dengan 31 Desember 2024, dan pendapatan dana desa yang tidak diakui dalam Laporan Operasional senilai **Rp98.438.427.000**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	25.285.631.566,00	12.175.115.476,00	13.110.516.090,00	107,68
Jumlah	25.285.631.566,00	12.175.115.476,00	13.110.516.090,00	107,68

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember 2024 tercatat senilai **Rp25.285.631.566,00** sedangkan di Tahun 2023 tercatat senilai **Rp12,175,115,476.00**. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang merupakan pendapatan hibah aset.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp25.285.631.566,00**, sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 senilai **Rp9.903.158.503,00** terdapat selisih senilai **Rp15.382.473.063,00** nilai ini bersum ber dari pendapatan hibah aset dari pemerintah pusat dan dari Lembaga organisasi swasta/kelompok masyarakat yang tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran karena hibah dalam bentuk barang/aset.

5.4.3 Beban Daerah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Beban Operasi	948.757.944.570,44	743.910.973.000,00	204.846.971.570,44	27,54
Jumlah	948.757.944.570,44	743.910.973.000,00	204.846.971.570,44	27,54

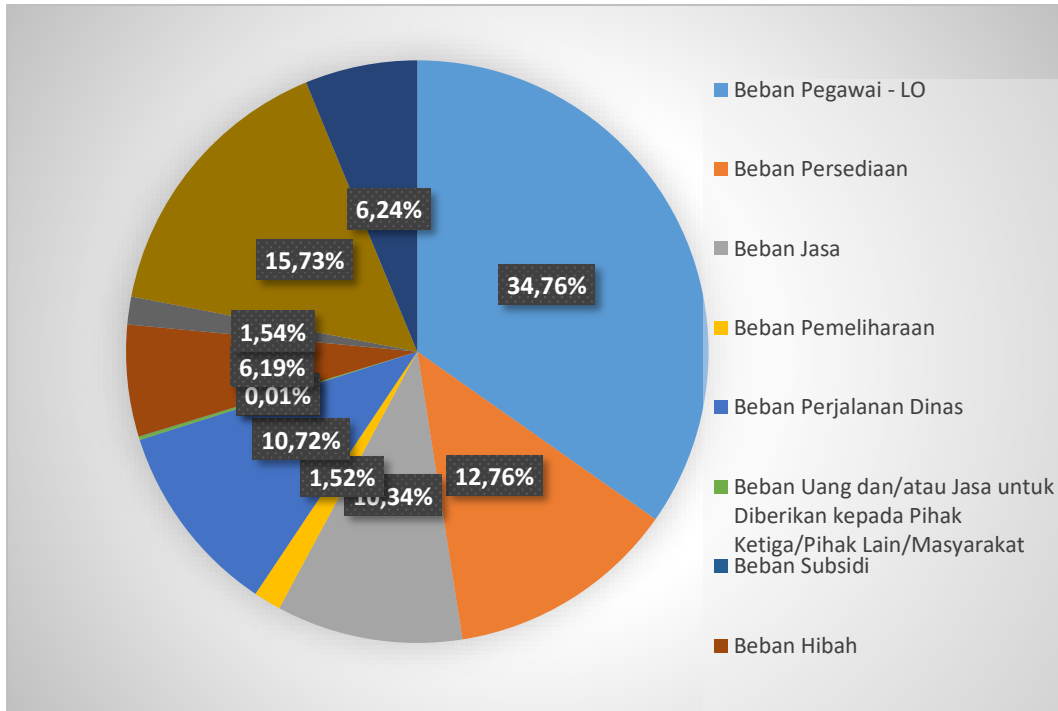
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Tahun 2024 adalah senilai **Rp948.757.944.570,44**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp204.846.971.570,44** atau **27,54%** dibandingkan Tahun 2023 senilai **Rp743.910.973.000,00**. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.

Perbandingan besaran Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik 5.23.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 5.23 Perbandingan Beban Operasi TA. 2024



Beban untuk Laporan Operasional per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp933.268.238.675,69** dengan rincian pada tabel 5.67.

Tabel 5.67
Rincian Beban Daerah

Uraian	2024	2023
Beban Operasi		
Beban Pegawai	429.331.394.094,50	356.906.524.307,50
Beban Barang dan Jasa	423.662.683.370,95	346.117.228.708,14
Beban Subsidi	176.701.394,00	106.098.667,00
Beban Hibah	76.507.807.222,00	39.801.506.092,00
Beban Bantuan Sosial	-	632.000.000,00
Beban penyisihan Piutang	19.079.358.488,99	347.615.225,45
Beban Penyusutan dan Amortisasi	194.277.771.703,91	193.028.973.657,14
Beban transfer	77.025.000.000,00	64.999.999.998,00
Jumlah Beban Operasi	1.220.060.716.274,35	1.001.939.946.655,23

5.4.3.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp417.752.893.194,50** dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.68
Daftar Beban Pegawai

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Gaji Pokok PNS	156.740.430.253,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	58.112.144.900,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	14.350.891.140,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4.244.710.242,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.671.585.000,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	9.645.436.000,00
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.193.955.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.404.790.000,00
9	Beban Tunjangan Beras PNS	7.933.678.905,00
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.198.920.440,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.684.339.950,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	175.729.300,00
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.102.318,00
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.203.415,00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.964.934.993,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.350.842.680,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	321.900.818,00
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	118.660.170,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	965.712.971,00
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	355.961.838,00
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	33.188.450.279,00
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.429.174.327,00
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	604.870.470,00
24	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.355.844.725,00
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	32.750.000,00
26	Beban TPG PNSD	57.179.528.730,00
27	Beban TKG PNSD	6.843.557.230,00
28	Beban Tamsil Guru PNSD	2.419.875.000,00
29	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.251.879.773,50
30	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.351.135.000,00
31	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.012.140.000,00
32	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	613.957.038,00
33	Beban Uang Representasi DPRD	560.070.000,00
34	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	42.210.000,00
35	Beban Tunjangan Beras DPRD	52.996.800,00
36	Beban Uang Paket DPRD	47.985.000,00
37	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	812.101.500,00
38	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.181.050,00
39	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
40	Beban Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00
41	Beban Pembulatan Gaji DPRD	17.595,00
42	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	53.787.684,00
43	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.151.640,00
44	Beban Jaminan Kematian DPRD	3.454.920,00
45	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	2.275.000.000,00
46	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.915.000.000,00
47	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	201.285.000,00
48	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000,00
49	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
50	Beban Pegawai BLUD	3.030.160.000,00
Jumlah		429.331.394.094,50



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Pegawai pada Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp429.331.394.094,50** sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran, Belanja Pegawai senilai **Rp415.021.806.513,50**. Terdapat selisih senilai **Rp14.309.587.581**. Nilai ini berasal dari Penambahan Utang belanja pegawai tahun 2024.

5.4.3.2 Beban Persediaan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Beban persediaan	141.706.832.763,95	107.925.254.539,14	33.781.578.224,81	31,30
Jumlah	141.706.832.763,95	107.925.254.539,14	33.781.578.224,81	31,30

Beban persediaan merupakan beban yang timbul atas konsumsi barang-barang yang bersifat habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan atau tidak. Beban persediaan periode 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bombana senilai **Rp141.706.832.763,95**. Nilai ini mengalami peningkatan **31,30%** atau senilai **Rp33.781.578.224,81** dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 senilai **Rp107.925.254.539,14**.

Terhadap beban persediaan pada akhir tahun tidak habis digunakan, maka berdasarkan PSAP Nomor 05 pada akhir periode pencatatan dicatat sebagai persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Rincian beban persediaan dapat dilihat pada tabel 5.69.

Tabel 5.69

Daftar Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	731.279.969,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	23.091.900,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.615.588.755,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	35.701.300,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	357.914.690,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	15.500.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	79.408.000,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	199.743.500,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	621.090.840,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.920.127.640,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	164.995.975,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.904.990.959,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.875.812.098,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.859.239.557,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	314.226.600,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.101.526.120,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.270.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	993.157.179,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	35.018.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	101.608.800,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	72.317.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.531.901.510,00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	3.461.912.028,95
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.276.838.773,00
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.665.922.521,00
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.579.247.550,00
27	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.023.541.636,00
28	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.031.326.033,00
29	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.966.639.278,00
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.093.202.551,00
31	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.092.125.480,00
32	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	472.398.200,00
33	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	440.000.000,00
34	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.950.000,00
35	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	308.500.000,00
36	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.298.453.000,00
37	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	5.000.000,00
38	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	27.050.000,00
39	Beban Pakaian Adat Daerah	1.285.310.000,00
40	Beban Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00
41	Beban Pakaian Olahraga	3.804.674.638,00
42	Beban Pakaian Paskibraka	181.500.000,00
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.467.200,00
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	3.498.118.933,00
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	22.091.500,00
46	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	446.945.000,00
47	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	142.608.050,00
	Jumlah	141.706.832.763,95

5.4.3.3 Beban Jasa

Beban Jasa sampai dengan per 31 Desember 2024 dengan rincian beban jasa pada akhir Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana dapat dilihat tabel 5.70 berikut:

Tabel 5.70
Daftar Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.213.759.790,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.028.610.000,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	36.000.000,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.725.300.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	6.300.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	470.370.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	10.308.129.431,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	737.750.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	22.506.803.828,00
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	477.000.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	108.000.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	124.800.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	23.475.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah
14	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	149.959.297,00
15	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	122.947.600,00
16	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	664.694.103,00
17	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.215.965.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	28.000.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.916.080.208,00
20	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.402.337.200,00
21	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.507.032.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.175.200.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Supir	883.733.381,00
24	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	33.000.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	84.080.000,00
26	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	608.646.400,00
27	Beban Jasa Tata Rias	22.050.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	115.565.000,00
29	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	626.000.000,00
30	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	80.400.000,00
31	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	221.049.750,00
32	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	33.000.000,00
33	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.160.598.000,00
34	Beban Tagihan Telepon	425.533.626,00
35	Beban Tagihan Air	196.991.200,00
36	Beban Tagihan Listrik	4.136.574.378,00
37	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	713.478.000,00
38	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.184.564.287,00
39	Beban Paket/Pengiriman	390.533.689,00
40	Beban Registrasi/Keanggotaan	100.500.000,00
41	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	381.648.116,00
42	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	230.000.000,00
43	Beban Pengolahan Air Limbah	187.506.750,00
44	Beban Lembur	1.191.135.000,00
45	Beban Medical Check Up	63.904.460,00
46	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	29.791.018.085,00
47	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.306.491,00
48	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	73.834.488,00
49	Beban Sewa Excavator	164.355.000,00
50	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	347.179.992,00
51	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.300.000,00
52	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	111.940.000,00
53	Beban Sewa Mebel	27.660.000,00
54	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	80.980.000,00
55	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	25.000.000,00
56	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	900.475.000,00
57	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	145.000.000,00
58	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	356.430.000,00
59	Beban Sewa Alat Musik	15.000.000,00
60	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	125.000.000,00
61	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	49.950.000,00
62	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	4.300.000,00
63	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	224.007.413,00
64	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	334.722.920,00
65	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	177.500.000,00
66	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000,00
67	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	667.575.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah
68	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	839.890.000,00
69	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	87.302.000,00
70	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	175.080.000,00
71	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	331.100.000,00
72	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	185.000.000,00
73	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	54.000.000,00
74	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.127.264.365,00
75	Beban Sosialisasi	270.000.000,00
76	Beban Bimbingan Teknis	3.441.956.113,00
77	Beban Diklat Kepemimpinan	373.225.980,00
78	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00
	Jumlah	127.651.358.341,00

5.4.3.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sampai dengan per 31 Desember 2024 dengan rincian pada tabel 5.71.

Tabel 5.71
Daftar Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	45.155.000,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	14.981.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	29.888.500,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	88.787.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	6.485.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.127.189.735,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	92.311.950,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	293.529.100,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	94.103.175,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	175.190.413,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	-26.000.000,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	1.000.000.000,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	611.771.170,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	200.486.750,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	964.005.233,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	35.441.000,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	14.885.000,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	2.900.000,00
19	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	367.928.708,00
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	57.560.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah
21	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	314.737.873,00
22	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	775.088.250,00
23	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	254.514.000,00
24	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	1.955.977.550,00
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.252.821.922,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	-199.800.000,00
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	155.540.000,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	212.170.500,00
29	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	8.932.050,00
30	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.066.148.677,00
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	190.128.650,00
32	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	123.500.000,00
33	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	-897.868.818,00
34	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1.125.792.000,00
35	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	300.000.000,00
36	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	299.250.000,00
37	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	593.088.300,00
38	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	56.736.000,00
	Jumlah	18.783.355.688,00

5.4.3.5 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	133.262.960.406,00	99.118.286.868,00	34.144.673.538,00	34,45
Jumlah	133.262.960.406,00	99.118.286.868,00	34.144.673.538,00	34,45

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp133.262.960.406,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72
Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	91.278.468.800,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.685.760.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.266.331.606,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.400.000,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	133.262.960.406,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.3.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sampai dengan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.73
Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.878.176.172,00
2	Beban Beasiswa	506.980.000,00
3	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	78.042.572,00
4	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.293.153.600,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	380.000.000,00
	Jumlah	2.258.176.172,00

5.4.3.7 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan subsidi atas bantuan pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp176.701.394,00**.

5.4.3.8 Beban Hibah

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2024 senilai **Rp76.507.807.222,00** dengan rincian pada tabel 5.74.

Tabel 5.74
Beban Hibah

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.201.336.990,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	438.259.000,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.706.318.000,00
4	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00
5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.022.100.000,00
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	640.374.232,00
8	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.499.419.000,00
	Jumlah	76.507.807.222,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.3.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp0,00** dengan rincian pada tabel 5.74.

Tabel 5.74
Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
JUMLAH		0,00

5.4.3.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan Piutang sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp19.079.358.488,99** dengan rincian SKPD sebagai pada tabel 5.75.

Tabel 5.75
Beban Penyisihan Piutang

1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	194.077,50
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	22.027,50
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	161.651,41
4	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	13.414.000,00
5	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	19.024.038.979,38
6	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	1.270.787,02
7	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	40.256.966,18
Jumlah		19.079.358.488,99

5.4.3.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan pada Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2024 senilai **R194.277.771.703,91** dengan rincian pada tabel 5.76.

Tabel 5.76
Beban Penyusutan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.566.471.571,23
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.840.473.184,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	125.145.492.866,17
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	346.983.334,51
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	378.350.748,00
Jumlah		194.277.771.703,91

Berdasarkan PSAP Nomor 07 ditetapkan bahwa nilai penyusutan atas aset tetap untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca pada akun Akumulasi Penyusutan dan akun Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.3.12 Beban Transfer

Beban Transfer yang ada pada PPKD sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp77.025.000.000,00** dengan rincian pada tabel 5.77.

Tabel 5.77
Beban Transfer

1.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	77.025.000.000,00
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	0,00
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
JUMLAH		77.025.000.000,00

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Selama periode Tahun 2024, nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat senilai Rp0,00 diperoleh dari Defisit Non Operasional senilai Rp0,00 dan Defisit Non Operasional senilai Rp0,00 Nilai Surplus tersebut tidak mengalami perubahan/peningkatan senilai Rp0,00.

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa yaitu senilai **(Rp97.687.682.498,29)** yang merupakan jumlah antara Surplus dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp97.687.682.498,29)** ditambah dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai **(Rp0,00)**.

Tabel. 5.78
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	-97.687.682.498,29	84.026.082.369,01
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	-97.687.682.498,29	86.026.082.369,01
- Pendapatan dari Kegiatan Operasional	1.122.373.033.776,06	1.087.966.029.024,24
- Beban dari Kegiatan Operasional	1.220.060.716.274,35	1.001.939.946.655,23
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-2.000.000.000,00
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-2.000.000.000,00

5.4.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian di luar kendali entitas pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 tercatat senilai **(Rp1.066.690.000,00)**. Nilai ini mengalami penurunan senilai **Rp3.673.095.807,00** dibanding tahun 2023 dimana saldo Pos Luar Biasa tercatat senilai **(Rp4.739.785.807,00)**. Pos Luar Biasa ini merupakan Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

5.4.6.1 Beban Luar Biasa

Saldo Beban Luar Biasa per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat senilai **(Rp1.066.690.000,00)**. Beban Luar Biasa ini tercatat pada satu entitas yakni pada Badan Keuangan Daerah yaitu Beban Luar Biasa pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan Beban Tak Terduga yang diakibatkan timbulnya Bencana Alam seperti angin puting beliung, banjir dan tanah longsor senilai **Rp1.066.690.000,00**.

5.4.7 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO senilai **(Rp98.754.372.498,29)** berasal dari Surplus sebelum pos luar biasa senilai **(Rp97.687.682.498,29)** dikurangi surplus/defisit pada pos luar biasa senilai **(Rp1.066.690.000,00)**. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp178.040.669.060,30)** atau **(224,55)%** jika dibandingkan tahun sebelumnya senilai **Rp79.286.296.562,01**.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024.

Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Bombana periode 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.79
Arus Kas Bersih Per Aktivitas TA 2024

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	200.976.987.477,50	138.246.773.049,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(205.132.359.301,00)	(185.374.672.408,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	57.530.345,00	(628.964.407,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(4.097.841.478,50)	(47.756.863.765,50)

Penjelasan mengenai arus kas bersih dari masing-masing aktivitas di atas adalah sebagai berikut:

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	200.976.987.477,50	138.246.773.049,50	62.730.214.428,00	45,38
Jumlah	200.976.987.477,50	138.246.773.049,50	62.730.214.428,00	45,38

Arus Kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi selama tahun 2024 adalah senilai **Rp200.976.987.477,50** dimana terjadi kenaikan senilai **(45,38%)** dari aktivitas operasi selama tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2024 arus kas masuk yang bersumber dari pendapatan daerah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya diantaranya pendapatan yang bersumber dari transfer dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, transfer non dan perimbangan yakni Dana Desa, serta Biaya Operasional Sekolah yang merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Berikut rincian arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi sepanjang tahun 2024. Rincian pada tabel 5.80.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah - LRA	16.809.320.380,00	16.741.628.704,00
Penerimaan Retribusi Daerah - LRA	7.944.727.599,00	6.460.644.617,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	16.241.480.609,00	12.863.598.813,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	34.912.861.162,00	58.396.780.050,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	370.038.827.211,00	162.743.083.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	507.929.909.000,00	469.181.210.648,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.548.170.798,00	57.368.240.596,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus (DAK) Non Fisik	114.726.978.900,00	117.863.059.289,00
Penerimaan Insentif Fiskal	15.208.211.000,00	-
Penerimaan Dana Desa dari APBN	98.438.427.000,00	97.776.291.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	35.189.129.558,00	39.274.767.891,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	9.903.158.503,00	15.000.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.298.891.201.720,00	1.053.669.304.608,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	415.021.806.513,50	353.049.066.129,50
Pembayaran Barang dan Jasa	441.591.050.797,00	342.512.576.227,00
Pembayaran Subsidi	176.701.394,00	106.098.667,00
Pembayaran Hibah	67.968.970.222,00	51.606.713.730,00
Pembayaran Bantuan Sosial	20.300.000,00	632.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	172.068.695.316,00	4.739.785.807,00
Pembayaran Tidak Terduga	1.066.690.000,00	162.776.290.998,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.097.914.214.242,50	915.422.531.558,50
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	200.976.987.477,50	138.246.773.049,50

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(205.132.359.301,00)	(185.374.672.408,00)	(19.757.686.893,00)	10,6
Jumlah	(205.132.359.301,00)	(185.374.672.408,00)	(19.757.686.893,00)	(10,6)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan selama tahun 2024 adalah senilai **(Rp205.132.359.301,00)** atau turun senilai **(10,6%)** dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan selama tahun 2023, dengan perhitungan pada tabel 5.81.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2024	2023
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	1.623.988.996,00	3.510.000.000,00
Perolehan Peralatan dan mesin	46.649.909.911,00	28.872.385.235,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	52.190.485.037,00	53.448.414.400,00
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	102.117.940.857,00	96.832.955.543,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.087.528.800,00	2.710.917.230,00
Perolehan Aset Lainnya	1.462.505.700,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	205.132.359.301,00	185.374.672.408,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(205.132.359.301,00)	(185.374.672.408,00)

Sepanjang tahun 2024 arus kas masuk dari aktivitas investasi senilai **Rp0,00**. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya 2023 yaitu senilai **Rp0,00**. Penyebab penurunan arus tersebut adalah tidak adanya arus kas masuk dari penjualan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bombana di Tahun Anggaran 2024 dibanding tahun sebelumnya terdapat penjualan aset kelompok peralatan dan mesin.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi pada tahun 2024 tercatat senilai **(Rp205.132.359.301,00)**. Nilai ini mengalami peningkatan senilai **Rp19.757.686.893,00** atau **10,66%** dibanding arus kas keluar tahun sebelumnya yang senilai **(Rp185.374.672.408,00)**..

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

surplus/defisit anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 tercatat senilai **Rp0,00**. Pada tahun 2023 tercatat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan senilai **Rp0,00**. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dapat kita lihat tabel 5.82.

Tabel 5.82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	-
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-

Sejak tahun 2023 s.d. 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana sudah tidak lagi mendapatkan arus kas masuk yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	57.530.345,00	(628.964.407,00)	686.494.752,00	(109,15)
Jumlah	57.530.345,00	(628.964.407,00)	686.494.752,00	(109,15)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2024 tercatat senilai **Rp57.730.345,00** di mana terjadi kenaikan senilai **Rp686.494.752,00** atau **(109,15)** dari tahun 2023 yang senilai **(Rp628.964.407,00)**. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 5.83.

Tabel 5.83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69.108.885.342,00	57.687.133.980,00
Koreksi SILPA	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	69.108.885.342,00	57.687.133.980,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69.051.354.997,00	58.316.098.387,00
Jumlah Arus Kas Keluar	69.051.354.997,00	58.316.098.387,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	57.530.345,00	(628.964.407,00)

Arus kas masuk dan keluar dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2024 hanya bersumber dari penerimaan dan pengeluaran PFK. Tercatat terdapat Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sepanjang tahun 2024 senilai **Rp69.108.885.342,00** sedangkan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga senilai **Rp69.051.354.997,00**.

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Saldo Akhir Kas	5.282.690.529,49	9.380.532.007,99	(4.097.841.478,50)	(43,68)
Jumlah	5.282.690.529,49	9.380.532.007,99	(4.097.841.478,50)	(44,25)

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp5.282.690.529,49**. Dibandingkan di tahun sebelumnya di tahun 2023 senilai **Rp9.380.532.007,49** maka dapat dilihat terjadi penurunan senilai **(43,68%)**. Berikut rincian pembentuk Saldo Akhir Kas berdasarkan Arus Kas sepanjang Tahun Anggaran 2024 dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, serta Kenaikan/Penurunan Kas dapat dilihat pada tabel 5.84.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.84
Saldo Akhir Kas

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	200.976.987.477,50	138.246.773.049,50
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(205.132.359.301,00)	(185.374.672.408,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	57.530.345,00	(628.964.407,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	(4.097.841.478,50)	(47.756.863.765,50)
Saldo Awal Kas	9.380.532.007,99	57.137.395.773,99
Koreksi Lebih Catat Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir Kas	5.282.690.529,49	9.380.532.008,49
Kas di Kas Daerah	832.351.859,49	921.142.531,49
Kas di Bendahara Penerimaan	20.085.997,00	95.571.540,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	136.711.579,00	98.800,00
Kas di BLUD	394.775.125,00	4.424.263.680,00
Kas di Bendahara FKTP	9.315.617,00	3.204.353,50
Kas di Bendahara BOS	22.966.714,00	113.091.855,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.866.483.638,00	3.823.159.248,00
Kas Lainnya selain BUD	0,00	37.389.184,00
Saldo Akhir Kas	5.282.690.529,49	9.417.921.191,99

Penjelasan nilai kas bersih dari masing-masing aktivitas dalam Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp200.976.987.477,50** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas Penerimaan senilai **Rp1.298.891.201.720,00** dan Arus Keluar Kas Pembayaran senilai **Rp1.097.914.214.242,50**.

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **(Rp205.132.359.301,00)** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Hasil Penjualan Aset dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya senilai **Rp0,00** dan Arus Keluar Kas Perolehan Aset senilai **Rp205.132.359.301,00**.

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Aktivitas pendanaan pada tahun 2024 senilai **Rp0,00**.

d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai **Rp57.530.345,00** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai **Rp69.108.885.342,00** dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai **Rp69.051.354.997,00**.

Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas TA 2024 senilai **Rp5.282.690.529,49** yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.85
Saldo Akhir Kas

Kas di Kas Daerah	832.351.859,49
Kas di Bendahara Penerimaan	20.085.997,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	136.711.579,00
Kas di BLUD	394.775.125,00
Kas Dana BOS	22.966.714,00
Kas di Bendahara FKTP	9.315.617,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.866.483.638,00
Saldo Akhir Kas	5.229.895.096,49
Kas Lainnya	0,00
Saldo Akhir Kas + Kas Lainnya	5.282.690.529,49



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode tahun 2023. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah senilai **Rp2.218.314.912.489,47**.

5.6.1 Ekuitas Awal

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas Awal	2.316.920.555.337,52	2.130.254.544.177,68	186.666.011.159,84	8,76
Jumlah	2.316.920.555.337,52	2.130.254.544.177,68	186.666.011.159,84	8,76

Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp2.316.920.555.337,52**. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan senilai **8,76%** atau senilai **Rp186.666.011.159,84** dibandingkan di Tahun 2023 dimana Ekuitas Awal tercatat senilai **Rp2.130.254.544.177,68**.

5.6.2 Surplus / Defisit LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus /Defisit LO senilai (**Rp98.754.372.498,29**) merupakan hasil selisih pengurangan pendapatan senilai **Rp1.122.373.033.776,06** terhadap Beban senilai **Rp1.220.060.716.274,35** dan defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai (**Rp0,00**) serta Defisit Pos Luar Biasa senilai (**Rp1.066.690.000,00**).

Pada tahun 2024 tercatat Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Bombana senilai (**Rp98.754.372.498,29**). Nilai tersebut mengalami penurunan nilai, (**Rp178.040.669.060,30**) atau (**224,55%**) dibandingkan tahun sebelumnya pada TA 2023 tercatat Surplus-LO senilai **Rp79.286.296.562,01**.

5.6.3 Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai **Rp148.729.650,24**. Koreksi ekuitas yang menambah dan mengurangi ekuitas Pemerintah Kabupaten Bombana sepanjang Tahun Anggaran 2024 dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.86
Rincian Koreksi Ekuitas

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1	Piutang PBBP2	28.731.370,00
2	Piutang Retribusi Kios	(459.105.000,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	12.167,78
4	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pertandingan Olahraga	7.350,00
5	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	11.205,66
6	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	33.375,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
7	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.968.411,92
8	Penyisihan Piutang PBBP2	66.939.704,66
9	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios	145.483.875,50
10	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	870.000,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	587.375,00
12	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan	1.470.642,27
13	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	9.870.761,76
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(15.000.000,00)
15	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.010.470.450,00
16	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(25.898.900,00)
17	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	(149.410.000,00)
18	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	(76.470.000,00)
19	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	(1.387.982.798,89)
20	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	(5.860.340,42)
	Jumlah	148.729.650,24

5.6.4 Ekuitas Akhir

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas Akhir	2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52	(98.605.642.848,05)	(4,26)
Jumlah	2.218.314.912.489,47	2.316.920.555.337,52	(98.605.642.848,05)	(4,26)

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bombana per 31 Desember 2024 tercatat senilai **Rp2.218.314.912.489,47**, nilai ini mengalami penurunan senilai **(Rp98.605.642.848,05)** atau menurun senilai **(4,26%)** dari Ekuitas Awal per 1 Januari 2024. Peningkatan/Penurunan tersebut diakibatkan penambahan/pengurangan oleh Surplus-LO senilai **(Rp98.754.372.498,29)** dan penambahan dari Koreksi Ekuitas Lainnya senilai **Rp148.729.650,24**.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN OPD

6.1 Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Bombana beribukota dan berkedudukan di Kecamatan Rumbia.

6.2 Sifat Operasi

Sesuai dengan karakteristik utama atau dasar pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

6.3 Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana meliputi PDAM dan PD Wonua Bombana namun sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana.

6.4 Kejadian Berdampak Sosial

Terdapat kejadian yang berdampak sosial secara signifikan seperti, kemiskinan ekstrim, prevalensi *stunting*, wabah virus *Covid-19* atau masalah sosial yang akibatnya pembiayaan juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

6.5 Informasi Lainnya

- a. Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Bombana mulai berlaku digunakan sejak 4 Januari 2024, kecuali Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya;
- b. Terkait dengan Aset Tetap tahun 2024 masih terdapat empat item aset tetap yang memiliki nilai Rp1,00, yang terlewatkan pada saat penginputan di aplikasi;
- c. Nilai Aset telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 108; dan
- d. Dalam melakukan penilaian aset tetap atas tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan, Pemerintah Kabupaten Bombana masih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab di muka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan APBD Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh kondisi umum perekonomian Kabupaten Bombana Tahun 2024, berdasarkan data Kabupaten Bombana dalam Angka 2023, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflansi, investasi, pendapatan daerah dan belanja daerah.
2. Berdasarkan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pendapatan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
 - b. Kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari pusat maupun Provinsi.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil tengah di hadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
3. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bombana maka perlu diambil kebijakan belanja daerah. Adapun kebijakan daerah yaitu belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana terkait dengan pelaksanaan urusan pada Tahun 2024 terdiri atas 6 urusan wajib pelayanan dasar, 11 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 4 urusan pilihan dan 9 urusan pemerintahan fungsi penunjang. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.
4. Kebijakan pembiayaan daerah yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, pencairan dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana menyajikan laporan keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 target dan realisasinya sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Target Pendapatan sebesar | Rp1.439.654.318.208,00 |
| Realisasi Pendapatan sebesar | <u>Rp1.298.891.201.720,00</u> |
| Selisih Pendapatan sebesar | Rp 140.763.116.488,00 |
7. Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 target dan realisasinya sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Target Belanja sebesar | Rp1.449.031.636.540,00 |
| Realisasi Belanja sebesar | <u>Rp1.303.046.573.543,50</u> |
| Selisih Belanja sebesar | Rp 145.985.062.996,50 |
8. Realisasi belanja APBD Tahun 2024 realisasi terdiri atas:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp415.021.806.513,50 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp441.591.050.797,00 |
| c. Belanja Bunga | Rp 0,00 |
| d. Belanja Subsidi | Rp 176.701.394,00 |
| e. Belanja Hibah | Rp 67.968.970.222,00 |
| f. Belanja Bantuan Sosial | Rp 20.300.000,00 |
| g. Belanja Modal | Rp205.132.359.301,00 |
| h. Belanja Tak Terduga | Rp 1.066.690.000,00 |
9. Realisasi Transfer APBD Tahun 2024 realisasi terdiri atas:
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | Rp172.068.695.316,00 |
| b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | Rp 0,00 |
10. Realisasi Pembiayaan APBD Tahun 2024 terdiri atas:
- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp 9.377.318.332,99 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp 0,00 |
| c. Pembiayaan netto | Rp 9.377.318.332,99 |
11. Saldo anggaran lebih awal Tahun 2024 Rp9.377.318.332,99 dan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2024 Rp5.221.946.509,49
12. Realisasi surplus Laporan Operasional (LO) Tahun 2024 mencapai sebesar Rp(98.754.372.498,29)
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Operasional (LO) | Rp1.122.737.033.776,06 |
| b. Realisasi Beban (LO) | Rp1.220.060.716.274,35 |
| c. Surplus/Defisit Operasional(LO) | Rp (97.687.682.498,29) |
| d. Defisit Kegiatan Operasional (LO) | Rp 0,00 |
| e. Beban Luar Biasa (LO) | Rp 1.066.690.000,00 |
| f. Total Surplus (LO) | Rp (98.754.372.498,29) |
13. Total Aset pada Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 sebesar Rp2.321.222.117.791,33 terdiri dari:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Aset Lancar | Rp 55.842.649.809,10 |
| b. Investasi Jangka Panjang | Rp. 39.720.796.300,00 |
| c. Aset Tetap | Rp 2.107.387.055.339,55 |
| d. Dana Cadangan | Rp 0,00 |
| e. Aset Lainnya | Rp 118.271.616.342,68 |



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

14. Akumulasi Penyusutan Aset tetap sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp(1.400.670.042,780,65)
15. Total kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Rp102.907.205.301,86 yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
16. Saldo ekuitas awal Tahun 2024 Rp2.316.920.555.337,52 dan saldo ekuitas akhir Rp2.218.314.912.489,47.
17. Arus Kas Tahun 2024 terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi | Rp1.298.891.201.720,00 |
| b. Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi | Rp1.097.914.214.242,50 |
| c. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi | Rp 0,00 |
| d. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi | Rp 205.132.359.301,00 |
| e. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan | Rp 0,00 |
| f. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan | Rp 0,00 |
| g. Arus Kas Masuk dari Aktifitasi Transitoris | Rp 69.108.885.342,00 |
| h. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris | Rp 69.051.354.997,00 |
| i. Koreksi Lebih Catat Saldo Awal | Rp 0,00 |
| j. Saldo Akhir kas Tahun 2024 | Rp 5.282.690.529,49 |



Bombana, Mei 2025

BUPATI BOMBANA

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Ringkasan
Belanja Pemerintah Kabupaten Bombana Menurut Organisasi

No	SKPD/OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	294.884.304.959,00	274.831.743.116,00	93,20
2	Dinas Kesehatan	129.623.510.702,00	118.536.845.580,00	91,45
3	Puskesmas Rumbia	1.702.323.800,00	1.244.051.047,00	73,08
4	Puskesmas Rumbia Tengah	1.407.140.300,00	1.098.714.242,00	78,08
5	Puskemas Rarowatu	1.366.623.800,00	1.172.697.993,00	85,81
6	Puskesmas Rarowatu Utara	1.418.602.000,00	1.319.610.014,00	93,02
7	Puskesmas Mataoleo	1.691.116.800,00	1.539.569.048,00	91,04
8	Puskesmas Masaloka Raya	914.850.000,00	741.754.285,00	81,08
9	Puskesmas Lantari Jaya	1.721.717.800,00	1.636.863.426,00	95,07
10	Puskesmas Poleang	2.026.192.000,00	2.001.059.325,00	98,76
11	Puskesmas Poleang Barat	2.020.153.000,00	1.844.332.616,00	91,30
12	Puskesmas Poleang Timur	1.501.289.000,00	1.460.661.461,00	97,29
13	Puskesmas Poleang Tenggara	1.257.452.000,00	999.488.310,00	79,49
14	Puskesmas Poleang Selatan	1.482.917.000,00	1.419.377.210,00	95,72
15	Puskesmas Poleang Utara	1.819.846.000,00	1.772.893.276,00	97,42
16	Puskesmas Poleang Tengah	904.104.500,00	879.327.421,00	97,26
17	Puskesmas Tontonunu	1.207.772.800,00	1.168.307.753,50	96,73
18	Puskesmas Matausu	855.290.800,00	623.469.058,00	72,90
19	Puskesmas Kabaena	1.028.153.300,00	696.254.913,00	67,72
20	Puskesmas Kabaena Barat	1.595.921.000,00	1.533.872.552,00	96,11
21	Puskesmas Kabaena Timur	1.521.319.000,00	1.327.685.034,00	87,27
22	Puskesmas Kabaena Selatan	1.138.876.000,00	973.916.882,00	85,52
23	Puskesmas Kabaena Utara	1.195.338.000,00	1.142.403.198,00	95,57
24	Puskesmas Kabaena Tengah	1.148.816.800,00	1.037.297.469,00	90,29
25	Rumah Sakit Umum Daerah	54.518.750.208,00	52.044.032.411,00	95,46
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	202.855.996.780,00	151.132.161.907,00	74,50
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.339.444.566,00	6.740.636.672,00	91,84
28	Satuan Polisi Pamong Praja	13.466.975.688,00	11.940.408.727,00	88,66
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.881.681.439,00	3.836.063.263,00	78,58
30	Dinas Sosial	6.877.988.260,00	6.303.395.503,00	91,65
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	6.972.796.208,00	5.910.558.669,00	84,77
32	Dinas Ketahanan Pangan	8.770.987.516,00	7.565.958.134,00	86,26
33	Dinas Lingkungan Hidup	10.428.989.270,00	9.442.108.951,00	90,54
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.124.329.848,00	7.469.662.252,00	91,94
35	Kepala UPTD Poleang	-	-	0,00
36	Kepala UPTD Kabaena	-	-	0,00
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.210.339.691,00	6.567.869.962,00	91,09
38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.243.630.287,00	14.939.682.646,00	91,97
39	Dinas Perhubungan	13.478.494.296,00	11.550.128.729,00	85,69
40	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	15.649.414.787,00	13.488.725.758,00	86,19
41	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.063.094.700,00	6.835.799.226,00	96,78
42	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	18.471.282.239,00	16.425.178.385,00	88,92
43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.986.439.989,00	7.256.210.873,00	90,86
44	Dinas Perikanan	17.410.835.696,00	15.732.310.948,00	90,36
45	Dinas Pertanian	44.047.959.984,00	35.703.466.314,00	81,06
46	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	88.459.600,00	88.299.200,00	99,82
47	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	12.026.083.416,00	10.800.316.577,00	89,81
48	UPTD Metrologi Legal	76.627.800,00	71.909.877,00	93,84
49	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.068.574.080,00	4.611.402.074,00	90,98
50	UPTD Balai Latihan Kerja	429.642.100,00	426.066.872,00	99,17
51	Sekretariat Daerah	86.725.678.411,00	80.886.098.950,00	93,27
52	Sekretariat DPRD	39.808.235.025,00	37.371.692.035,00	93,88
53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.737.288.966,00	9.373.479.460,00	96,26
54	Badan Keuangan Daerah	202.592.036.667,00	193.611.020.585,00	95,57
55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	12.437.139.268,00	11.900.900.209,00	95,69
56	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.546.334.852,00	4.009.293.652,00	88,19
57	Inspektorat Daerah	13.889.714.702,00	13.103.160.677,00	94,34
58	Kecamatan Rumbia	4.659.668.220,00	4.427.053.673,00	95,01
59	Kelurahan Kasipute	709.000.000,00	619.122.710,00	87,32
60	Kelurahan Doule	745.588.800,00	631.486.400,00	84,70
61	Kelurahan Lampopala	701.241.550,00	638.247.280,00	91,02
62	Kelurahan Lameroro	758.830.000,00	475.833.200,00	62,71
63	Kecamatan Rumbia Tengah	3.815.673.612,00	3.514.526.557,00	92,11
64	Kelurahan Lauru	700.000.000,00	695.019.000,00	99,29
65	Kelurahan Poea	728.515.566,00	372.158.000,00	51,08
66	Kelurahan Kampung Baru	700.000.000,00	642.042.900,00	91,72
67	Kecamatan Rarowatu	2.960.862.319,00	2.647.786.555,00	89,43
68	Kelurahan Taubonto	700.000.000,00	697.326.000,00	99,62
69	Kecamatan Rarowatu Utara	2.572.011.149,00	2.125.934.354,00	82,66

70	Kelurahan Aneka Marga	700.000.000,00	698.920.863,00	99,85
71	Kecamatan Mataoleo	2.427.898.401,00	1.997.384.543,00	82,27
72	Kecamatan Kep. Masaloka Raya	1.915.267.511,00	1.708.580.634,00	89,21
73	Kecamatan Lantari Jaya	2.227.112.101,00	1.889.025.279,00	84,82
74	Kecamatan Poleang	3.382.857.499,00	2.914.989.544,00	86,17
75	Kelurahan Boepinang	703.746.850,00	699.999.416,00	99,47
76	Kelurahan Boepinang Barat	703.744.500,00	698.207.733,00	99,21
77	Kelurahan Boeara	704.666.600,00	701.992.000,00	99,62
78	Kelurahan Kastarib	705.076.000,00	607.640.000,00	86,18
79	Kelurahan Barangga	705.190.000,00	629.852.000,00	89,32
80	Kelurahan Kasabolo	701.307.000,00	699.956.000,00	99,81
81	Kecamatan Poleang Barat	1.985.747.702,00	1.866.667.100,00	94,00
82	Kecamatan Poleang Timur	3.396.167.273,00	3.151.665.172,00	92,80
83	Kelurahan Bambaea	704.200.000,00	703.868.000,00	99,95
84	Kelurahan Puulemo	722.362.400,00	710.484.100,00	98,36
85	Kecamatan Poleang Tenggara	2.084.558.334,00	1.965.832.929,00	94,30
86	Kecamatan Poleang Utara	1.964.801.039,00	1.697.429.419,00	86,39
87	Kecamatan Poleang Selatan	1.872.698.417,00	1.404.368.122,00	74,99
88	Kecamatan Poleang Tengah	2.121.562.060,00	1.931.491.965,00	91,04
89	Kecamatan Tontonunu	2.063.255.297,00	1.649.819.448,00	79,96
90	Kecamatan Matausu	1.726.324.584,00	1.452.845.216,00	84,16
91	Kecamatan Kabaena	3.227.039.551,00	2.766.944.256,00	85,74
92	Kelurahan Teomokole	700.000.000,00	552.824.368,00	78,97
93	Kelurahan Rahampuu	700.000.000,00	585.756.270,00	83,68
94	Kecamatan Kabaena Barat	2.154.328.937,00	1.853.445.852,00	86,03
95	Kelurahan Sikeli	830.200.000,00	703.403.150,00	84,73
96	Kecamatan Kabaena Timur	3.545.999.200,00	2.912.568.288,00	82,14
97	Kelurahan Dongkala	700.000.000,00	349.744.800,00	49,96
98	Kelurahan Lambale	700.000.000,00	440.281.400,00	62,90
99	Kecamatan Kabaena Selatan	2.144.569.563,00	1.788.499.806,00	83,40
100	Kecamatan Kabaena Utara	1.720.158.700,00	1.638.136.268,00	95,23
101	Kecamatan Kabaena Tengah	1.635.674.682,00	1.460.356.294,00	89,28
102	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	63.044.853.423,00	62.586.861.952,00	99,27
Jumlah		1.449.031.636.540,00	1.303.046.573.543,50	89,93

**Daftar Rincian
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024**

No	Uraian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.013.460.394,00	766.279.969,00	75,61
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	23.567.400,00	23.091.900,00	97,98
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.693.690.100,00	4.466.737.270,00	95,16
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	48.130.800,00	35.701.300,00	74,18
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	642.768.960,00	357.914.690,00	55,68
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	79.686.000,00	79.408.000,00	99,65
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	201.525.000,00	199.743.500,00	99,12
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	135.540.000,00	43.290.840,00	31,94
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.205.436.000,00	1.968.267.640,00	89,25
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	165.000.000,00	164.995.975,00	100,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.608.468.600,00	6.352.218.116,00	96,12
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.681.836.300,00	10.227.249.063,00	95,74
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.331.714.500,00	2.872.433.307,00	86,21
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	339.960.000,00	314.226.600,00	92,43
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.193.821.600,00	1.101.526.120,00	92,27
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.274.300,00	11.270.000,00	99,96
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.058.921.128,00	980.910.959,00	92,63
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	35.218.000,00	35.018.000,00	99,43
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	105.008.500,00	101.608.800,00	96,76
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	143.922.000,00	72.317.000,00	50,25
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.956.997.709,00	6.261.322.810,00	90,00
23	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.025.000.000,00	2.761.409.490,00	91,29
24	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.664.764.600,00	1.183.740.328,00	71,11
25	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	53.929.801.912,00	43.059.975.221,00	79,84
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	32.996.317.000,00	20.579.247.550,00	62,37
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.857.707.700,00	1.808.306.428,00	97,34
28	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.041.500.000,00	7.101.076.033,00	88,31
29	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.032.390.000,00	7.966.639.278,00	99,18
30	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.570.478.500,00	6.009.428.480,00	91,46
31	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	472.500.000,00	472.398.200,00	99,98
32	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	440.000.000,00	440.000.000,00	100,00
33	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50
34	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	386.100.000,00	308.500.000,00	79,90
35	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.494.882.500,00	1.315.448.000,00	88,00
36	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	12.500.000,00	5.000.000,00	40,00
37	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.550.000,00	27.050.000,00	91,54
38	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.455.024.200,00	1.285.310.000,00	88,34
39	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
40	Belanja Pakaian Olahraga	3.977.241.000,00	3.767.878.138,00	94,74
41	Belanja Pakaian Paskibraka	186.000.000,00	181.500.000,00	97,58
42	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	201.500,00	0,00	0,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.035.504.000,00	446.945.000,00	43,16
44	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	145.248.000,00	142.608.050,00	98,18
45	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	5.000.000,00	0,00	0,00
46	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.768.500.000,00	3.046.969.790,00	80,85
47	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.194.220.000,00	4.879.395.400,00	93,94
48	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
49	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.733.000.000,00	1.708.800.000,00	98,60
50	Honorarium Rohaniwan	7.250.000,00	6.300.000,00	86,90
51	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	508.580.000,00	470.370.000,00	92,49
52	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	753.600.000,00	737.750.000,00	97,90
53	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.671.500.000,00	10.445.670.000,00	97,88
54	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	477.000.000,00	477.000.000,00	100,00
55	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00
56	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	35.250.000,00	23.475.000,00	66,60
57	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	153.600.000,00	149.959.297,00	97,63
58	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	133.950.000,00	122.947.600,00	91,79
59	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	672.000.000,00	664.694.103,00	98,91
60	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.241.400.000,00	1.200.602.000,00	96,71
61	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	28.000.000,00	22.000.000,00	78,57
62	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.614.550.000,00	3.509.604.121,00	97,10
63	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.405.470.000,00	1.369.740.000,00	97,46
64	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.530.200.000,00	4.294.139.000,00	94,79
65	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.317.800.000,00	2.245.000.000,00	96,86
66	Belanja Jasa Tenaga Supir	932.200.000,00	873.533.381,00	93,71
67	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
68	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	93.000.000,00	84.080.000,00	90,41
69	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	679.749.000,00	608.646.400,00	89,54
70	Belanja Jasa Tata Rias	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
71	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	149.000.000,00	115.565.000,00	77,56
72	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	926.000.000,00	926.000.000,00	100,00
73	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	86.250.000,00	80.400.000,00	93,22
74	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	225.000.000,00	0,00	0,00
75	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
76	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	14.201.450.000,00	12.037.212.000,00	84,76
77	Belanja Tagihan Telepon	452.650.000,00	425.533.626,00	94,01
78	Belanja Tagihan Air	272.876.000,00	200.870.700,00	73,61
79	Belanja Tagihan Listrik	4.369.557.688,00	4.063.978.613,00	93,01
80	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	738.600.000,00	690.605.000,00	93,50
81	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.054.212.225,00	1.611.599.284,00	78,45
82	Belanja Paket/Pengiriman	463.930.000,00	341.533.689,00	73,62
83	Belanja Registrasi/Keanggotaan	100.500.000,00	100.500.000,00	100,00
84	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	528.930.000,00	369.792.411,00	69,91
85	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
86	Belanja Lembur	1.203.915.000,00	1.161.615.000,00	96,49
87	Belanja Medical Check Up	113.595.000,00	79.569.460,00	70,05
88	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	30.392.522.700,00	25.834.308.995,00	85,00
89	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.972.800,00	0,00	0,00

No	Uraian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
90	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	132.800.000,00	73.834.488,00	55,60
91	Belanja Sewa Excavator	235.977.000,00	164.355.000,00	69,65
92	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	361.000.000,00	347.179.992,00	96,17
93	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00
94	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	116.000.000,00	111.940.000,00	96,50
95	Belanja Sewa Mebel	28.105.000,00	27.660.000,00	98,42
96	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	83.000.000,00	80.980.000,00	97,57
97	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
98	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	983.200.000,00	900.475.000,00	91,59
99	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	571.000.000,00	355.030.000,00	62,18
100	Belanja Sewa Alat Musik	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	382.850.000,00	224.007.413,00	58,51
103	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	646.166.000,00	334.722.920,00	51,80
104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil	177.500.000,00	177.500.000,00	100,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	750.000.000,00	667.575.000,00	89,01
107	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.150.000.000,00	790.000.000,00	68,70
108	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	223.857.000,00	87.302.000,00	39,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	338.310.000,00	175.080.000,00	51,75
110	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil	333.000.000,00	331.100.000,00	99,43
111	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	185.000.000,00	74.000.000,00	40,00
112	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
113	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.236.000.000,00	2.127.264.365,00	95,14
114	Belanja Sosialisasi	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00
115	Belanja Bimbingan Teknis	3.987.480.000,00	3.441.956.113,00	86,32
116	Belanja Diklat Kepemimpinan	373.250.000,00	373.225.980,00	99,99
117	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
118	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	201.800.000,00	49.950.000,00	24,75
119	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	30.000.000,00	29.888.500,00	99,63
120	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	90.000.000,00	88.787.000,00	98,65
121	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	9.000.000,00	6.485.000,00	72,06
122	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.932.350.000,00	1.780.870.172,00	92,16
123	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Benda	93.000.000,00	92.862.750,00	99,85
124	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	359.000.000,00	293.529.100,00	81,76
125	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	95.700.000,00	94.103.175,00	98,33
126	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor	25.000.000,00	0,00	0,00
127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	223.320.000,00	223.140.540,00	99,92
128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	220.500.000,00	200.486.750,00	90,92
129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	433.500.000,00	397.502.591,00	91,70
130	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	39.000.000,00	35.441.000,00	90,87
131	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan	15.000.000,00	14.885.000,00	99,23
132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67
133	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	402.000.000,00	367.928.708,00	91,52
134	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	88.200.000,00	56.860.000,00	64,47
135	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	150.000.000,00	147.685.500,00	98,46
136	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00
137	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.882.436.881,00	7.732.544.451,00	78,25
138	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	327.250.000,00	155.540.000,00	47,53
139	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	223.300.000,00	212.170.500,00	95,02
140	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk	8.932.050,00	8.932.050,00	100,00
141	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.373.010.050,00	1.081.148.677,00	78,74
142	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golong	240.807.650,00	190.128.650,00	78,95
143	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	230.200.000,00	123.500.000,00	53,65
144	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	300.000.000,00	299.250.000,00	99,75
145	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	56.736.000,00	56.736.000,00	100,00
146	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.451.149.180,00	89.815.793.453,00	96,11
147	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.947.550.000,00	1.685.760.000,00	86,56
148	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.919.077.000,00	27.460.424.206,00	86,03
149	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00
150	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	540.800.000,00	506.980.000,00	93,75
151	Belanja Beasiswa	78.042.572,00	78.042.572,00	100,00
152	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	1.400.480.000,00	1.293.153.600,00	92,34
153	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.434.947.400,00	27.648.213.211,00	241,79
154	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.387.025.000,00	15.719.590.362,00	90,41
155	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.150.640.000,00	31.311.097.083,00	100,52
	Jumlah	481.516.537.399,00	441.591.050.797,00	91,71

DAFTAR RINCIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Excavator	1.850.000.000,00	1.832.610.000,00	99,06
3	Belanja Modal Electric Generating Set	153.306.000,00	3.306.000,00	2,16
4	Belanja Modal Pompa	7.425.000,00	5.700.000,00	76,77
6	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	65.550.000,00	48.624.000,00	74,18
7	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.158.272.000,00	3.063.232.000,00	96,99
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.500.000.000,00	1.127.100.000,00	75,14
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.946.472.000,00	1.720.110.000,00	88,37
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	262.200.000,00	144.571.000,00	55,14
11	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	8.428.690.000,00	7.473.960.000,00	88,67
13	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	136.800.000,00	136.708.800,00	99,93
18	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	18.810.000,00	18.750.000,00	99,68
20	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	14.250.000,00	0,00	-
21	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.063.000,00	0,00	-
22	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.640.500,00	0,00	-
23	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	38.800.000,00	1.800.000,00	4,64
24	Belanja Modal Alat Panen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
25	Belanja Modal Alat Processing	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
26	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	2.280.000,00	0,00	-
27	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	82.878.400,00	21.200.000,00	25,58
28	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	464.334.600,00	226.762.888,00	48,84
29	Belanja Modal Mebel	4.921.928.503,00	2.954.291.812,00	60,02
30	Belanja Modal Alat Pembersih	39.610.000,00	28.600.000,00	72,20
31	Belanja Modal Alat Pendingin	1.550.162.000,00	1.415.025.565,00	91,28
32	Belanja Modal Alat Dapur	16.265.900,00	13.198.750,00	81,14
33	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.969.405.000,00	1.880.420.316,00	95,48
34	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	66.760.000,00	60.940.000,00	91,28
36	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.940.000,00	5.940.000,00	100,00
38	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00
39	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	502.810.200,00	421.601.757,00	83,85
40	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.292.498.200,00	1.023.273.800,00	79,17
41	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	120.865.000,00	103.429.824,00	85,57
42	Belanja Modal Peralatan Cetak	792.811.940,00	631.942.600,00	79,71
43	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur T	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
44	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	151.900.000,00	49.100.000,00	32,32
45	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	23.427.000,00	22.649.000,00	96,68
48	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	28.525.000,00	28.503.496,00	99,92
52	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
55	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	990.300.000,00	984.600.000,00	99,42
56	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	4.683.164.208,00	4.534.705.800,00	96,83
57	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	939.647.600,00	909.760.000,00	96,82
59	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.518.450.000,00	1.099.450.000,00	72,41
62	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	220.775.000,00	220.479.000,00	99,87
63	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	18.000,00	0,00	-
64	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.000.000.000,00	2.999.923.100,00	100,00
65	Belanja Modal System/Power Supply	26.790.000,00	26.740.000,00	99,81
67	Belanja Modal Photo and Film Equipment	2.000.000,00	1.970.000,00	98,50
68	Belanja Modal Komputer Jaringan	107.182.800,00	0,00	-
69	Belanja Modal Personal Computer	5.031.469.560,00	4.160.642.800,00	82,69
70	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	19.380.000,00	0,00	-
71	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	16.000.000,00	7.500.000,00	46,88
72	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	430.093.000,00	388.849.000,00	90,41
73	Belanja Modal Peralatan Jaringan	51.000.000,00	20.500.000,00	40,20
74	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	48.153.400,00	48.103.000,00	99,90
75	Belanja Modal Sumur Lainnya	209.304.000,00	207.719.560,00	99,24
77	Belanja Modal Baju Pengaman	189.000.000,00	185.120.000,00	97,95
78	Belanja Modal Sepatu Lapangan	1.710.000,00	0,00	-
79	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	6.794.400,00	6.761.496,00	99,52
80	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainr	300.000.000,00	297.569.000,00	99,19
81	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	254.514.000,00	254.514.000,00	100,00
82	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00
83	Belanja Modal Peralatan Permainan	11.400.000,00	11.390.000,00	99,91
84	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	171.208.200,00	159.355.000,00	93,08
85	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.119.865.886,00	4.259.698.836,00	69,60
86	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	250.850.000,00	369.207.711,00	147,18
	Jumlah	55.265.750.297,00	46.649.909.911,00	84,41

Lampiran 5.4 Beban Transfer

DAFTAR RINCIAN BEBAN TRANSFER
BEBAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2024

No	Desa	Beban Transfer
1	2	3
	BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN 2024 ALOKASI DANA DESA (ADD)	
1	Pokurumba	634.539.600
2	Pallimae	636.660.600
3	Salosa	632.971.600
4	Mattirowalie	631.771.300
5	Teppoe	640.637.300
6	Biru	640.063.500
7	Mambo	635.972.000
8	Rau-Rau	632.124.700
9	Ladumpi	631.794.500
10	Rarowatu	631.236.600
11	Lakomea	634.678.600
12	Pangkuri	633.904.200
13	Lampeantani	631.957.800
14	Watukalangkari	633.202.300
15	Tahi lte	633.894.500
16	Lantawonua	633.908.400
17	Rahadopi	632.768.700
18	Tirongkoyua	632.714.800
19	Wumbuburo	634.897.200
20	Balo	635.369.300
21	Toli-Toli	632.121.100
22	Tapuhaka	635.086.500
23	Bungi-Bungi	631.059.600
24	Babamolingku	637.504.200
25	Toari Bombana	633.513.700
26	Timbala	635.858.700
27	Ranokomea	636.259.300
28	Rakadua	643.117.800
29	Lameong-Meong	631.811.800
30	Pabiring	636.130.200
31	Balasari	634.263.000
32	Bulumanai	633.735.200
33	Matabundu	635.222.100
34	Analere	631.637.000
35	Pomontoro	633.109.300
36	Liano	632.175.900
37	Pulau Tambako	636.739.100
38	Lora	736.590.800
39	Toli-Toli	631.105.700
40	Tajuncu	630.600.000
41	Mawar	631.026.700
42	Laloa	633.003.300
43	Batu Sempe	630.769.600
44	Hambawa	630.662.200
45	Puuwaeya	631.020.700
46	Wumbubangka	638.664.600
47	Hukaea	632.495.700
48	Lantowua	632.233.500
49	Tembe	631.467.500
50	Watu Mentade	631.897.600
51	Marga Jaya	634.207.600
52	Tunas Baru	631.288.600
53	Tampabulu	640.449.500
54	Tanah Poleang	642.151.400
55	Karya Baru	632.223.100
56	Toburi	640.141.000
57	Rompu-Rompu	636.826.200
58	Pusuea	636.940.800
59	Lawatuea	633.178.300
60	Wambarema	631.745.400
61	Batu Putih	636.851.500
62	Waemputang	740.183.200
63	Kali Baru	636.906.000
64	Akacipong	633.686.700
65	Laea	635.930.400
66	Larete	635.594.500
67	Lemo	632.872.900

No	Desa	Beban Transfer
68	Terapung	637.741.800
69	Lamoare	633.194.800
70	Rambaha	630.318.000
71	Langkema	631.800.000
72	Batuawu	633.101.200
73	Pongkalaero	634.709.700
74	Puununu	632.776.200
75	Baliara	637.336.100
76	Rahantari	632.089.200
77	Baliara Kepulauan	633.332.900
78	Baliara Selatan	634.093.700
79	Mapila	632.902.000
80	Wumbulasa	632.645.600
81	Sangia Makmur	633.510.100
82	Eemokolo	632.201.300
83	Tedubara	635.551.000
84	Larolanu	629.297.000
85	Lamonggi	631.609.800
88	Tangkeno	629.979.900
87	Lengora	637.506.200
86	Enano	632.988.700
89	Ulungkura	632.666.400
90	Lengora Selatan	631.848.400
91	Lengora Pantai	636.349.900
92	Masaloka	631.292.500
93	Batu Lamburi	631.246.500
94	Masaloka Selatan	631.056.500
95	Masaloka Timur	631.028.500
96	Masaloka Barat	630.591.000
97	Tapuhahi	736.595.800
98	Lampata	631.267.200
99	Mulaeno	634.415.100
100	Lebo Ea	634.161.000
101	Paria	634.811.100
102	Poleondro	633.060.500
103	Tontonunu	636.987.900
104	Tongkoseng	643.507.400
105	Tetehaka	632.304.400
106	Watu Melomba	635.286.800
107	Puu Wonua	635.353.400
108	Lombakasi	635.020.800
109	Lantari	634.464.600
110	Langkowala	633.108.600
111	Pasare Apua	634.427.100
112	Anugerah	634.991.600
113	Kalaero	633.718.200
114	Tinabite	635.194.800
115	Rarongkeu	633.005.000
116	Watu-Watu	633.323.500
117	Kolombi	631.635.000
118	Morengke	633.379.200
119	Wia-Wia	630.596.700
120	Lamuru	635.312.000
121	Totole	637.180.400
	JUMLAH	77.025.000.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN REALISASI DANA BOS TAHUN 2024

Wilayah : Kab. Bombana
 Status : Negeri
 Bentuk : SD dan SMP
 Sumber Dana : BOS Reguler, BOS Kinerja, Lainnya

No	NPSN	Nama Unit	Kecamatan	Saldo Awal 2024		Jumlah Saldo Awal 2024	Penerimaan 2024			Jumlah Penerimaan 2024	Realisasi Belanja BOS				Jumlah Realisasi BOS	Saldo Akhir 2024	
				Saldo Akhir 2023	Saldo Awal Markas		BOS REGULER	BOS KINERJA	LAINNYA		Pengembalian Temuan ke Kasda	BARANG & JASA	MODAL			Saldo	
													PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA			EKSTRA KOMPTABEL
1	2	3	4	5	5	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
TOTAL SD + SMP				10.243.703	2.576.362	12.820.065	#####	#####	25.190.000	23.824.249.838	5.510.142	#####	2.094.995.200	48.264.300	2.116.439.336	#####	22.966.714
1	40403778	SD NEGERI 01 TEOMOKOLE	Kabaena		-	-	71.440.000	-	-	71.440.000		58.315.600	-	-	13.124.400	71.440.000	-
2	40403766	SD NEGERI 02 TAUBONTO	Rarowatu	5.510.142		5.510.142	122.200.000			122.200.000	5.510.142	103.700.000	18.500.000		-	127.710.142	
3	40402490	SD NEGERI 03 BOEPINANG BARAT	Poleang		-	-	94.000.000	22.500.000		116.500.000		75.868.500	28.500.000	-	12.131.500	116.500.000	-
4	40404039	SD NEGERI 04 ROMPU-ROMPU	Poleang Utara		57.200	57.200	122.142.800	-	425.000	122.567.800		115.060.200	3.350.000	-	3.789.000	122.199.200	425.800
5	40402491	SD NEGERI 05 ENANO	Kabaena Tengah		-	-	45.120.000	-	-	45.120.000		42.848.500	-	-	2.271.500	45.120.000	-
6	40403620	SD NEGERI 06 BALIARA SELATAN	Kabaena Barat		167.000	167.000	116.393.000	-		116.393.000		99.435.000	11.975.000	-	5.150.000	116.560.000	-
7	40402521	SD NEGERI 07 DONGKALA	Kabaena Timur		-	-	125.020.000			125.020.000		103.070.000	21.000.000	-	950.000	125.020.000	-
8	40402493	SD NEGERI 08 KASIPUTE	Rumbia		-	-	398.560.000	-	-	398.560.000		303.256.100	21.326.000		73.977.900	398.560.000	-
9	40404067	SD NEGERI 09 BATU PUTIH	Poleang Selatan		-	-	74.260.000	-	-	74.260.000		70.821.600	-	-	3.438.400	74.260.000	-
10	40402486	SD NEGERI 10 WUMBUBURO	Kabaena Timur		-	-	78.960.000		-	78.960.000		72.960.000	6.000.000	-	-	78.960.000	-
11	40404058	SD NEGERI 11 BAMBAEA	Poleang Timur		-	-	93.060.000	22.500.000		115.560.000		89.450.000	26.110.000	-		115.560.000	-
12	40404046	SD NEGERI 12 WAEMPUTANG	Poleang Selatan		-	-	147.580.000	-	-	147.580.000		124.930.000	4.109.000	-	15.541.000	144.580.000	3.000.000
13	40403759	SD NEGERI 13 MASALOKA BARAT	Kep. Masaloka Raya		-	-	53.580.000	22.500.000		76.080.000		48.557.000	22.500.000	-	5.023.000	76.080.000	-
14	40403622	SD NEGERI 14 SIKELI	Kabaena Barat		-	-	94.940.000			94.940.000		88.444.500	-	-	6.495.500	94.940.000	-
15	40402424	SD NEGERI 15 TIRONGKOTUA	Kabaena		-	-	68.620.000	-	-	68.620.000		56.922.900	4.400.000	-	7.297.100	68.620.000	-
16	40403626	SD NEGERI 16 BALIARA SELATAN	Kabaena Barat		-	-	73.320.000	-	-	73.320.000		70.328.000	-	-	2.992.000	73.320.000	-
17	40402489	SD NEGERI 17 BOEARA	Poleang		-	-	90.240.000	22.500.000		112.740.000		80.568.300	22.500.000	-	9.671.700	112.740.000	-
18	40403702	SD NEGERI 18 TEDUBARA	Kabaena Utara		-	-	63.920.000	-	-	63.920.000		60.748.000	-	-	3.172.000	63.920.000	-
19	40402529	SD NEGERI 19 LAMEO-MEONG	Poleang Barat		-	-	61.100.000	-	-	61.100.000		35.270.000	16.000.000	-	9.830.000	61.100.000	-
20	40403642	SD NEGERI 20 BATUAWU	Kabaena Selatan		-	-	104.340.000	-	-	104.340.000		72.977.800	13.950.000	10.412.200	7.000.000	104.340.000	-
21	40403755	SD NEGERI 21 LANTAWONUA	Rumbia		-	-	57.340.000			57.340.000		50.590.000	5.000.000	-	1.750.000	57.340.000	-
22	40403756	SD NEGERI 22 LAMPATA	Rumbia Tengah		-	-	59.220.000	-	-	59.220.000		56.070.000	-	-	3.150.000	59.220.000	-
23	40403764	SD NEGERI 23 POMONTORO	Mataleo		-	-	139.120.000	-	-	139.120.000		121.129.000	10.000.000	-	7.991.000	139.120.000	-
24	40402527	SD NEGERI 24 PALLIMAE	Poleang		-	-	71.440.000	-	-	71.440.000		58.292.700	2.000.000	-	11.147.300	71.440.000	-
25	40404047	SD NEGERI 25 ULUNGKURA	Kabaena Tengah		-	-	78.020.000	-	-	78.020.000		73.020.000	-	-	5.000.000	78.020.000	-
26	40402443	SD NEGERI 26 TOARI BOMBANA	Poleang Barat		-	-	170.140.000	-	-	170.140.000		132.120.000	18.800.000	-	19.220.000	170.140.000	-
27	40403621	SD NEGERI 27 DOULE	Rumbia		-	-	156.040.000	-	220.000	156.260.000		141.463.400	-	-	14.796.600	156.260.000	-
28	40403757	SD NEGERI 28 KAMPUNG BARU	Rumbia Tengah		-	-	163.560.000	-	-	163.560.000		148.711.800	1.900.000	-	12.948.200	163.560.000	-
29	40403793	SD NEGERI 29 LAMPEANTANI	Rarowatu		-	-	137.240.000	-	-	137.240.000		119.240.000	18.000.000	-	-	137.240.000	-
30	40402528	SD NEGERI 30 PONGKALAERO	Kabaena Selatan		-	-	89.300.000	-	-	89.300.000		70.421.500	8.500.000	-	10.378.500	89.300.000	-
31	40402419	SD NEGERI 31 PUSUEA	Poleang Utara		-	-	94.940.000	-	-	94.940.000		72.552.300	15.750.000	-	6.637.700	94.940.000	-
32	40403976	SD NEGERI 32 SIKELI	Kabaena Barat		-	-	32.900.000	-	-	32.900.000		26.162.400	1.750.000	-	4.987.600	32.900.000	-
33	40402520	SD NEGERI 33 KASIPUTE	Rumbia		-	-	388.220.000	-	-	388.220.000		328.575.100	25.000.000	-	34.644.900	388.220.000	-
34	40402447	SD NEGERI 34 KASTARIB	Poleang		-	-	195.520.000	-	-	195.520.000		165.333.300	19.500.000	-	10.686.700	195.520.000	-
35	40404048	SD NEGERI 35 LEMO	Poleang Tenggara		-	-	73.320.000	22.500.000	-	95.820.000		64.002.500	25.400.000	-	6.417.500	95.820.000	-
36	40403762	SD NEGERI 36 PULAU TAMBAKO	Mataleo		-	-	253.800.000	-	-	253.800.000		237.588.800	6.700.000	-	9.511.200	253.800.000	-
37	40402532	SD NEGERI 37 BALO	Kabaena Timur		-	-	100.580.000	-	-	100.580.000		86.717.100	2.500.000	-	11.362.900	100.580.000	-
38	40403758	SD NEGERI 38 LAURU	Rumbia Tengah		-	-	262.260.000	-	-	262.260.000		210.913.000	28.500.000	-	22.847.000	262.260.000	-

No	NPSN	Nama Unit	Kecamatan	Saldo Awal 2024		Jumlah Saldo Awal 2024	Penerimaan 2024			Jumlah Penerimaan 2024	Realisasi Belanja BOS					Jumlah Realisasi BOS	Saldo Akhir 2024
				Saldo Akhir 2023	Saldo Awal Markas		BOS REGULER	BOS KINERJA	LAINNYA		Pengembalian Temuan ke Kasda	BARANG & JASA	MODAL				
													PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL		Saldo
1	2	3	4	5	5	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
39	40403763	SD NEGERI 39 PULAU TAMBAKO	Mataleo		-	-	305.500.000	22.500.000	-	328.000.000		312.800.000	3.600.000	-	11.600.000	328.000.000	-
40	40403644	SD NEGERI 40 PUUNUNU	Kabaena Selatan		-	-	102.460.000	-	-	102.460.000		71.040.000	13.750.000	-	17.670.000	102.460.000	-
41	40403767	SD NEGERI 41 WATU KALANGKARI	Rarowatu		-	-	34.780.000	-	-	34.780.000		29.080.000	5.700.000	-	-	34.780.000	-
42	40404043	SD NEGERI 42 TOLI-TOLI	Mataleo		-	-	40.420.000	22.500.000	-	62.920.000		38.696.600	14.000.000	-	10.223.400	62.920.000	-
43	40404057	SD NEGERI 43 BAMBAEA	Poleang Timur		-	-	233.120.000	-	1.710.000	234.830.000		200.383.000	7.500.000	-	26.597.000	234.480.000	350.000
44	40403645	SD NEGERI 44 LANGKEMA	Kabaena Selatan		-	-	76.140.000	-	-	76.140.000		68.140.000	8.000.000	-	-	76.140.000	-
45	40402510	SD NEGERI 45 MULAENO	Poleang Tengah		-	-	77.080.000	-	-	77.080.000		73.071.200	-	-	4.008.800	77.080.000	-
46	40402449	SD NEGERI 46 TOARI BOMBANA	Poleang Barat		-	-	102.460.000	22.500.000	1.080.000	126.040.000		73.245.200	27.900.000	-	24.894.800	126.040.000	-
47	40404117	SD NEGERI 47 LAMERORO	Rumbia		-	-	321.480.000	-	-	321.480.000		279.099.500	9.750.000	-	32.630.500	321.480.000	-
48	40402523	SD NEGERI 48 EEMOKOLO	Kabaena Utara		2.200.000	2.200.000	61.720.000	-	-	61.720.000		46.920.000	15.000.000	-	2.000.000	63.920.000	-
49	40403765	SD NEGERI 49 LIANO	Mataleo		-	-	97.760.000	22.500.000	-	120.260.000		100.459.000	7.420.000	-	12.381.000	120.260.000	-
50	40403760	SD NEGERI 50 MASALOKA SELATAN	Kep. Masaloka Raya		-	-	80.840.000	-	-	80.840.000		64.090.000	7.000.000	-	9.750.000	80.840.000	-
51	40402525	SD NEGERI 51 MULAENO	Poleang Tengah		-	-	138.180.000	-	-	138.180.000		112.362.000	-	-	25.818.000	138.180.000	-
52	40403772	SD NEGERI 52 HUKAEA	Rarowatu Utara		-	-	219.020.000	-	-	219.020.000		197.720.000	-	-	21.300.000	219.020.000	-
53	40404004	SD NEGERI 53 WAEMPUTANG	Poleang Selatan	4.024	-	4.024	73.320.000	-	425.000	73.745.000		68.673.000	-	-	4.647.000	73.320.000	429.024
54	40402439	SD NEGERI 54 LARETE	Poleang Tenggara		-	-	62.040.000	22.500.000	-	84.540.000		52.540.000	31.300.000	-	700.000	84.540.000	-
55	40403754	SD NEGERI 55 LENGORA	Kabaena Tengah		-	-	63.920.000	-	-	63.920.000		59.113.400	-	-	4.806.600	63.920.000	-
56	40403639	SD NEGERI 56 RAHAMPUU	Kabaena		-	-	68.620.000	-	-	68.620.000		62.337.600	-	-	6.282.400	68.620.000	-
57	40402513	SD NEGERI 57 RAKADUA	Poleang Barat		-	-	114.680.000	-	-	114.680.000		86.190.500	10.800.000	-	17.689.500	114.680.000	-
58	40402531	SD NEGERI 58 DONGKALA	Kabaena Timur		-	-	149.460.000	-	-	149.460.000		142.461.000	6.999.000	-	-	149.460.000	-
59	40402468	SD NEGERI 59 TONGKOSENG	Tontonunu		-	-	173.900.000	-	1.000.000	174.900.000		132.026.500	13.680.000	700.000	27.193.500	173.600.000	1.300.000
60	40403627	SD NEGERI 60 PANGKURI	Rarowatu		-	-	54.520.000	22.500.000	-	77.020.000		62.053.500	11.000.000	-	3.966.500	77.020.000	-
61	40403774	SD NEGERI 61 WUMBUBANGKA	Rarowatu Utara		-	-	135.360.000	-	-	135.360.000		84.980.900	12.500.000	-	37.879.100	135.360.000	-
62	40404001	SD NEGERI 62 BATU PUTIH	Poleang Selatan		-	-	86.480.000	-	-	86.480.000		85.280.000	1.200.000	-	-	86.480.000	-
63	40404056	SD NEGERI 63 TANGKENO	Kabaena Tengah		-	-	31.960.000	-	500.000	32.460.000		30.368.600	-	-	2.091.400	32.460.000	-
64	40403768	SD NEGERI 64 LADUMPI	Rarowatu		-	-	53.580.000	-	-	53.580.000		41.713.500	5.000.000	-	6.866.500	53.580.000	-
65	40402512	SD NEGERI 65 MATIRROWALIE	Poleang		-	-	85.540.000	-	-	85.540.000		68.371.500	-	-	17.168.500	85.540.000	-
66	40404050	SD NEGERI 66 MAMBO	Poleang Timur	600.000	-	600.000	91.180.000	-	-	91.180.000		83.010.000	3.000.000	-	3.060.000	89.070.000	2.710.000
67	40402429	SD NEGERI 67 TEPPOE	Poleang Timur		-	-	174.840.000	-	-	174.840.000		134.689.700	16.250.000	-	23.900.300	174.840.000	-
68	40402430	SD NEGERI 68 TIMBALA	Poleang Barat		-	-	137.240.000	-	350.000	137.590.000		102.079.000	13.000.000	-	22.511.000	137.590.000	-
69	40402539	SD NEGERI 69 BOEPINANG	Poleang		-	-	199.280.000	-	-	199.280.000		171.992.300	7.500.000	-	19.787.700	199.280.000	-
70	40403761	SD NEGERI 70 MASALOKA TIMUR	Kep. Masaloka Raya		-	-	70.500.000	22.500.000	-	93.000.000		59.628.900	16.500.000	-	16.871.100	93.000.000	-
71	40404055	SD NEGERI 71 LAMOARE	Poleang Tenggara		-	-	80.840.000	-	-	80.840.000		61.081.600	13.163.400	-	6.595.000	80.840.000	-
72	40403641	SD NEGERI 72 BATU LAMBURI	Kep. Masaloka Raya		-	-	32.900.000	22.500.000	-	55.400.000		26.498.000	23.600.000	-	5.302.000	55.400.000	-
73	40403648	SD NEGERI 73 BALIARA KEPULAUAN	Kabaena Barat	376.000	-	376.000	62.040.000	-	-	62.040.000		62.040.000	-	-	-	62.040.000	376.000
74	40402420	SD NEGERI 74 TERAPUNG	Poleang Tenggara		-	-	258.500.000	-	-	258.500.000		218.250.000	20.250.000	-	20.000.000	258.500.000	-
75	40403649	SD NEGERI 75 SIKELI	Kabaena Barat		-	-	137.240.000	-	-	137.240.000		116.691.100	6.500.000	-	14.048.900	137.240.000	-
76	40402417	SD NEGERI 76 RANOKOMEA	Poleang Barat		-	-	105.280.000	-	-	105.280.000		79.036.000	20.400.000	-	5.844.000	105.280.000	-
77	40402448	SD NEGERI 77 KASABOLO	Poleang		-	-	129.720.000	-	-	129.720.000		106.508.000	16.500.000	-	6.712.000	129.720.000	-
78	40402466	SD NEGERI 78 TOBURI	Poleang Utara		-	-	279.180.000	-	-	279.180.000		175.112.600	50.250.000	-	53.817.400	279.180.000	-
79	40404052	SD NEGERI 79 PUULEMO	Poleang Timur		-	-	148.520.000	-	-	148.520.000		134.904.000	-	-	13.616.000	148.520.000	-
80	40404002	SD NEGERI 80 KALI BARU	Poleang Selatan		-	-	98.700.000	-	-	98.700.000		76.354.300	12.000.000	-	10.345.700	98.700.000	-
81	40402540	SD NEGERI 81 BOEARA	Poleang		1.450	1.450	56.398.550	-	-	56.398.550		50.526.800	-	-	250.000	50.776.800	5.623.200
82	40402435	SD NEGERI 82 PABBIRING	Poleang Barat		-	-	66.740.000	-	-	66.740.000		50.959.000	3.560.000	-	12.221.000	66.740.000	-
83	40403646	SD NEGERI 83 LANTARI	Lantari Jaya		-	-	157.920.000	-	-	157.920.000		124.659.500	14.476.000	-	18.784.500	157.920.000	-
84	40404066	SD NEGERI 84 BALIARA	Kabaena Barat		-	-	119.380.000	22.500.000	-	141.880.000		100.580.000	40.500.000	-	800.000	141.880.000	-

No	NPSN	Nama Unit	Kecamatan	Saldo Awal 2024		Jumlah Saldo Awal 2024	Penerimaan 2024			Jumlah Penerimaan 2024	Realisasi Belanja BOS				Jumlah Realisasi BOS	Saldo Akhir 2024	
				Saldo Akhir 2023	Saldo Awal Markas		BOS REGULER	BOS KINERJA	LAINNYA		Pengembalian Temuan ke Kasda	BARANG & JASA	MODAL				
													PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		EKSTRA KOMPTABEL	
1	2	3	4	5	5	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
85	40402446	SD NEGERI 85 TONTONUNU	Tontonunu		-	-	133.480.000	-	-	133.480.000		128.820.000	4.660.000	-		133.480.000	-
86	40402422	SD NEGERI 86 POKORUMBA	Poleang		-	-	118.440.000	22.500.000	-	140.940.000		99.689.000	32.000.000	-	9.251.000	140.940.000	-
87	40403638	SD NEGERI 87 RAHADOPi	Kabaena				52.640.000		-	52.640.000		43.061.600		-	9.578.400	52.640.000	-
88	40404064	SD NEGERI 88 RAHANTARI	Kabaena Barat		-	-	60.160.000		-	60.160.000		47.560.000	5.000.000	-	7.600.000	60.160.000	
89	40402519	SD NEGERI 89 BOEPINANG BARAT	Poleang		-	-	198.340.000	22.500.000	8.800.000	229.640.000		162.215.000	61.175.000	-	6.250.000	229.640.000	-
90	40404053	SD NEGERI 90 RAKADUA	Poleang Barat		-	-	176.720.000		-	176.720.000		118.288.000	27.134.900	-	31.297.100	176.720.000	-
91	40403773	SD NEGERI 91 ANEKA MARGA	Rarowatu Utara		-	-	170.140.000		-	170.140.000		146.732.500	11.000.000	-	12.407.500	170.140.000	-
92	40402433	SD NEGERI 92 LAEA	Poleang Selatan		-	-	88.360.000	22.500.000		110.860.000		83.898.900		-	26.961.100	110.860.000	-
93	40403769	SD NEGERI 93 LAKOMEA	Rarowatu		-	-	118.440.000		-	118.440.000		90.934.300	16.000.000	-	11.505.700	118.440.000	-
94	40402536	SD NEGERI 94 PABBIRING	Poleang Barat		-	-	77.080.000		-	77.080.000		54.439.300	11.200.000	-	11.440.700	77.080.000	-
95	40402436	SD NEGERI 95 LAMONGGI	Kabaena Tengah		-	-	59.220.000		200.000	59.420.000		54.884.100		-	4.535.900	59.420.000	-
96	40404041	SD NEGERI 96 BIRU	Poleang Timur		-	-	174.840.000		-	174.840.000		131.340.200	30.872.400		12.627.400	174.840.000	-
97	40402426	SD NEGERI 97 BALIARA	Kabaena Barat		-	-	23.500.000	22.500.000		46.000.000		20.528.400	21.619.000	-	3.852.600	46.000.000	-
98	40402516	SD NEGERI 98 TAPUHAKA	Kabaena Timur		-	-	85.540.000		-	85.540.000		77.040.000	8.500.000	-		85.540.000	-
99	40403640	SD NEGERI 99 TEOMOKOLE	Kabaena		9.600	-	9.600	38.540.000	22.500.000	61.040.000		48.672.100	1.875.000	-	10.492.900	61.040.000	9.600
100	40404061	SD NEGERI 100 LOMBAKASI	Lantari Jaya		-	-	188.940.000		-	188.940.000		152.688.700	16.000.000		20.251.300	188.940.000	-
101	40403647	SD NEGERI 101 MAPILA	Kabaena Utara		-	-	51.700.000		-	51.700.000		45.700.000	6.000.000	-		51.700.000	-
102	40403775	SD NEGERI 102 ANEKA MARGA	Rarowatu Utara		-	-	161.680.000		-	161.680.000		134.400.900	18.800.000	-	8.479.100	161.680.000	-
103	40403795	SD NEGERI 103 TOLI-TOLI	Kabaena Timur		-	-	103.400.000		-	103.400.000		82.834.000	3.500.000		17.066.000	103.400.000	-
104	40402427	SD NEGERI 104 TAMPABULU	Poleang Utara		400.000	-	400.000	226.540.000	-	226.540.000		191.537.900		35.002.100	-	226.540.000	400.000
105	40404054	SD NEGERI 105 TANAH POLEANG	Poleang Utara		-	-	97.760.000		-	97.760.000		69.001.600	12.700.000	-	16.058.400	97.760.000	-
106	40404051	SD NEGERI 106 KARYA BARU	Poleang Utara		-	-	125.960.000		-	125.960.000		101.398.600	5.500.000	-	19.061.400	125.960.000	-
107	40403776	SD NEGERI 107 PASARE APUA	Lantari Jaya		-	-	109.040.000		-	109.040.000		72.842.000	14.200.000	-	21.998.000	109.040.000	-
108	40404049	SD NEGERI 108 BIRU	Poleang Timur		-	-	46.060.000		-	46.060.000		42.360.000	2.800.000	-	900.000	46.060.000	-
109	40402437	SD NEGERI 109 LEMBORA KANTAL	Kabaena Tengah		-	-	56.400.000	22.500.000	-	78.900.000		70.121.900		-	8.778.100	78.900.000	-
110	40403753	SD NEGERI 110 LEMBOEA	Poleang Tengah		-	-	101.520.000		-	101.520.000		77.527.700	10.000.000	-	13.992.300	101.520.000	-
111	40402425	SD NEGERI 111 SANGIA MAKMUR	Kabaena Utara		-	-	60.160.000		-	60.160.000		42.009.300	11.500.000	-	6.650.700	60.160.000	-
112	40404042	SD NEGERI 112 MAPILA	Kabaena Utara		-	-	40.420.000		-	40.420.000		32.920.000	7.500.000	-		40.420.000	-
113	40402445	SD NEGERI 113 RAHADOPi	Kabaena		-	-	24.440.000	22.500.000	-	46.940.000		27.090.000	9.000.000	-	10.850.000	46.940.000	-
114	40402432	SD NEGERI 114 SIKELI	Kabaena Barat		-	-	62.040.000		-	62.040.000		57.849.400		-	4.190.600	62.040.000	-
115	40404065	SD NEGERI 115 BALIARA KEPULAUAN	Kabaena Barat		-	-	56.400.000	22.500.000	-	78.900.000		72.900.000	6.000.000	-		78.900.000	-
116	40404007	SD NEGERI 116 LAROLANU	Kabaena Utara		-	-	26.320.000		-	26.320.000		26.320.000		-		26.320.000	-
117	40402469	SD NEGERI 117 WUMBULASA	Kabaena Utara		-	-	135.360.000	22.500.000	-	157.860.000		149.110.000		1.800.000	6.950.000	157.860.000	-
118	40402431	SD NEGERI 118 BALIARA KEPULAUAN	Kabaena Barat		-	-	56.400.000		-	56.400.000		47.400.000	9.000.000	-		56.400.000	-
119	40403770	SD NEGERI 119 RAU-RAU	Rarowatu		-	-	96.820.000		-	96.820.000		88.357.300	6.500.000	-	1.962.700	96.820.000	-
120	40403771	SD NEGERI 120 RAU-RAU	Rarowatu		-	-	98.700.000		-	98.700.000		76.547.200	15.500.000	-	6.652.800	98.700.000	-
121	40402428	SD NEGERI 121 BALIARA	Kabaena Barat		-	-	28.200.000		-	28.200.000		28.200.000		-		28.200.000	-
122	40403631	SD NEGERI 122 LAMBALE	Kabaena Timur		-	-	198.340.000	22.500.000	-	220.840.000		190.391.600	9.165.000	-	21.283.400	220.840.000	-
123	40403703	SD NEGERI 123 LANTOWUA	Rarowatu Utara		-	-	139.120.000		-	139.120.000		103.654.900	14.350.000	-	21.115.100	139.120.000	-
124	40404045	SD NEGERI 124 BABAMOLINGKU	Poleang Barat		-	-	85.540.000		-	85.540.000		78.963.000		-	6.577.000	85.540.000	-
125	40403779	SD NEGERI 125 TEDUBARA	Kabaena Utara		1.694.485	-	1.694.485	22.560.000	-	22.560.000		20.968.500		-	1.591.500	22.560.000	1.694.485
126	40403780	SD NEGERI 126 TANAH POLEANG	Poleang Utara		-	-	25.380.000		-	25.380.000		25.380.000		-		25.380.000	-
127	40405716	SD NEGERI 127 RARONGKEU	Lantari Jaya		-	-	71.440.000		-	71.440.000		42.389.800	10.000.000	-	19.050.200	71.440.000	-
128	40403633	SD NEGERI 128 AKACIPONG	Poleang Selatan		-	-	23.500.000	22.500.000	-	46.000.000		23.500.000	18.500.000	-	4.000.000	46.000.000	-
129	40403632	SD NEGERI 129 BALASARI	Poleang Barat		15.000	-	15.000	93.045.000	-	93.045.000		71.045.000	13.000.000	-	9.000.000	93.045.000	15.000
130	40405717	SD NEGERI 130 BULUMANAI	Poleang Barat		-	-	29.140.000	22.500.000	-	51.640.000		40.705.000	5.200.000	-	5.735.000	51.640.000	-

No	NPSN	Nama Unit	Kecamatan	Saldo Awal 2024		Jumlah Saldo Awal 2024	Penerimaan 2024			Jumlah Penerimaan 2024	Realisasi Belanja BOS					Jumlah Realisasi BOS	Saldo Akhir 2024
				Saldo Akhir 2023	Saldo Awal Markas		BOS REGULER	BOS KINERJA	LAINNYA		Pengembalian Temuan ke Kasda	BARANG & JASA	MODAL				Saldo
													PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL		
1	2	3	4	5	5	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
131	40405715	SD NEGERI 131 LENGORA PANTAI	Kabaena Tengah	-	-	-	62.040.000	-	-	62.040.000		46.746.000	5.000.000	-	10.294.000	62.040.000	-
132	40403629	SD NEGERI 132 BUNGI-BUNGI	Kabaena Timur	-	-	-	61.100.000	-	-	61.100.000		58.100.000	3.000.000	-		61.100.000	-
133	40403643	SD NEGERI 133 ANUGERAH	Lantari Jaya	-	-	-	114.680.000	-	-	114.680.000		99.880.000	14.050.000	-	750.000	114.680.000	-
134	40403786	SD NEGERI 134 LAMURU	Mata Usu	-	-	-	72.380.000	-	-	72.380.000		66.630.000	5.750.000	-		72.380.000	-
135	40404228	SD NEGERI 135 ROMPU-ROMPU	Poleang Utara	-	-	-	33.840.000	-	-	33.840.000		30.490.000	-	-		30.490.000	3.350.000
136	40403634	SD NEGERI 136 LARETE	Poleang Tenggara	-	-	-	61.100.000	22.500.000	-	83.600.000		61.100.000	4.000.000	-	18.500.000	83.600.000	-
137	40403784	SD NEGERI 137 MORENGKE	Mata Usu	-	-	-	64.860.000	-	-	64.860.000		64.860.000	-	-		64.860.000	-
138	40403782	SD NEGERI 138 TAMPABULU	Poleang Utara	-	-	-	94.940.000	-	-	94.940.000		86.061.100	-	-	8.878.900	94.940.000	-
139	40403794	SD NEGERI 139 SALOSA	Poleang	-	-	-	50.760.000	-	-	50.760.000		41.188.700	-	-	9.571.300	50.760.000	-
140	40405841	SD NEGERI 140 TAJUNCU	Mataoleo	-	-	-	31.020.000	-	-	31.020.000		28.980.000	-	-	2.040.000	31.020.000	-
141	40403636	SD NEGERI 141 BABAMOLINGKU	Poleang Barat	-	-	-	56.400.000	22.500.000	-	78.900.000		57.750.000	16.400.000	-	4.750.000	78.900.000	-
142	40403637	SD NEGERI 142 WAEMPUTANG	Poleang Selatan	-	-	-	32.900.000	-	-	32.900.000		32.900.000	-	-		32.900.000	-
143	40404559	SD NEGERI 143 TETEHAKA	Tontonunu	-	-	-	57.340.000	22.500.000	-	79.840.000		55.240.000	23.600.000	-	1.000.000	79.840.000	-
144	40403787	SD NEGERI 144 TOTOLE	Mata Usu	-	-	-	53.580.000	-	-	53.580.000		38.580.000	10.000.000	-	5.000.000	53.580.000	-
145	40403783	SD NEGERI 145 WATU-WATU	Lantari Jaya	-	-	-	33.840.000	-	-	33.840.000		31.909.400	-	-	1.930.600	33.840.000	-
146	40403781	SD NEGERI 146 WAMBAREMA	Poleang Utara	-	-	-	54.520.000	-	1.000.000	55.520.000		43.079.000	10.500.000	-	941.000	54.520.000	1.000.000
147	40403785	SD NEGERI 147 WIA-WIA	Mata Usu	-	-	-	60.160.000	22.500.000	-	82.660.000		61.660.000	21.000.000	-		82.660.000	-
148	69830691	SD NEGERI 148 LAMPOPALA	Rumbia	-	-	-	115.620.000	-	-	115.620.000		107.882.100	1.000.000	-	6.737.900	115.620.000	-
149	40404992	SD NEGERI 149 LENGORA SELATAN	Kabaena Tengah	-	-	-	37.600.000	-	-	37.600.000		37.600.000	-	-		37.600.000	-
150	40403790	SD NEGERI 150 TINA BITE	Lantari Jaya	-	-	-	56.400.000	-	-	56.400.000		45.350.000	10.000.000	-	1.050.000	56.400.000	-
151	70000533	SD NEGERI 151 TAPUAHI	Rumbia Tengah	-	-	-	142.880.000	45.000.000	-	187.880.000		175.628.600	-	-	12.251.400	187.880.000	-
152	40405221	SDS LAPONU-PONU	Poleang Barat	-	-	-	43.240.000	-	-	43.240.000		35.592.200	4.044.000	-	3.603.800	43.240.000	-
153	69862664	SDS MAWAR	Mataoleo	-	-	-	35.720.000	-	-	35.720.000		31.470.000	2.750.000	-	1.500.000	35.720.000	-
154	69892559	SDS ANAK SOLEH	Rarowatu Utara	-	-	-	48.391.200	-	-	48.391.200		47.282.000	-	-	1.109.000	48.391.000	200
155	40405842	SDS BATU SEMPE	Mataoleo	-	-	-	41.360.000	-	-	41.360.000		41.360.000	-	-	-	41.360.000	-
156	69830624	SDS WATU-WATU	Lantari Jaya	-	-	-	94.000.000	-	-	94.000.000		82.331.700	2.700.000	-	8.968.300	94.000.000	-
157	69892561	SDS TEKULEBU	Poleang	-	-	-	30.080.000	-	-	30.080.000		30.080.000	-	-		30.080.000	-
SUB TOTAL (SD)				8.609.251	2.425.650	11.034.901	15.931.010.550	720.000.000	15.710.000	16.666.720.550	5.510.142	13.648.200.700	1.488.613.700	47.914.300	1.466.833.300	16.657.072.142	20.683.309
1	2	3	4	5	5	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
158	40403747	SD-SMP SATAP NEGERI 01 POLEANG	Poleang	-	-	-	89.320.000	35.000.000	-	124.320.000		75.054.000	35.000.000	-	14.266.000	124.320.000	-
159	40404093	SD-SMP SATAP NEGERI 02 KABAENA TENGAH	Kabaena Tengah	-	-	-	45.240.000	-	-	45.240.000		45.040.000	-	-	200.000	45.240.000	-
160	40404226	SD-SMP SATAP NEGERI 03 MATAOLEO	Mataoleo	-	-	-	84.680.000	-	-	84.680.000		80.515.300	-	-	4.164.700	84.680.000	-
161	40403748	SD-SMP SATAP NEGERI 04 KABAENA	Kabaena	-	-	-	34.800.000	-	-	34.800.000		30.800.000	4.000.000	-		34.800.000	-
162	40403617	SD-SMP SATAP NEGERI 05 TONTONUNU	Tontonunu	-	-	-	138.040.000	-	-	138.040.000		130.628.500	-	-	7.411.500	138.040.000	-
163	40404223	SD-SMP SATAP NEGERI 06 KABAENA BARAT	Kabaena Barat	-	-	-	69.600.000	-	-	69.600.000		65.802.400	-	-	3.797.600	69.600.000	-
164	40404224	SD-SMP SATAP NEGERI 07 KABAENA BARAT	Kabaena Barat	-	-	-	69.600.000	-	-	69.600.000		60.244.000	1.120.000	350.000	7.886.000	69.600.000	-
165	40404551	SD-SMP SATAP NEGERI 08 KABAENA BARAT	Kabaena Barat	-	-	-	45.240.000	-	-	45.240.000		45.240.000	-	-		45.240.000	-
166	40404018	SD-SMP SATAP NEGERI 09 POLEANG UTARA	Poleang Utara	-	56.500	56.500	114.783.500	-	-	114.783.500		93.370.100	-	-	21.469.900	114.840.000	-
167	40404225	SD-SMP SATAP NEGERI 10 RAROWATU	Rarowatu	-	-	-	84.680.000	-	-	84.680.000		78.580.000	5.600.000	-	500.000	84.680.000	-
168	40403750	SD-SMP SATAP NEGERI 11 RAROWATU UTARA	Rarowatu Utara	34.000	-	34.000	69.600.000	35.000.000	-	104.600.000		87.684.000	9.500.000	-	7.416.000	104.600.000	34.000

No	NPSN	Nama Unit	Kecamatan	Saldo Awal 2024		Jumlah Saldo Awal 2024	Penerimaan 2024			Jumlah Penerimaan 2024	Realisasi Belanja BOS				Jumlah Realisasi BOS	Saldo Akhir 2024	
				Saldo Akhir 2023	Saldo Awal Markas		BOS REGULER	BOS KINERJA	LAINNYA		Pengembalian Temuan ke Kasda	BARANG & JASA	MODAL				
													PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		EKSTRA KOMPTABEL	Saldo
1	2	3	4	5	5	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
169	40404964	SD-SMP SATAP NEGERI 12 POLEANG TIMUR	Poleang Timur		-	-	82.360.000	-	-	82.360.000		70.271.700	-	-	12.088.300	82.360.000	-
170	40404724	SD-SMP SATAP NEGERI 13 KABAENA TENGAH	Kabaena Tengah		-	-	17.400.000	35.000.000	-	52.400.000		22.400.000	30.000.000	-	-	52.400.000	-
171	40405046	SD-SMP SATAP NEGERI 14 POLEANG TENGGARA	Poleang Tenggara		-	-	182.120.000	-	-	182.120.000		173.202.400	-	-	8.917.600	182.120.000	-
172	40405112	SD-SMP SATAP NEGERI 15 POLEANG BARAT	Poleang Barat		-	-	69.600.000	35.000.000	-	104.600.000		57.302.000	41.000.000	-	6.298.000	104.600.000	-
173	69964151	SD-SMP SATU ATAP NEGERI 16 POLEANG TENGGARA	Poleang Tenggara		-	-	41.760.000	-	-	41.760.000		36.673.400	1.000.000	-	4.086.600	41.760.000	-
174	40403749	SMP NEGERI 01 KABAENA	Kabaena		-	-	61.480.000	-	-	61.480.000		57.256.000	-	-	4.224.000	61.480.000	-
175	40402452	SMP NEGERI 02 RUMBIA	Rumbia		-	-	605.520.000	-	-	605.520.000		509.389.301	38.835.000	-	56.900.300	605.124.601	395.399
176	40404029	SMP NEGERI 03 POLEANG	Poleang		-	-	233.160.000	-	-	233.160.000		196.807.400	1.450.000	-	34.902.600	233.160.000	-
177	40404019	SMP NEGERI 04 KABAENA TIMUR	Kabaena Timur		-	-	247.080.000	-	-	247.080.000		221.745.000	18.500.000	-	6.180.000	246.425.000	655.000
178	40404009	SMP NEGERI 05 POLEANG TIMUR	Poleang Timur		-	-	162.400.000	-	-	162.400.000		135.900.000	24.300.000	-	2.200.000	162.400.000	-
179	40404010	SMP NEGERI 06 RAROWATU	Rarowatu		-	-	261.000.000	-	-	261.000.000		184.565.000	57.265.000	-	19.170.000	261.000.000	-
180	40404015	SMP NEGERI 07 RAROWATU UTARA	Rarowatu Utara		-	-	155.440.000	-	-	155.440.000		150.550.300	-	-	4.889.700	155.440.000	-
181	40402459	SMP NEGERI 08 MATAOLEO	Mataoleo		-	-	263.320.000	-	-	263.320.000		223.683.000	25.000.000	-	14.637.000	263.320.000	-
182	40404011	SMP NEGERI 09 KABAENA BARAT	Kabaena Barat		91.000	91.000	182.029.000	35.000.000	-	217.029.000		167.441.500	48.580.000	-	-	216.021.500	1.098.500
183	40404014	SMP NEGERI 10 POLEANG SELATAN	Poleang Selatan		-	-	252.880.000	35.000.000	-	287.880.000		188.280.700	41.565.000	-	58.034.300	287.880.000	-
184	40402453	SMP NEGERI 11 KABAENA TENGAH	Kabaena Tengah	1.500.000	-	1.500.000	174.000.000	-	-	174.000.000		158.208.400	-	-	17.291.600	175.500.000	-
185	40404013	SMP NEGERI 12 POLEANG BARAT	Poleang Barat		3.212	3.212	298.116.788	35.000.000	5.175.000	338.291.788		263.870.346	25.500.000	-	48.924.600	338.294.946	54
186	40404016	SMP NEGERI 13 POLEANG UTARA	Poleang Utara		-	-	110.200.000	-	670.000	110.870.000		101.947.400	-	-	8.922.600	110.870.000	-
187	40404021	SMP NEGERI 14 KABAENA SELATAN	Kabaena Selatan		-	-	134.560.000	-	-	134.560.000		118.129.000	-	-	16.431.000	134.560.000	-
188	40404008	SMP NEGERI 15 KABAENA UTARA	Kabaena Utara		-	-	106.720.000	35.000.000	-	141.720.000		110.270.000	12.950.000	-	18.500.000	141.720.000	-
189	40402460	SMP NEGERI 16 POLEANG TENGAH	Poleang Tengah		-	-	143.840.000	-	-	143.840.000		122.927.364	3.000.000	-	17.912.636	143.840.000	-
190	40404017	SMP NEGERI 17 KEP. MASALOKA RAYA	Kep. Masaloka Raya		-	-	156.600.000	-	-	156.600.000		136.055.000	-	-	20.545.000	156.600.000	-
191	40403745	SMP NEGERI 18 KABAENA UTARA	Kabaena Utara		-	-	158.920.000	-	-	158.920.000		137.488.000	10.000.000	-	11.432.000	158.920.000	-
192	40403614	SMP NEGERI 19 POLEANG BARAT	Poleang Barat		-	-	163.560.000	70.000.000	-	233.560.000		156.068.700	35.900.000	-	41.591.300	233.560.000	-
193	40404022	SMP NEGERI 20 POLEANG UTARA	Poleang Utara		-	-	228.520.000	-	965.000	229.485.000		196.424.000	1.680.000	-	31.381.000	229.485.000	-
194	40404283	SMP NEGERI 21 POLEANG TENGGARA	Poleang Tenggara		-	-	78.880.000	-	-	78.880.000		69.664.500	-	-	9.215.500	78.880.000	-
195	40404954	SMP NEGERI 22 LANTARI JAYA	Lantari Jaya		-	-	350.320.000	-	-	350.320.000		255.652.600	32.340.000	-	62.327.400	350.320.000	-
196	40405109	SMP NEGERI 23 POLEANG UTARA	Poleang Utara		-	-	113.680.000	-	510.000	114.190.000		108.190.000	6.000.000	-	-	114.190.000	-
197	69760829	SMP NEGERI 24 POLEANG	Poleang		-	-	97.440.000	35.000.000	-	132.440.000		84.890.000	39.250.000	-	8.300.000	132.440.000	-
198	69760832	SMP NEGERI 25 POLEANG BARAT	Poleang Barat	100.452	-	100.452	69.600.000	35.000.000	2.160.000	106.760.000		81.720.000	14.160.000	-	10.880.000	106.760.000	100.452
199	69760830	SMP NEGERI 26 POLEANG TIMUR	Poleang Timur		-	-	68.440.000	-	-	68.440.000		59.961.100	-	-	8.478.900	68.440.000	-
200	69760831	SMP NEGERI 27 RAROWATU UTARA	Rarowatu Utara		-	-	127.600.000	-	-	127.600.000		115.600.000	12.000.000	-	-	127.600.000	-
201	69760828	SMP NEGERI 28 MATAOLEO	Mataoleo		-	-	67.280.000	-	-	67.280.000		67.280.000	-	-	-	67.280.000	-
202	69857731	SMP NEGERI 29 RUMBIA	Rumbia		-	-	125.280.000	-	-	125.280.000		95.723.000	23.824.000	-	5.733.000	125.280.000	-
203	69946183	SMP NEGERI 30 KABAENA TIMUR	Kabaena Timur		-	-	69.600.000	-	-	69.600.000		66.100.000	-	-	3.500.000	69.600.000	-
204	69964127	SMP NEGERI 31 LANTARI JAYA	Lantari Jaya		-	-	100.920.000	35.000.000	-	135.920.000		122.803.900	7.062.500	-	6.053.600	135.920.000	-
205	40405110	SMP SWASTA LEBOEA	Poleang Tengah		-	-	60.320.000	-	-	60.320.000		57.774.200	-	-	2.545.800	60.320.000	-
206	69787682	SMP SWASTA WATUMALOMBA	Tontonunu		-	-	25.520.000	-	-	25.520.000		25.520.000	-	-	-	25.520.000	-
SUB TOTAL (SMP)				1.634.452	150.712	1.785.164	6.693.049.288	455.000.000	9.480.000	7.157.529.288	-	5.900.693.511	606.381.500	350.000	649.606.036	7.157.031.047	2.283.405

PUSKESMAS
RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAPITASI BPJS TAHUN 2024

NO	Nama FKTP	Saldo Awal Per 1 Jan 2024	Total Penerimaan (Kas di bendahara Kapitasi + Kas Lainnya)	Pengeluaran							
				PEGAWAI	BARANG DAN JASA						
				Belanja Jasa Pelayanan Medik	Belanja ATK Dan Cetak	Belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Belanja Internet	Belanja Obat-Obatan Dan Bahan Habis Pakai	Belanja Penggandaan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja listrik
1	2	4	17 = 13+14+15+16	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Puskesmas Rumbia	21.228,00	647.750.259,00	470.853.604,00	10.287.000,00	10.395.000,00	5.624.400,00	79.297.982,00	23.389.450,00	-	-
2	Puskesmas Rumbia Tengah	11.874,00	565.835.390,00	402.231.938,00	13.131.000,00	7.225.128,00	10.619.418,00	66.178.252,00	6.520.000,00	-	-
3	Puskesmas Rarowatu	46.288,00	422.259.213,00	301.261.808,00	13.426.000,00	6.200.000,00	-	46.982.454,00	5.622.650,00	10.725.000,00	-
4	Puskesmas Rarowatu Utara	15.473,75	484.151.157,00	350.780.570,00	14.045.500,00	3.755.000,00	4.819.000,00	57.367.500,00	10.692.200,00	12.000.000,00	-
5	Puskesmas Mataoleo	395.215,00	502.775.129,00	360.243.896,00	16.850.000,00	1.586.000,00	-	55.401.511,00	6.797.550,00	23.760.000,00	-
6	06. Puskesmas Masaloka Raya	41.072,00	167.095.042,00	121.091.173,00	2.505.000,00	-	-	20.789.885,00	609.350,00	14.400.000,00	-
7	07. Puskesmas Lantari Jaya	42.320,00	628.515.370,00	456.164.426,00	19.441.000,00	440.000,00	4.331.300,00	79.058.750,00	21.580.600,00	15.000.000,00	-
8	Puskesmas Poleang	57.887,00	872.919.631,00	631.445.798,00	20.742.000,00	5.940.000,00	4.445.460,00	97.937.180,75	8.082.250,00	22.050.000,00	-
9	Puskesmas Poleang Barat	30.595,00	821.421.917,00	593.544.486,00	18.045.000,00	8.500.000,00	-	67.528.640,00	14.496.200,00	28.000.000,00	-
10	Puskesmas Poleang Timur	86.040,00	702.236.421,00	514.181.486,00	24.813.000,00	7.340.000,00	-	78.763.479,00	8.970.700,00	10.210.000,00	3.008.500,00
11	Puskesmas Poleang Tenggara	112.027,25	346.482.071,00	253.374.860,00	3.679.500,00	1.350.000,00	-	34.906.002,00	970.250,00	18.900.000,00	5.943.000,00
12	Puskesmas Poleang Selatan	91.097,00	455.520.058,00	332.692.903,00	23.995.500,00	-	-	55.517.078,00	5.631.200,00	14.350.000,00	-
13	Puskesmas Poleang Utara	10.833,00	761.276.717,00	548.908.717,00	15.100.000,00	17.880.000,00	-	81.462.137,00	2.840.300,00	17.630.000,00	-
14	Puskesmas Poleang Tengah	1.605.185,25	262.430.309,00	191.990.896,00	15.633.500,00	8.020.000,00	3.020.000,00	24.567.219,00	4.305.000,00	4.050.000,00	-
15	Puskesmas Tontonunu	22.567,50	430.263.238,00	310.537.642,50	5.349.000,00	6.980.105,00	-	48.454.499,00	1.501.100,00	11.550.000,00	-
16	Puskesmas Matausu	43.602,00	102.080.569,00	74.586.757,00	600.000,00	-	-	9.600.000,00	1.800.000,00	9.480.000,00	-
17	Puskesmas Kabaena	66.101,00	241.758.823,00	175.154.413,00	5.085.000,00	2.400.000,00	-	28.990.036,00	-	20.526.000,00	-
18	Puskesmas Kabaena Barat	288.172,00	512.080.044,00	371.150.132,00	18.850.000,00	2.015.000,00	-	64.832.750,00	5.100.000,00	28.836.000,00	3.294.720,00
19	Puskesmas Kabaena Timur	10.740,00	477.993.752,00	340.998.384,00	11.639.000,00	8.920.000,00	-	55.816.859,00	9.476.000,00	9.010.000,00	-
20	Puskesmas Kabaena Selatan	49.335,00	248.536.027,00	179.088.246,00	4.260.000,00	5.960.000,00	-	22.110.000,00	3.800.000,00	14.952.000,00	-
21	Puskesmas Kabaena Utara	124.189,50	308.438.508,00	223.617.198,00	8.930.000,00	5.185.000,00	-	28.124.500,00	-	15.186.000,00	-
22	Puskesmas Kabaena Tengah	32.511,00	304.534.204,00	223.134.853,00	7.484.000,00	8.250.000,00	-	32.922.000,00	-	16.020.000,00	-
		3.204.353,25	10.266.353.849,00	7.427.034.186,50	273.891.000,00	118.341.233,00	32.859.578,00	1.136.608.713,75	142.184.800,00	316.635.000,00	12.246.220,00

PUSKESMAS
RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELOMPOKAN
DANA KAPITASI BPJS TAHUN 2024

NO	Nama FKTP							Total Pengeluaran	Saldo akhir Per Bulan
		MODAL		TOTAL BELANJA	Setoran Jasa Giro/ SILPA	Pengeluaran Lainnya/luran BPJS PNS 1%	Setoran Pajak		
		Belanja Alat Kesehatan	Belanja Operasional Kantor						
1	2	26	27	28 = 18+...+27	29	30	31`	32 = 28+29+30+31	33 = 9+17-32
1	Puskesmas Rumbia	2.313.335,00	25.641.500,00	627.802.271,00	-	2.102.956,00	17.842.501,00	647.747.728,00	23.759,00
2	Puskesmas Rumbia Tengah	3.266.200,00	27.122.500,00	536.294.436,00	-	2.300.529,00	27.225.611,00	565.820.576,00	26.688,00
3	Puskesmas Rarowatu	5.279.000,00	12.231.250,00	401.728.162,00	-	1.582.309,00	18.994.495,00	422.304.966,00	535,00
4	Puskesmas Rarowatu Utara	2.850.000,00	11.275.000,00	467.584.770,00	-	1.971.877,00	14.471.855,00	484.028.502,00	138.128,75
5	Puskesmas Mataoleo	5.560.000,00	10.500.000,00	480.698.957,00	-	2.414.474,00	20.035.464,00	503.148.895,00	21.449,00
6	06. Puskesmas Masaloka Raya	-	1.900.000,00	161.295.408,00	-	794.165,00	4.845.979,00	166.935.552,00	200.562,00
7	07. Puskesmas Lantari Jaya	-	12.205.656,00	608.221.732,00	-	2.012.817,00	18.283.321,00	628.517.870,00	39.820,00
8	Puskesmas Poleang	11.491.050,00	39.762.500,00	841.896.238,75	-	2.576.693,00	28.473.091,00	872.946.022,75	31.495,25
9	Puskesmas Poleang Barat	33.052.883,00	28.200.000,00	791.367.209,00	-	2.989.007,00	27.040.264,00	821.396.480,00	56.032,00
10	Puskesmas Poleang Timur	10.347.250,00	28.025.000,00	685.659.415,00	-	1.924.725,00	14.736.381,00	702.320.521,00	1.940,00
11	Puskesmas Poleang Tenggara	8.868.750,00	9.823.500,00	337.815.862,00	-	1.446.590,00	7.202.335,00	346.464.787,00	129.311,25
12	Puskesmas Poleang Selatan	1.900.000,00	9.233.437,00	443.320.118,00	-	1.507.814,00	9.911.343,00	454.739.275,00	871.880,00
13	Puskesmas Poleang Utara	13.671.840,00	34.374.887,00	731.867.881,00	-	2.241.509,00	27.156.921,00	761.266.311,00	21.239,00
14	Puskesmas Poleang Tengah	1.158.000,00	-	252.744.615,00	-	1.161.430,00	5.274.350,00	259.180.395,00	4.855.099,25
15	Puskesmas Tontonunu	5.287.500,00	24.412.500,00	414.072.346,50	-	1.648.335,00	14.564.713,00	430.285.394,50	411,00
16	Puskesmas Matausu	2.225.650,00	-	98.292.407,00	-	494.268,00	2.137.292,00	100.923.967,00	1.200.204,00
17	Puskesmas Kabaena	1.300.000,00	-	233.455.449,00	-	915.276,00	7.304.333,00	241.675.058,00	149.866,00
18	Puskesmas Kabaena Barat	-	-	494.078.602,00	-	1.940.139,00	15.278.860,00	511.297.601,00	1.070.615,00
19	Puskesmas Kabaena Timur	3.206.250,00	15.525.000,00	454.591.493,00	-	1.927.162,00	21.402.080,00	477.920.735,00	83.757,00
20	Puskesmas Kabaena Selatan	8.650.000,00	-	238.820.246,00	-	1.038.773,00	8.716.920,00	248.575.939,00	9.423,00
21	Puskesmas Kabaena Utara	13.001.250,00	3.925.000,00	297.968.948,00	-	1.055.589,00	9.226.655,00	308.251.192,00	311.505,50
22	Puskesmas Kabaena Tengah	3.860.000,00	5.800.000,00	297.470.853,00	-	816.209,00	6.207.756,00	304.494.818,00	71.897,00
		137.288.958,00	299.957.730,00	9.897.047.419,25	-	36.862.646,00	326.332.520,00	10.260.242.585,25	9.315.617,00

Daftar Piutang dan Penyisihan

	PIUTANG	PENYISIHAN	NETTO
Pajak Daerah	2.341.094.759,20	560.600.768,34	1.780.493.990,87
Pajak Hotel	38.965.500,00	194.827,50	38.770.672,50
Pajak restoran/rumah makan dan sejenisnya	24.638.280,00	123.191,40	24.515.088,60
Pajak Hiburan	0	0	0,00
Pajak Reklame	14.225.000,00	71.125,00	14.153.875,00
Pajak Penerangan Jalan	589.632.955,00	2.948.164,78	586.684.790,23
Pajak Air Tanah	1.418.297,20	7.091,49	1.411.205,71
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.011.921.130,00	401.398.785,54	610.522.344,47
PBB P2	561.293.597,00	139.151.332,64	422.142.264,37
BPHTB	99.000.000,00	16.706.250,00	82.293.750,00
Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0,00
Retribusi Daerah	1.950.118.316,00	1.803.651.312,73	146.467.003,27
Retribusi Pelayanan Pasar	1.884.749.770,00	1.803.324.470,00	81.425.300,00
Retribusi Kepelabuhanan	62.843.546,00	314.217,73	62.529.328,27
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Karpet Lapangan Badminton)	2.525.000,00	12.625,00	2.512.375,00
Lain-lain PAD yang sah	4.292.168.447,00	20.756.377,74	4.271.412.069,26
BLUD	4.151.275.447,00	20.756.377,74	4.130.519.069,26
Penjualan Aset	140.893.000,00	0,00	140.893.000,00
TOTAL	8.583.381.522,20	2.385.008.458,81	6.198.373.063,40

No.	OPD	Nilai S/D 31 Desember 2023	MUTASI PERSEDIAAN TA 2024		Nilai S/D 31 Desember 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	AUDITED
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	1.574.585.829,00	918.585.829,00	656.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	2.714.124.937,81	730.324.926,00	730.324.926,00	2.714.124.937,81
3	UPTD LABKESDA	-	54.233.640,00	47.473.740,00	6.759.900,00
4	PSC 119	-			-
5	PUSKESMAS RUMBIA	24.951.671,00	156.944.331,00	127.368.894,00	54.527.108,00
6	PUSKESMAS RUMBIA TENGAH	21.341.763,00	93.692.571,00	76.920.877,00	38.113.457,00
7	PUSKESMAS RAROWATU	35.205.914,80	36.004.578,00	32.695.430,00	38.515.062,80
8	PUSKESMAS RAROWATU UTARA	31.940.748,00	163.521.905,00	151.761.505,00	43.701.148,00
9	PUSKESMAS LANTARI JAYA	37.041.617,60	195.036.381,00	165.512.983,00	66.565.015,60
10	PUSKESMAS MASALOKA RAYA	9.232.273,00	100.337.460,00	77.050.044,00	32.519.689,00
11	PUSKESMAS MATAOLEO	22.764.517,00	114.473.941,00	95.968.090,00	41.270.368,00
12	PUSKESMAS MATAUSU	20.367.347,00	100.336.860,00	77.049.444,00	43.654.763,00
13	PUSKESMAS TONTONUNU	5.874.120,00	231.693.920,00	203.527.092,00	34.040.948,00
14	PUSKESMAS POLEANG	85.180.880,00	269.434.290,00	230.392.122,00	124.223.048,00
15	PUSKESMAS POLEANG BARAT	34.180.520,00	198.479.385,00	170.557.687,00	62.102.218,00
16	PUSKESMAS POLEANG SELATAN	21.673.208,00	104.502.802,00	83.156.056,00	43.019.954,00
17	PUSKESMAS POLEANG TENGAH	26.127.424,00	95.772.982,00	79.941.923,00	41.958.483,00
18	PUSKESMAS POLEANG TENGGARA	17.409.315,00	93.207.754,00	76.296.322,00	34.320.747,00
19	PUSKESMAS POLEANG TIMUR	21.519.551,00	94.666.762,00	84.681.687,00	31.504.626,00
20	PUSKESMAS POLEANG UTARA	36.901.102,00	281.356.874,00	234.931.973,00	83.326.003,00
21	PUSKESMAS KABAENA	28.607.558,00	135.239.195,00	102.322.292,00	61.524.461,00
22	PUSKESMAS KABAENA BARAT	19.917.988,00	81.086.063,00	67.473.295,00	33.530.756,00
23	PUSKESMAS KABAENA SELATAN	33.359.335,00	177.652.223,00	60.369.513,00	150.642.045,00
24	PUSKESMAS KABAENA TENGAH	19.578.317,00	73.201.191,00	57.582.220,00	35.197.288,00
25	PUSKESMAS KABAENA TIMUR	28.337.607,00	148.261.000,00	123.852.415,00	52.746.192,00
26	PUSKESMAS KABAENA UTARA	23.276.556,00	196.330.624,00	70.680.627,00	148.926.553,00
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.779.528.414,95	10.925.017.971,05	9.972.925.054,00	2.731.621.332,00
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.708.156.650,00	39.157.999.645,00	23.272.938.145,00	35.593.218.150,00
29	DINAS PERUMAHAN, PEMUKINAN DAN PERTANAHAN	-	604.345.700,00	604.345.700,00	-
30	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	-	1.397.630.051,00	1.397.630.051,00	-
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	156.973.821,00	156.973.821,00	-
32	DINAS SOSIAL	-	440.287.733,00	440.287.733,00	-
33	DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	274.656.525,00	274.656.525,00	-
34	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	2.206.744.414,00	1.421.979.622,00	784.764.792,00
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1.435.107.281,00	1.435.107.281,00	-
36	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	101.142.195,00	209.088.878,00	177.762.152,00	456.566.710,00
37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	90.313.644,00	90.313.644,00	-
38	BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURGA BERENCANA	93.817.497,00	796.545.237,00	796.545.237,00	93.817.497,00
39	DINAS PERHUBUNGAN	-	592.175.507,00	592.175.507,00	-
40	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	533.186.667,00	533.186.667,00	-
41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	389.452.633,00	389.452.633,00	-
42	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	1.441.730.630,00	1.441.730.630,00	-
43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	834.058.890,00	834.058.890,00	-
44	DINAS PERIKANAN	-	8.234.537.700,00	8.234.537.700,00	-
45	DINAS PERTANIAN	-	12.587.809.400,00	12.587.809.400,00	-
46	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPREASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	2.642.530.220,00	2.642.530.220,00	-
47	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	-	313.091.840,00	313.091.840,00	-
48	SEKRETARIAT DAERAH	-	6.070.071.928,00	6.070.071.928,00	-
49	SEKRETARIAT DPRD	-	1.336.952.216,00	1.336.952.216,00	-
50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	100.995.025,00	100.995.025,00	-
51	BADAN KEUANGAN DAERAH	15.651.000,00	71.744.750,00	58.551.000,00	28.844.750,00

No.	OPD	Nilai S/D 31 Desember 2023	MUTASI PERSEDIAAN TA 2024		Nilai S/D 31 Desember 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	AUDITED
52	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	773.607.000,00	773.607.000,00	-
53	BADAN RISET DAERAH	-	476.629.300,00	476.629.300,00	-
54	INSPEKTORAT	-	196.488.460,00	196.488.460,00	-
55	KECAMATAN RUMBIA	-	565.772.300,00	565.772.300,00	-
56	KELURAHAN KASIPUTE	-	275.540.000,00	275.540.000,00	-
57	KELURAHAN DOULE	-	291.763.650,00	291.763.650,00	-
58	KELURAHAN LAMPOPALA	-	269.925.000,00	269.925.000,00	-
59	KELURAHAN LAMERORO	-	267.576.000,00	267.576.000,00	-
60	KECAMATAN RUMBIA TENGAH	-	193.560.900,00	193.560.900,00	-
61	KELURAHAN LAURU	-	204.934.250,00	204.934.250,00	-
62	KELURAHAN POEA	-	19.058.000,00	19.058.000,00	-
63	KELURAHAN KAMPUNG BARU	-	275.157.500,00	275.157.500,00	-
64	KECAMATAN RAROWATU	-	451.061.500,00	451.061.500,00	-
65	KELURAHAN TAUBONTO	-	175.120.000,00	175.120.000,00	-
66	KECAMATAN RAROWATU UTARA	-	231.364.040,00	231.364.040,00	-
67	KELURAHAN ANEKA MARGA	-	133.943.400,00	133.943.400,00	-
68	KECAMATAN MATAOLEO	-	336.969.000,00	336.969.000,00	-
69	KECAMATAN MASALOKA RAYA	-	391.661.000,00	391.661.000,00	-
70	KECAMATAN LANTARI JAYA	-	620.464.000,00	620.464.000,00	-
71	KECAMATAN POLEANG	-	500.401.650,00	500.401.650,00	-
72	KELURAHAN BOEPINANG	-	246.863.600,00	246.863.600,00	-
73	KELUTAHAN BOEPIANG BARAT	-	250.493.700,00	250.493.700,00	-
74	KELURAHAN BOEARA	-	249.563.300,00	249.563.300,00	-
75	KELURAHAN KASTARIB	-	255.031.100,00	255.031.100,00	-
76	KELURAHAN BARANGGA	-	254.535.000,00	254.535.000,00	-
77	KELURAHAN KASABOLO	-	282.148.000,00	282.148.000,00	-
78	KECAMATAN POLEANG BARAT	-	538.127.500,00	538.127.500,00	-
79	KECAMATAN POLEANG TIMUR	-	338.042.300,00	338.042.300,00	-
80	KELURAHAN BAMBAEA	-	152.255.600,00	152.255.600,00	-
81	KELURAHAN PUULEMO	-	171.107.900,00	171.107.900,00	-
82	KECAMATAN POLEANG TENGGARA	-	721.858.452,00	721.858.452,00	-
83	KECAMATAN POLEANG UTARA	-	423.928.300,00	423.928.300,00	-
84	KECAMATAN POLEANG SELATAN	-	508.501.000,00	508.501.000,00	-
85	KECAMATAN POLEANG TENGAH	-	267.173.870,00	267.173.870,00	-
86	KECAMATAN TONTONUNU	-	380.438.000,00	380.438.000,00	-
87	KECAMATAN MATAUSU	-	393.029.900,00	393.029.900,00	-
88	KECAMATAN KABAENA	-	129.922.000,00	129.922.000,00	-
89	KELURAHAN TEOMOKOLE	-	11.325.000,00	11.325.000,00	-
90	KELURAHAN RAHAMPUU	-	52.085.000,00	52.085.000,00	-
91	KECAMATAN KABAENA BARAT	-	149.370.000,00	149.370.000,00	-
92	KELURAHAN SIKELI	-	145.343.500,00	145.343.500,00	-
93	KECAMATAN KABAENA TIMUR	-	723.647.800,00	723.647.800,00	-
94	KELURAHAN DONGKALA	-	115.235.000,00	115.235.000,00	-
95	KELURAHAN LAMBALE	-	165.079.600,00	165.079.600,00	-
96	KECAMATAN KABAENA SELATAN	-	625.459.380,00	625.459.380,00	-
97	KECAMATAN KABAENA UTARA	-	25.267.200,00	25.267.200,00	-
98	KECAMATAN KABAENA TENGAH	-	85.331.000,00	85.331.000,00	-
99	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	-	106.321.700,00	106.321.700,00	-
	Jumlah	25.017.210.027,16	112.761.907.445,05	93.741.567.259,00	44.361.648.002,21

Daftar Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023

No	NAMA	TAHUN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
A	TGR BUKAN BENDAHARA		66.689.362.122,00	
1	Zainul, S.AP. MM		42.218.246.270,00	
2	Sudin		9.635.297.802,00	
3	Harsin		1.885.734.604,00	
4	Asmin Makmur, S.Pt		5.449.643.500,00	
5	Isman Syahrir		311.996.446,00	
6	Zainal Arifin Yasin		7.188.443.500,00	
B	TGR BUKAN BENDAHARA YG TELAH MEMILIKI SK PEMBEBANAN		6.902.239.057,00	
1	Amirullah, S.Pt	31-Jul-12	6.366.432,00	
2	Asis Kaeja, SH	31-Jul-12	194.100.000,00	
3	Hamzah, S.Kom	31-Des-13	214.994.067,00	
4	Arief Syam, S.Kom	31-Des-13	1.257.651,00	
5	Achmad Nompia	31-Des-13	16.795.000,00	
6	Ponirin	31-Des-13	28.929.000,00	
7	Dr. H. Atikurahman, M. S	12-Jan-13	1.312.497.500,00	
8	Muh. Subhan Tambara, SE. M. Si	12-Jan-13	1.523.562.500,00	
9	Drs. H. Idrus Effendy Kube, M. Si	12-Jan-13	1.686.213.500,00	
10	Hamran	12-Jan-13	1.000.000.000,00	
11	Doddy A. Muchlisi, SE	12-Jan-13	21.122.500,00	
12	Subroto	12-Jan-13	8.900.000,00	
13	Syarifuddin	12-Jan-13	6.250.000,00	
14	Jusmawati, A. Md	12-Jan-13	8.500.000,00	
15	Aseha	12-Jan-13	8.500.000,00	
16	Ilham, A. Mt	12-Jan-13	7.900.000,00	
17	Nasriadi	12-Jan-13	7.900.000,00	
18	Hajaru Hamid	12-Jan-13	8.500.000,00	
19	Hardiawan, A. Md	12-Jan-13	8.700.000,00	
20	Soro Manguntu	12-Jan-13	5.500.000,00	
21	M. Kasim	12-Jan-13	7.750.000,00	
22	Rahmat	12-Jan-13	5.500.000,00	
23	Darwis	12-Jan-13	5.500.000,00	
24	Ridwan, S. Pi, M. Si	12-Jan-13	6.900.000,00	
25	Djuraedin, S. Ag	12-Jan-13	9.500.000,00	
26	Boby Afyudi, S. Pi	12-Jan-13	18.000.000,00	
27	Ir. H. Arifuddin	12-Jan-13	3.250.000,00	
28	Sri Rahayu Halik, S. Kel	12-Jan-13	9.000.000,00	
29	Diding Mahfudin, A. Pi	12-Jan-13	28.500.000,00	
30	Ir. Muh. Said	12-Jan-13	9.500.000,00	
31	Umar Manne	12-Jan-13	9.000.000,00	
32	Makmur, S. Pi	12-Jan-13	7.000.000,00	
33	Asrul Nasir, S. Si	12-Jan-13	9.700.000,00	
34	Amsir	12-Jan-13	17.350.000,00	
35	Muh. Asbari Muis	12-Jan-13	21.000.000,00	
36	Bang Musakkir, S. Pi	12-Jan-13	10.600.000,00	
37	Rafiu	12-Jan-13	22.850.000,00	
38	Dirman, S. Pd	12-Jan-13	26.250.000,00	

No	NAMA	TAHUN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
39	Hamsinah T. Burhan, SE	12-Jan-13	28.750.000,00	
40	M. Aras Tarika	12-Jan-13	9.750.000,00	
41	Andi Agusaling, SP	12-Jan-13	18.900.000,00	
42	Isnan Agus, S. Sos	12-Jan-13	5.300.000,00	
43	M. Gaswa	12-Jan-13	5.900.000,00	
44	Nurarfita Wati	12-Jan-13	4.500.000,00	
45	Marwan, S. IP. MP	12-Jan-13	189.000.000,00	
46	Abris Mahmud, SE	12-Jan-13	16.800.000,00	
47	Achyan Kontje	31-Des-13	319.560.107,00	
48	LA IFA, SE, M.Si	05-Sep-14	140.800,00	
C	TGR BUKAN BENDAHARA YG TELAH MEMILIKI SK PEMBEBANAN		434.096.000,00	
1	Dadi Saugi	14-Mei-18	25.000.000,00	
2	CV. Buana Jaya	13-Mar-19	7.695.000,00	
3	CV. Sultan Pratama	02-Agu-19	30.000.000,00	
4	CV. Amal Bakti	31-Des-19	93.868.000,00	
5	CV. Tolima	31-Des-19	65.032.000,00	
6	CV. Telaga Bening Nusantara	31-Des-19	2.001.000,00	
7	PT. Arta Graha Cipta	31-Des-19	53.500.000,00	
8	CV. Pladesy Consultant	31-Des-19	59.000.000,00	
9	Andi Muh. Kamal (PPK Dinas Perindagkop)	20-Okt-20	98.000.000,00	
	JUMLAH		74.025.697.179,00	
1	Kurvol	20-Okt-20	456.784.732,00	
	JUMLAH		75.213.843.733,00	

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
REKAPITULASI UTANG BELANJA TAHUN 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Utang Belanja Pegawai	24.548.811.833,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	11.981.873.165,00
3	Utang Belanja Hibah	1.017.318.000,00
4	Utang Belanja Modal:	60.911.692.377,86
a	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 673.415.200,00	
b	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.084.411.308,36	
c	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 50.140.128.869,50	
d	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.737.000,00	
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan (Alokasi Dana Desa)	3.394.731.684,00
6	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	260.672.400,00
	JUMLAH UTANG BELANJA TAHUN 2024	102.115.099.459,86

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
REKAPITULASI UTANG BELANJA TAHUN 2024

No	Uraian	Tahun	JUMLAH
		2024	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		451.866.560,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	451.866.560,00	
2	Dinas Kesehatan		3.108.594.079,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	3.108.594.079,00	
2.1	Rumah Sakit Umum Daerah		-
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		379.747.587,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	346.997.587,00	
	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian K	32.750.000,00	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		160.867.038,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	150.627.038,00	
	Utang Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.240.000,00	
5	Satuan Polisi Pamong Praja		199.294.658,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	199.294.658,00	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		150.424.897,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	136.064.897,00	
	Utang Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.560.000,00	
	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	800.000,00	
7	Dinas Sosial		115.488.126,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	115.488.126,00	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		219.353.801,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	189.153.801,00	
	Utang Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	21.900.000,00	
	Utang Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.100.000,00	
	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.200.000,00	
9	Dinas Ketahanan Pangan		136.978.480,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	136.978.480,00	
10	Dinas Lingkungan Hidup		153.591.740,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	153.591.740,00	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		228.513.404,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	228.513.404,00	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		123.682.166,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	123.682.166,00	
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		376.484.900,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	376.484.900,00	
14	Dinas Perhubungan		216.311.636,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	216.311.636,00	
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		164.750.831,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	164.750.831,00	
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		177.616.256,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	177.616.256,00	
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		199.994.311,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	199.994.311,00	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		157.374.884,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	157.374.884,00	
19	Dinas Perikanan		151.825.771,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	151.825.771,00	
20	Dinas Pertanian		563.118.247,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	563.118.247,00	
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		185.133.184,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	185.133.184,00	
22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		152.373.860,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	152.373.860,00	
23	Sekretariat Daerah		907.063.958,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	907.063.958,00	
24	Sekretariat DPRD		189.059.539,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	189.059.539,00	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		163.189.745,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	163.189.745,00	
26	Badan Keuangan Daerah		12.677.013.566,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	352.110.666,00	
	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bang	746.402.000,00	
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)	11.578.500.900,00	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		131.407.581,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	131.407.581,00	
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		211.973.869,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	211.973.869,00	
29	Inspektorat Daerah		349.001.574,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	349.001.574,00	
30	Kecamatan Rumbia		213.603.341,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	213.603.341,00	
31	Kecamatan Rumbia Tengah		177.278.693,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	176.878.693,00	
	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	400.000,00	
	Kelurahan Polea		5.600.000,00
	Utang Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.600.000,00	

No	Uraian	Tahun	JUMLAH
		2024	
32	Kecamatan Rarowatu		106.454.412,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	106.454.412,00	
33	Kecamatan Rarowatu Utara		85.651.124,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	85.651.124,00	
34	Kecamatan Mataoleo		79.118.320,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	79.118.320,00	
35	Kecamatan Kep. Masaloka Raya		60.634.096,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	60.634.096,00	
36	Kecamatan Lantari Jaya		68.776.463,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	68.776.463,00	
37	Kecamatan Poleang		150.480.564,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	150.480.564,00	
38	Kecamatan Poleang Barat		59.188.756,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	59.188.756,00	
39	Kecamatan Poleang Timur		151.033.376,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	137.323.376,00	
	Utang Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.510.000,00	
	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00	
40	Kecamatan Poleang Tenggara		49.438.408,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	49.438.408,00	
41	Kecamatan Poleang Utara		70.334.764,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	70.334.764,00	
42	Kecamatan Poleang Selatan		58.245.392,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	58.245.392,00	
43	Kecamatan Poleang Tengah		54.521.408,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	54.521.408,00	
44	Kecamatan Tontonunu		66.257.165,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	66.257.165,00	
45	Kecamatan Matausu		49.087.471,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	49.087.471,00	
46	Kecamatan Kabaena		134.344.984,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	134.344.984,00	
47	Kecamatan Kabaena Barat		72.618.356,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	72.618.356,00	
48	Kecamatan Kabaena Timur		121.571.064,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	121.571.064,00	
49	Kecamatan Kabaena Selatan		59.119.148,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	59.119.148,00	
50	Kecamatan Kabaena Utara		41.993.520,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	41.993.520,00	
51	Kecamatan Kabaena Tengah		35.257.388,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	35.257.388,00	
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		176.107.372,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Peng	155.627.372,00	
	Utang Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.680.000,00	
	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	800.000,00	
	TOTAL UTANG BELANJA PEGAWAI	24.548.811.833,00	24.548.811.833,00

Daftar Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2024	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		951.373.226,00
	Utang Belanja Jasa kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemb	56.800.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim P	20.600.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	137.500.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.593.226,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	593.880.000,00	
2	Dinas Kesehatan		5.718.974.094,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	695.750.000,00	
	Utang Belanja-Jasa Tenaga Pelayanan Umum Nov. & Des 2023	51.498.750,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	14.895.787,00	
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU d	4.033.682.565,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	247.576.642,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	675.570.350,00	
3	Puskesmas Poleang Tenggara		1.500.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	500.000,00	
4	Rumah Sakit Umum Daerah		199.893.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	199.893.000,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		437.158.517,00
	Utang Belanja Jasa kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemb	102.140.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.000.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	29.520.000,00	
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum (sewa st	50.000.000,00	
	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	10.000.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	60.000.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.522.517,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	46.976.000,00	
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		77.045.600,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	3.000.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.000.000,00	
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum (sewa st	30.000.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.845.600,00	
7	Satuan Polisi Pamong Praja		216.169.491,00
	Utang Belanja jasa Kantor-Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Mas	108.000.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	15.363.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,00	
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.306.491,00	
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum (sewa st	15.000.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	18.300.000,00	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		58.530.200,00
	Utang Belanja Jasa kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemb	7.850.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	5.100.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.156.500,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Kendaraan Dinas	1.365.500,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.323.200,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	34.735.000,00	
9	Dinas Sosial		253.848.200,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim P	32.869.600,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	100.000.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.278.600,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	65.700.000,00	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		243.674.879,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	31.097.200,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	2.400.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	3.500.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.677.679,00	
11	Ketahanan Pangan		138.013.954,00
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121.718.954,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	16.295.000,00	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		129.036.706,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	32.684.340,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.152.366,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	14.200.000,00	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		20.785.000,00

No	Uraian	Tahun	JUMLAH
		2024	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.785.000,00	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		71.088.600,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.348.600,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	20.740.000,00	
15	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik		1.312.930.838,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	221.049.750,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	872.150.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	219.731.088,00	
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		110.402.400,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	82.000.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.402.400,00	
17	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan		124.562.000,00
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum (sewa s	25.000.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Kendaraan Dinas	8.010.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	38.255.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.297.000,00	
18	Dinas Perikanan		297.486.400,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	135.000.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.500.000,00	
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan R	49.890.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Kendaraan Dinas	5.000.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	11.705.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.616.400,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	68.775.000,00	
19	Dinas Pertanian		35.160.820,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (honor operat	16.500.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.910.820,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	15.750.000,00	
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		16.835.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.000.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.835.000,00	
21	Sekretariat Daerah		656.043.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	550.000.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	106.043.000,00	
22	Sekretariat DPRD		176.400.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	176.400.000,00	
23	Badan Keuangan Daerah		26.365.057,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.365.057,00	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		114.226.200,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim P	26.560.000,00	
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum (sewa s	20.000.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	14.981.000,00	
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.685.200,00	
25	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		111.000.000,00
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi La	111.000.000,00	
26	Kelurahan Lamoro		19.155.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	5.400.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.510.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.245.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	3.000.000,00	
27	Kelurahan Poea		20.170.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.900.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	2.400.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.170.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer Peralatan Personal Comp	700.000,00	
28	Kecamatan Mataleo		77.158.659,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.556.385,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.862.274,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	35.740.000,00	
29	Kecamatan Masaloka Raya		13.862.800,00
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	13.862.800,00	
30	Kecamatan Lantari Jaya		36.280.000,00
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.280.000,00	
31	Kecamatan Poleang		1.500.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	1.500.000,00	
32	Kecamatan Poleang Timur		22.688.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (beli Orbid/Wifi)	6.150.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	3.600.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	3.200.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.886.000,00	

No	Uraian	Tahun	JUMLAH
		2024	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.232.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.620.000,00	
33	Kelurahan Puulemo		10.180.000,00
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.180.000,00	
34	Kecamatan Poleang Utara		3.000.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	3.000.000,00	
35	Kecamatan Poleang Selatan		20.744.700,00
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.400.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.344.700,00	
36	Kecamatan Poleang Tengah		2.210.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.100.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.110.000,00	
37	Kecamatan Tontonunu		18.406.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim P	16.385.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	216.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	103.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	482.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	1.220.000,00	
38	Kelurahan Dongkala		14.957.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	14.957.000,00	
39	Kelurahan Lambale		24.925.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Ge	24.925.000,00	
40	Kecamatan Kabaena Tengah		44.884.624,00
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.664.624,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	20.220.000,00	
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		153.248.200,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	2.400.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	3.000.000,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	2.000.000,00	
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum (sewa st	5.000.000,00	
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Kendaraan Dinas	2.100.000,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.033.200,00	
	Utang Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dalam Kota	72.715.000,00	
	TOTAL UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	11.981.873.165,00	11.981.873.165,00

**DAFTAR RINCIAN UTANG BELANJA HIBAH
TAHUN 2024**

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		15.318.000,00
	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan :		
	Utang Belanja Hibah Uang kepada PKBM Tunas Harapan	9.120.000,00	
	Utang Belanja Hibah Uang kepada PKBM Mahakarya Pendidikan	6.198.000,00	
2	SEKRETARIAD DAERAH		1.002.000.000,00
	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan :		
	Utang Belanja Hibah Uang kepada Politeknik Bombana	792.000.000,00	
	BANTUAN SOSIAL UANG KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR JAMIL POLTIM	20.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID AL-KHAIR SYAMI	15.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID NURUL HIDAYAH	15.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID BABUR RAHMAN	10.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID JABAL NUR	10.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID FASTABIQUL KHAIRAT	10.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID NURUL JIHAD	10.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID NURUL JANNA	10.000.000,00	
	BANTUAN SOSIAL UANG KEPADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 1 BOMBANA	50.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID NURUL FALAH	10.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MASJID NURUL FALAH	10.000.000,00	
	RUMAH IBADAH MESJID AL-IKHLAS	10.000.000,00	
	PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM	10.000.000,00	
	BANTUAN BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA RUMAH IBADAH MASJID NURUL FALAH	10.000.000,00	
	PEMBAYARAN LS PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KPD MASYARAKAT	10.000.000,00	
	TOTAL BELANJA HIBAH		1.017.318.000,00

**DAFTAR RINCIAN UTANG BELANJA MODAL DAN UTANG ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN 2024**

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	OPD		
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN		301.027.758,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi SMP 3 Poleang	4.662.500,00	
	Pembangunan Perpustakaan SDN 2 Mulaeno	1.205.000,00	
	Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan SMPN Satap Mambo	53.571.676,00	
	Pek. Rehab. Ruang Kelas Rusak Sedang SDN Bambamolingku	2.623.429,00	
	Pek. Meubelair Perpustakaan SMAN 1 Poleang Selatan	173.267,00	
	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SMAN 1 Kabaena Timur	39.545.455,00	
	Pek. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SMAN 1 Kabaena Timur	430.693,00	
	Pek. Rehab. Meubelair Ruang Kelas Rusak Berat SMAN 1 Kabaena Timur	7.425.743,00	
	Pembangunan Kantor dan RKB SD-SMP Satap terapung	9.989.500,00	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Prasarana Pendidikan Wilayah Rumbia-Poleang (DID)	95.460.000,00	
	Pengawasan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Dasar (DID) Tahun Anggaran 2020	11.880.000,00	
	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Pusat Pendidikan Vokasi (DAU) Tahun 2020	19.877.000,00	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Kawasan Adat dan Budaya Taubonto	14.983.000,00	
	Pembangunan Toilet (Jamban) SD Negeri 111 Sangia Makmur (DAK) Tahun Anggaran	8.147.945,00	
	Pembangunan Toilet (Jamban) SD Negeri 67 Teppoe (DAK) Tahun Anggaran 2022	16.056.500,00	
	Pembangunan Toilet (Jamban) TK Negeri 02 Kastarib (DAK) Tahun Anggaran 2022	5.132.550,00	
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN Poleang Barat (DAU) Tahun Anggaran 2022	6.244.000,00	
	Rehabilitasi Ruang Guru SDN 100 Lombakasi (DAU) Tahun Anggaran 2022	3.049.000,00	
	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN 100 Lombakasi (DAU) Tahun Anggaran 2022	570.500,00	
2	DINAS KESEHATAN	-	1.199.018.056,00
	Rabat Jalan Masuk RS. Pratama Poleang	7.500.000,00	
	Pengadaan Sarana Air Bersih Puskesmas Poleang Selatan	3.600.000,00	
	Pengadaan Sarana Air Bersih RS.Pratama Kabaena pada Dinas Kesehatan dan KB Kab.Bombana	6.000.000,00	
	Biaya Pendukung Kegiatan Pembangunan (DAK AFIRMASI)	24.138.348,00	
	Rehab Gedung Pustu Lameong Meong (DID)	22.790.000,00	
	Pembangunan Labkesda berstandar BSL-2 (Konstruksi sipil)	71.142.500,00	
	Pembangunan Labkesda Berstandar BSL-2 (Perlengkapan BSL-2)	65.000.000,00	
	Pembangunan Pagar Puskesmas Kabaena Timur	1.000.000,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Poleang Tengah	11.640.000,00	
	Pembangunan Pagar Puskesmas Poleang Selatan Tahap II	9.485.000,00	
	Rehab Pagar Dan Halaman Kantor Dinkes	9.480.825,00	
	Pembayaran belanja modal pagar/pembangunan pagar PKM Polsel Tahap III (Kegiatan TA. 2023)/pembangunan pagar PKM Polsel Tahap III Retensi/Luncuran (DBH) dengan nomor kontrak 012/PPK-DINKES/KONS/SPK/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2023	7.470.500,00	
	Belanja modal 70 % bangunan kesehatan pembangunan ruang OK RS tipe D (Dau Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) dengan nomor kontrak 003/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VI/2024 Tanggal 06 Juni 2024 an. Muhammad Sahir	91.839.500,00	
	Belanja modal 100% bangunankesehatan pengawasan pembangunan Ruang OK RS Tipe D (DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) nomor kontrak 004/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VI/2024 Tanggal 06 Juni 2024 an. Iskandar Syah B	49.950.000,00	
	Belanja modal 95% bangunan kesehatan/pemeliharaan Pusk Rumbia Tengah (DBH) dengan nomor kontrak 007/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 an. Musridin Fahmi selaku Direktur CV. Genam Green	7.486.200,00	
	Belanja modal 100% bangunan kesehatan/rehabilitasi pengawasan pemeliharaan Pusk Rumbia Tengah (DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) dengan nomor kontrak 006/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VII/2024 Tanggal 02 Juli 2024 an. Ahmad Mahmud	3.750.000,00	
	Belanja modal 70 % bangunan kesehatan rehabilitasi dan pemeliharaan pembangunan ruang perawatan Pusk. Kabaena Utara (DBH) dengan nomor kontrak 009/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024 an. Arsan	177.600.000,00	
	belanja modal 100% bangunan kesehatan pengawasan rehabilitasi dan pemeliharaan pembangunan ruang perawatan PUsk. Kabaena Utara (Dau yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) dengan nomor kontrak 006/PPK-	10.000.000,00	
	Belanja modal 30 % uang muka bangunan kesehatan/pembangunan rumah dinas Puskesmas Rumbia/rehabilitasi dan pemeliharaan (DBH) dengan nomor kontrak 005/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VII/2024 Tanggal 02 Juli 2024 an. Andi Muhrana selaku Direktris CV. Afsheen	342.370.000,00	
	Belanja modal 100% bangunan kesehatan/pembangunan rumah dinas puskesmas rumbia/pengawasan (Dau yang ditentukan penggunaanyabidang Kesehatan) dengan nomor kontrak 006/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VII/2024 Tanggal 02 Juli 2024 an. Ahmad Mahmud	9.850.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	Belanja modal 30% uang pagar pembangunan pagar puskesmas Poleang Barat (DBH) dengan nomor kontrak 010/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VIII/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 an. Rahmad Nur M selaku Direktur CV. Lompi Makmur Raya	104.767.941,00	
	Belanja modal 100% pagar pengawasan pembangunan pagar Puskesmas Poleang Barat (Dau yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) dengan nomor kontrak 006/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VII/2024 Tanggal 02 Juli 2024 an. Ahmad Mahmud	5.000.000,00	
	Belanja modal 30% uang pagar penataan kantor Dinkes (Rehabilitasi Pagar kantor Dinkes) (DBH) dengan nomor kontrak 012/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VIII/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 an. Luciana Retnowati selaku Direktur CV Daffa Zaki Pratama	139.672.228,00	
	Belanja modal 100 % pagar/rehabilitasi pagar kantor Dinkes/Pengawasan (DBH) dengan nomor kontrak 002/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 an. Syamsul Alam.ST selaku Direktur CV. Mega Konsultan	5.000.000,00	
	Belanja modal 100% pagar rehabilitasi pagar kantor Dinkes /Pengawasan (DBH) dengan nomor kontrak 006/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VII/2024 Tanggal 02 Juli 2024 an. Ahmad Mahmud selaku Direktur CV. Three Dimensi Consultant	5.000.000,00	
	Belanja modal 95% pengadaan taman Puskesmas Rarowatu Utara (DBH) dengan nomor kontrak 011/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VIII/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 an. Andi Rachmad Amirullah selaku Direktur CV. Sangia Putra Mandiri	4.985.014,00	
	Belanja modal 100% taman pengawasan pengadaan taman Puskesmas Rarowatu Utara (Dau Yang di tentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan) dengan nomor Kontrak 006/PPK-DINKES/KONS/KONTRAK/VII/2024 Tanggal 02 Juli 2024 an. Ahmad Mahmud selaku Direktur	2.500.000,00	
3	BLUD RSUD	-	1.106.301.700,00
	Pembangunan Tempat Parkir Rumah Sakit Umum Kab. Bombana	3.747.500,00	
	Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir RSUD Kab. Bombana	1.875.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir RSUD Kab. Bombana	2.250.000,00	
	Perencanaan Rehab Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Kab. Bombana	3.060.000,00	
	Perencanaan Rehab Gedung Rawat Inap Kelas I & II RSUD Kab. Bombana	3.890.000,00	
	Perencanaan Rehab Gedung Instalasi Gizi RSUD Kab. Bombana T.A 2013	2.720.000,00	
	Pengawasan Rehab Gedung Rawat Inap Kelas I dan II RSUD Kab. Bombana T.A 2013	2.240.000,00	
	Pengawasan Rehab Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Kab. Bombana T.A 2013	2.050.000,00	
	Pengawasan Rehab Gedung Instalasi Gizi RSUD Kab. Bombana	2.260.000,00	
	Rehabilitasi Ruang Bersalin	920.000,00	
	PEMBUATAN PAGAR MASUK DAN KELUAR RSUD BOMBANA	2.500.000,00	
	REHAB. KAMAR MAYAT MENJADI GUDANG SAPRAS	2.500.000,00	
	PERENCANAAN PEMELIHARAAN/REHAB. INSTALASI GIZI UMAH SAKIT	3.150.000,00	
	PENGAWASAN PEMELIHARAAN INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT	2.700.000,00	
	Pembangunan Gedung Rawat Inap (VIP) RSUD Kab. Bombana di Lokasi Baru dengan Nomor Kontrak 605/05/PPK-BLUD.RSU/V/2020 dan No. BAP 001/BAP-RSU-	473.689.000,00	
	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH BLU RSUD. KAB. BOMBANA TAHUN 2023	18.587.000,00	
	5% BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG INSTALASI (REHAB)	19.750.000,00	
	70 % BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG NSTALASI JENAZAH	139.440.000,00	
	Utang Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	112.000.000,00	
	Utang Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	57.000.000,00	
	Utang Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	249.973.200,00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-	51.270.496.300,00
	Peningkatan Jalan Gambere - pokurumba	26.050.000,00	
	Perkerasan Jalan Lemboea I - Teppoe	12.395.000,00	
	Pembangunan Sumur Bor+Tower air	1.176.600,00	
	Pemb. Jembatan Tondopi	3.965.000,00	
	pengawasan kons. Jembatan	134.400.000,00	
	Pengawasan SLMB Pulau Sagori	1.232.477,00	
	Pengaspalan Jalan Poros Lengora - Tedubara	251.390.000,00	
	Pengaspalan Jalan Poros Sikeli-Tedubara	251.420.000,00	
	Pembangunan Jembatan Hambawa	7.030.000,00	
	Pembangunan Deuker Plat (Teomokole - Tirongkotua) 8 Bh	11.250.000,00	
	Pembangunan Lantai Atas Jembatan Belly Tampabulu	5.975.000,00	
	Pembangunan Deuker Poleondro 2 BH	2.484.000,00	
	Pembangunan Drainase Jalan Kihajar Dewantara I	810.000,00	
	Rehabilitasi D/I. Tosui	4.500.000,00	
	SPAM Air Bersih Sikeli Kec. Kabaena Barat	60.155.500,00	
	Pembangunan SPAM Air Bersih Kec. Mataoleo	314.679,00	
	Pembangunan Sumur Bor Pemukiman Desa Terapung Kec. Poleang Tenggara	2.477.500,00	
	perkerasan jalan lampusui ii - sangkona - pasir putih	35.520.000,00	
	perkerasan jalan desa lampeantani	27.765.000,00	
	peningkatan jalan waemputang- tanjung bainang	35.325.000,00	
	peningkatan jalan teomokole - enano lanjutan	868.996.000,00	
	peningkatan jalan aneka marga - lombakasih	24.015.000,00	
	pengaspalan jalan poros lantari (bram)...dpal 2013	17.500.000,00	
	pengaspalan jalan hukaea-pelabuhan.dpal 2013	23.300.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	pengaspalan jalan toari bombana - bulumanai	23.950.000,00	
	pemb. jembatan rahawatu- labayu 2 bh (abudment)...dpal 2013	39.750.500,00	
	PERINTISAN JALAN TPA POLEANG	5.475.000,00	
	PENINGKATAN JALAN PUSUUTE-RAKADUA	10.224.500,00	
	PERKERASAN JALAN LAWATUEA-TAMPABULU	16.569.500,00	
	PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN TEBING JALAN POROS TEOMOKOLE-RAHADOPI	23.585.000,00	
	PERKERASAN JALAN MASUK BTN ANGGREK	4.150.000,00	
	PENGAWASAN DAU PEMBANGUNAN JALAN I	127.224.000,00	
	PERAPIHAN BAHU JALAN POEA - RSUD	9.450.000,00	
	PENINGKATAN JALAN BSB POROS SPDN TAPUAHI	10.050.000,00	
	PENIMBUNAN TALUD PENAHAN TEBING TEOMOKOLE-RAHADOPI	2.178.000,00	
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN KE- MASALOKA	4.995.000,00	
	PEMBUATAN GORONG-GORONG KEC. RAROWATU UTARA	8.870.000,00	
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN AKACIPONG	22.230.000,00	
	PEMBANGUNAN PLAT ATAS JEMBATAN LEBOEAE	6.995.000,00	
	PEMATANGAN LOKASI PEMBANGUNAN TPA DAN PENINGKATAN JALAN AKSES 2 KM	49.705.000,00	
	KANALISASI TAMBATAN PERAHU DESA TERAPUNG	19.150.000,00	
	PEMB. BRONJONG DESA LEBOEAE	5.150.000,00	
	PENATAAN KAWASAN WISATA PANTAI JODOH BAMBAAE	34.869.500,00	
	REHABILITASI D.I LAMOARE	9.575.000,00	
	PEMBANGUNAN SPAM AIR BERSIH KEC. MATAOLEO	314.680,00	
	PEMASANGAN PIPA SUPLAY TAMBAHAN AIR MINUM POLEANG	4.990.000,00	
	PENGAWASAN PENGASPALAN JALAN DONGKALA - PONGKALAERO (Tahun Jamak)	137.000.000,00	
	PENGAWASAN TALUD/BRONJONG (TALUD PANTAI DESA MASALOKA TIMUR)	3.000.000,00	
	PENGAWASAN PENGASPALAN JALAN MULAENO - TOBURI (Tahun Jamak)	390.767.000,00	
	Biaya Pendukung DAK Irigasi Tambahan	81.000.000,00	
	PENGASPALAN JALAN IBU KOTA WAEMPUTANG POLEANG SELATAN (DAK IPD)	50.405.000,00	
	PEMBANGUNAN DEUKER PLAT DESA TAPUHAKA	4.730.000,00	
	SWAKELOLA PERENCANAAN SANITASI DAK AVIRMASI	1,00	
	SWAKELOLA PEMBANGUNAN JARINGAN SR LAURU RUMBIA TENGAH (DAK	1,00	
	PENGASPALAN JALAN DONGKALA-PONGKALERO (TAHUN JAMAK)	874.995.000,00	
	PENGAWASAN PENGASPALAN JALAN MULAENO - TOBURI (TAHUN JAMAK)	147.897.550,00	
	PENGAWASAN DAK AVIRMASI	9.810.000,00	
	Biaya 100% Atas Pek. SWAKELOLA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DEUKER PLAT LINGKUNGAN SANDU	2.500.000,00	
	SWAKELOLA PENGAWASAN PEMBANGUNAN PLAT DEUKER TAPUHAKA	2.500.000,00	
	SWAKELOLA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN DRAINASE BAMBAAE	2.500.000,00	
	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI POLEWALI	2.000,00	
	LANJUTAN PERKERASAN JALAN TINABITE-LABABU	42.312.400,00	
	PENGAWASAN JALAN DAU V	2.000.000,00	
	PENGAWASAN JALAN DAU IV	4.000.000,00	
	Pengaspalan Jaln Poros Desa Tunas Baru (Lapen)	58.100.000,00	
	Perintisan Jalan Produksi Bocco Tellue-Longki Desa Watumelomba	31.890.000,00	
	Perintisan Jalan Produksi Dusun 1-3 Desa Teteahaka	24.100.000,00	
	Perintisan Jalan Produksi Dusun Atangkio-Talengkea Desa Puuwanua	31.985.000,00	
	Perintisan dan Perkerasan Jalan Lameroro-Lantawonua	10.900.000,00	
	Pembanguna Saluran Drainase Jalan Poros Lamonggi-Lengora	22.100.000,00	
	Pembanguna Saluran Drainase Ibukota Waemputang	19.281.500,00	
	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Perkuburan Beropa Kel. Sikeli	36.050.000,00	
	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Kel. Sikeli	23.640.000,00	
	Pembangunan RTH Lambale	22.495.000,00	
	PERINTISAN JALAN PRODUKSI DESA PUSUEA	20.928.000,00	
	PEMBANGUNAN SPL KAP. 5 l/dtk DESA LENGORA , DESA LENGORA SELATAN DAN DESA ENANO KEC. KABAENA TENGAH KAB. BOMBANA (SARING PASIR LAMBAT)	115.985.000,00	
	PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM DESA SANGIA MAKMUR KEC. KABAENA UTARA	33.350.000,00	
	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DUSUN LEMOKELOKARAN BOEARA	3.735.000,00	
	PENINGKATAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM LAPONU-PONU	14.043.100,00	
	PEMBANGUNAN BAK INTAKE SPAM DESA MAMBO (APBD-P 2019)	45.600.000,00	
	Rehabilitasi jaringan irigasi Di Kapu-kapura Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	500,00	
	Pembangunan bronjong sungai Peropa di Kelurahan Lambale	4.695.000,00	
	Normalisasi sungai di Desa Biru	9.375.000,00	
	Pembangunan rabat beton jalan lingkungan di Desa Tembe	400.000,00	
	Pembangunan talud jalan lingkungan di Desa Tembe	9.390.000,00	
	Lanjutan perintisan jalan Boepapa - Lantinea	10.000,00	
	Perintisan jalan Landuli - Mustrasi	34.940.000,00	
	Peningkatan Jalan Dalam Kawasan Tangkeno	47.567.000,00	
	Pembangunan deuker di Desa Aneka Marga	2.335.000,00	
	Pembangunan deuker jalan di Kelurahan Aneka Marga	2.336.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN KASIPUTE - LORA - BAMBAEA (Kegiatan T.A	133.610.700,00	
	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN SIKELI - DONGKALA (Kegiatan T.A 2022)	68.628.000,00	
	REHABILITASI JEMBATAN PENYEBERANGAN DI LINGK. BEROPA KEL. SIKELI (T.A	1.495.000,00	
	Pembangunan gedung PKK Kabupaten Bombana (lanjutan)	28.540.000,00	
	Pembangunan gedung komputer tes CAT BKPSDM Kabupaten Bombana	23.645.000,00	
	Pembangunan pagar dan drainase kawasan kawasan SOR Rumbia	742.192.400,00	
	Penataan taman dan trotoar Jalan Yos Sudarso Kelurahan di Kampung Baru	337.501.200,00	
	Penimbunan lahan di kawasan Rumah Adat Taubonto	97.160.000,00	
	Pemeliharaan berkala RTH dan Alun-Alun Rumbia	75.000.000,00	
	Revitalisasi Kawasan Tugu Toburi	190.379.000,00	
	Pengadaan lampu taman kawasan pesisir Rumbia	60.000.000,00	
	Pembangunan jalur pedestrian Alun-alun Masjid Raya Rumbia	131.810.000,00	
	Pembangunan tanggul pemecah ombak di Desa Masaloka Selatan	9.370.000,00	
	Peningkatan saluran pembuang sungai di Lingkungan Talabente Kelurahan Lameroro	9.390.000,00	
	Pembangunan saluran pembuang sungai di Desa Batu Putih (lanjutan)	9.387.500,00	
	Rehabilitasi bendung irigasi DI Maccede	443.747.500,00	
	Peningkatan jaringan irigasi D.I. Lasangi	72.796.000,00	
	Peningkatan jaringan irigasi D.I. Lampadena	59.880.000,00	
	Peningkatan jaringan irigasi D.I. Rompu-Rompu	31.205.500,00	
	Peningkatan saluran irigasi di Desa Lantawonua	7.043.530,00	
	Lanjutan pembangunan saluran irigasi di Desa Lantawonua	7.033.000,00	
	Pemeliharaan berkala jaringan irigasi permukaan (Perubahan APBD T.A. 2023)	120.000.000,00	
	Pembangunan saluran drainase di Lorong SMPN 29 Lameroro	8.573.650,00	
	Pembangunan saluran drainase di lingkungan Pesantren Hidayatullah	9.350.000,00	
	Pembangunan rabat beton jalan lingkungan di Kelurahan Rahampuu	4.685.500,00	
	Pembangunan rabat beton jalan lingkungan di Kelurahan Teomokole	9.422.500,00	
	Pembangunan rabat beton jalan ke Pesantren Hidayatullah	9.305.000,00	
	Pembangunan rabat beton jalan di Lingkungan 2 Kelurahan Lameroro	130.060.000,00	
	Pembangunan rabat beton jalan lingkungan di Desa Lakomea	9.315.000,00	
	Rehabilitasi jembatan titian permukiman di Desa Baliara	13.814.500,00	
	Pengawasan pembangunan jalan bypass Rumbia	111.704.000,00	
	Peningkatan Jalan Dalam Ibukota Kabupaten Bombana	4.940.530.000,00	
	Peningkatan jalan poros Dongkala - Sikeli - Pongkalaero	975.553.950,00	
	Peningkatan jalan poros Pising - Tedubara - Sikeli	725.550.000,00	
	Peningkatan jalan Kasipute - Lora -Bambaea (lanjutan)	3.903.992.000,00	
	Peningkatan jalan Dalam Ibukota Bambaea	94.925.500,00	
	Preservasi jalan Toburi - Mulaeno	1.464.610.000,00	
	Peningkatan jalan Lampangi - Patengge	9.410.000,00	
	Peningkatan jalan di desa Masaloka Selatan	118.510.000,00	
	Pembangunan box culvert Jalan Teomokole - Pongkalaero di Desa Langkema	196.000.000,00	
	Pembangunan jembatan di Dusun Rene Rene Desa Salosa	324.310.000,00	
	Pembangunan deuker jalan di Desa Salosa	7.025.000,00	
	Pembangunan deuker jalan Tajuncu - Puuwaea di Desa Puuwaea	4.238.500,00	
	Pembangunan deuker jalan Toburi - Mulaeno di Desa Tontonunu	2.462.800,00	
	Pembangunan jembatan penyeberangan Pulau Bangko	233.683.432,00	
	PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM CAT BKPSDM KAB. BOMBANA	22.818.700,00	
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR DINAS PUPR BOMBANA (2024)	22.770.000,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG PKK KAB. BOMBANA	28.540.000,00	
	PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN PESISIR RTH RUMBIA	1.330.350.000,00	
	NORMALISASI SUNGAI DI KELURAHAN PUU LEMO	7.036.000,00	
	NORMALISASI SUNGAI JEMBATAN MERAH DI DESA MARGA JAYA	9.385.000,00	
	NORMALISASI SUNGAI DI DESA ANEKA MARGA	9.385.000,00	
	NORMALISASI SUNGAI DI DESA LAMPEANTANI	9.380.000,00	
	NORMALISASI SUNGAI DI DESA LIANO	7.038.000,00	
	ORMALISASI SUNGAI DI DESA MULAENO	7.038.150,00	
	NORMALISASI SUNGAI DI DESA PARIA	9.386.950,00	
	NORMALISASI SUNGAI DI DESA LAMOARE	9.366.250,00	
	PERKUATAN TEBING SUNGAI MAMBO	38.255.000,00	
	PERKUATAN TEBING SUNGAI WA OMBU DI DESA E'E MOKOLO	9.389.500,00	
	PERKUATAN TEBING SUNGAI DI DESA LENGORA PANTAI	9.384.000,00	
	PEMBANGUNAN TALUD PENGAMAN PANTAI DI KELURAHAN BAMBAEA	34.719.450,00	
	PEMBANGUNAN TALUD PENGAMAN PANTAI DI DESA LARETE	9.185.000,00	
	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I HAMBAWA	83.718.500,00	
	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I TONGKOSENG	103.730.000,00	
	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DI DUSUN MATTIROWALIE DESA TEPPOE	7.022.000,00	
	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DI DUSUN 2 KOBU DESA LAWATUEA	4.684.500,00	
	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN TINA ORIMA DI KEL.DOULE	6.994.000,00	
	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DI DUSUN UWAEMITTIE DESA LAWATUEA	7.033.000,00	
	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DI KELURAHAN KAMPUNG BARU	7.031.850,00	
	PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA TEPPOE	25.608.300,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	PENINGKATAN JALAN MASUK KAWASAN IPLT DI DESA LANTOWUA	9.990.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DESA LAMPEANTANI	9.625.000,00	
	PENINGKATAN JALAN AKSES SMK 3 DI KELURAHAN KASABOLO	57.687.550,00	
	PENINGKATAN JALAN MARAMPUKA - LAMOARE	47.842.500,00	
	PENINGKATAN JALAN PAKKAE - SALOSA - LEBOEAE	618.661.400,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DESA PUSUEA	23.695.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DESA BATU PUTIH	24.043.500,00	
	PENINGKATAN JALAN PANTAI SUMPANG SALO	7.035.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DESA WAMBAREMA	9.389.500,00	
	PENINGKATAN JALAN LINGKAR SMA DI DESA LARAETE	4.684.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DONGKALA - SIKELI - PONGKALERO	445.675.000,00	
	PENINGKATAN JALAN TAMPABULU - TOBURI	392.175.000,00	
	PENINGKATAN JALAN TUNAS BARU	130.500.000,00	
	PENINGKATAN JALAN KASIPUTE - LORA - BAMBAAE (LANJUTAN)	1.219.997.500,00	
	PENIMBUNAN JALAN DI KELURAHAN DOULE	8.608.000,00	
	PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN TEOMOKOLE - PONGKALERO DI DESA LANGKEMA	14.000.000,00	
	REHABILITASI JEMBATAN DI KELURAHAN LAMPOPALA	7.980.000,00	
	NORMALISASI SUNGAI DI DESA TANAH POLEANG	98.287.000,00	
	NORMALISASI SUNGAI DI DESA PANGKURI	131.390.000,00	
	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI D.I LENGORA PANTAI	451.580.500,00	
	REHABILITASI BENDUNG D.I SAWEI II	551.600.000,00	
	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DI DESA MULAENO	131.355.000,00	
	PERINTISAN JALAN SANGIA MAKMUR - PULAU BANGKO	343.550.900,00	
	PERINTISAN JALAN DI DESA PUSUEA	131.390.000,00	
	PERINTISAN JALAN DI LINGKUNGAN I KELURAHAN KASIPUTE	114.919.000,00	
	PERINTISAN JALAN DI LINGKUNGAN IV KELURAHAN KASIPUTE	115.290.000,00	
	PERINTISAN JALAN PADANGKANTORI DI KELURAHAN TAUBONTO	130.970.000,00	
	PENINGKATAN JALAN HUKAEA - PELABUHAN	780.710.000,00	
	PENINGKATAN JALAN LINGKAR SMA DI DESA LAKOMEA	134.820.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DALAM IBUKOTA BOEPINANG	1.167.390.000,00	
	PENINGKATAN JALAN KASTARIB - TOMAMPU	1.639.400.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DESA MATTIROWALIE	519.400.000,00	
	PENINGKATAN JALAN KAMPUNG JABBA - PULAU SOPPE	1.981.000.000,00	
	PENINGKATAN JALAN BAMBAAE - MAMBO	1.375.500.000,00	
	PENINGKATAN JALAN KASSIE - PABBIRING	1.144.136.000,00	
	PENINGKATAN JALAN TIMBALA - BULUMANAI	2.068.920.000,00	
	PENINGKATAN JALAN GAMBERE - POKURUMBA	200.410.000,00	
	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN POROS DI PULAU MASALOKA	239.883.750,00	
	PENINGKATAN JALAN TOARI - WAMBAMOLINGKU - MATAUSU	5.593.000.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DALAM IBUKOTA KABUPATEN BOMBANA	2.083.760.000,00	
	PENINGKATAN JALAN PUUWAEYA - TAJUNCU	447.440.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DESA TAMPABULU	131.451.600,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DESA LEMO	98.553.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DUSUN GAMBERE	98.445.900,00	
	PENINGKATAN JALAN DI DUSUN TANTAHAI SALOBAINANG	131.439.000,00	
	PENINGKATAN JALAN DI KELURAHAN DOULE	98.399.000,00	
	PENINGKATAN JALAN TPU RAROWATU	126.490.000,00	
	PENINGKATAN JALAN LAEYA - TAMPABULU	1.750.500.000,00	
	PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN DONGKALA - SIKELI - PONGKALERO	185.944.000,00	
	PEMBANGUNAN BOX CULVERT DAN DEUCKER DI JALAN POROS LENGORA	325.204.600,00	
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DUSUN PUNGKOWU DESA TAMPABULU	390.070.800,00	
	LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN PULAU BANGKO	500.955.000,00	
	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA SANGIA MAKMUR	409.710.000,00	
5	DINAS PERUMAHAN, PEMUKINAN DAN PERTANAHAN		7.494.200,00
	Utang Belanja Modal Jalan-Belanja Modal Jalan Kabupaten (Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton Lrng. Anggrek Lingk. I Kel. Kampung Baru) 95%	7.494.200,00	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	13.737.000,00
	Utang Belanja Aset renovasi (rehab plafon kantor dekranasda)	13.737.000,00	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	400.542.100,00
	Perkuatan / Normalisasi Tebing Sungai Laeya	9.995.500,00	
	Lanjutan Talud Penahan Gelombang Pantai Bambaesa	14.885.000,00	
	Rehab/Rekonstruksi Jembatan Titian Pongkalaero	4.995.000,00	
	PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG (RUMAH JAGA) BPBD	1.745.000,00	
	PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG (RUMAH JAGA) LANJUTAN	3.490.000,00	
	REHABILITASI/REKONSTRUKSI TALUD PENAHAN GELOMBANG BOEARA	50,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (RUMAH JAGA) LANJUTAN TAHAP III	2.528.550,00	
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Pembangunan Gedung Sederhana)	16.529.500,00	
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Sederhana)	9.951.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Biaya Perencanaan Pembangunan Gedung Sederhana)	9.435.000,00	
	Utang Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor Lainnya (Pembangunan Gudang Tahap	75.460.000,00	
	Utang Belanja Modal Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Pekerjaan Taman)	124.267.500,00	
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.700.000,00	
	Utang Belanja Modal Peralatan Olah Raga Lainnya (Meja Tennis)	8.500.000,00	
	Utang Belanja Modal Personal Komputer (Laptop)	36.000.000,00	
	Utang Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film (Drone+invocus)	29.000.000,00	
	Utang Belanja Modal Peralatan Studio Lainnya (Microfon +stan Microfon)	3.860.000,00	
	Utang Belanja Modal Meubiler (Kursi Sofa & Meja Rapat)	15.000.000,00	
	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya (GPS)	9.000.000,00	
	Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.200.000,00	
8	DINAS KETAHANAN PANGAN		521.967.000,00
	Pembayaran Pembangunan Kantin Dinas Ketahanan Pangan (95%)	71.000.000,00	
	Pembayaran Pembangunan Sarana Olah Raga Dinas Ketahanan Pangan (95%)	62.104.000,00	
	Pembayaran Pekerjaan Interior Ruang Kepala Dinas, Ruang kabad dan Sekreatris (95%)	197.780.000,00	
	Pembayaran Pekerjaan Interior Receptionis, Ruang Rapat dan Selasar (95%)	191.083.000,00	
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	-	8.388.850,00
	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR DPPKB 2023	8.388.850,00	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	35.296.500,00
	Pengadaan Biodigester	11.996.000,00	
	Desaian Penataan TPU	4.910.000,00	
	Pengawasan Penataan TPU	4.500.000,00	
	Pekerjaan Pagar, Pintu Gerbang	13.890.500,00	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		43.900.000,00
	Pengadaan Laptop Kantor	43.900.000,00	
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	224.737.550,00
	Rehabilitasi pelabuhan kayu sikeli	24.791.550,00	
	Pembangunan Pelabuhan Bamaea Tahap III	35.186.500,00	
	Biaya pendukung pekerjaan pembangunan gedung terminal	52.100.000,00	
	Pengawasan pembangunan gedung terminal rumbia	95.500.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Pos LLAJ Lameroro/Lantari Jaya	2.480.000,00	
	Pekerjaan Plafon Kantor	4.690.000,00	
	Retensi pelabuhan Larete	9.989.500,00	
13	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	738.098.450,00
	PENGAWASAN RENOVASI LAPANGAN FUTSAL RTH	2.000.000,00	
	PERENCANAAN RENOVASI LAPANGAN FUTSAL RTH	2.500.000,00	
	PEMBAGUNAN GEDUNG KANTOR	9.979.000,00	
	PEMBAGUNAN PAGAR KANTOR	9.010.500,00	
	PERMINTAAN PEMBAYARAN PEMBAGUNAN LAPANGAN FUTSAL	6.989.100,00	
	PEMBAGUNAN LAPANGAN FUTSAL (DESA PONGKALAERO)	6.989.000,00	
	REHAP LAPANGAN FUTSAL RAHAMPUU	2.489.500,00	
	PEMBANGUNAN LAPANGAN FUTSAL	8.484.000,00	
	BELANJA MODAL PERALATAN OLAHRAGA	8.985.000,00	
	[KOREKSI] Pembangunan Lapangan Basket berdasarkan kontrak No: 003/SP/PPK-WISPORA/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan pengakuan asetnya pada Dinas Wispora senilai Rp69.812.000,00 catatan: 95% keuangan sudah dicairkan melalui SP2D tahun 2024 senilai Rp66.321.400,00, sisanya retensi 5% belum cair senilai	69.812.000,00	
	Pembangunan Lapangan Basket (Luncuran 2023)	3.490.600,00	
	Lanjutan Peningkatan Gedung Kantor 2024	9.987.050,00	
	Pekerjaan Vynil Gor Rumbia	108.868.000,00	
	Pekerjaan Interior dan Selasar Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan	132.817.300,00	
	Penataan Kawasan Wisata Tanjung Timbala	132.917.400,00	
	Pembangunan Atap Lapangan Futsal	222.780.000,00	
	Aset Tidak Berwujud (Kajian)		260.672.400,00
	KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN WISATA TERPADU RANOKOMEA KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA SESUAI SURAT PERJANJIAN KERJA NOMOR: 905/001/WISPORA/PK-I/SWAKELOLA.II/2024 DAN 93/IT1.B07/KS.00/2024 (Penyediaan ITB)	260.672.400,00	
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	1.500.000,00
	Penambahan Ruang Kantor	1.500.000,00	
15	DINAS PERIKANAN	-	288.840.000,00
	Utang Pengawasan Pembuatan Jembatan Semi Permanen	3.350.000,00	
	Utang Pembuatan Jalan Produksi Tambak	130.090.000,00	
	Utang Pengawasan Pembautan Jalan Produksi Tambak	5.000.000,00	
	Utang Swakelola Pembuatan Jembatan Titian	144.000.000,00	
	Pekerjaan Jembatan Semi permanen Desa Laea NK Rp. 128,000,000 dibayar Rp121.600.000	6.400.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
16	DINAS PERTANIAN	-	1.097.660.100,00
	Pembuatan Sarana Air Bersih Poskeswan 1 (Satu) Unit	1.050.000,00	
	Pembuatan JUT Desa Tangkeno	5.185.000,00	
	Pembuatan JUT Desa Langkema	5.186.500,00	
	Pembuatan JUT Kel. Kastarib - Panrokoe	15.511.500,00	
	Pembuatan JUT Desa Bulumanai - Sangkili	15.496.500,00	
	Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air (Pembuatan Sumur Bor Kec. Poleang Timur)	8.800.000,00	
	Pembangunan Kandang Pelayanan Keswan (Cattle Yard)	2.000.000,00	
	PEMBUATAN DUEKER POSKESWAN 1 (SATU) UNIT	1.050.000,00	
	JUT DESA BIRU II	9.489.500,00	
	PEKERJAAN JUT DESA SALOSA KEC. POLEANG KEPADA CV. RESKA RAYA GROUP, DENGAN SPK NO. 520/16/SPK/PPK-DISTAN/VIII/2023 PADA TGL 18 AGUSTUS 2023 DAN BAP NO. 520/72/BAP-LS/IX/2023 TGL 4 SEP 2023	9.465.000,00	
	PEKERJAAN JUT DESA POKORUMBA I KEPADA CV. ANI CAHAYA MANDIRI, DENGAN SPK NO. 520/14/SPK/PPK-DISTAN/VIII/2023 PADA TGL 18 AGUSTUS 2023 DAN BAP NO. 520/68/BAP-LS/IX/2023 TGL 4 SEP 2023	9.470.000,00	
	PEKERJAAN JUT DESA PALLIMAE KEPADA CV. ANI CAHAYA MANDIRI, DENGAN SPK NO. 520/17/SPK/PPK-DISTAN/VIII/2023 PADA TGL 18 AGUSTUS 2023 DAN BAP NO. 520/70/BAP-LS/IX/2023 TGL 4 SEP 2023	9.465.000,00	
	PEKERJAAN JUT PUBUNGGUGEA - POLEANGNANO KEPADA CV. KING WATER MANURUNG, DENGAN SPK NO. 520/36/SPK/PPK-DISTAN/VIII/2023 PADA TGL 22 AGUSTUS 2023 DAN BAP NO. 520/76/BAP-LS/IX/2023 TGL 6 SEP 2023	9.480.000,00	
	PEKERJAAN JUT DUSUN SOLWATANG KEPADA CV. MASALOKA STAR, DENGAN SPK NO. 520/32/SPK/PPK-DISTAN/VIII/2023 PADA TGL 18 AGUSTUS 2023 DAN BAP NO. 520/73/BAP-LS/IX/2023 TGL 4 SEP 2023	9.479.800,00	
	PEKERJAAN JUT KASTARIB - BULUSALAMA KEPADA CV. ALWI MANDIRI, DENGAN SPK NO. 520/25/SPK/PPK-DISTAN/VIII/2023 PADA TGL 18 AGUSTUS 2023 DAN BAP NO. 520/75/BAP-LS/IX/2023 TGL 4 SEP 2023	9.482.050,00	
	PEKERJAAN JUT PARIA - BATUDAI KEPADA CV. MASALOKA STAR, DENGAN SPK NO. 520/31/SPK/PPK-DISTAN/VIII/2023 PADA TGL 18 AGUSTUS 2023 DAN BAP NO. 520/74/BAP-LS/IX/2023 TGL 4 SEP 2023	9.485.000,00	
	JUT DESA MULAENO	9.397.550,00	
	JUT LANGKEMA	9.490.600,00	
	PEMBUATAN JUT DESA AKACIPONG KEC. POLEANG SELATAN	7.115.550,00	
	PEMBUATAN JUT DESA LARETE	7.113.850,00	
	PEMBUATAN JUT LAMPOPALA	9.475.000,00	
	PEMBUATAN JUT ANALERE	9.488.850,00	
	PEMBUATAN JUT SANGIA MAKMUR	132.824.200,00	
	PEMBUATAN JUT DUSUN TUTAMPO TONKOSENG	9.488.000,00	
	PEMBUATAN JUT SUMPANGSALO PUULEMO	9.015.000,00	
	PEMBUATAN JUT BALIARA SELATAN	132.814.500,00	
	PEMBUATAN JUT GAMBERE	9.489.400,00	
	PEMBUATAN JUT POEA	8.062.000,00	
	PEMBUATAN JUT LAMPEANTANI	9.488.400,00	
	PEMBUATAN JUT DUSUN DARMA BAKTI	126.218.400,00	
	PEMBUATAN JUT DUSUN JATIE DESA BIRU	126.179.200,00	
	PEMBUATAN JUT LENGORA	9.495.800,00	
	PEMBUATAN SALURAN IRIGASI DUSUN TOSUI	8.722.900,00	
	PEMBUATAN SALURAN IRIGASI DESA DARMA BAKTI	122.345.300,00	
	PEMBUATAN SALURAN IRIGASI DESA JATIE	4.739.750,00	
	Pembuatan JUT Poleang Tenggara	9.490.000,00	
	Pengadaan JUT Desa Tampabulu	10.445.000,00	
	Pengadaan JUT Desa mulaeno 1	9.445.000,00	
	Pengadaan JUT Desa Bosso	9.490.000,00	
	Pengadaan JUT Desa Pusuea	9.485.000,00	
	Pengawasan BPP	7.500.000,00	
	Pembangunan BPP Rarowatu Utara	150.745.000,00	
17	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM	-	102.048.783,00
	PEMBANGUNAN DRAINASE PASAR TADOHA MAPACCING	84.533,00	
	BELANJA KONSULTASI PENGAWASAN PEMB.PASAR POLEANG (TAHUN JAMAK) NOMOR KOTRAK 510/03/PPKJM-INDAG/VI/2020 TANGGAL 30 JUNI 2020, NILAI KONTRAK 581,515,000	87.227.250,00	
	PEKERJAAN PENATAAN PASAR TADOHA MAPPACING	14.737.000,00	
18	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	-	9.890.000,00
	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana T.A 2022	9.890.000,00	
19	SEKRETARIAT DAERAH	-	2.689.189.466,80
19a	Sekretariat Daerah	-	
	Rehabilitasi Pendopo Rujab Wakil Bupati Bombana	2.497.250,00	
	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Serbaguna	4.500.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	Pengawasan Pemeliharaan Gedung Serbaguna	3.600.000,00	
	Perencanaan Rehabilitasi Mess Pemda Laica Tapoleta	6.800.000,00	
	Pengawasan Rehabilitasi Mess Pemda Laica Tapoleta	5.500.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Tambahan Gedung Kantor Semi Permanen	25.800.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Tambahan Gedung Kantor Semi Permanen	21.200.000,00	
	Pemeliharaan Kantor Bupati	33.000.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bupati	5.600.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bupati	4.700.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Baruga Rujab Bupati	11.495.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Baruga Rujab Bupati	9.432.000,00	
	Pengawasan Rehabilitasi Rujab Wakil Bupati Bombana	9.000.000,00	
	Pembangunan dan Penataan Taman Makam Pahlawan	22.275.000,00	
	Penataan Taman Makam Pahlawan	7.440.000,00	
	Rehabilitasi Kantor Bupati	19.950.000,00	
	Pengawasan Pengadaan Bermotor Angkutan Laut Sarana dan Prasarana Perdesaan	33.000.000,00	
	Pembangunan Tambahan Gedung Semi Permanen	13.173.778,80	
	Pembangunan Paviliun Mini Rujab Wakil Bupati Tahap II	4.550.000,00	
	Pengadaan Panggung RTH	4.222.500,00	
	Pengadaan Instalasi Air Bersih Asrama Mahasiswa Kendari	1.497.500,00	
	Pengadaan Konstruksi Tribun dan Ruang Dewan Hakim MTQ	9.986.000,00	
	Pembangunan Gudang Semi Permanen	1.245.000,00	
	Pembuatan Taman Rujab Wakil Bupati	2.497.500,00	
	Rehab Garasi Rujab Wakil Bupati	2.497.500,00	
	pembangunan pavillium mini rujab wakil bupati tahap ii	4.550.000,00	
	pembangunan masjid raya kasipute tahun anggaran 2014/2015	1.150.774.565,00	
	pengawasan pembangunan masjid raya kasipute	1.010.000,00	
	PEMBANGUNAN PARTISI RUANG BENDAHARA	1.745.000,00	
	PEMBANGUNAN GAZEBO KANTOR PENGHUBUNG KENDARI	747.500,00	
	PEMBANGUNAN RUMAH GENSET KANTOR BUPATI	1.350.000,00	
	REHABILITASI PLAFON DAN SANITASI PAVILIUN RUJAB BUPATI	9.990.000,00	
	PEMASANGAN ATAP SELASAR KANTOR BUPATI	9.985.000,00	
	RENOVASI KONTAINER MTQ KABUPATEN BOMBANA	2.434.000,00	
	REHAB PLAFOND PAVILIUN RUJAB BUPATI	8.293.000,00	
	REHABILITASI ASRAMA MAHASISWA MAKASSAR	4.970.773,00	
	Fasade Kantor Bupati	9.975.000,00	
	Rehab Dapur Rujab Bupati	9.970.000,00	
	PENGADAAN GUDANG ASET SETDA	9.440.000,00	
	REHABILITASI POS JAGA RUJAB BUPATI	8.932.050,00	
	PEMELIHARAAN GEDUNG AUDITORIUM TANDUALE	22.294.000,00	
	REHABILITASI RUJAB SEKRETARIS DAERAH	9.427.000,00	
	PEMBANGUNAN RUMAH CLEANING SERVICE RUJAB BUPATI	10.995.000,00	
	PEMELIHARAAN SANITASI DAN SALURAN PEMBUANG RUJAB BUPATI	13.365.000,00	
	REHABILITASI RUANG KERJA SEKDA	4.618.800,00	
	REHABILITASI RUJAB WAKIL BUPATI	258.362.300,00	
	REHABILITASI GEDUNG KANTOR BUPATI	22.899.500,00	
	REHABILITASI PAVILIUN RUJAB BUPATI	16.840.000,00	
	PENATAAN HALAMAN RUJAB BUPATI	9.437.000,00	
	REHABILITASI MUSHOLAH RUJAB BUPATI	131.625.900,00	
	REHABILITASI RUJAB BUPATI	131.999.000,00	
	REHABILITASI MESS SIKELI	192.817.800,00	
	Pembangunan Asrama Mahasiswa Kolaka	323.400.000,00	
19b	Ex. Dinas Kehutanan	-	
	Rehab Hutan / Reboisasi Pengkayaan 50 Ha	11.190.000,00	
	Pemeliharaan Mangrove P1 Mulaeno 14 Ha	2.656.750,00	
	Pemeliharaan Reboisasi Penghayaan P1 Pangkuri 64 Ha	3.889.500,00	
	Rehabilitasi Lahan 50 Ha	10.576.500,00	
	biaya perencanaan pembangunan dam penahan desa bambamolingku kec. poleang barat	2.673.000,00	
	pengawasan dan palaporan pembangunan dam penahan desa bambamolingku kec. poleang barat	2.227.500,00	
	Pembuatan tempat Penampungan Kayu Sitan/temuan	2.492.500,00	
	PENIMBUNAN HALAMAN KANTOR DINAS KEHUTANAN KABUPTEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016	2.495.000,00	
19c	Ex. Dinas Pertambangan	-	
	Pembangunan Pagar Kawat Kantor Dinas Pertambangan dan Energi	3.281.500,00	
20	SEKRETARIAT DPRD	-	7.548.500,00
	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD	3.599.500,00	
	Pekerjaan Desain Interior Ruang Kerja Rujab Ketua DPRD Kab. Bombana Tahun 2016	3.949.000,00	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3.236.500,00
	PENGADAAN PARTISI RUANG KERJA	3.236.500,00	
22	BKD (EX. DISPENDA)	-	4.710.000,00
	Pembangunan Garasi Kendaraan Bermotor	2.243.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	Pengadaan Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Dispenda	2.467.000,00	
23	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		56.470.000,00
	PERMINTAAN PEMBAYARAN LS BELANJA MODAL TABLET BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOMBANA	11.400.000,00	
	PERMINTAAN PEMBAYARAN LS BELANJA MODAL TABLET BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOMBANA	4.000.000,00	
	PERMINTAAN PEMBAYARAN 95% LS PEMASANGAN LANTAI PAVING BLOCK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOMBANA	39.016.500,00	
	PERMINTAAN PEMBAYARAN 5% LS PEMASANGAN LANTAI PAVING BLOCK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOMBANA	2.053.500,00	
24	INSPEKTORAT DAERAH	-	6.726.000,00
	Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Inspektorat	6.726.000,00	
25	KEC. RUMBIA	-	3.943.495,00
	Pengawasan pembangunan gedung kantor camat	1.099.495,00	
	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR LURAH KASIPUTE	2.495.000,00	
	PEMBANGUNAN GARASI KANTOR LURAH KASIPUTE	349.000,00	
26	KEL. KASIPUTE	-	20.472.900,00
	Pengadaan Gedung Kantor Tahap II	4.725.000,00	
	perencanaan pengadaan gedung kantor tahap III	2.495.000,00	
	pengawasan pengadaan gedung kantor tahap III	5.000,00	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP IV	2.495.000,00	
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP IV	2.000.000,00	
	Honor Pejabat Pengadaan Pembangunan Gedung kantor Tahap IV	500.000,00	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan IV	500.000,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP V	3.774.900,00	
	Papan Nama Instansi	711.000,00	
	Pekerjaan Rahab Plafon Kantor dan Garasi	3.267.000,00	
27	KEL. DOULE	-	22.723.250,00
	Perencanaan pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.495.000,00	
	Pengawasan pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.895.000,00	
	Pengawasan pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.350.000,00	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR	2.245.000,00	
	PEK. PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR	1.900.000,00	
	PERENCANAAN LINGKUP KELURAHAN DOULE	660.000,00	
	PENGAWASAN LINGKUP KELURAHAN DOULE	550.000,00	
	BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN KEL. DOULE	7.628.250,00	
28	KEL. LAMPOPALA	-	9.367.000,00
	Pengawasan pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	5.000,00	
	PEMASANGAN LANTAI KANTOR	3.747.000,00	
	PEMASANGAN TERALI PENGAMAN GEDUNG KANTOR	750.000,00	
	PERENCANAAN PEMASANGAN LANTAI KANTOR	2.245.000,00	
	PERENCANAAN PEMASANGAN TERALI PENGAMAN GEDUNG KANTOR	445.000,00	
	PENGAWASAN PEMASANGAN TERALI PENGAMAN GEDUNG KANTOR	375.000,00	
	PENGAWASAN PEMASANGAN LANTAI KANTOR	1.800.000,00	
29	KEL. LAMERORO	-	61.502.250,00
	pengawasan peningkatan jalan lingkungan di lingkungan i lameroro	649.000,00	
	pengawasan pembangunan deker pelat di lingkungan iv lameroro	1.099.000,00	
	pengawasan pembangunan jalan pertanian di lingkungan ii lameroro	2.099.000,00	
	perencanaan konstruksi gedung kantor	2.937.000,00	
	pengawasan konstruksi gedung kantor	2.450.000,00	
	perencanaan rehabilitasi aula kantor	498.000,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN TAHAP II	5.665.000,00	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN TAHAP 2	3.600.000,00	
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN TAHAP 2	3.000.000,00	
	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP III	2.622.250,00	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR TAHAP III (LANJUTAN) KANTOR KEL. LAMERORO	1.665.000,00	
	PENGAWASAN LINGKUP KELURAHAN LAMERORO	1.388.000,00	
	kurang catat utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan pengakuan asetnya di Kelurahan Lameroro senilai Rp33.830.000,00	33.830.000,00	
30	KEC. RUMBIA TENGAH	-	11.471.500,00
	pengawasan perintisan jalan poea (lanjutan)	2.159.000,00	
	Pembuatan Pintu Pagar Kantor Kec. Rumbia Tengah	500.000,00	
	Pembangunan Rabat Beton Halaman Kantor	1.847.500,00	
	Pengadaan Konstruksi Jaringan Air/Drainase	4.720.000,00	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR DRAENASE	2.245.000,00	
31	KEL. LAURU	-	477.500,00
	Pengawasan pengadaan konstruksi gedung kantor	5.000,00	
	RABAT HALAMAN KANTOR	472.500,00	
32	KEL. POEA	-	26.908.816,00
	Pembuatan Drainase (5 %)	2.035.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	Pembangunan Posyandu Kelurahan (5%)	2.975.000,00	
	Pengawasan Rehabilitasi Pagar Kantor	100.000,00	
	Perencanaan Pembuatan Drainase	992.800,00	
	Pengawasan Pembuatan Drainase	1.032.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Gorong-Gorong	357.500,00	
	Perencanaan Pembangunan Posyandu Kelurahan	1.359.700,00	
	pengawasan pembangunan jalan lingkungan	1.295.000,00	
	pengawasan pembagunan deuker	745.000,00	
	pengawasan pembangunan gedung kantor kelurahan	1.250,00	
	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR KEL. POEA	9.971.400,00	
	BELANJA MODAL PAGAR KEL. POEA	2.504.033,00	
	BELANJA MODAL PAGAR KEL. POEA	3.540.133,00	
33	KEL. KAMPUNG BARU	-	25.225.500,00
	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Tahap II	4.448.000,00	
	Pengadaan Pagar Kantor Kelurahan	3.747.500,00	
	perencanaan pengadaan gedung kantor	2.250.000,00	
	pengawasan pengadaan gedung kantor	5.000,00	
	PENATAN HALAMAN KANTOR	3.215.000,00	
	PEK. PERENCANAAN PENATAAN HALAMAN KANTOR	2.247.000,00	
	PEK. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR TAHAP II	2.248.000,00	
	PEK. PENGAWASAN PENATAAN HALAMAN KANTOR	2.125.000,00	
	PEK. PENGAWASAN PEMBAGUNAN PAGAR KANTOR TAHAP II	1.875.000,00	
	Pengadaan Pos Jaga	1.415.000,00	
	PERENCANAAN LINGKUP KAMPUNG BARU	900.000,00	
	PENGAWASAN LINGKUP KELURAHAN KAMPUNG BARU	750.000,00	
34	KEC. RAROWATU	-	17.032.000,00
	BANGUNAN MENARA / BAK PENAMPUNG / RESERVOK AIR UMUM	700.000,00	
	PENGAWASAN GAPURA KANTOR	2.500.000,00	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA (LANJUTAN) KEC.	2.864.000,00	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIBUN LANJUTAN KEC. RAROWATU	2.386.000,00	
	PENGAWASAN GEDUNG SERBAGUNA	2.387.000,00	
	Pekerjaan Bronjong	6.195.000,00	
35	KEL. TAUBONTO	-	3.942.750,00
	perencanaan pembuatan deuker	1.498.000,00	
	pengawasan pembuatan deuker	1.200.000,00	
	PEMBANGUNAN DEUKER	1.244.750,00	
36	KEC. RAROWATU UTARA	-	14.134.000,00
	LANJUTAN PEMBANGUNAN PLAFOND	2.360.000,00	
	PENGADAAN DEUKER	1.247.000,00	
	Pembangunan Pintu Gerbang	2.360.000,00	
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	5.667.000,00	
	PEMASANGAN PAVING BLOCK JALAN MASUK KANTOR KECAMATAN DPAL 2016	2.500.000,00	
37	KEL. ANEKA MARGA	-	4.479.000,00
	perencanaan pembangunan pagar kantor	1.199.000,00	
	pengawasan pembangunan pagar kantor	5.000,00	
	perencanaan pembuatan deuker	299.000,00	
	pengawasan pembuatan deuker	5.000,00	
	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR TAHAP II	2.265.000,00	
	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR	706.000,00	
38	KEC. MATAOLEO	-	153.437.358,00
	Pengawasan Pembangunan Rujab Camat	5.140.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor	2.033.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor	1.611.500,00	
	Perencanaan Pembuatan Jalan	7.617.000,00	
	Pekerjaan Pembangunan Gedung Pertemuan	137.035.858,00	
39	KEC. MASALOKA RAYA	-	17.181.650,00
	pengawasan pembangunan pagar kantor kecamatan	1.298.000,00	
	pengawasan pengadaan lantai tegel gedung serbaguna	1.819.000,00	
	pengawasan konstruksi cutting jalan kecamatan masaloka raya	1.769.000,00	
	pengawasan pengadaan konstruksi talud (100 m)	1.769.000,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PKK TAHAP II	3.257.250,00	
	RABAT BETON HALAMAN KANTOR	3.775.000,00	
	Pekerjaan Rehabilitasi Rujab Camat	3.494.400,00	
40	KEC. LANTARI JAYA	-	21.313.250,00
	Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan	3.000,00	
	pengawasan pembangunan tribun olahraga	3.011.000,00	
	pengawasan penimbunan jalan usaha tani desa pasera apua	2.587.000,00	
	Pembuatan Halaman Kantor	1.497.250,00	
	BELANJA MODALPEMBANGUNAN PAGAR KANTOR (TAHAP I)	9.162.500,00	
	PENGADAAN PAPAN NAMA KANTOR	707.500,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG TK	3.900.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	PERENCANAAN PENGADAAN PAPAN NAMA KANTOR	445.000,00	
41	KEC. POLEANG	-	13.753.400,00
	Pengawasan Pengadaan Gedung kantor	8.999.000,00	
	Pengawasan rehabilitasi Mess Poleang	1.561.000,00	
	PENIMBUNAN TANAH KANTOR	470.000,00	
	PEMELIHARAAN PANGGUNG KESENIAN	1.308.400,00	
	PEMELIHARAAN RUMAH JABATAN	1.415.000,00	
42	KEL. BOEPINANG	-	6.037.850,00
	Perencanaan Kontruksi Drainase	478.000,00	
	pengawasan pengadaan konstruksi jaringan drainase	1.250.000,00	
	perencanaan pembangunan deuker	500.000,00	
	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	3.809.850,00	
43	KEL. BOEPINANG BARAT	-	9.489.500,00
	perencanaan pemasangan lantai tegel	820.000,00	
	pengawasan pemasangan lantai tegel	660.000,00	
	perencanaan pembangunan deuker	1.190.000,00	
	pengawasan pembangunan deuker	1.000.000,00	
	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR	2.075.000,00	
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (KEL. BOEPINANG BARAT)	3.744.500,00	
44	KEL. BOEARA	-	15.251.621,56
	Perencanaan Pengadaan Konstruksi Pagar Kantor Kelurahan	239.234,00	
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Pagar Kantor Kelurahan	191.387,56	
	Perencanaan Pengadaan Konstruksi Deuker Plat	3.875.500,00	
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Deuker Plat	3.100.400,00	
	Pengadaan Pagar Kantor	713.500,00	
	Pengadaan Pos Jaga/Ronda 2 unit	847.000,00	
	Pembangunan Drainase	1.175.000,00	
	pengawasan pengadaan pagar kantor	298.000,00	
	pengawasan pengadaan konstruksi jalan	1.248.000,00	
	pengawasan pembangunan deuker	498.000,00	
	pengawasan pengadaan drainase	623.000,00	
	pengawasan pengadaan pos jaga	448.000,00	
	BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI (KEL.BOEARA)	1.994.600,00	
45	KEL. KASTARIB	-	4.540.000,00
	Perencanaan Pemeliharaan Tribun Olahraga	997.500,00	
	Pengawasan Pemeliharaan Tribun Olahraga	798.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Drainase	1.497.500,00	
	Pengawasan Pembangunan Drainase	1.247.000,00	
46	KEL. BARANGGA	-	85.844.169,50
	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan	239.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan	191.000,00	
	Perencanaan Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	2.392.344,50	
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	1.913.875,00	
	Pengadaan Pagar Kantor	715.950,00	
	Pembangunan Deuker	942.500,00	
	Pengadaan Pos Jaga /Pos Ronda	846.500,00	
	pengawasan pengadaan pagar kantor	300.000,00	
	pengawasan pembangunan jalan setapak	1.250.000,00	
	perencanaan pembangunan deuker	600.000,00	
	pengawasan pembangunan deuker	500.000,00	
	pengawasan pengadaan pos jaga(pos ronda)	450.000,00	
	pengawasan pembangunan drainase	625.000,00	
	Pembangunan Deucker Kel. Barangga Kecamatan Poleang	995.000,00	
	Pembangunan Saluran Drainase Kel. Barangga	3.995.000,00	
	Pembangunan Pengaman Sungai/drainase	69.888.000,00	
47	KEL. KASABOLO	-	8.382.750,00
	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR	1.650.000,00	
	LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN	2.596.000,00	
	PEK.JALAN PERKAMPUNGAN NELAYAN	2.359.750,00	
	PEMBANGUNAN DEUKER	470.000,00	
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor (Pemeliharaan Bangunan Deucker) Kel.Kasabolo	1.307.000,00	
48	KEC. POLEANG BARAT	-	17.215.154,00
	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor	1.913.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor	1.531.100,00	
	Perencanaan Pembangunan Pintu Pagar Kantor	478.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Pintu Pagar Kantor	382.775,00	
	Perencanaan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	867.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	693.779,00	
	Pengawasan pembangunan Pagar Kantor	3.499.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
	Pengawasan Pembangunan Papan Nama Kantor	374.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Balai Pertemuan	1.439.000,00	
	Pembangunan Pagar Kantor Tahap III	3.435.000,00	
	PEMBANGUNAN KONSTRUKSI GEDUNG GUDANG	1.660.000,00	
	PENATAAN HALAMAN KANTOR	942.500,00	
49	KEC. POLEANG TIMUR	-	9.927.000,00
	Pembangunan Lanjutan Pagar Kantor	1.740.000,00	
	Pembangunan Lantai Keramik, Pengadaan Pintu dan Kusen	2.237.000,00	
	PEMBANGUNAN LAPANGAN BULUTANGKIS	750.000,00	
	[KOREKSI] kurang catat utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.5,200,000	5.200.000,00	
50	KEL. BAMABEA	-	15.861.400,00
	Perencanaan Pengadaan Pembuatan Deuker Plat	1.435.400,00	
	Pengawasan Pengadaan Pembuatan Deuker Plat	1.148.400,00	
	Perencanaan Pembuatan Tapal Batas Kelurahan	478.500,00	
	Pengawasan Pembuatan Tapal Batas Kelurahan	382.700,00	
	Perencanaan Pembuatan Jalan Lingkungan	1.495.200,00	
	Pengawasan Pembuatan Jalan Lingkungan	1.196.200,00	
	Perencanaan pengadaan jalan lingkungan	2.998.000,00	
	Pengawasan pengadaan jalan lingkungan	2.499.000,00	
	perencanaan pembangunan draenase	1.352.000,00	
	Pengawasan pembanguan draenase	1.126.000,00	
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN POSYANDU TAHAP II	1.750.000,00	
51	KEL. PUULEMO	-	22.018.300,00
	Perencanaan Pembangunan Kantor	1.794.200,00	
	Pengawasan Pembangunan Kantor	1.435.400,00	
	Perencanaan Pembuatan Drainase	1.000.000,00	
	Perencanaan Pembangunan Deuker Plat Lingkungan	1.435.400,00	
	Pengawasan Pembangunan Deuker Plat Lingkungan	1.148.300,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU	1.995.000,00	
	PEMBANGUNAN DEUKER	850.000,00	
	[KOREKSI] kurang catat utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan pengakuan asetnya di Kelurahan Puulemo senilai Rp12.360.000,00catatan: masuk aset tetap 12.000.000,00 masuk barang ekstrakompabil 360.000,00	12.360.000,00	
52	KEC. POLEANG TENGGARA	-	12.717.000,00
	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS CAMAT	5.540.000,00	
	BELANJA MODAL PENGADAAN PAGAR KANTOR	2.357.500,00	
	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN DRAINASE	1.887.500,00	
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS CAMAT	2.932.000,00	
53	KEC. POLEANG SELATAN	-	9.044.000,00
	Pengawasan Pengadaan Talud	2.002.000,00	
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PINTU PAGAR KANTOR	562.000,00	
	PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP LANJUTAN	1.493.500,00	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Kantor	4.986.500,00	
54	KEC. POLEANG TENGAH	-	7.775.000,00
	perencanaan pembangunan deuker	2.975.000,00	
	Pekerjaan Jalan Lingkungan Kantor	4.800.000,00	
55	KEC. TONTONUNU	-	4.545.000,00
	pengawasan pengadaan gedung serba guna	3.500.000,00	
	perencanaan penimbunan kantor camat	1.045.000,00	
56	KEL. KABAENA	-	12.614.000,00
	Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pagar	2.500.000,00	
	Perencanaan Pembuatan saluran Drainase	1.003.000,00	
	Pengawasan Pembuatan saluran Drainase	861.000,00	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENTAS SENI	4.500.000,00	
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENTAS SENI	3.750.000,00	
57	KEL. TEOMOKOLE	-	8.390.000,00
	Pengawasan Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan	260.000,00	
	Pengawasan Pengadaan Sarana Air Bersih	3.160.000,00	
	PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG PKK TAHAP II	2.970.000,00	
	PENGAWASAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	2.000.000,00	
58	KEL. RAHAMPUU	-	3.065.000,00
	Pengawasan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor	3.065.000,00	
59	KEC. KABABENA BARAT	-	4.240.500,00
	Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih	4.240.500,00	
60	KEL. SIKELI	-	4.279.000,00
	Pengawasan Pembuatan Deuker Lingkungan	1.300.000,00	
	Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih	1.650.000,00	
	Pengawasan Pengadaan Sarana Air Bersih	1.320.000,00	
	pengawasan pengadaan gedung posyandu	9.000,00	

No	Uraian	JUMLAH	SISA UTANG 2024
61	KEC. KABAENA TIMUR	-	15.176.500,00
	Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Camat	2.866.500,00	
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Jembatan	2.870.000,00	
	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR	9.440.000,00	
62	KEL. DONGKALA	-	5.037.500,00
	perencanaan pembangunan papan nama kantor	320.000,00	
	Pembangunan Talud	4.717.500,00	
63	KEL. LAMBALE	-	8.550.000,00
	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan	1.220.000,00	
	Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan	970.000,00	
	Perencanaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih	650.000,00	
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih	520.000,00	
	Perencanaan Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	2.880.000,00	
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	2.310.000,00	
64	KEC. KABAENA SELATAN	-	4.285.500,00
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Deuker Plat	956.000,00	
	Pengadaan Deuker Plat Gerbang Kantor	1.887.500,00	
	Pengadaan Papan Nama Kantor	944.500,00	
	Pembuatan Pintu Pagar Kantor	497.500,00	
65	KEC. KABAENA UTARA	-	6.642.500,00
	Pembuatan Deuker Desa Larolanu	1.694.000,00	
	Perencanaan Pengadaan Konstruksi Deuker	1.190.000,00	
	Pengawasan Pembuatan Drainase Desa Eemokolo	1.429.500,00	
	Pengawasan Pembuatan Jalan Usaha Tani	2.329.000,00	
66	KEC. KABAENA TENGAH	-	39.396.750,00
	Pengadaan Konstruksi Pagar Kantor (100%)	14.280.000,00	
	Perencanaan Pengadaan Konstruksi Pagar Kantor	357.000,00	
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Pagar Kantor	285.000,00	
	Pengadaan Konstruksi Gedung Garasi (100%)	10.800.000,00	
	Perencanaan Pengadaan Konstruksi Konstruksi Gedung Garasi	270.000,00	
	Pengawasan Pengadaan Konstruksi Konstruksi Gedung Garasi	216.000,00	
	Pengadaan Konstruksi Pembangunan Pagar Kantor	4.697.500,00	
	Pembangunan Papan Nama Kantor	499.250,00	
	PERENCANAAN PENIMBUNAN PERSIAPAN LAPANGAN	2.995.000,00	
	Pekerjaan Rehab. Kantor	4.997.000,00	
67	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	5.175.950,00
	Pembangunan Pagar Kantor	2.481.500,00	
	Pekerjaan Rehab. Kantor	2.694.450,00	
	TOTAL UTANG BELANJA MODAL & ASET TIDAK BERWUJUD	61.172.364.777,86	61.172.364.777,86

**DAFTAR RINCIAN UTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ADD)
TAHUN 2024**

NO.	NAMA DESA		JUMLAH
	BADAN KEUANGAN DAERAH		3.394.231.684,00
1	Lampeantani	52.914.824,00	
2	Lantawonua	61.083.072,00	
3	Pabbiring	34.130.000,00	
4	Matabundu	69.100.000,00	
5	Pallimae	100.759.872,00	
6	Lampata	65.987.000,00	
7	Laloa	62.560.000,00	
8	Liano	87.585.000,00	
9	Lora	99.825.000,00	
10	Masaloka Barat	93.300.000,00	
11	Pangkuri	63.500.000,00	
12	Langkowala	94.200.000,00	
13	Wia-Wia	89.287.200,00	
14	Tampabulu	62.180.000,00	
15	Wambarema	64.300.000,00	
16	Batu Putih	64.900.000,00	
17	Lemo	88.200.000,00	
18	Lawatu Ea	56.800.000,00	
19	Poleondro	103.014.480,00	
20	Tongkoseng	79.899.400,00	
21	Balo	66.800.000,00	
22	Langkema	68.900.000,00	
23	Lamonggi	92.175.000,00	
24	Ranokomea	63.400.000,00	
25	Mulaeno	61.160.000,00	
26	Lakomea	66.350.000,00	
27	Toburi	65.200.000,00	
28	Watu Melomba	98.484.096,00	
29	Ulungkura	63.400.000,00	
30	Timbala	33.500.000,00	
31	Tahi Ite	66.500.000,00	
32	Puu Nunu	66.800.000,00	
33	Laea	66.200.000,00	
34	Puu Wonua	87.796.440,00	
35	Rompu-Rompu	95.659.200,00	
36	Balasari	87.600.000,00	
37	Wumbulasa	88.800.000,00	
38	Analere	61.800.000,00	
39	Kali Baru	95.325.000,00	
40	Toli - Toli	32.250.000,00	
41	Pokurumba	59.400.000,00	
42	Akacipong	60.000.000,00	
43	Tirongkotua	61.000.000,00	
44	Sangia Makmur	59.400.000,00	
45	Baliara	72.206.100,00	
46	Bulumanai	67.600.000,00	
47	Morengke	93.000.000,00	
	TOTAL UTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ADD)	3.394.231.684,00	3.394.231.684,00

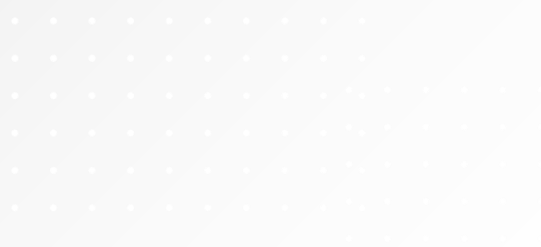
Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pendapatan Pajak Daerah	16.127.077.408,06
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	326.091.000,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	32.330.283,46
	Pajak Air Tanah-LO	38.793.936,00
	Pajak Sarang Burung Walet-LO	45.950.000,00
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	1.447.023.750,00
	PBBP2-LO	4.340.553.266,00
	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	764.406.317,00
	PBJT-Restoran-LO	2.111.986.695,60
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	6.829.355.210,00
	PBJT-Hotel-LO	168.070.000,00
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau	22.516.950,00
	Pendapatan Retribusi	8.226.075.952,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	3.912.252.400,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	284.650.000,00
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	206.113.000,00
	Retribusi Pelataran-LO	137.775.000,00
	Retribusi Los-LO	84.500.000,00
	Retribusi Kios-LO	871.598.497,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	3.000.000,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	(8.700.000,00)
	Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	1.380.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	78.100.000,00
	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	0,00
	Retribusi Pemakaian Alat-LO	(6.000.000,00)
	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	38.814.000,00
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	120.127.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	1.181.482.516,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00
	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	169.343.140,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	61.930.000,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	429.175.000,00
	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	660.535.399,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.241.480.609,00
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah	16.241.480.609,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	33.010.389.409,00
	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Di	140.893.000,00
	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	972.325.560,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahar	5.868.132.108,00
	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	332.535,00
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	8.183.132,00
	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO	8.001,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.053.378,00
	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	31.852,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	291.543,00
	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	15.677.430,00
	Pendapatan Denda PBBP2-LO	10.716.850,00
	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	180.000,00
	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Ase	120.000,00
	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	25.915.963.141,00
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	59.500.000,00
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	16.980.879,00
	TOTAL PAD	73.605.023.378,06

DAFTAR RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER

No.	URAIAN	JUMLAH
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	976.717.627.909,00
1	DBH PBB-LO	15.031.822.211,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	3.951.348.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.420.956.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	239.667.088.000,00
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	21.721.000,00
6	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	141.781.000,00
7	DBH SDA Perikanan-LO	2.982.936.000,00
8	DBH Sawit-LO	4.086.706.000,00
9	DAU-LO	363.630.481.000,00
10	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	4.400.000.000,00
11	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	27.937.596.000,00
12	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	61.556.247.000,00
13	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	26.900.408.000,00
14	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	23.505.177.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	1.048.930.800,00
16	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	8.147.554.200,00
17	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.881.358.800,00
18	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	6.229.155.800,00
21	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	3.544.620.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0
23	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	23.254.218.000,00
24	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	13.184.702.000,00
25	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	7.038.126.000,00
26	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	3.934.422.198,00
27	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	2.285.083.000,00
28	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0
29	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0
30	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	48.086.850.000,00
31	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.701.000.000,00
32	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	5.583.025.000,00
33	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.495.205.665,00
34	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	15.743.799.752,00
35	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.040.413.345,00
36	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0
37	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0
38	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	326.781.300,00
39	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.851.525.000,00
40	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	24.576.159.838,00
41	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	1.245.000.000,00
42	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.443.494.000,00
43	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	165.000.000,00
44	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	3.333.725.000,00
45	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	135.000.000,00
46	Insentif Fiskal-LO	15.208.211.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	46.764.750.923,00
47	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.665.112.159,00
48	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	4.707.099.928,00
49	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	23.523.243.354,00
50	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	445.566.588,00
51	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	14.423.728.894,00
	Jumlah	1.023.482.378.832,00

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024





BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Sao Sao No.10, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
Telp. (0401) 3129403, Fax 93111
<https://sultra.bpk.go.id/>